KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Diskominfo Kotawaringin Barat dapat menyelesaikan Buku Pendirian, Perjuangan Dan Pembangunan Kotawaringin Barat.

Buku Pendirian, Perjuangan Dan Pembangunan Kotawaringin Barat ini hasil revisi dari buku cetakan yang terdahulu yang disusun oleh Bappeda Kotawaringin Barat pada tahun 1995, penyusunan data - data sekunder diperoleh dari berbagai sumber dan informasi yang berkaitan dengan Sejarah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dengan telah tersusunnya Buku Pendirian, Perjuangan Dan Pembangunan Kotawaringin Barat ini diharapkan perencanaan kedepannya dapat tersusun dengan optimal, matang, dan akan terus diperbaharui berdasarkan pencapaian kemajuan serta perkembangan yang terbaru Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dengan mengucapkan banyak terima kasih oleh Diskominfo kepada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat serta lembaga - lembaga terkait sehingga Buku Pendirian, Perjuangan Dan Pembangunan Kotawaringin Barat ini tersusun. Semoga Buku ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
KATA PENGANTAR ..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **iii**

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan Dan Sasaran 3
1.3 Ruang Lingkup 3
1.4 Metode Penekatan dan Analisa 4
BAB II ASAL MULA PEMUKIMAN DI KOTAWARINGIN BARAT
2.1 Pemukiman Awal Di Kotawaringin Barat 7
2.2 Kerajaan Kotawaringin Yang Pertama 10
2.3 Kerajaan Kotawaringin di Pangkalan Bun 16
2.4 Hubungan dengan Jepang 23
2.5 Syarekat Islam (SI) 26
2.6 Pendidikan 27
2.7 Syarekat Dayak 28
2.8 Akhir Kerajaan Kotawaringin 30
BAB III MASA PENDUDUKAN JEPANG (1942-1945)
3.1 Jepang Menduduki Kalimantan Tengah 33
3.2 Pembangunan Fisik 36
3.3 Latihan Ketentaraan dan Berorganisasi 39
3.4 Sistem Pemerintahan dan Militerisme di Jaman Jepang 40
3.5 Seni dan Budaya di Jaman Jepang 41
3.6 Propaganda Perang Asia Timur Raya 43
3.7 Perjuangan Rakyat Jelata Dimasa Penjajahan Jepang 43
3.8 Di Akhir Pendudukan Jepang 44
BAB IV MASA PERJUANGAN 1945
4.1 Masuknya NICA 46
4.2 KPRIM dan AM 53
4.3 Gerombolan Tentara Burung Desa 56
4.4 Pertempuran dengan NICA 58
4.5 Pasukan MN 1001 63
4.6 Ekspedisi Husin Hamzah 64

4.7 Pasukan M Edris menyerang Pangkalan Bun 66
4.8 Teluk Bogam 98
4.9 Sungai Rangas 69
4.10 Serangan NICA yang kedua ke Kotawaringin Lama 70
4.11 Serangan NICA yang kedua ke Sukamara 72
4.12 Perjuangan di Nanga Bulik 74
4.13 Pasukan Payung Republik Indonesia Mendarat di Kalimantan 76
4.14 Penutup 82
BAB V KABUPATEN KOTAWARINGIN
5.1 Kotawaringin dalam Konteks Kalimantan Tengah 84
5.2 Berdirinya Kabupaten Kotawaringin 87
5.3 Berdirinya Kabupaten Kotawaringin Barat 90
5.4 Kotawaringin Barat di Jaman Orde Baru 100
5.5 Kotawaringin Barat Membangun 107
BAB VI SEJARAH LOKAL SEBAGAI JATIDIRI DAN KEBANGGAAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
6.1 Mainstream Sejarah Nasional 113
6.2 Sejarah Lokal 113
6.3 Pasca Modern dan Perjuangan Rakyat 115
BAB VII PEMBANGUNAN KOTAWARINGIN BARAT
PANGKALAN BUN KOTA MANIS 117
VISI & MISI KAB. KOTAWARINGIN BARAT 118
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 119
KONDISI GEOGRAFIS 120
PENDIDIKAN 121
PELAYANAN KESEHATAN 123
KEBUDAYAAN 126
WISATA KAB. KOTAWARINGIN BARAT 127
WISATA SEJARAH DAN BUDAYA SITUS SEJARAH 130
DAFTAR PUSTAKA 138

BAB SATU
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Sejarah adalah bagian yang tidak dapat ditinggalkan dalam proses pembangunan suatu daerah. Bukan hanya dalam hal pembangunan moral dimana nilai-nilai luhur kebudayaan nenek moyang yang dipegang di dalam menghadapi proses globalisasi, sejarah juga menjadi patokan penting dalam membangun fisik kota masa kini dan masa yang akan datang. Jika satu bangsa melupakan sejarahnya, maka akan hilang pula nilai-nilai moral yang bisa menjadi panutan untuk mengatur dan menjadi satu sistem kehidupan. Untuk itulah, bagi Kabupaten Kotawaringin Barat, penyusunan sejarah Kotawaringin Barat merupakan tugas yang harus di kedepankan.

Berbicara tentang sejarah biasanya orang selalu berpikir akan silsilah raja dan kekuasaan yang kemudian digabung dengan peperangan. Sejarah selalu di tafsirkan sebagai urut-urutan tahun tentang sebuah kerajaan besar dengan situs-situs purbakala yang ditemukan. Padahal sejarah bukan hanya silsilah raja, tetapi juga berhubungan langsung dengan kebudayaan dan perjuangan masyarakat setempat didalam memajukan bangsanya. Ini berarti bahwa sebuah kerajaan dalam sejarah bukanlah hanya cerita tentang raja, tetapi juga permukiman rakyat jelata secara keseluruhan, dan bagaimana tradisi kerajaan tadi tercermin pada perjuangan rakyat baik di masa kemerdekaan maupun pembangunan. Untuk itulah sangat menarik menulis sejarah Kotawaringin Barat yang terletak di pedalaman Kalimantan, jauh dari ibukota negara dan kehidupan metropolitan yang hingar bingar. Berbeda dengan sejarah Jakarta yang banyak dipelajari orang, Sejarah Kotawaringin selama ini merupakan sejarah lokal yang tidak banyak dikenal oleh para Sejarahwan Indonesia.

Selama ini Sejarah Kalimantan selalu dikenal sebagai Kutai, Serawak, dan Brunei. Dalam buku profil Kalimantan Tengah, pada bagian pendahuluan yang memaparkan sejarah sebanyak 5 (lima) halaman, ternyata tidak ada keterangan tentang sejarah Kalimantan Tengah, dan hanya di sebutkan bahwa ada Kerajaan Kotawaringin tanpa pemaparan yang rinci. Sangatlah beralasan untuk mengatakan bahwa Kalimantan Tengah dengan luas 153.828 Km^2, merupakan sebuah provinsi yang belum banyak tergali sejarahnya (Gb 1.1).

Demikian pula dengan sejarah perjuangan. Kita mengenal sejarah perjuangan di paruh kedua tahun 1940 an yang banyak di isi dengan kisah kepahlawanan di Pulau Jawa. Hari Pahlawan misalnya, adalah hari pertempuran fisik di Surabaya yang demikian terkenal dan menyentak tentara sekutu. Kita juga mengenal serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta yang membuka mata dunia internasional akan sikap rakyat Indonesia terhadap kembalinya Belanda di bumi Indonesia. Tetapi, seberapa jauhkah generasi muda Indonesia tahu tentang

kepahlawanan di Kalimantan Tengah yang selama pendudukan Belanda dari Tahun 1945 - 1949 terus menerus bergolak dengan perjuangan untuk merdeka? Penerjunan Pasukan Payung RI misalnya dilakukan di atas Sambi Kotawaringin Barat tanggal 17 Oktober 1947 dengan melewati ribuan tentara NICA dan satuan buru sergap udara Belanda. Penerjunan pertama kali ini dilakukan oleh putra-putra Kalimantan untuk memerdekakan daerahnya Hari itu menjadi hari Kopassanda, tetapi seakan kepahlawanan yang spektakuler ini dilupakan begitu saja. Karena itulah penulisan sejarah ini tidak bisa ditunda lagi.

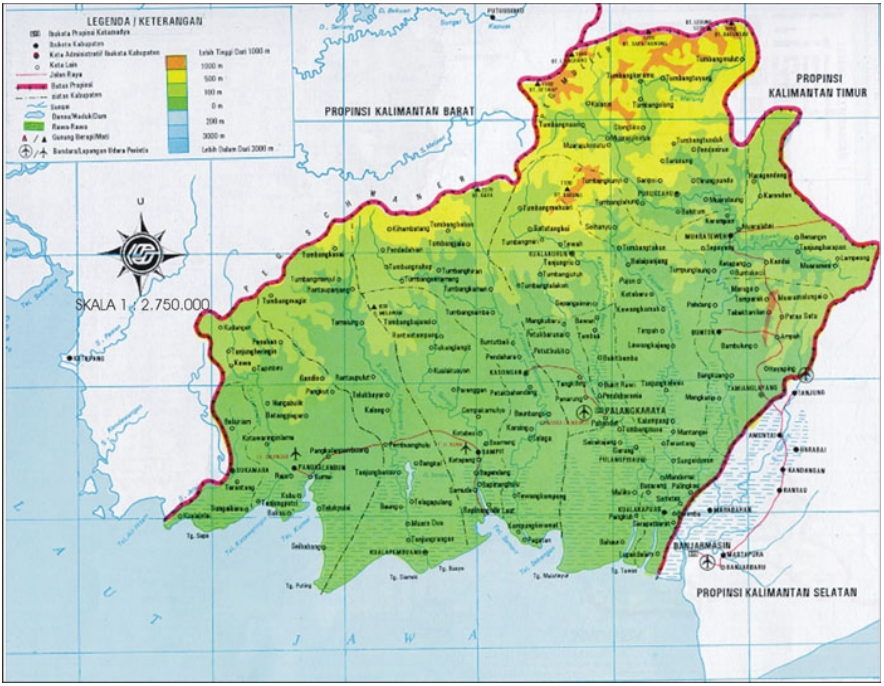

Gb 1.1. Kalimantan Tengah dan Letak Kotawaringin Barat.

Di Kalimantan Tengah, Sejarah Kotawaringin Barat ini belum pernah ditulis secara komprehensif dalam kaitan perjuangan rakyat baik selama berabad-abad yang lalu maupun di zaman modern. Bagaimana Masyarakat Dayak ter transformasi dari ketertinggalan ke alam modernitas belum pernah ditulis. Satu-satunya buku yang memperkenalkan Sejarah Kotawaringin Barat adalah "Mengenal Kotawaringin Barat" yang di tulis oleh Ju Lontaan dan GM Sanusi. Buku yang ditulis 1976 ini tidak banyak di kenal orang. Ini terlihat pada beberapa buku tentang sejarah Kalimantan Tengah yang terbit belakangan ini tidak mencantumkan buku "Mengenal Kotawaringin Barat" tadi sebagai salah satu daftar referensi.

Untuk itulah penelitian sejarah Kotawaringin Barat ini bermakna bagi sejarah Kalimantan Tengah pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.

1.2. Tujuan dan Sasaran.

Tujuan dari penyusunan awal Buku Sejarah Kerajaan Kotawaringin Barat ini adalah:

a. Mempelajari sejarah perjuangan rakyat Kotawaringin Barat secara mendalam baik dalam kerangka utuh atau integratif maupun secara parsial yakni berhubungan dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Dengan demikian maka akan ditemukan konsepsi nilai-nilai budaya yang berkembang di dalam masyarakat baik berupa nilai-nilai budaya yang masih dipertahankan, integrasi nilai - nilai lama dan nilai-nilai baru maupun pengadopsian nilai-nilai baru sehingga menjadi pedoman bagi sikap dan perilaku masyarakat, baik semasa perjuangan kemerdekaan maupun pembangunan.

b. Penyusunan sebuah sejarah yang dapat dipakai sebagai pedoman bagi pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat di masa depan. Baik dalam arti pembangunan fisik maupun non fisik seperti pendidikan dan pengembangan kebudayaan. Sejarah perjuangan rakyat Kotawaringin Barat ini diharapkan menimbulkan semangat membangun bagi generasi muda.

c. Selaras dengan otonomi daerah, maka setiap provinsi harus mampu mengembangkan identitasnya agar bisa bersaing dengan daerah lain secara nasional. Untuk itu sejarah perjuangan rakyat Kotawaringin Barat merupakan identitas Kabupaten yang amat berarti untuk pengembangan identitas tadi. Juga sejarah Kerajaan Kotawaringin di Kabupaten Kotawaringin Barat sangatlah penting bagi kebanggaan daerah dalam kesadaran kesatuan nasional.

d. Penyusunan sejarah ini akan bermuara pada perujukan cikal-bakal Kerajaan Kotawaringin, monumen-monumen perjuangan, dan tertenger satu peristiwa penting bagi sejarah Kotawaringin Barat. Kota-kota bersejarah ini dipercaya dapat menjadi tumpuan perkembangan ekonomi kerakyatan baik sektor jasa pariwisata maupun industri kecil seperti kerajinan tangan di Kabupaten Kotawaringin Barat baik yang sudah terkenal maupun yang belum dikenal.

e. Buku sejarah ini diharapkan mampu mengungkap peran perjuangan rakyat Kotawaringin Barat dalam konstelasi perkembangan sejarah nusantara.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan buku sejarah ini sangatlah luas yakni mulai dari zaman pra Kerajaan Kotawaringin, zaman Kerajaan Kotawaringin, zaman perjuangan kemerdekaan, sampai dengan zaman Kabupaten Kotawaringin Barat. Mengingat luasnya pembahasan, maka penelitian ini akan dibagi menjadi dua tahap. Pertama adalah mengupas zaman pra Kerajaan Kotawaringin hingga zaman perjuangan kemerdekaan. Kemudian pada tahap kedua telah dilanjutkan dengan sejarah kabupaten dan penyempurnaan tulisan sejarah sebelumnya.

Sengaja kami tidak membatasi pembahasan sejarah pada periode tertentu misalnya periode sebelum atau sesudah Belanda menguasai Kotawaringin. Tetapi seluruh tahap sejarah tercakup dalam penyusunan awal ini. Dengan demikian walaupun penyusunan periode sejarah tadi masih perlu disempurnakan, tetapi pada penyusunan awal ini alur sejarah secara utuh diharapkan telah terungkap.

1.4. Metode Pendekatan dan Analisa

Menyusun buku sejarah sama seperti mengumpulkan puing reruntuhan sebuah candi dan kemudian merekonstruksikannya. Keberhasilan sebuah rekonstruksi sangat tergantung dari jumlah puing yang dikumpulkan dan kreatifitas mengisi bagian-bagian yang tidak ditemui puingnya. Demikian pula dengan penyusunan Buku Sejarah Kotawaringin Barat ini sangat ditentukan oleh fakta-fakta baik yang ditemui berupa artefak ataupun cerita dari para narasumber. Semakin banyak masukan maka semakin sempurna candi yang di rekonstruksi.

Sejalan dengan pemikiran tersebut di atas, pendekatan yang kami lakukan adalah partisipatif dan interpretatif. Sedikitnya data yang jelas menceritakan alur sejarah yang bisa dibuktikan dengan artefak, menyebabkan penulisan sejarah ini harus menghubungkan beberapa sumber dan menginterpretasikannya. Dalam interpretasi ini, sering angka tahun menjadi tidak menentukan tetapi hubungan kegiatan pada satu masa dengan masa berikutnya menjadi penting.

1.4.1. Data

Dengan metoda partisipatif dikumpulkan cerita-cerita rakyat baik berupa hikayat ataupun kisah tentang kerajaan Kotawaringin barat dan pahlawan-pahlawan perjuangan dan perang yang pernah terjadi. Mengenai hikayat yang hidup ditengah masyarakat di gali dari tokoh masyarakat maupun penulis setempat baik dari manuskrip yang belum ataupun yang sudah diterbitkan.

Selain wawancara kepada para tokoh masyarakat untuk mendapatkan gambaran sejarah, juga di lakukan pemotretan artefak-artefak yang ada di lapangan. Walaupun ada keterbatasan biaya, kami tetap berusaha mengamati semua situs yang berada diatas di tanah untuk di analisa. Berbagai artefak yang perlu di amati pada penelitian ini adalah:

- Bangunan, baik rumah, gudang ataupun bangunan umum baik kosong ataupun berpenghuni. Selain itu kami juga mengamati suatu area tertentu pada sebuah permukiman. Semua perubahan di usahakan agar dapat di deskripsikan secara sistematis.
- Inskripsi pada bangunan ataupun kuburan yang akan mengungkap kehidupan satu keluarga kerajaan ataupun keadaan masyarakat di suatu jaman.
- Khusus untuk membahas sejarah perjuangan, kami mengamati langsung medan pertempuran yang ada serta bekas-bekas maskas pejuang.

Untuk penyusunan sejarah perjuangan peneliti juga menemui para mantan pejuang yang sekarang sudah lanjut usia. Masalahnya, banyak dari mereka yang sebenarnya bukan pejuang karena pada waktu itu masih kanak-kanak. Mereka

mengaku pejuang karena dulu kakaknya atau orang tuanya seorang pejuang. Yang menarik memang di daerah Kotawaringin Barat ini, Belanda menyerang kota dan desa dengan membumi hanguskan rumah-rumah penduduk, sehingga hampir semua orang melawannya. Karena itu jika definisi pejuang adalah mereka yang melawan Belanda dengan senjata, bisa jadi seluruh penduduk kota dan desa adalah pejuang semuanya.

1.4.2. Analisa

Penyusunan sejarah dari cerita rakyat tadi akan menjadi ilmiah jika di kombinasi dengan pengumpulan peta-peta lama dan prasasti yang ada baik terdapat pada dinding-dinding bangunan ataupun kuburan. Tulisan-tulisan yang terukir pada artefak biasanya tidak lengkap dan terpotong-potong sehingga harus di hubungkan satu dengan yang lain.

Pada inskripsi di artefak tadi sebuah alur sejarah dapat di tafsirkan melalui metode interpretatif. Metode interpretatif yakni menghubungkan hasil analisa kenyataan-kenyataan sejarah yang tercecer baik berupa cerita maupun situs untuk kemudian di tafsir dan di rangkai menjadi satu cerita secara ilmiah.

1.4.3. Lokasi Penelitian.

Pada tahap penyusunan awal sejarah Kotawaringin Barat ini, Lokasi penelitian adalah :

a. Pada tahap penulisan awal ini lokasi penelitian adalah Arsip Nasional Jakarta dimana terdapat banyak data-data baik berupa manuskrip-manuskrip penting maupun peta lama Kotawaringin Barat.
b. Perpustakaan Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah di Palangkaraya, maupun pada Dinas Pendidikan Nasional.
c. Pengumpulan data lapangan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.4.4. Sistematika Pembahasan.

Setelah pendahuluan pada bab pertama, pada bab kedua akan di bahas munculnya permukiman di Kotawaringin Barat seiring dengan munculnya Kerajaan Kotawaringin di Sukabumi. Pada bagian ini juga akan di bahas tentang sistem pemerintahan Belanda di Kalimantan Tengah pada umumnya dan Kotawaringin Barat pada khususnya.

Pada bab ketiga akan dibahas masa pendudukan Jepang, baik mulai runtuhnya pemerintahan Belanda sampai dengan datangnya kemerdekaan. Penulisan ini di tekankan pada beberapa momen penting yang mana di lalui oleh perjuangan rakyat Kotawaringin Barat di dalam menghadapi Jepang dan NICA yang merupakan tentara Belanda yang ingin kembali berkuasa di Nusantara.

Pada bab ke tiga akan diuraikan kehidupan rakyat jelata di masa penjajahan Jepang, baik dari tata cara hidup mereka, mata pencaharian dan bagaimana mereka menyiasati segala kesulitan yang di hadapi di masa perang. Tujuan dari pembahasan ini adalah menyuguhkan kedalaman warisan budaya lokal yang

penting bagi pengembangan identitas Kotawaringin Barat di masa globalisasi masa kini.

Bab ke empat mendiskusikan masa perjuangan 1945 ketika Belanda dengan bertopeng NICA mencoba kembali menguasai Kotawaringin dan Indonesia pada umumnya. Tulisan pada bab ke empat ini dilandasi pada satu studi lapangan yang menemui para pejuang dan melihat langsung tempat dimana pertempuran terjadi.

Bab lima merupakan sejarah Kabupaten Kotawaringin Barat setelah berpisah dengan Kotawaringin Timur. Disini diskusi akan mendalami proses modernisasi masyarakat Kotawaringin Barat. Proses modernisasi ini penting di ungkap untuk melihat nilai-nilai tradisi yang tidak luntur oleh kemajuan zaman.

Pada bab enam akan ditarik kesimpulan perjuangan rakyat Kotawaringin Barat bukan hanya secara fisik melawan penjajah, tetapi juga bagaimana prinsip kemerdekaan, sebagai memerdekakan manusia dari kebodohan dan ketidaktahuan menjadi satu bagian bangsa Indonesia yang memiliki kebanggaan sebagai warga Kalimantan Tengah. Bab ke enam ini merupakan ulasan tentang pentingnya sejarah lokal, dalam hal ini di Kotawaringin Barat sebagai jati diri dan kebanggaan daerah.

BAB DUA
AWAL MULA PERMUKIMAN DI KOTAWARINGIN BARAT

2.1. Permukiman awal di Kotawaringin Barat.

Permukiman awal di Kalimantan Tengah tidak bisa dilepaskan dari daerah aliran sungai. Di Kabupaten Kotawaringin Barat terdapat empat sungai besar yakni Sungai Jelai, Sungai Arut, Sungai Lamandau, Sungai Kumai, dan puluhan anak sungai. Permukiman penduduk sejak berabad-abad yang lalu tumbuh di sepanjang sungai ini. Sungai ini selain menjadi tempat mencari ikan untuk kebutuhan makanan sehari-hari, juga tempat mandi dan transportasi.

Penduduk asli yang tinggal di daerah ini adalah suku Dayak yang berindukkan Dayak Ngaju. Kedekatan suku dayak dengan sungai mengakibatkan mereka mengidentitaskan dirinya, atau masyarakatnya dengan nama sungai (Usop et al, 1995: I-6). Di Daerah Kotawaringin Barat, sebelum berdirinya kerajaan Kotawaringin bermukim beberapa suku Dayak yakni (Nahan 1993):

1. Suku Dayak Arut : di bawah pimpinan Patih Patinggi Diumpang, berkedudukan di Desa Pandau.
2. Suku Dayak Darat : di bawah pimpinan Demung Tujuh bersaudara yakni Demung Rayan, Demung Ajaran, Demung Cingka, Demung Guru, Demung Antah Gantung, Demung Semadi Jaya dan Demung Akar. Mereka mengirimkan upeti kepada Kerajaan Majapahit, pakaian adat (ikat kepala) berwarna merah putih. Menurut legenda, tujuh demung tadi berasal dari tujuh gumpalan darah yang di lahirkan oleh Ratu Aji. Minyan Ronyai, istri Jambang Rawok yang datang dari Laut menggunakan perahu dan kemudian berdiam di atas Bukit Liarunting. Di Bukit inilah sang istri melahirkan tujuh gumpalan darah yang menjelma menjadi Demung Tujuh bersaudara yang merupakan cikal bakal suku Dayak Darat.
3. Suku Dayak Delang, Belantikan dan Batang Kawa : turunan Patih Sebatang dari pulau Sumatera di bawah pimpinan Jajar Malahui yang bergelar Patih Jayangpati, berkedudukan di Desa Kudangan. Mengirimkan upeti kepada Kerajaan Banjar sampai Raja ketiga Sultan Mustainubillah.
4. Selain itu juga terdapat Dayak Jelai yang berdialek Jelai dan termasuk kelompok Dayak Ketungan. Mereka berdiam di daerah Jelai dan Kotawaringin Lama.
5. Dari keluarga Dayak Ketungan ini, juga terdapat Dayak Bulik yang bertempat tinggal di daerah Sungai Bulik, di utara Kotawaringin Lama.

Menurut Ch.F.H. Dumont dahulu orang Dayak mendiami seluruh wilayah pulau baik daerah pantai maupun darat. Kedatangan orang Melayu, dari Sumatera dan Malaka mendesak orang Dayak yang bermukim di Pantai, mundur ke sebelah darat pulau Kalimantan. Selain orang Melayu, juga berdatangan orang Bugis dan

Jawa mendiami Pantai Timur dan Pantai Barat pulau Kalimantan. Di Kalimantan sebelah barat berdatangan pula orang Tionghoa yang bekerja untuk pertambangan (Dumont, 1924).

Mengenai teritori masyarakat Dayak ini terdapat pendapat yang berbeda. Bagi Waldemar Stoehr di Kalimantan Utara terdapat Dayak Klemantan, sedang menurut Cilik Riwut Dayak Klemantan itu sama dengan Dayak Darat yang bermukim di Kalimantan Barat dan Tengah, tepatnya di Kotawaringin Barat (Kampfemeyer, 1991: 22 dan Riwut 1993: 23).

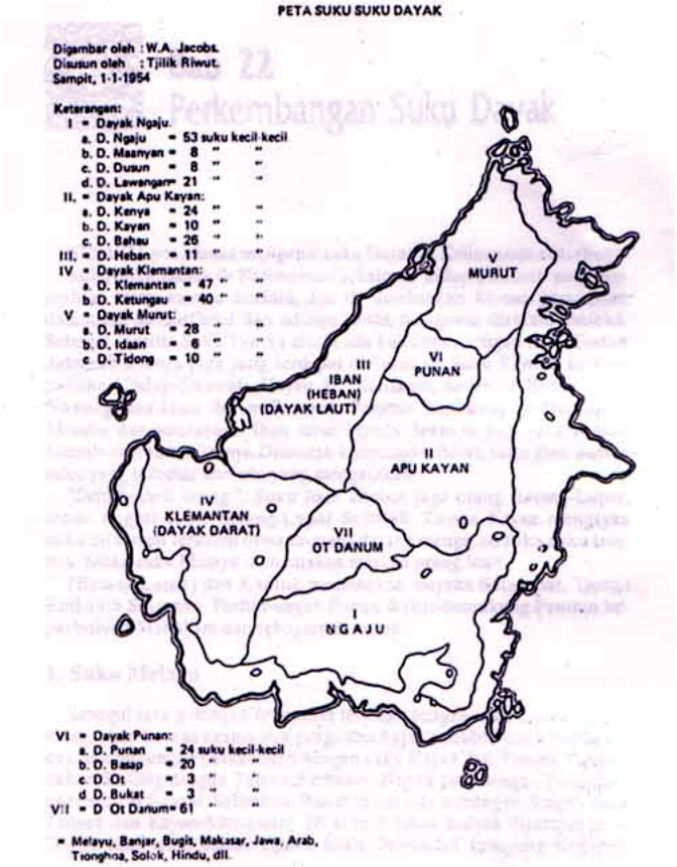

Gb. 2.1. Teritori Suku Dayak di Kalimantan (Riwut, 1993: 263)

Tetapi perbedaan ini tentunya tidak berpengaruh bagi satu analisa sejarah di Kabupaten Kotawaringin Barat yang kita lakukan ini (Gb 2.1).

Pada umumnya orang-orang Dayak memeluk agama Kaharingan atau Kristen. Sedang orang Dayak yang telah memeluk agama Islam menyebut dirinya Melayu. Di daerah Kotawaringin Barat, orang melayu banyak yang bercampur dengan suku Dayak dan menumbuhkan satu kebudayaan yang sangat unik baik dari arsitektur bangunan maupun kehidupan sehari-hari.

Selain penduduk Melayu, beberapa ahli berpendapat bahwa sebagian penduduk sepanjang pantai laut Kalimantan, termasuk Kotawaringin Barat adalah campuran antara penduduk asli (Dayak) dengan pendatang antara lain dengan orang Tionghoa yang datang sebagai pedagang atau pekerja. Orang-orang Tionghoa ini banyak kita jumpai di kota-kota seperti Pangkalan Bun, Sukamara, bahkan di kota sekecil Nanga Bulik. Selain itu, juga terjadi percampuran antara orang Dayak dengan orang India yang beragama Hindu.

Pembagian bangsa-bangsa Melayu di Kalimantan sukar kita jelaskan, karena perkataan suku Melayu digunakan hanya dalam pengertian perbedaan agama, tidak dalam pengertian asal usul suku/bangsa. Meskipun memang banyak juga bangsa Melayu sejati, yang berasal dari Riau dan Tanah Semenanjung Malaka. Mallincordt menerangkan bahwa bangsa Melayu di sekitar Pesisir ialah sebagian turunan dari penduduk Jawa pada masa Majapahit. Jajahan semacam itu memang banyak terdapat di Pesisir. Dan penduduk ini bisa datang dari Bangawan di sungai Sedulun dan Melayu Tarakan (Mallincordt, 1928: 48).

Barulah kira-kira tahun 1960 an sejak semaraknya pergerakan sebutan "Kalimantan" sebagai pengganti "Borneo" dahulu, tumbuhlah perkembangan baru dan lahir suatu sebutan terhadap penduduk asal Banjarmasin--Hulu Sungai dengan nama "Orang Banjar". Sejarah mereka merupakan suatu persekutuan hidup dengan pembawaan hidupnya sendiri (groepgemeenschap), mungkin di nobatkan pada nama pintu gerbang Kalimantan Selatan selama beberapa zaman, yaitu Banjarmasin (Riwut, 1993:194). Di Kotawaringin Barat Suku Banjar bermukim di sekitar Sukamara. Mereka adalah para pedagang yang tangguh yang datang dari Sumatera dan pulau-pulau Melayu lainnya. Menurut penelitian etnologi mereka banyak bercampur dengan Bugis dan Makassar.

Kumpulan berbagai suku ini memakai bahasa sehari-hari campuran dan banyak yang memakai bahasa Banjar. Bahasa Banjar kuno, pada masa Kesultanan banyak mirip dengan bahasa Jawa kuno. Perbedaan bahasa Banjar. adalah berbeda dialek sedikit-sedikit menurut tempat tinggal, yang semuanya hampir bersamaan dengan dialek kelurahan dan kerajaan Banjar dahulu. Bahasa resmi Istana Kerajaan Banjar dahulu adalah bahasa Banjar, seperti yang di pakai dalam undang-undang Sultan Adam. Suku Banjar mempunyai bermacam-macam hak dan kewajiban di bawah pimpinan Sultan. Mereka berpengaruh sekali dalam perdagangan, pendidikan dan penyebaran agama Islam, seperti di Jawa (Surabaya, Semarang, Cirebon, Bandung, Jakarta), Tambilahan (Sumatera), Kalimantan Utara, bahkan di Semenanjung Malaka (Riwut, 1993: 193).

Keturunan Sultan Banjarmasin kemudian banyak yang bekerja di pemerintah, berdagang atau partikulir antara lain Ir. Pangeran Gt. Muhammad Noor menjadi

Gubernur Kalimantan yang pertama. Dalam rangka membebaskan Kalimantan dari Belanda beliau membentuk pasukan yang terkenal dengan nama Pasukan MN 1001 yang bertugas merebut Kalimantan dari tangan Belanda. MN 1001 artinya M(uhammad) N(oor) 1001 (dengan seribu satu macam usaha untuk merebut Kalimantan dari tangan Belanda). Di samping itu ada beberapa tokoh lain di Kalimantan keturunan Sultan Banjar seperti Mr. Gt. Major, Gt. Mohammad Tahrie, Pangeran Musa Ardikesuma, Gt. Mastur, Gt. Haridji Kesuma dan lain-lain.

Pengelompokan suku-suku Banjar antara lain (1) Banjar Kota tinggal di Banjarmasin, (2) Martapura di Martapura, (3) Kandangan di Kandangan, (4) Negara di Negara. (5) Alabio di Alabio, (6) Pamangkih di Pamangkih, (7) Amuntai di Amuntai, (8) Angkinang di Angkinang, (9) Barabai di Barabai, (10) Tanjung di Tanjung, (11) Margasari di Margasari, (12) Batang Atai di Batang Atai, dan (13) Kelua di Kelua (Riwut, 1993: 195).

2.2. Kerajaan Kotawaringin yang pertama

Sejarah Kotawaringin Barat dimulai dengan masuknya pengaruh kerajaan Hindu Majapahit di tahun 1365 dengan mengangkat kepala-kepala suku menjadi menteri kerajaan (Riwut, 1993: 55). Ini di buktikan dengan di sebutnya daerah Kotawaringin dalam pupuh XIII buku Nagara Kertagama karya Mpu Prapanca. Nama Kotawaringin berasal dari nama pohon beringin yang banyak tumbuh di daerah ini, dengan akarnya yang panjang dan dedaunan yang lebat (Yusuf dan Kassu, 1989: 48). Soal nama ini di pertegas oleh peninggalan-peninggalan yang ditemukan, misalnya sepasang meriam di dekat istana kraton kerajaan Kotawaringin di Pangkalan Bun, nama kerajaan ini adalah Kota Ringin. Untuk memudahkan analisa sejarah kami tetap menggunakan nama Kotawaringin seperti nama kabupaten yang sekarang.

Tentang tahun berdirinya kerajaan Kotawaringin terdapat dua pendapat yang berbeda. Pendapat pertama mengatakan bahwa kerajaan ini baru dibangun oleh Pangeran Adipati Antakusuma, Putra Raja Banjar Sultan Musta'inubillah (1650-1678), yang pergi kearah Barat 1679 (Nahan (c), mengutip Saifudin Zuhri: 401 dan Riwut 1993: 55). Kerajaan Islam Kotawaringin ini meliputi Sampit, Mendawai, dan Pembuang. Daerah lain di sekitarnya masih dibawah pimpinan kepala-kepala suku Dayak (Riwut, 1993: 55). Pendapat ini banyak didasari oleh tulisan Sanusi dan Lontaan yang tidak mencantumkan angka tahun pemerintahan raja-raja Kotawaringin dengan jelas (Lontaan dan Sanusi 1976). Sedang buku yang lebih baru Memori Hari Pahlawan ke 43 10 November 1988 di Pangkalan Bun angka tahunnya bercampur antara tahun masehi dan tahun Hijriah, dan keduanya tidak sesuai. Misalnya saja masa pemerintahan Sultan I disebutkan 1680-1687 M. Sedang Sultan II disebut 920-941 H, bukankah 920 H itu adalah tahun 1499 M? Jadi sebelum Sultan I (Yusuf dan Kassu, 1989). Pendapat kedua, yang bersumber dari catatan yang ada di Astana Alnursari di Kotawaringin Lama, mengatakan bahwa kerajaan ini di bangun tahun 1615.

Terlepas dari perbedaan angka tahun ini, di tengah masyarakat ada cerita legenda akan nama-nama tempat di Kalimantan Tengah sebagai penamaan yang

berasal dari Pangeran Adipati Antakusuma. Misalnya : nama Sampit, muncul karena pada waktu sang Pangeran menelusuri sungai Mentaya tiba-tiba menemui tempat yang sempit sehingga di beri nama Sampit. Karena tempat yang sempit ini membuat perasaan tidak enak (di sebut Sanusi sebagai perasaan mereka menjadi sempit), rombongan pangeran ini berbalik ke laut lagi. Setelah menelurusi pantai mereka menemukan lagi sebuah perkampungan di muara sebuah sungai yang membentuk teluk. Pangeran dan rombongan ingin bergabung dengan penduduk perkampungan ini. Sayang mereka ditolak dan meneruskan perjalanan dengan perahu ke hulu dengan menelusuri Sungai Seruyan. Karena merasa di tolak atau di buang itulah tempat ini diberi nama pembuang (Sanusi dan Lontaan 197: 13).

Setelah sampai di desa Rantau Pulut, keadaan sungai menjadi semakin sempit dan dangkal sehingga tidak mungkin di lewati perahu. Rombongan memutuskan jalan darat. melewati desa Sambi menyeberangi anak sungai Arut sampai di desa Pandau dan bertemu dengan suku Dayak Arut yang di pimpin Patih Patinggi Diumpang. Kedua kelompok kemudian mengadakan permufakatan untuk menjalin hubungan yang baik. Menurut legenda, dalam permufakatan tadi di lakukan upacara yang meminta tumbal masing-masing kelompok satu orang untuk di bunuh dan di atas kuburan dua orang tumbal ini di letakkan sebuah batu peringatan yang disebut Ratu Petahan. Selanjutnya Pangeran Adipati Antakusuma menganugerahi pusakanya untuk suku Dayak Arut berupa Serompang Bakurung, Batung Batulis, Waluh Banjar dan Sangkuh Canggah.

Pangeran Adipati Antakusuma beserta pengikutnva beristirahat beberapa hari, sesudah itu dengan di antar Patih Patinggi Diumpang mereka menghiliri sungai Arut. Setelah sampai di pertemuan Sungai Arut dan Sungai Lamandau, mereka belok ke kanan dan memudiki Sungai Lamandau. Di satu tempat mereka mendarat dan mendirikan keraton yang di namai Kutaringin yang kemudian di ucapkan sebagai Kotawaringin.

Keraton Kerajaan Islam Kotawaringin ini terletak di tepi Sungai Lamandau ini di bangun dengan konstruksi kayu semuanya. Karena kondisi tanah yang lembab serta kayu yang semakin lama semakin lapuk, tidak dapat di temukan situs-situsnya. Pangeran Adipati Antakusuma sebagai Sultan pertama membangun istana yang diberi nama Dalem Luhur atau Istana Luhur. Di dalam membangun istana dan kerajaan Kotawaringin ini sultan di bantu oleh seorang alim ulama yang bernama Kyai Gede. Kyai Gede adalah seorang Muslim yang menurut ceritanya, berbarengan dengan pembangunan Kotawaringin terjadilah satu kehebohan di hulu sungai Lamandau dengan di ketemukannya sesosok tubuh hanyut sekarat terikat pada sebatang pisang. Tubuh tadi di temukan oleh para wanita yang menimba air dini hari. Mereka memberitahukan kepada kepala sukunya, suku Dayak Lamandau. Kepala suku dengan pahlawan-pahlawan perangnya segera menuju tempat di mana sesosok tubuh hanyut sekarat itu. Tatkala di teliti untuk di ketahui identitasnya, tubuh yang sekarat tadi kelihatan menyeramkan dan nenakutkan. Sekali menengoknya, seram menakutkan rupanya. Hampir saja kepala suku melayangkan mandaunya keleher orang hanyut itu. Untunglah ia masih sempat mengeluh minta tolong, mohon di selamatkan, walaupun dalam

suasana yang hampir mati. Kepala suku tidak jadi membunuh malah bersama rakyatnya mengusung orang tadi ke rumah. Setelah di rawat dan orang tadi siuman kepala suku memberinya seorang pembantu. Sejak saat itulah terjadi persahabatan antara kepala suku dan orang yang baru ditemukan tadi yang ternyata Kyai dari Jawa. Kyai ini memanggil suku Dayak Lamandau mamak dan Dayak Lamandau menjulukinya naga/niaga. Ia diberi ruang bergerak yang bebas dalam kampung suku Dayak. Karena ia seorang beragama Islam, mengerti tata tertib dan sopan santun, maka ia menjadi perhatian suku Dayak. Rakyat sangat tertarik dengan tutur kata yang menyegarkan rasa. Karena kepribadiannya yang baik itulah rakyat menamainya Kyai Gede (Lontaan dan sanusi, 1976: 17).

Dalam legenda Rakyat, pada waktu rombongan Pangeran Adipati Antakusuma mendarat di tepi Sungai Lamandau mereka didatangi oleh rombongan Demung Tujuh bersaudara dan Kyai Gede. Setelah kedua rombongan berperang dengan kemenangan di pihak Pangeran Adipati Antakusuma, Kyai Gede dan rombongannya sepakat mengangkat Pangeran Adipati Antakusuma menjadi raja. Yang menarik dari legenda rakyat ini, Kyai Gede, Demung Akar dan anaknya Sagar masuk agama Islam. Demung Akar dan Sagar masing-masing berganti nama menjadi Demung Silam (Solam) dan Selamat. Sedangkan ke enam Denung lainnya pindah lebih ke darat (pedalamam) negeri kutaringin. Sejak itu muncul sebutan Mamak untuk suku Dayak Darat turunan enam Demung yang tidak mau masuk agama Islam dan hidup dengan berniaga. Pangeran Adipati Antakusuma memerintahkan tujuh orang pengikutnya untuk bersemedi menjaga negeri Kutaringin hingga bergaib dan tempat-tempat tersebut masih dipelihara dengan baik sampai sekarang; masing-masing mereka ialah;

1. Datuk Ratu Hitam,
2. Raden Tukas Renua,
3. Geleger Rosi,
4. Putri Emek-emek,
5. Rangga Santrek,
6. Rantai Wulung, dan
7. Simpai Dudung.

Legenda ini memperlihatkan hubungan yang baik antara orang Dayak yang memeluk agama tradisionalnya dan para pendatang yang beragama Islam. Agaknya hubungan yang baik ini pula yang patut ditiru oleh masyarakat Kalimantan Tengah sekarang.

Dalam sebuah papernya, hasil wawancara dengan Gusti Dumai Anas, A F Nahan mengatakan bahwa berdirinya Kerajaan Kotawaringin oleh Pangeran Adipati Antakasuma tidak dapat dipisahkan dari kedatangan Kyai Gede yang mendahului kedatangan' Pangeran Adipati Antakasuma di daerah Kotawaringin. Di kisahkan, Kyai Gede seorang ulama dari Demak. Meninggalkan daerah a-salnya menuju Banjar, di terima dan di perintahkan oleh Sultan Mustainulillah

membuka daerah wilayah Barat Kerajaan Banjar. Ini dapat di tafsirkan bahwa Kyai Gede sengaja di utus untuk menjadi perintis. Di kisahkan, bahwa setelah Kyai Gede berhasil "membuka" daerah ini masih sempat mengantar upeti ke Banjar sampai kedatangan Pangeran Adipati Antakasuma yang di sambut oleh Kyai Gede beserta pengikutnya (Nahan AF (c)).

Selamanya sosok Kiai Gede akan terus menerus di perdebatkan orang, apakah dia seorang muslim sebelum datang ke Kotawaringin ataukah seorang Hindu yang kemudian berpindah agama Islam (Nahan, (e): 56-60). Bahkan juga akan di perdebatkan apakah sang kyai seorang Dayak yang masuk ke agama Islam ataukah seorang Jawa. Perdebatan ini akan tidak pernah berakhir karena data tertulis mengenai masa lalu Kotawaringin sangat kurang.

Kerajaan Kotawaringin berdiri lebih dari tiga abad dengan mengalami satu kali perpindahan dari Kotawaringin Lama ke Sukabumi yang kemudian di namai Pangkalan Bu'un. Pangeran Adipati Antakusumabin Sultan Mustainubillah, adalah sultan Kotawaringin ke I dengan gelar Ratu Bagawan Kotawaringin. Memerintah dari tahun 1615 - 1630 M dengan Mangkubumi Kyai Gede. Pada hari tuanya Sultan pulang ke Bandarmasih (sekarang Banjarmasin, ibu kota provinsi Kalimantan Selatan). Beliau wafat disana dan di makamkan di desa Kuin Utara. Perihal wafatnya pangeran Adipati Antakusumaini tidak ada catatan yang pasti. Selain wafat karena usia yang tua seperti di tuturkan diatas, ada pendapat bahwa sebenarnya sang Pangeran pergi ke Banjarmasin atas panggilan Kakaknya sang Sultan Banjar untuk membantu peperangan melawan kerajaan Pasir. Pangeran Adipati Antakusumagugur di dalam peperangan ini (Nahan AF (c)).

Di masa pemerintahan sultan pertama inilah disusun undang-undang kerajaan Kotawaringin yakni Kitab Kanun Kuntara. Selain membangun Istana Luhur sebagai Keraton Kerajaan Kotawaringin, Sang pangeran juga membangun Perpatih (rumah patih) Gadong Bundar Nurhayati dan Perdipati (panglima perang) Gadong Asam. Selain itu untuk keperluan perang dibangun pula Pa'agungan, sebagai tempat menyimpan senjata atau pusaka, membangun surau untuk keperluan ibadat, dan membangun sebuah paseban sebagai tempat para bawahan dan rakyat menghadap sultan.

Sultan yang pertama ini menyerahkan daerah Jelai kepada kerajaan Sukadana (Kalimantan Barat sekarang) untuk menantunya Raden Sari Dewa Putra Panembahan di Sukadana. Mengenai perkawinan ini ada legenda di tengah masyarakat yang menceritakan bahwa:

Salah seorang putri Pangeran Adipati Antakasuma, bernama Putri Gagelang di pinang oleh Raden Seri Dewa Putra Panembahan di Sukadana. Perkawinan kedua sejoli ini menjadi ikatan kedua buah kerajaan bertetangga untuk saling membantu mempertahankan keamanan dari serangan musuh dari luar. Ikatan ini juga untuk saling membantu dalam soal pertahanan pangan. Karena rasa bahagia, Sultan Kotawaringin menghadiahkan daerah Jelai kepada panembahan sukadana. Akibatnya rakyat yang tinggal di daerah Jelai menyerahkan upetinya ke Sukadana. Setelah perkawinan berjalan beberapa tahun, terjadilah perceraian. Putri Galelang pulang ke Kotawaringin. Akibat

perceraian ini pula pihak Kerajaan Kotawaringin meminta kembali daerah Jelai yang dulu di hadiahkan ke Panembahan Sukadana. Tetapi, permintaan ini di tolak sehingga terjadi perselisihan yang bertahun-tahun. Perselisihan ini akhirnya di selesaikan oleh kontrolir Belanda di Sampit yang mengesahkan Daerah Jelai sebagai wilayah Sukadana (Lontaan dan Sanusi 1976: 22-23)

Selain pembangunan fisik di kerajaan dan penyusunan kitab untuk mengatur pemerintahan, Sultan juga menentukan batas-batas kerajaannya yakni :

a. Sebelah utara berbatas dengan Bukit Sarang Pruya (Kerajaan Sintang, Kalimantan Barat),
b. Sebelah timur berbatas dengan Sungai Mendawai (Katingan),
c. Sebelah barat berbatas dengan Tanjung Simbar (Kerajaan Matan, Kalimantan Barat),
d. Sebelah selatan berbatas dengan Laut Jawa.

Setelah wafat Pangeran Adipati Antakusuma digantikan oleh putranya Pangeran Mas Dipati sebagai Sultan Kotawaringin ke II dengan Mangkubumi Kyai Gede dan kemudian di ganti oleh Dipati Ganding. Memerintah dari tahun 1630 - 1655 M. Pada saat wafat Sultan kedua ini di makamkan di Kotawaringin.

Sebagai pengganti, di angkatlah Pangeran Panembahan Anum bin Pangeran Mas Dipati, sebagai Raja Kotawaringin ke III dengan Mangkubumi Dipati Ganding. Memerintah dari tahun 1655 - 1682 M, berputra dua orang laki-laki dan wafat serta di makamkan di Kotawaringin.

Dengan wafatnya Pangeran Panembahan Anum, di angkatlah putranya Pangeran Prabu sebagai sultan Kotawaringin ke 1V dengan Mangkubumi Pangeran Dira. Pangeran Prabu memerintah dari tahun 1682 sampai dengan tahun 1699 M, berputra tiga orang dan wafat serta di makamkan di Kotawaringin.

Pangeran Dipati Tuha bin Pangeran Prabu, di angkat sebagai raja Kotawaringin ke V dengan Mangkubumi Pangeran Cakra. Sultan ke lima ini memerintah dari tahun 1699 sampai dengan tahun 1711 M, berputra tiga orang. Seperti para pendahulunya, setelah wafat sultan di kuburkan di Kotawaringin.

Sebagai pengganti Sultan ke V di angkatlah putranya Pangeran Penghulu bin Pangeran Dipati Tuha sebagai Raja Kotawaringin ke VI dengan Mangkubumi Pangeran Anum. Memerintah dari tahun 1711 - 1727 M, berputra tujuh orang dan wafat serta di makamkan di Kotawaringin.

Pangeran Ratu Bagawan bin Pangeran Penghulu di angkat sebagai Raja Kotawaringin ke VII dengan Mangkubumi Pangeran Paku Negara. Memerintah dari tahun 1727 - 1761 M, berputra tujuh orang. Setelah wafat di makamkan di Kotawaringin. Di masa pemerintahannya di laksanakan pembangunan Masjid Jami Kotawaringin, karena surau yang di bangun masa Pangeran Adipati Antakusumasudah rusak.

Pada Pemerintahan Ratu Begawan Sultan ke VII Kerajaan Kotawaringin mengalami zaman keemasan. Pada masa ini pertanian dan hasil bumi melimpah

ruah dan di ekspor keluar daerah. Perdagangan hasil-hasil kerajinan produksi Kotawaringin menjadi terkenal dan sangat laku di pasaran regional. Karena kemajuan ekonomi ini rupanya juga memacu perkawinan antar suku dan banyak pendatang baru yang menetap di Kotawaringin (Yusuf dan Kassu, 1989: 49-50). Sistem organisasi pemerintahanpun telah maju dengan membagi tugas kepada para menteri berdasarkan wilayahnya. Dalam pembagian ini setiap kota di kepalai oleh seorang menteri seperti misalnya Menteri Kumai, Menteri Pangkalan Bu'un, Menteri Jelai, dan seterusnya.

Ironisnya, pada zaman keemasan itu, juga terjadi peristiwa yang menyedihkan yakni di serahkannya Kerajaan Kotawaringin kepada pihak Belanda oleh Kerajaan Banjar. Pada saat itulah pertanggung jawaban pemerintahan harus di lakukan kepada kontrolir Belanda di Sampit. Walaupun demikian Belanda tetap tidak mengangkat seorang kontrolir langsung di Kotawaringin.

Pangeran Ratu Begawan yang wafat tahun 1761, di gantikan oleh putranya Pangeran Ratu Anum Kesumayuda (Gusti Musaddam bin Pangeran Ratu Bagawan) sebagai Raja Kotawaringin ke VIII dengan Mangkubumi Pangeran Tapa Sana. Memerintah dari tahun 1767 - 1805 M ; berputra 16 orang. Setelah wafat di makamkan di Kotawaringin. Di masa pemerintahannya di laksanakan pembangunan pesantren di Danau Gatal Kanan dan Danau Gatal Kiri (Desa Rungun sekarang), tempat mendidik putra-putri kerajaan.

Perlu di catat di sini sebagai bagian dari Kerajaan Banjar, Sultan-sultan Kotawaringin selalu memakai gelar pangeran. Ini menunjukkan kesantunan terhadap Kerajaan Banjar yang lebih tua yang mana gelar rajanya sultan. Memang kemudian di dalam lingkungan Kotawaringin para pangeran yang menjadi raja juga disebut dengan Sultan, tetapi itu hanya untuk lingkungan di Kotawaringin, jika mereka ke Banjar, mereka disebut dengan gelar Pangeran.

Sebagai satu kompleks kerajaan di tempat ini terdapat beberapa bangunan antara lain Astana Alnursari, Masjid Jami Kotawaringin, pekuburan keluarga raja. Di zaman Orde Baru masjid ini dipugar Ditjen Kebudayaan Depdikbud. Selain dalam restorasi ini mengembalikan beberapa bagian ke dalam bentuknya yang semula, juga penambahan baru seperti penggantian pucak masjid yang semula berbentuk kubah, penyatuan mihrab dalam satu atap, pembuatan tempat wudhu yang terpisah serta pembuatan turap tebing pencegah erosi (Nahan, 1995: 60).

Peninggalan istana yang masih utuh adalah Astana Alnursari sebagai satu peninggalan Kerajaan Kotawaringin, sekarang di lindungi oleh pemerintah. Keadaan bangunannya juga masih bagus. Banyak orang yang mengira bahwa istana ini merupakan bekas tempat tinggal raja-raja Kotawaringin, tetapi sebenarnya istana ini dibangun setelah kerajaan Kotawaringin di pindah ke Pangkalan Bun.

Kerajaan Kotawaringin yang di bangun di awal abad ke 17 telah memacu pertumbuhan permukiman lain di sepanjang sungai yang berdekatan. Kenyataan bahwa sudah ada para pemukim di Pembuang menunjukkan bahwa Kerajaan Kotawaringin bukanlah permukiman pertama di daerah Kotawaringin Barat.

Kemungkinan permukiman awal telah muncul di berbagai kota seperti Pangkalan Bun - yang sebelumnya bernama Sukabumi), Kumai, Sukamara sebagai satu ekonomi domain permukiman embrio. Sedang di Kotawaringin Lama barangkali juga sudah ada beberapa pemukim sebelum Keraton Kotawaringin di bangun. Ini menunjukkan bahwa Di Kabupaten Kotawaringin Barat permukiman dipacu oleh pertumbuhan satu domain ekonomi dan bukannya domain politik yang membentuk kota-kota agraris seperti di Jawa. Permukiman ini memakai sungai sebagai alat transportasi dan elemen primer kota. Perkembangan permukiman di tepi sungai ini masih terlihat sekarang di kota-kota yang penduduknya semakin padat. Kepadatan tadi selalu berada di pinggir sungai dan sangat sulit untuk di pindahkan ke darat.

Gb 2.2. Astana Alnursari Kotawaringin Lama

Gb. 2.3. Masjid Jami Kotawaringin Lama

2.3. Kerajaan Kotawaringin di Pangkalan Bun

Pada zaman Sultan ke IX Pangeran Ratu Imanudin Keraton Kerajaan Kotawaringin di pindah ke pinggir Sungai Arut. Tempat ini di namai Sukabumi. Sebagai gerbang ke Sukabumi di pilih Pangkalan bapak Bu'un, yang mana kemudian nama tempatnya disebut oleh Belanda sebagai Pangkalan Bu'un. Hingga akhir penjajahan Belanda, tempat ini masih di namai Pangkalan Bu'un, tetapi setelah kemerdekaan, di sebut Pangkalan Bun. Jika Keraton Kesultanan Kotawaringin di Kotawaringin lama sudah tidak diketahui situsnya, keraton setelah pindah di Pangkalan Bun terbakar pada tahun 1986.

Keraton yang terletak di Desa Raja, Kecamatan Arut Selatan ini di namai Keraton Lawang Agung Bukit Indera Kencana. Selain memiliki arsitektur yang indah, juga bersifat terbuka tanpa di lindungi Benteng seperti Keraton di Jawa. Dari observasi yang di lakukan keraton ini terletak di atas bukit dan menghadap ke Sungai. Kemegahannya tercipta dari hirarkhi ruang yang mulai dari permukaan air, tebing sungai, jalan dan halaman yang menjadi alun-alun keraton. Dari posisinya yang berada di atas bukit, keraton yang sekarang, memiliki geomancy yang bagus. Kemudian di seberang sungai, berhadapan dengan keraton adalah pecinan. Pecinan ini muncul pada waktu orang-orang Tionghoa berniat untuk bermukim di Pangkalan Bu'un. Oleh sultan mereka di beri tempat di seberang

sungai sehingga secara politis terpisah dengan keraton. Ini menunjukkan bahwa Pangeran Ratu Imannudin seorang perencana kota yang baik di mana setiap perletakan ruang selalu di perhitungkan dampak sosial politisnya.

Gb2.4. Istana Lawang Agung Bukit Indra Kencana yang sudah di renovasi

Pangeran Ratu Imannuddin sebagai Raja Kotawaringin ke IX di bantu oleh Mangkubumi Pangeran Adipati Mohamad Saleh dan kemudian di ganti oleh Pangeran Mangkurat. Pangeran Ratu Imannudin memerintah dari tahun 1805 - 1841 M, berputra tiga orang. Setelah wafat beliau di makamkan di Pangkalan Bu'un.

Di tahun-tahun pertama masa pemerintahannya, Pangeran Ratu Imannudin sudah mulai membangun Teluk Benteng dan Batu Beturus di Sungai Lamandau untuk menanggulangi serangan bajak laut. Waktu itu keraton masih di Kotawaringin. Pembangunan Pangkalan Bu'un Sukabumi Kotawaringin di mulai pada tahun 1809 M dan pemindahan ibukota kerajaan Kotawaringin baru dilakukan tahun 1811 M; dengan linggih (kedudukan) Sultan di Istana Lawang Agung Bukit Indra Kencana. Selain keraton, juga di bangun rumah Raden Ratna Wilis, Permaisuri Pangeran Ratu Imannudin. Permaisuri ini adalah putri Damung Raksa pemuka Suku Dayak dari Kapuas. Rumah Permaisuri ini sekarang menjadi rumah jabatan Bupati Kotawaringin Barat (Nahan (f): 4). Pangeran Ratu Imannudin juga membangun pertahanan di Teluk Kumai dan Desa Kubu untuk

menghadapi serangan bajak laut pada tahun 1826 M. Dan pembuatan parit pertahanan di Sukamara yang di namakan Kerta Baru pada tahun 1838 M, untuk menghadapi serangan Bajak laut. Untuk mengamankan kota Pangkalan Bu'un dari musuh, sultan mengadakan kerjasama dengan Suku Dayak Mendawai (Lontaan dan Sanusi, 1976: 31) Suku Dayak Mendawai bertanggung Jawab akan keamanan kota, untuk itu Penghulu di Pangkalan Bu'un harus dari Suku Dayak Mendawai.

Setelah Pangeran Ratu Imannudin wafat, Pangeran Ratu Ahmad Hermansyah bin Pangeran Ratu Imannuddin, di lantik sebagai Raja Kotawaringin ke X dengan mangkubumi Pangeran Paku Syukma Negara. Sultan ke X ini memerintah dari tahun 1847 - 1862 M, berputra delapan orang dan wafat serta di makamkan di Pangkalan Bu'un.

Di masa pemerintahannya dilaksanakan pembangunan sebuah rumah untuk anaknya Ratu Mangku, yang kemudian di jadikan kepatihan pada saat pemerintahan raja ke XI.

Setelah Pangeran Ratu Ahmad Hermansyah wafat maka Pangeran Paku Syukma Negara di angkat menjadi pejabat raja dengan Mangkubumi Pangeran Prabunata. Sultan ke XI ini memiliki masa pemerintahan pendek, lima tahun, dari tahun 1862 sampai dengan 1867. Masa pemerintahan yang sangat pendek ini tidak memberikan perubahan pembangunan yang dapat dicatat. Setelah lima tahun menjabat raja, maka di angkatlah Sultan ke XI yakni Pangeran Ratu Anum Kesumayuda

Sebagai Sultan ke XI Pangeran Ratu Anum Kesumayuda (Gusti Muhammad Sanusi) bin Pangeran Ratu Ahmad Hermansyah, memerintah dari tahun 1867 - l904 M. Sebagai Mangkubumi, di angkat Pangeran Paku Sukma Negara. Sultan ke XII ini beranak dua orang putri yang menurut kitab Kanun Kuntara tidak berhak menjadi raja. Beliau wafat serta di makamkan di Pangkalan Bu'un.

Mangkubumi Pangeran Paku Sukma Negara yang di angkat oleh Raja ke X (Pangeran Ratu Ahmad Hermansyah) mengundurkan diri pada 12 Oktober 1897 M karena tidak setuju dengan penyerahan wilayah Nanga Pinoh (di Kalimantan Barat sekarang) kepada Belanda. Sebagai Mangkubumi baru di angkat Pangeran Mangku Prabunata. Tidak ada catatan yang mengungkap alasan mengapa Nanga Pinoh di serahkan kepada Belanda.

Pada masa Pangeran Ratu Anum Kesumayuda di laksanakan penyelesaian Masjid Jami Pangkalan Bu'un yang di bangun sejak masa pemerintahan Raja ke X, sayangnya Masjid Jami ini terbakar tahun 1982 (Nahan AF (f): 4). Selain itu juga muncul Rumah Mangkubumi yang sekarang di lindungi oleh Jawatan purbakala. Rumah Mangkubumi ini merupakan kediaman keturunan Ratu Prabu yang berasal dari warisan Pangeran Ratu Anom Kesuma Yudha (Nahan 1996, 112-113). Di belakang rumah ini, masih tersisa bekasnya, ada sebuah kolam dengan beberapa patung. Konon kolam ini merupakan tempat mandi para putri Keraton Kotawaringin.

Gb 2.5. Rumah Mangkubumi

Pada masa Pemerintahannya Kota Pangkalan Bun berkembang antara lain dengan

1. Berdirinya Bea Cukai dan Gudang Garam di Karang Anyar 1902.
2. Berdirinya Sarekat Islam
3. Pembaharuan lain-lain seperti :
   a. Terbentuk Pegawai Raja.
   b. Musik Raja
   c. Penamaan Abdul Muluk sejenis Komidi Saudi Arabia dan Seni Tari Joaet.
   d. Hubungan dengan Daerah lain mulai lancar karena Sultan Bangsawan dan Hartawan banyak mempunyai Sekonyer (Kapal Layar).

Karena tidak memiliki anak laki-laki itulah, setelah Pangeran Anom Kesumayudha wafat, terjadilah perebutan kursi kesultanan di Kerajaan Kotawaringin. Menurut Lontaan dan Sanusi, pada waktu itu adik-adik sultan ini menuntut harta keraton dan barangkali juga menguasai keraton karena cucu Pangeran Ratu Anom Kesuma Yudha masih kecil. Sebenarnya pihak Pangeran Ratu Anom Kesuma Yudha menginginkan proses pemilihan sultan bukan di dasari oleh kitab Kanun Kuntara yang di susun pada waktu sultan yang pertama dan selama berabad-abad di ikuti oleh kerabat kerajaan. Menurut kitab tadi sebenarnya cucu Pangeran Ratu Anom Kesuma Yudha tidak berhak atas tahta

kerajaan. Tetapi agar sang cucu dapat naik tahta, sultan pada tahun 1902, sebelum beliau meninggal dunia, beliau telah berlayar ke Batavia dengan maksud tunggal menerangkan siapa yang bakal menggantikan kedudukan sebagai Sultan Kerajaan Kotawaringin. Sultan Pangeran Ratu Anom Kusuma Yudha mempunyai cucu, anak Putri Mahkota Ratu Kuning. Cucunya bernama Pangeran Hermansyakh. Sultan memohon restu kepada Gubernur Jenderal Belanda di Jakarta, agar merestui cucu tersebut menggantikan kedudukannya nanti.

Masalah inipun juga di sampaikannya kepada Residen Belanda di Banjarmasin, sewaktu beliau mampir, pulang dari Batavia ke Pangkalan Bu'un. Tetapi sebagaimana maklum dua tahun kemudian sekembalinya dari Batavia, beliaupun mangkatlah (Lontaan dan Sanusi, 1976 : 34). Akhirnya pihak Belanda, dengan melalui controleur di Sampit Van Duve mengambil keputusan bahwa hanya mengakui sultan yang berasal dari keturunan Pangeran Ratu Imannudin. Untuk itulah maka Pangeran Ratu Sukma Negara kembali naik tahta.

Pangeran Paku Sukma Negara bin Pangeran Ratu Imannuddin, pada waktu menjabat sebagai Sultan Kotawaringin ke XII telah mengangkat Mangkubumi Adipati Mangku Negara. Sultan ke XII ini memerintah dari tahun 1904 - 1913 M. Pangeran Paku Sukma Negara dinobatkan menjadi raja karena beliaulah satu-satunya juriat tutus (keturunan langsung) yang berhak berdasarkan Kitab Kanun Kuntara.

Dengan pengangkatan Pangeran Ratu Sukma Negara menjadi sultan, walaupun sesuai dengan Kitab Kanun Kuntara, pemerintah Belanda telah mencampuri urusan keluarga keraton secara mendalam.

Pangeran Paku Sukma Negara berputra tiga orang yakni Pangeran Bagawan yang kemudian di angkat menjadi Raja Muda, Pangeran Kelana Perabu Wijaya di angkat menjadi Perpatih dan Perdipati Menteri Dalam, dan Pangeran Mohammad Zen di jadikan Penghulu.

Setelah wafat, Sultan ke XII ini di makamkan di Kotawaringin. Untuk itu di angkatlah Pangeran Ratu Sukma Alamsyah bin Pangeran Bagawan, sebagai Raja Kotawaringin ke XIII dengan Mangkubumi Pangeran Adipati Mangkunegara. Beliau memerintah dari tahun 1913 - 1939 M. Sultan ke XIII ini berputra sembilan orang. Sebenarnya pemilihan mangkubumi dari anak negeri (rakyat) jatuh kepada Gusti Anas yang bergelar Pangeran Surya bin Pangeran Kelana Perabu Wijaya, tetapi Raja ke XIII hanya mengangkatnya menjadi onderdistricthoofd Sukamara, tentu saja penunjukkan ini di tolak oleh Pangeran Surya.

Pada waktu sultan ke XIII bertahta, sekitar tahun 1930 an, hubungan antara kota-kota di muara sungai atau tepi pantai ke daerah-daerah pedalaman sudah dapat ditempuh dalam waktu yang lebih singkat. Ini karena adanya kapal-kapal api khusus yang dapat melayani sungai-sungai kecil di pedalaman sampai mendekati daerah-daerah yang berjeram. Kapal-kapal tersebut umumnya kapal dagang milik orang-orang Cina yang mengangkut barang dan penumpang sepanjang sungai-sungai di Kalimantan Tengah (SKN 1979: 50).

Karena transportasi yang cepat dan berarti komunikasi menjadi lebih mudah, Belanda menjadi takut akan cepatnya perkembangan gerakan kemerdekaan yang bisa di mulai oleh para pemimpin rakyat Kotawaringin. Untuk mengurangi pengaruh para pemimpin tradisional yang bisa membakar masa untuk memberontak atau mengorganisasi gerakan kemerdekaan, pemerintah Belanda memecah Distrik (Wedana) menjadi beberapa onder distrik. Kalau dahulunya lembaga pemerintahan terdepan adalah Distrik maka sekarang dalam distrik yang dikepalai oleh seorang Kiai, yang setingkat Camat. Pada umumnya sampai dengan masa Kemerdekaan ibukota onderdistrict masih merupakan ibu kota kecamatan. Tampaklah disini pemerintahan langsung Belanda telah meluas dan menjangkau garis terdepan melewati pemimpin tradisional lokal. Pada umumnya pemimpin tradisional lokal ini hanya di manfaatkan untuk kepentingan tertentu, misalnya untuk persoalan hukum adat, barulah Demang Kepala Adat itu di minta bantuannya oleh penguasa penguasa Kolonial. Jadi sifatnya hanya sekedar memberi bantuan penjelasan tentang adat atau hukum adat yang sudah umum berlaku secara tradisional (SKN, 1979 : 49-50).

Setelah Sultan ke XIII wafat, sebagai penggantinya adalah Pangeran Ratu Anum Kesuma Alamsyah bin Pangeran Ratu Sukma Alamsyah, sebagai Sultan Kotawaringin ke XIV dengan Mangkubumi Pangeran Adipati Mangku. Memerintah dari tahun 1939-l948 M, wafat dan di makamkan di Solo serta berputra sembilan orang. Pada waktu pemerintahan sultan terakhir inilah terjadi revolusi kemerdekaan di Indonesia yang akan di ulas pada bab berikutnya.

Sultan ke XIV ini di lantik pada waktu umurnya masih sangat muda. Meskipun demikian beliau melaksanakan pembangunan, terutama di kota Pangkalan Bun sendiri, yaitu memperluas kota antara lain (Yussuf dan Kassu, 1989: 56).

1. Di kampung Mendawai, membuka lokasi baru untuk tempat pemukiman penduduk Mendawai yang selama ini tinggal di Sungai Karang Anyar, maka tempat itu dikenal dengan sebutan Sungai Bulin.
2. Di Kampung Raja, membuka lokasi baru untuk tempat pemukiman penduduk Kampung Raja yang banyak tinggal di pedukuhan/ladang-ladang, maka dikenalah tempat itu dengan Kampung Sungai Bu'un atau disebut juga Kampung Baru, sekarang jadi Kelurahan Baru.
3. Di jalan Pangkalan Bun ke Kumai, di muka Simpang Mendawai, di buka untuk pemukiman orang-orang yang berasal dari Jawa, sekarang menjadi Kelurahan Sidorejo. Ketika lokasi baru ini di buka pada tahun 1940, berbarengan dengan pembukaan pemukiman bagi penduduk, maka pemerintahan Hindia Belanda, membuka dan membuat lapangan udara yang terbesar dan terkuat sebagai tempat pertahanan dan perlawanan terakhir, bilamana Balikpapan sudah tidak dapat di pertahankan lagi. Maka berangsur-angsurlah militer Belanda berdatangan dalam jumlah yang besar, sampai akhirnya Hindia Belanda jatuh ketangan Pemerintahan Jepang (Yussuf dan Kassu, 1989 : 55-56).

Pada masa Pemerintahan Kerajaan berada dalam kekuasaan Pangeran Ratu Sukma Alamsyah Sultan ke 13 Kerajaan Kotawaringin dapatlah di katakan sebagai awal dari pada masa pertumbuhan dan perkembangan, baik Ekonomi, Pendidikan dan Kebudayaan. Kesehatan dan lain sebagainya. Dalam Kota Pangkalan Bun berdiri sebuah rumah Sekolah desa yang di sebut Volkschool sampai kelas III dan sebuah sekolah sambungan yang di sebut Vervolkschool kelas V sedangkan di luar Kota Pangkalan Bun yaitu : Kumai, Sukamara, Kotawaringin, Nanga Bulik, Perambang, Kudangan, Kinipan, Tapin Bini, Bayat masing-masing sebuah Sekolah (Volkschool).

Untuk Kota Pangkalan Bun pada tahun 1938/1939 di dirikan pula sebuah Rumah Sakit, sedangkan di Sukamara dan Nanga Bulik masing-masing satu buah Poliklinik (Balai Pengobatan). Pada tahun itu juga yaitu 1938/1939 berdiri sebuah Kantor Pos dan Telegrap.

Dari dua tempat di mana Keraton Kesultanan Kotawaringin berada, terdapat beberapa peninggalan seperti Astana Alnursari, Masjid Jami Kotawaringin, dan rumah Mangkubumi, juga terdapat dua makam raja-raja dan keluarganya. Satu makam terdapat di Kotawaringin Lama, tepatnya di belakang Astana Alnursari, dan satu lagi di Pangkalan Bun. Di Kotawaringin Lama di makamkan Sultan ke II

Gb 2.6. Makam Kyai Gede di Kotawaringin Lama

sampai ke VIII. Makam yang di Pangkalan Bun juga berada di belakang Istana menyeberang jalan. Selain kedua makam raja ini, di Kotawaringin Lama juga ada makam keluarga kerajaan yang sekarang sudah dipakai untuk rumah penduduk secara liar. Makam-makam tadi tidak dibongkar, tetapi langsung di atasnya di

dirikan bangunan baru dari kayu. Makam yang terakhir ini sangat luas, terbagi menjadi dua bagian yang di belah oleh jalan. Di sebelah kiri, dimana juga terdapat makam Kyai Gede merupakan makam keluarga kerajaan yang berasal dari Suku Dayak atau mereka yang masuk Islam setelah Dewasa. Sedang di sebelah kiri adalah makam keluarga kerajaan yang berasal dari Suku Banjar atau memang sejak lahir Islam. Pembagian ruang ini demikian unik dan seharusnya di gali dalam penelitian yang lain..

Gb 2.7. Makam Raja-raja Kotawaringin Lama

2.4. Hubungan dengan Jepang.

Perlu kita tulis di sini hubungan khusus antara Kotawaringin dengan Jepang sebelum Perang Dunia kedua. Seperti diungkapkan di muka bahwa setelah mangkatnya Sultan ke XI Pangeran Ratu Anom Kusuma Judha, terjadilah perpecahan di dalam keluarga Kerajaan Kotawaringin. Ini karena Pangeran Ratu Anom Kusuma Yudha tidak memiliki putra, selain dua orang Putri ; Ratu Kuning dan Ratu Intan (Ratu Perabu). Beberapa adik sultan menuntut harta keraton dan barang kali juga menguasai keraton karena cucu Pangeran Ratu Anom Kusuma Yudha masih kecil.

Untuk mencari dukungan dari luar maka berangkatlah pihak Pangeran Hermansyakh ke Jepang yang di percaya sebagai negara terkuat di Asia. Rombongan yang berangkat ke Jepang ini di pimpin oleh Pangeran Natawijaya. Rombongan ke Jepang ini terdiri dari 5 orang yakni : Gusti Muh. Bakhri, Pangeran Natawijaya, Gusti Gumad, Haran dari Mendawai, Djelani dari Kumai. Mereka berkeyakinan, bahwa Kerajaan Jepang lah yang terkuat di Asia Timur pada dewasa itu. Rombongan atas pimpinan Pangeran Natawijaya berangkat dengan satu keyakinan pasti berhasil. Entah rombongan ini telah langsung ke Jepang atau belum, tapi kenyataannya, sebagian rombongan telah kembali dengan membawa bendera matahari terbit milik Kerajaan Jepang. Menurut perkiraan, mungkin sebagian rombongan ini hanya bertemu dengan Jepang di daerah Singapura. Hanya Konon Pangeran Natawijaya langsung ke Jepang dan tak mau kembali lagi sampai akhir hidupnya.

Gb 2.8. Makam Kerajaan di Kotawaringin Lama

Sebagian rombongan Pangeran Natawijaya yang kembali ke Pangkalan Bun ini sebenarnya merencanakan untuk menahan diri dan menunggu pasukan bantuan dari Jepang, atau satu keputusan resmi dari penguasa Jepang. Di samping itu mereka juga ingin mempersiapkan perlengkapan fisik, mental dan menyebarkan pengaruh terhadap seluruh rakyat untuk menyambut kedatangan bantuan dari Jepang. Tapi karena dorongan emosi ingin menang dan merasa kuatnya dorongan moril dari pihak Jepang di Singapura, rombongan ini segera mengibarkan bendera Jepang dan menggembar-gemborkan bahwa bantuan Jepang segera akan datang untuk membantu mereka. Tanpa di sadari segala rahasia di sebarkan kepada seluruh masyarakat di Pangkalan Bun.

Seperti telah di ceritakan secara singkat di muka bahwa pihak yang menentang rombongan Pangeran Hermansyah ini segera mengambil langkah menghubungi penguasa Belanda di Banjarmasin. Mereka mengajak kontrolir Belanda untuk menjadi mediator. Di waktu itu di angkatlah seorang pejabat. Menurut adat untuk jadi pejabat, harus terambil/menunjuk Mangku Bumi. Kebetulan Mangku Bumi di waktu itu Pangeran Adipati Mangku Negara. Keberangkatan ke Banjarmasin telah berhasil mengutus Kontroler Sampit yang bernama Van Duve. Pada bulan Agustus 1905, beliau telah datang dan menyelesaikan masalah siapa yang akan menduduki takhta pemerintahan Kerajaan Kotawaringin.

Tanpa di duga-duga sebelumnya Residen mengumumkan, bahwa yang menjadi Sultan untuk Kerajaan Kotawaringin ialah Pangeran Sukma Negara dan hari itu juga Sultan akan di lantik. Residen mengambil sumpah melantik Sultan kemudian Sultan melakukan sumpah dengan menuju ke Masjid. Keputusan ini diambil karena Residen hanya mengetahui bahwa yang patut menjadi sultan adalah keturunan Sultan Pangeran Imanudin sesuai dengan Kitab Kanun Kuntara. Selesai pengumumannya berangkatlah Residen pulang ke Banjarmasin. Dengan adanya Pangeran Sukma Negara naik takhta, Menteri Kumai Pangeran Syarif Abdulrachman minta berhenti dengan hormat. Permohonan berhenti dengan hormat, bagi Sultan tidak menjadi persoalan. Segera di berikan surat berhenti dengan hormat, dan di ganti dengan Pangeran Bendahara menjadi menteri di Kumai.

Bendera Jepang yang tadinya berkibar dengan megah, kemudian menghilang dari tiangnya, malah kaki tangan Belanda berusaha menangkap siapa-siapa mereka yang telah mengibarkannya. Sebenarnya orang tersebut tidak sukar menemuinya, tapi karena Sultan Kerajaan Kotawaringin telah jelas dan telah di kukuhkan dan tidak ada lagi reaksi mengikutinya, maka punahlah segala kesulitan dan kegaduhan dalam Kerajaan Kotawaringin (Lontaan dan Sanusi, 1976: 35-38).

Tetapi tidak lama kemudian kegaduhan kembali lagi. Pada tahun 1906, pada suatu hari, ramailah orang membicarakan kedatangan Gusti Gumad, salah seorang dari rombongan Pangeran Hermansyah yang berangkat ke Jepang beberapa waktu yang lalu. Beliau telah datang dari Jepang menumpang sebuah perahu layar melalui Singapura. Karena dendamnya untuk menguasai keraton, Gusti Gumad rajin mempengaruhi rakyat Kerajaan Kotawaringin. Ia melancarkan berita mengenai senjata kura-kura yang sewaktu-waktu dapat di lepaskan dan menghembuskan gas racun. Yang di maksud dengan senjata kura-kura ini mungkin kapal selam Jepang. Rakyat sangat terpengaruh olehnya. Tambahan pula ia menjelaskan bahwa Pemerintah Jepang akan membantu. dan akan datang memerintah mereka. Pengaruhnya kian hari kian meluas ke seluruh kampung-kampung, sehingga setiap hari rumahnya di datangi. Karena pengaruh yang telah banyak merajai rakyat, perintah membangun jalan yang menghubungkan Pangkalan Bun dengan Kumai terbengkalai. Rakyat tidak mengindahkan perintah Sultan.

Perkembangan pengaruh ini sangat mengkhawatirkan pemerintahan kesultanan. Sultan tidak dapat menguasai situasi karena rakyat lebih condong kepada Gusti Gumad. Karena itu Sultan mengirimkan utusan menemui Kontrolir di Sampit, melapor keadaan yang sedang mengancam pemerintahan Kerajaan Kotawaringin. Mendengar laporan ini kontrolerpun segera mengambil keputusan, mengirim setengah kompeni tentara menumpang kapal "S.S. SELATAN". Kapal ini dilengkapi dengan alat-alat perang. Kapal ini datang ke Pangkalan Bu'un untuk menghadapi segala kemungkinan. Namun demikian rakyat tidak takut, mereka tak mengindahkan apa yang akan terjadi. Setiap hari mereka berdatangan ke rumah Gusti Gumad menerima segala ajaran dan instruksinya. Rakyat tidak ada lagi yang mau mengerjakan jalan. Mereka beranggapan bahwa Gusti Gumad yang gagah berani itulah yang akan menjadi jaminan mereka.

Keadaan ini berjalan terus dan lebih mengkhawatirkan Sultan. Pihak Belanda di Sampit pun telah turut memikirkan kemungkinan yang bisa mengakibatkan kehancuran Kerajaan Kotawaringin nanti. Datanglah kontroler bersama menteri di Kumai menumpang kapal S.S. BERANDAN. Tuan Vander Duve, kontroler Sampit bersama Menteri Kumai datang ke Pangkalan Bu'un, berusaha mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah Gusti Gumad. Kontroler Van Duve berunding dengan Sultan. Mereka mengambil jalan politik mengangkat Gusti Gumad menjadi Kepala Kampung saja (Lontaan dan Sanusi 1976: 36-38).

Dengan semakin mantapnya kedudukan Belanda di Kotawaringin, setelah hampir 120 tahun menerima daerah ini dari Kerajaan Banjar, pada tahun 1907 pemerintah kolonial merasa perlu menugaskan seorang kontrolir untuk mengawasi daerah ini. Kontrolir Belanda pertama di sini adalah Vender Mellen sebagai hoofd van plaatelijk Besteur. Kemudian di gantikan oleh W Dolf sebagai kontrolir yang kedua. Kontrolir ketiga adalah C van Nohijs dan kemudian berganti lagi sampai 22 kali. Kontrolir terakhir adalah LWJ Bouhuijs yang di tawan oleh Jepang tanggal 21 Maret 1942

2.5. Syarekat Islam (SI)

Pada tahun 1914 di Kota Pangkalan Bun berdiri "Syarikat Islam" (SI) yang merupakan suatu Organisasi Pergerakan Politik dan Keamaan yang pertama yang ada di daerah ini (Yusuf dan Kassu, 1989: 53). Syarikat Islam adalah suatu perkumpulan yang menjalankan Paham Politiknya berdasarkan "Ajaran Islam" dalam waktu yang relatif singkat telah mendapat simpati dari Umat Islam sebagai pengikut dan anggotanya.

Dari sumbangan dan kerja keras pada anggotanya, maka berdirilah sebuah gedung berlantai tiga yang cukup megah menjadikan suatu kebanggaan tersendiri dengan nama "CLUB MEDAN SAMPURNA" terletak di kampung Mendawai. Sungguh sangat di sesalkan gedung yang merupakan monumen Sejarah Perjuangan itu, sudah tidak ada lagi.

Pada waktu itu Pemerintah Belanda dalam menghadapi maraknya pergerakan kemerdekaan di daerah Kalimantan Tengah menggunakan Regering Reglement

S. 1855 nomor 2 yang mengemukakan bahwa "Perkumpulan perkumpulan dan rapat-rapat yang bersifat politik atau yang dapat mengancam ketentraman umum di larang di Hindia-Belanda. Terhadap pelanggaran larangan ini akan di ambil tindakan sesuai keadaan."

Dengan adanya peraturan ini dari Pemerintah Kolonial Belanda maka sukarlah bagi rakyat di Kalimantan Tengah untuk mendirikan suatu perkumpulan yang bersifat politik. Hal ini disebabkan kalau terang-terangan mendirikan suatu organisasi politik, tentulah segera dibubarkan/ditangkap oleh penguasa Kolonial Belanda pada waktu itu. Sebab itulah penguasa Belanda berusaha untuk menghancurkan setiap usaha yang mengarahkan kepada politik dalam arti berusaha mendirikan suatu organisasi yang berbau politik serta bersifat mengkritik atau menentang kebijaksanaan yang di jalankan oleh Pemerintah Kolonial, segeralah pemimpinnya di tangkap dan di masukkan dalam penjara. Dengan peraturan inilah maka Syarikat Islam di Pangkalan Bun di bubarkan.

Tetapi, pada akhir tahun 1939 dan awal tahun 1940, udara politik di Hindia Belanda semakin memanas karena api peperangan di Eropa sudah mulai menyala. Pada waktu itu Negeri Belanda telah di duduki oleh tentara Jerman. Melihat momentum ini, para pemimpin dan anggota Syarikat Islam, mencoba membangun lagi satu pergerakan kemerdekaan yang tidak terang-terangan. Atas prakarsa beberapa orang tokohnya, di bangunlah sebuah perguruan yang bernama "BADAN PERGURUAN ISLAM" dengan singkatan BAPERIS. Berdirinya BAPERIS ini, di sponsori oleh alm. Pangeran Adipati Mangku Negara dalam jabatan beliau sebagai Mangku Bumi Kerajaan Kotawaringin, dan alm. Haji Abdussyukur, seorang saudagar di Kumai yang telah banyak mengeluarkan biaya untuk organisasi tersebut (Yusus dan Kassu, 1989: 56). Di dalam BAPERIS inilah pemikiran akan Indonesia merdeka terus dikembangkan sambil menunggu saat yang tepat.

2.6. Pendidikan

Walaupun, seperti telah di tuturkan di muka, terdapat sekolah-sekolah dasar di beberapa kota, perhatian Pemerintah Kolonial Belanda mengenai pendidikan untuk anak-anak masyarakat pribumi kurang di perhatikan. Tugas pendidikan untuk anak-anak pribumi ini di lakukan oleh badan swasta yakni Zending. Zending dengan keterbatasan dana dan tenaga sukar untuk mendirikan sekolah sekolah yang mampu menjangkau rakyat banyak. Sedangkan bantuan yang di berikan Pemerintah Belanda berupa subsidi banyak yang di kurangi karena politik penghematan. Akibat penghematan itu uang sekolah menjadi mahal dan banyak anak-anak pribumi yang tidak mampu meneruskan sekolahnya.

Kesulitan utama bagi pendidikan di Kotawaringin adalah kesediaan tenaga guru yang sangat terbatas. Tenaga-tenaga yang terpilih menjadi guru di kirim terlebih dahulu ke Depok untuk di didik. Sekolah guru ini adalah satu-satunya milik Zending. Baru pada tahun 1902 Zending mendirikan sekolah guru di Banjarmasin yang disebut Seminari

Lulusan Seminari inilah nantinya yang mengajar pada sekolah-sekolah yang disebut Sekolah tiga tahun (volkschool) di mana kadang-kadang untuk mengajar tiga kelas itu hanya di tangani oleh seorang guru saja. Yang di ajarkan sekedar menulis, membaca, dan berhitung. Keadaan tetap berkembang, tuntutan akan adanya satu wadah pendidikan lanjutan dari Volkschool ini Zending mendirikan sekolah sambungan yang lamanya dua tahun dari Volkschool, yang di sebut vervolgschool. Untuk kampung yang cukup banyak penduduknya sekolah yang lamanya dua tahun dan tiga tahun itu di gabungkan menjadi satu sekolah yang lamanya lima tahun dengan nama Vervolgschool juga (SKN, 1979: 34).

Menjelang kedatangan invasi militer Jepang ke Indonesia, maka sebagian besar Sekolah Rakyat 3 tahun dan 5 tahun di asuh oleh badan swasta, yaitu suatu badan yang di bantu oleh Gereja Dayak Evangelis. Mengapa terjadi hal seperti ini ialah karena Pemerintah Belanda dalam keadaan melaksanakan politik penghematan, sehingga sekolah-sekolah yang diasuh oleh pihak swasta tidak lagi memperoleh subsidi dari Pemerintah Belanda. Yang menjadi gurunya adalah orang-orang pribumi juga. Kesempatan untuk memperoleh pendidikan di sekolah Rakyat ini pada masa Belanda memang cukup sulit umumnya yang masuk adalah mereka yang mampu membayar uang sekolah. Ketika Jepang masuk di Kalimantan Tengah mereka menemukan sekolah swasta ini tetap berjalan dengan guru-gurunya yang digaji oleh penduduk kampung. Pemerintah Jepang mengambil alih semua sekolah swasta ini dan semua gurunya di gaji oleh pemerintah Jepang. Pelajaran bahasa Jepang dengan intensif sekali di ajarkan kepada anak-anak sekolah. Setiap pagi sebelum masuk kelas selalu di adakan upacara bendera mengibarkan bendera Jepang dan penghormatan kearah matahari terbit. Setelah upacara bendera selesai di sambung dengan gerak badan yang disebut Taiso (SRDK 18). Mengenai zaman Jepang ini akan di bahas di bab berikutnya.

2.7. Serikat Dayak.

Selain Serikat Islam, di kalangan masyarakat Dayak yang beragama Kristen pun timbul organisasi yang bertujuan untuk memerdekakan Indonesia. Selama masa penjajahan Belanda aktivitas masyarakat pribumi lebih banyak merupakan "arus bawah" karena Belanda menekan segala pikiran dan pengaruh "arus bawah" tersebut supaya jangan muncul dalam permukaan sejarah kolonial, dengan mempertahankan tegaknya peraturan kolonial yang melarang semua kegiatan yang berbau politik. Namun pemimpin-pemimpin tradisional lokal masyarakat Suku Dayak Kalimantan Tengah mampu memanfaatkan sarana yang ada pada waktu itu untuk membentuk wadah persatuan yang merupakan organisasi politik.

Untuk menghindari kesulitan meminta izin mengadakan rapat pembentukan suatu organisasi, lebih-lebih dalam hubungannya dengan politik, kelahiran Serikat Dayak ini sangat unik sekali yakni oleh pendukung dan pencetusnya mula-mula, di adakan rapat pembentukannya dengan menggunakan gedung-gereja di Kuala Kapuas. Penggunaan gedung gereja tersebut hanyalah suatu siasat belaka agar

tidak di cegah oleh penguasa Kolonial. Pemimpin-pemimpinnya adalah orang Dayak yang menjadi Pegawai Pemerintah Belanda seperti kita ketahui pada waktu itu Pemerintah Kolonial Belanda melarang Pegawai-pegawai pemerintah untuk masuk dalam Partai Politik. Untuk menghindari kategori partai Politik di tempuhlah oleh mereka pada waktu mana wadah yang di bentuk tersebut adalah Serikat Dayak, sehingga pada luarnya adalah organisasi sosial non politik.

Serikat Dayak ini di dirikan tahun 1919 oleh beberapa orang tokoh seperti Haosman Baboe yang pada waktu menjadi Kepala Distrik yang berkedudukan di Kuala Kapuas, M. Lampe yang pada waktu itu adalah seorang Adjunct Jaksa. Hampir setiap kota di Kalimantan Tengah ada cabang-cabangnya bahkan kemudian berkembang sampai Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Tokoh tokoh Serikat Dayak yang lain adalah Philips Sinas Haji Abdulgani, Sian; E. Kamis, Tamanggong Tundan, Achmad Anwar, dan Ovang Uray. Tujuannya dapat di simpulkan sebagai berikut (SKN, 1979: 28):

a. Mengembalikan rasa harga diri yang di injak injak oleh kaum penjajah serta menanamkan rasa mempunyai,
b. Menghimpun dan memperkuat solidaritas untuk sama-sama berjuang memperbaiki nasib dengan tolong-menolong dan memperhatikan pendidikan anggota anggotanya.

Organisasi ini di dirikan tidak memandang aliran paham politik dan keagamaan, tetapi lebih mengutamakan kebersamaan dan persatuan untuk mencapai kejayaan. Karena gerakan dan usaha Organisasi Serikat Dayak ini tidak mencantumkan gerakannya sebagai suatu Partai Politik, maka pemerintah Belanda di Kalimantan Tengah masih memperkenankan organisasi ini hidup dan melebarkan sayapnya ke seluruh Kalimantan Tengah. Usaha yang utama dari organisasi ini adalah bergerak dalam bidang pendidikan, karena dengan melalui pendidikan dapat di berikan pikiran-pikiran tentang cita-cita bangsa, sebab anak-anak yang di didik adalah kader-kader yang akan meneruskan cita-cita bangsa yang merdeka. Kemerdekaan bangsa yang selama ini telah di injak-injak oleh sistem Pemerintah Kolonial Belanda di Kalimantan Tengah, harus direbut kembali dan harus dihormati oleh bangsa lain.

Kendati pun cara mendirikan organisasi Serikat Dayak ini kurang di setujui Pemerintah Kolonial Belanda, namun organisasi ini tidak di bubarkan oleh Belanda, Untuk mengurangi kekuatan politik organisasi ini pemerintah Belanda memisah-misahkan pemimpinnya yang hampir semua Pegawai Pemerintah Belanda, dengan cara mengadakan pemindahan tempat kerja. Tindakan Belanda ini cukup berhasil karena mulai tahun 1926 aktifitas organisasi ini mulai berkurang. Tetapi itu tidak lama sebab pada tahun itu juga Serikat Dayak menjelma menjadi Pukat Dayak yang kemudian berubah menjadi Partai Dayak.

Dengan demikian Progam Kerja Serikat Dayak yang berusaha untuk meningkatkan kehidupan masyarakat suku dalam bidang sosial budaya belum sempat dilaksanakan secara menyeluruh, akibat kecurigaan Belanda terhadap tujuan Serikat Dayak. Usaha-usaha pemerintah Belanda untak menggerogoti

kelangsungan hidup organisasi Serikat Dayak, dengan berbagai dalih dan ancaman, telah menyebabkan organisasi ini berkurang aktivitasnya mulai 1926. Tampaknya Belanda seolah olah berhasil memperlambat atau membendung usaha Serikat Dayak, tetapi kenyataannya Serikat Dayak tidak lumpuh. Kembali cita-cita Serikat Dayak merupakan arus bawah yang tetap mempunyai potensi dalam mengangkat martabat masyarakat Suku Dayak Kalimantah Tengah.

2.8. Akhir Kerajaan Kotawaringin.

Awal mundurnya Kerajaan Kotawaringin adalah pada saat di serahkannya Kerajaan Kotawaringin oleh Kerajaan Banjar kepada Belanda. Ini berarti seluruh kesultanan berada dibawah pengawasan Belanda. Kemudian Belanda juga memperkuat kekuasaannya dengan berbagai macam monopoli dagang. Perpecahan di pihak keluarga kerajaan dan di undangnya Belanda untuk ikut campur memperlemah kekuatan keluarga kerajaan terhadap Pemerintah Belanda dan mengurangi wibawanya terhadap rakyat. Kemudian di serahkan pula monopoli garam kepada Belanda pada 13 Agustus 1900. Dengan memegang monopoli ini Belanda menjadi sangat kuat kekuasaannya mengingat penduduk di pedalaman Kalimantan Tengah yang tidak mungkin membuat garam, menjadi sangat tergantung kepada Belanda. Setiap tahun Belanda membayar fl 12.000,- yang dibagi menjadi fl 8.000 untuk kerajaan dan fl 4000 untuk menteri-menteri. Dengan berlakunya uang Belanda di dalam wilayah Kerajaan Kotawaringin sebagai alat tukar, maka secara ekonomi Belanda menjadi sangat kuat. Akibatnya keluarga kerajaan hanya menjadi simbol saja tanpa kekuasaan.

Kekuasaan Keraton Kotawaringin berakhir pada waktu kemerdekaan Republik Indonesia. Menurut sumber buku Memori hari Pahlawan ke 43 10 November 1988 di Pangkalan Bun, pada saat Sultan ke XIV di mintai kepastiannya apakah mendukung Republik Indonesia atau tidak, Sultan dalam keadaan sakit sehingga ketegasan tadi tidak di dapat (Yusuf dan Kassu 1989: 93). Tetapi, menurut Cilik Riwut di dalam bukunya Kalimantan Membangun secara jelas mengatakan sebagai berikut:

Selama 124 tahun Swapraja Kotawaringin ber-ibukota di Pangkalan Bun dan pada masa revolusi kemerdekaan sekalian Sultan menerangkan bahwa mereka berdiri di belakang blok A.B.C.D., tetapi rakyatnya tetap berdiri di belakang Republik Indonesia, karenanya rakyat mengangkat seorang yang dipandang bisa sesuai dengan kemauan rakyat. Pemerintah Kerajaan Kotawaringin mengajukan mosi pada Pemerintah Republik Indonesia di Yogya (Riwut, 1993: 127).

Benarkah Kesultanan Kotawaringin tidak berdiri di Belakang Republik Indonesia? Menurut penulis harus dikaji dengan bijaksana. Sebab di waktu itu komunikasi sangat buruk. Informasi yang diterima tidak bisa begitu saja diputuskan, sehingga sebagai seorang Sultan tidak boleh gegabah mengambil keputusan politis. Dalam keadaan begini barangkali terkesan Sultan tidak mendukung RI, padahal sebaliknya mendukung kemerdekaan RI karena selama

beberapa abad Kesultanan Kotawaringin telah dijajah oleh Belanda.

Mengenai berakhirnya kerajaan Kotawaringin, Lontaan dan Sanusi membuat catatan sebagai berikut :

Tanggal 19 Oktober 1945 Organisasi Angkatan Muda Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia terbentuk. Kotawaringin membentuk Dewan Perwakilan sendiri. Satu Dewan yang telah terbentuk pada tanggal 20 Oktober 1948. Rakyat Kotawaringin dan sekitarnya dengan suara bulat, melalui Dewan tersebut menyerukan, hanya ingin menggabungkan diri dengan Pemerintah Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta. Pernyataan ini telah membuka jalan baru bagi Kerajaan Kotawaringin untuk mengirimkan seorang wakil di Parlemen, yang bernama Ibrahim Sedar.

Di masa itu, status kerajaan feodal telah hilang. Kesultanan tidak ada lagi yang memerintah. Daerah bekas Kerajaan Kotawaringin, pemerintahan di lanjutkan dasai Zelfbesturregelin. 1938/ staadsblad 1938 No. 529. Untuk itu pemerintahan di jalankan oleh Bestuur Commissie. Bestuur Commissie bekerja sama dengan Dewan Kotawaringin dan telah berakhir pada tanggal 2 Mei 1950, pada waktu resminya penggabungan dengan Pemerintahan Republik Indonesia oleh Dr. Murjani selaku Gubernur Kalimantan (Lontaan dan Sanusi, 1976: 53-54)

Mengenai jatuhnya pengaruh Sultan terhadap rakyatnya, Yusuf dan Kassu mencatat sebagai berikut:

(...) Sejak Balatentara Jepang menduduki Kota Pangkalan Bun sebagai Ibukota Kerajaan Kotawaringin, Posisi Sultan memang sudah tersudut dan tersingkir yaitu sejak di wajibkannya setiap orang tanpa kecuali yang melalui penjagaan serdadu Jepang harus memberi hormat, dengan sikap berhenti dan menghadap kemudian membungkuk untuk memberi hormat. Dengan keadaan ini, berarti Sultan telah dihina, bukankah beliau sebagai seorang figur yang harus dihormati tetapi sebaliknya harus memberi hormat (...) (Yusuf dan Kassu, 1989: 75)

Tetapi Barangkali tidak benar bahwa Sultan tunduk terhadap Belanda, kemungkinan karena beliau memang ingin kerajaannya berdiri sendiri tanpa tunduk terhadap Belanda maupun pemerintah Indonesia, berikut sebuah kutipan yang menarik:

Gerakan dan kegiatan pejuang yang beraneka dan tak kunjung padam ini telah menggegerkan kaum penjajah di Pangkalan Bu'un. Telah merubah sikap mental mereka. Dengan sikap kekerasan telah berubah membujuk merayu rakyat dengan mengadakan satu badan/ dewan Kotawaringin. Siasat ini menarik Sultan bekerja sama dengan Kontroler Belanda. Pemerintahan nampaknya agak aman. Namun Sultan tetap dicurigai, karena Kotawaringin melalui Sultan, tetap menolak daerah bekas kerajaan Kotawaringin dimasukkan dalam salah satu Negara Bagian yang telah berdiri di Indonesia ini. Akhirnya NICA bertindak memberhentikan Sultan dari jabatannya, dengan alasan tidak becus dalam pemerintahan. (Lontaan 76)

Bahwa Sultan ke XIV tidak bersedia berdiri di belakang Republik Indonesia dibantah oleh kerabat kerajaan. Bukti bahwa Sultan berpihak kepada

kemerdekaan Indonesia adalah dengan memberikan lebih dari 300 pucuk senapan kepada para pejuang, memberikan meriam-meriamnya untuk melawan Pemerintah Belanda yang ingin kembali lagi setelah perang Dunia II selesai. Kenyataan bahwa Sultan kotawaringin mendukung RI tidak dapat dibantah lagi karena beliau menghadap Presiden RI untuk menyatakan tekadnya mendukung RI. Oleh Bung Karno Sultan ke XIV di angkat menjadi Wedana di daerah Sukorejo Jawa Tengah.

BAB TIGA
MASA PENDUDUKAN JEPANG (1942-1945)

3.1.Jepang Menduduki Kalimantan Tengah.

Menjelang serangan Jepang ke Kalimantan, Pemerintah Belanda yang sudah menduga akan ancaman negara matahari terbit ini mulai mencurigai siapa saja yang diperkirakan akan mendukung Jepang. Bahkan para rohaniawan warga negara Jerman yang bertugas sebagai misionaris karena mereka berkebangsaan Jerman, yang menyerang Belanda di Eropa, maka mereka ditangkap dan ditahan (SKN, 1979: 65). Mereka kemudian dibebaskan ketika Jepang masuk di Kalimantan Tengah. Khusus di Kotawaringin Belanda sangat mencurigai kelompok Gusti Gumad yang pernah mengibarkan bendera Jepang. Banyak orang dari kelompok ini yang ditangkapi.

Beberapa hari menjelang kejatuhan Pemerintahan Hindia Belanda, pada tanggal 26 Februari 1942, seorang Bangsa Jepang yang telah lama bermukim di Pangkalan Bun bekerja sebagai seorang pengrajin Batu Kecubung, bernama Y. Yamamoto ditangkap. Penangkapan dipimpin langsung oleh kontrolir LWJ. Borsumy bersama 2 orang anggota Polisi dan pada hari itu juga membawa Yamamoto dengan pengawalan ketat ke Banjarmasin (Yusuf dan Kassu, 1989: 61).

Pada tanggal 11 Januari 1942 Jepang menyerang Miri, Kucing (Serawak), Brunai, Tarakan, Tanah Grogot, Pontianak, dan Kotawaringin. Kemudian pada tanggal 24 Januari 1942 Jepang menduduki Balikpapan bertujuan merebut persediaan minyak di Balikpapan. Berita kemenangan Jepang di Tarakan dan Balikpapan ini sebenarnya telah membuat petugas-petugas pemerintah kolonial Belanda di Kalimantan Tengah bergegas mencari perlindungan dan mengungsi ke pedalaman. Dengan membawa Perlengkapan sekedarnya menggunakan kapal-kapal kecil dan perahu-perahu dayung bersembunyi di anak-anak sungai. Pada tanggal 10 Februari 1942 Banjarmasin jatuh ke tangan Jepang. Pemerintahan Gubernur Dr. BJ. Haga, melarikan diri ke pedalaman (Riwut, 1993: 137).

Dalam situasi terjepit mereka tidak ingin Jepang memanfaatkan data-data yang mereka buat selama berabad-abad di Kalimantan. Maka dari itu, banyak arsip yang dibakar oleh petugas-petugas Belanda termasuk pula semua peta-peta daerah penting yang mempunyai nilai untuk pertambangan di seluruh daerah Kalimantan Tengah. Melarikan diri dengan kepanikan dan ketakutan seperti itu, orang Belanda menderita sendiri dalam pengungsiannya akhirnya tidak merasa tahan lagi, maka mereka keluar dari persembunyiannya dan menyerah kepada Jepang tanpa syarat. Dengan kejadian ini tampaklah kepada masyarakat bahwa, keunggulan orang kulit putih tidak terbukti karena mereka menyerah kepada kulit berwarna. Dengan demikian mitos keunggulan tersebut hanya buatan penjajah yang ingin memperoleh keuntungan saja dari negeri yang dijajah.

Pada bulan Maret 1942 bersamaan dengan jatuhnya pemerintahan Hindia Belanda, gubernur menyerah. Setelah ditahan beberapa lama, gubernur ini dihukum mati oleh tentara Jepang pada bulan desember 1943 (SRKD, 1983: 6). Sejak saat itulah sebenarnya seluruh wilayah Kalimantan berada di bawah kekuasaan Pemerintah Angkatan Laut Jepang yaitu Borneo Minseibu berpusat di Banjarmasin yang dipimpin seorang Jepang berpangkat Borneo Minseibu - Cukan (Riwut, 1993: 137).

Pasukan Jepang dengan kekuatan satu kompi tiba di Pelabuhan Kumai pada tanggal 21 Maret 1942. Dua regu langsung ke Pangkalan Bun untuk menerima penyerahan diri Kontrolir LWJ, Bouhuys beserta tentara Inggris Gurkha yang melarikan diri dari Daerah Serawak. Sedangkan yang lainnya menerima penyerahan Komandan Pasukan Belanda beserta Pasukannya di lapangan terbang Sabah Uyah, sekarang Lanud Iskandar, Lapangan Udara di Pangkalan Bun. Pada hari itu juga semua tawanan dibawa ke Kumai yang selanjutnya dengan sebuah Kapal Perang yang berlabuh di Laut dibawa ke Banjarmasin. Dari dua regu tentara Jepang yang memasuki kota Pangkalan Bun, satu regu mengawal para tawanan ke Banjarmasin, sedangkan yang satu regunya tinggal di Pangkalan Bun, dipimpin oleh seorang Sersan bernama Nakamura. Pada tanggal 28 Maret 1945 kekuatan balatentara Jepang ditambah dengan satu regu lagi dan sebagai pimpinannya berpangkat *"Taico"* atau Kapten.

Pada tanggal 31 Maret 1942 untuk pertama kalinya Pemerintah Jepang menempatkan Pejabat Sipilnya yang berpangkat Bunken Kanrikan sebagai pengganti atau setingkat dengan Kontrolir zaman Hindia Belanda, bernama Ota Tamon dengan seorang sekretarisnya yang bernama Ulinami

Bunken Kanrikan ini menempati rumah Jabatan Dokter Rumah Sakit Pangkalan Bun, sedangkan Taicho menempati Rumah Jabatan Kepala Douane Beambte berhadapan dengan rumah Jabatan Kontrolir yang waktu itu ditempati oleh Balatentara Jepang (Yusuf dan Kassu, 1989: 61-63).

Gb 3.1. Kota Kumai di Tahun 2001

Kedatangan Jepang di Kalimantan pada mulanya disambut oleh rakyat Kalimantan dengan meriah dan gembira, dengan harapan bahwa Jepang akan memberikan Kemerdekaan dan Kebebasan kepada rakyat. Tetapi kenyataan adalah sebaliknya kedatangan Jepang menjadikan bertambahnya penderitaan rakyat. Dengan tangan besinya Jepang mengadakan penganiayaan penyembelihan massal rakyat Kalimantan dengan dalih membantu Sekutu. Padahal yang dianiaya dan dibunuh Jepang itu adalah rakyat tak berdosa dan buta politik sama sekali.

Keadaan yang demikian itu menimbulkan kepanikan dan ketakutan yang luar biasa sehingga akhirnya meningkat menjadi kenekatan yang melahirkan pemberontakan-pemberontakan. Perbuatan Jepang itulah yang memaksa timbulnya rasa dendam dan benci rakyat. Banyak sekali pemimpin-pemimpin masyarakat dan mereka yang sangat dibutuhkan melarikan diri ke Jawa.

Selain itu, banyak sekali pemimpin, pemuka-pemuka rakyat dibunuh oleh tentara Jepang. Perlu dicatat satu kejadian yang sangat menggemparkan di siarkan dalam harian Borneo Simbun Banjarmasin nomor 324 tanggal 21 Desember 1943 bahwa telah dihukum mati tanggal 20 Desember 1943, 200 (dua ratus) orang yang terdiri antara lain orang-orang Belanda, Indonesia, Tionghoa, di antaranya ialah bekas Gubernur Haga orang Belanda, C.M. Vischer orang Swiss, Raden Susilo umur 50 tahun, Dr. R. Sutomo, Hausman Baboe bekas Gunco Sampit (salah seorang pemuka/pemimpin Dayak yang terkenal dan disegani rakyat). Ditambah lagi berita dalam Harian Borneo Simbun Banjarmasin nomor 491 tanggal 2 Juli 1944 bahwa telah dihukum tembak berdasarkan Maklumat Pemerintah Angkatan Laut Jepang antara lain J.E. Pattiasiana umur 51 tahun, Sjarif Mohammad Alkadri Sultan Pontianak, Dr. Roebini serta isteri, dan 12 Sultan di Kalimantan Barat. Selain itu beratus-ratus rakyat yang tidak berdosa mati terbunuh oleh Jepang, baik yang di bunuh di tempat, maupun yang mati menjadi korban Romusha (Riwut 1993: 138).

Mungkin penduduk Kalimantan Tengah sedang mengalami nasib yang lebih mujur dari saudara-saudaranya di tempat lain selama masa pendudukan Jepang itu. Jepang pada umumnya cukup ramah walaupun mereka tidak segan-segan bertindak kejam dan membunuhi orang-orang yang di curigainya dan yang di anggap masih setia kepada Belanda.

Di Kotawaringin kedatangan Pemerintah Sipil Jepang disambut dengan sikap biasa-biasa saja oleh rakyat. Keluarga Kesultanan yang semula ketakutan akhirnya boleh bernapas lega karena mereka tidak diganggu. Menurut Lontaan dan Sanusi, kedatangan Jepang di Keraton Kotawaringin telah mengejutkan keluarga kerajaan, karena mereka langsung menanyakan siapa keturunan dari Pangeran Natawijaya yang pernah ke Jepang. Suatu pertanyaan yang menggentarkan karena keluarga kerajaan justru yang menentang pihak Pangeran Hermansyah yang di bawah pimpinan Pangeran Natawijaya pergi ke Jepang untuk meminta bantuan. Untunglah ternyata Jepang tidak jadi membantai keluarga Kerajaan (Lontaan dan Sanusi, 1976: 47).

Kehidupan rakyat berlangsung biasa-biasa saja. Kesulitan-kesulitan yang timbul kemudian adalah akibat wajar dari situasi perang yang tidak memungkinkan kelancaran arus barang-barang. Dalam kesempatan-kesempatan tertentu Jepang masih sempat membagikan sejumlah kecil barang-barang kebutuhan kepada yang memerlukan.

Terhadap penduduk di usahakan untuk menjaga jangan sampai timbul keresahan pada mereka. Agama suku dihargai dan menurut Demang J. Salilah justru pada masa pendudukan Jepang itulah nama agama suku yang semula sering disebut sebagai agama dulu (agama helo) atau oleh orang Barat disebut sebagai Heidendom diberi nama baru menjadi agama Kaharingan sesuai usul J. Salilah. Ketika ditanya kenapa J. Salilah mengusulkan nama Kaharingan diperoleh jawaban bahwa perkataan Kaharingan berarti tumbuh dengan sendirinya. Ini memberikan kesan bahwa agama suku yang disebut Kaharingan itu tumbuh dan berkembang dengan sendirinya dengan tidak diketahui siapa yang menjadi tokoh pemulanya (SKN, 70).

3.2. Pembangunan Fisik.

Masa pendudukan Jepang adalah masa Perang Pasifik. Setelah menghantam Pearl Harbour, Jepang berusaha menguasai Pasifik Selatan yang waktu itu di kuasai Belanda. Dengan jatuhnya Hindia Belanda, maka keadaan darurat perang pun berlaku di wilayah ini.

Sehingga segala sesuatu yang dilakukan Jepang adalah semata-mata untuk perang. Untuk menunjang perang Pasifik ini, Jepang membangun dan memperbesar tempat-tempat galangan kapal. Di Kalimantan, Jepang memanfaatkan Sukamara sebagai tempat membuat kapal.

Program pembuatan kapal ini memperkerjakan secara paksa 44.000 orang Indonesia yang di pimpin oleh 215 insinyur Jepang. Program ini membangun 150 kapal mesin di tahun 1942. Di tahun 1943. 127 kapal diluncurkan, tetapi ambisi untuk meluncurkan 700 kapal di tahun 1944 batal dan hanya mampu meluncurkan 343 kapal. Kegagalan ini karena di antara para pekerja orang Indonesia tadi mulai ada yang berani mengadakan perlambatan kerja sebagai bagian dari pembangkangan terhadap Jepang (Lucas, 1986: 28).

Di Kumai, dibangun sebuah pabrik yang mengolah kulit Bakau yang pada waktu itu dikenal dengan "Tanning Kojo". Orang-orang Jepang yang ahli dalam tehnik bangunan di datangkan ke Pangkalan Bun, selain untuk membangun Kantor-kantor Pemerintah, terutama sekali berkenaan dengan dimulainya membangun kembali Lapangan Terbang.

Dalam keadaan kehidupan rakyat yang semakin terjepit, pemerintah melalui anak-anak sekolah dan para Remaja membentuk Organisasi "Seinendan" organisasi ini. selain dari sebuah organisasi sosial, bekerja untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat, yaitu memperbaiki jalan dan sebagainya, maka Seinendan Pangkalan Bun, dibawah pimpinan Bapak Gt. SANUSI telah dapat membuat sebuah Gedung yang disebut "Gedung Nasional" didirikan diatas lapangan tennis karena tidak berfungsi lagi. Gedung ini kemudian berperan

sebagai tempat rapat umum baik di masa Jepang masih berkuasa atau masa revolusi melawan NICA. Di gedung inilah strategi perjuangan diatur untuk mencapai kemerdekaan. Tetapi karena pembangunannya tergesa-gesa oleh seinendan, maka di zaman kemerdekaan menjadi cepat rusak dan harus dirobohkan. Tempat dimana gedung tadi berada sekarang kembali menjadi lapangan tenis (Yusuf dan Kassu, 1989:70).

Gb 3.2. Sukamara di Tahun 2001

Di zaman Jepang ini diberlakukan Kinrohosi atau kerja bakti kepada rakyat. Untuk suatu jangka waktu tertentu rakyat di wajibkan datang ke tempat tugas dan jaminan selama bertugas sepenuhnya menjadi tanggungan. yang bersangkutan. Kerja bakti besar-besaran adalah pembersihan sungai dari kayu-kayu yang berada di dasar sungai. Kayu-kayu ini dimusim kemarau yang mana permukaan air merendah, menjadi penghalang lalu-lintas kapal Jepang yang lewat. Selain itu penduduk juga dipaksa untuk membuat jalan disepanjang sungai. Permukiman penduduk pada waktu itu masih terpencar dengan sarana jalan sejajar dengan sungai yang dimaksudkan untuk kepentingan militer. Walaupun jalan ini tidak bermanfaat untuk pengangkutan barang di waktu itu, dikemudian hari ternyata mendorong permukiman dari sungai ke permukiman darat. Jika jalan ini melewati anak sungai, penduduk pun dikerahkan untuk membuat jembatannya dari kayu (SKRD, 1983: 17).

Di beberapa kota, Jepang juga mendirikan bangunan-bangunan baru dari kayu untuk keperluan perang. Di Nanga Bulik misalnya, bersebelahan dengan kantor onderdistricthoofd, Jepang membangun sebuah tangsi. Bangunan-bangunan tadi dibangun dengan cepat tanpa sebuah rancangan yang baik sepertinya bangunan-bangunan belanda yang dibangun sebelumnya. Tetapi, sampai sekarang bangunan Jepang ini masih ada sebagai saksi sejarah.

Pemerintah juga mendirikan "TONARIGUMI" yakni semacam Rukun Tetangga dengan seorang ketua yang disebut "Kumicho", badan ini semata-mata dimaksud

kan agar memudahkan pemerintah memobilisasi tenaga kerja untuk melaksanakan pembangunan. Tonarigumi di manfaatkan Pemerintah Jepang untuk membuka kembali Lapangan Terbang yang ditinggalkan oleh Belanda. Karena itulah seluruh penduduk dewasa dan Pemuda didalam Daerah Kerajaan Kotawaringin dikerahkan secara bergiliran 2 atau 3 bulan sekali sebagai tenaga sukarela dengan gaji setiap harinya 50 sen Jepang.

Gb 3.3. Kantor Onderdistrict di Nanga Bulik Tahun 2001

Tenaga kerja sukarela ini tidak terbatas pada Penduduk dalam wilayah Kerajaan Kotawaringin saja, juga dari Daerah Sampit (Kabupaten Kotawaringin Timur) sekarang ini, pada tiap-tiap bulan diambil dari kampung-kampung dalam wilayah ini diangkut dengan kapal Laut "Kasuga Maru dan Kore Maru" tidak kurang dari 200 sampai 300 orang di berangkatkan ke Pangkalan Bun untuk mengerjakan lapangan Terbang ini. Juga tenaga sukarela di datangkan dari Jawa, sehingga pada tiap-tiap hari. tenaga yang mengerjakan Lapangan Terbang itu tidak kurang dari 1.000 atau 3.000 orang. Banyak sekali di antara tenaga sukarela ini meninggal dunia karena kurangnya akomodasi, tidak adanya air bersih (Yusuf dan Kassu, 1989: 71-72).

Seperti telah di tuturkan di muka bahwa tenaga masyarakat Kalimantan Tengah lebih banyak di arahkan untuk membersihkan aluran sungai dari berbagai rintangan baik kayu maupun dari keadaan pendangkalan. Penggalian pedalaman terusan-terusan untuk memperlancar sarana perhubungan. Penggunaan tenaga ini memang di minta begitu saja tanpa memperoleh imbalan bayaran. Dalam hubungannya dengan militer, di Kotawaringin Barat, tenaga paksa ini di manfaatkan untuk membangun lubang-lubang perlindungan dengan waktu bekerja siang dan malam. Lubang perlindungan sudah jelas besar manfaatnya di masa perang berkecamuk. Selain ada serangan udara rakyat di perintahkan untuk

masuk lubang perlindungan (SRKD, 1983: 32). Di sepanjang pantai, lubang-lubang ini, juga dipakai untuk bersembunyi sambil menembaki musuh dari darat.

3.3. Latihan Ketentaraan dan Berorganisasi

Untuk menghadapi Perang Pasifik, Jepang membutuhkan banyak tenaga untuk menjadi tentara. Terutama untuk mempertahankan Kalimantan dari serangan sekutu, Jepang mengorganisasi pemuda untuk latihan kemiliteran. Untuk itulah di dirikan sebuah Organisasi Kemiliteran bagi orang-orang dewasa atau Pemuda yaitu apa yang disebut "Konan Hoku Kudan". Badan ini benar-benar mendapat latihan militer dengan latihan yang keras dan tetap, dengan mempergunakan senapan yang terbuat dari kayu ulin.

Badan-badan ini dibentuk bukan saja untuk Kota Pangkalan Bun, tetapi di setiap Kota, Fuku Guncho (Kecamatan) dan Kampung-kampung. Diantara para pemuda ini, mereka yang terpilih dikirim ke Banjarmasin. memasuki pusat latihan yang disebut "Rensei Dojo" mendapat latihan yang keras dari orang-orang Jepang atau Pelatih Indonesia dengan keras dan penuh disiplin.

Untuk menjaga ketertiban dan keamanan kampung, maka pemuda-pemuda kampung di kerahkan terutama untuk menjaga kemungkinan sabotase pihak musuh, misalnya kebakaran dan lain-lain sebagainya yang sifatnya bisa memperlemahkan ketahanan pertahanan Jepang. Maka di bentuklah organisasi Seinendan. Dalam prakteknya organisasi ini di ajarkan juga baris berbaris, latihan dasar kemiliteran, menjaga keamanan dan ketertiban kampung. Dalam propaganda Jepang dikatakan bahwa jika keamanan dan kampung tertib, rakyat banyak merasa aman bekerja. Seinendan ini menurut rencana bertugas mengamankan garis belakang jika Sekutu menyerang Kotawaringin Barat (SRKD, 1983: 32).

Selain latihan ketentaraan diatas, Jepang juga mendirikan satu organisasi ketentaraan yang lebih besar lagi yakni Heiho. Banyak para pemuda yang tertarik dengan kepahlawanan Heiho dan mencoba mendaftarkan diri. Pada mulanya tidak semua pemuda di terima karena proses seleksinya sangat ketat. Tetapi karena mengingat Jepang mulai terdesak oleh sekutu dan mereka membutuhkan tentara sebanyak-banyaknya maka semua yang mendaftar di terima dan di latih menjadi tentara.

Kesemuanya itu sudah jelas oleh Pemerintah Jepang di maksudkan dan di tujukan untuk membantu Balatentara Dai Nippon untuk mencapai kemenangan akhir dalam peperangan Asia Timur Raya "Dai Toa No Senso" (Yusuf dan Kassu, 1989: 71). Tetapi latihan ketentaraan yang diikuti oleh banyak pemuda ini justru menguntungkan bagi rakyat Kotawaringin, sebab mereka memperoleh bekal kemiliteran yang nantinya akan dipakai untuk menghadapi Belanda yang ingin kembali menjajah.

Jika Para kaum laki-laki berlatih ketentaraan, pemerintah Jepang membentuk organisasi Wanita Funjinkai. Organisasi wanita ini pelaksanaannya sampai ke desa-desa. Semua kaum wanita di desa masuk dalam organisasi ini. Usaha-usaha yang dijalankan oleh Fujinkai ini, misalnya sehabis bekerja siang hari di

ladang, mereka berkumpul di rumah persinggahan untuk bersama-sama menganyam tikar dan menenun serta lemba. Dari hasil karya ini bisa dijual untuk umum, untuk modal selanjutnya dalam mencari bahan yang sama. Usaha Jepang untuk menggali semua potensi yang ada di masyarakat Kalimantan Tengah ini termasuk penggunaan hasil kerajinan kaum wanita dalam Fujinkai ini, tidak lain sebagai usaha untuk menopang pemerintahan militer Jepang yang semakin hari semakin terdesak oleh Sekutu. Kebanyakan hasil usaha Fujinkai di desa-desa diambil begitu saja oleh penguasa Jepang dan mungkin hanya untuk kepentingan pribadi Jepang tersebut.

3.4. Sistem Pemerintahan dan Militerisme di Jaman Jepang

Pada saat pendudukan Jepang seluruh Pulau Kalimantan di jadikan satu provinsi dan di namai Borneo Minseibu beribukota di Banjarmasin. Gubernur pertama, yang waktu itu disebut *Cookan,* adalah Inoije. Pada awal pemerintahan Jepang, pucuk pimpinan pemerintahan sampai dengan kecamatan di pegang oleh orang Jepang. Tetapi kemudian Jepang melepas pucuk pimpinan di bawah kawedanan kepada pribumi. Kawedanan di sebut *Bun* sedang kecamatan disebut *Gun.* Pada waktu itu Kalimantan Tengah dibagi menjadi lima Bun (Kawedanan) yakni Daerah Muara Teweh, Buntok, Kuala kapuas, Kuala Kurun, Kasongan, Sampit, dan Pangkalan Bu'un, yang kemudian disebut Pangkalan Bun. Daerah-daerah ini dipimpin oleh seorang Jepang berpangkat Bunkan Kanrikan. Pembagian daerah-daerah *Bun* ini berdasarkan delapan aliran sungai besar Barito, Kapuas, Kahayan, Katingan, Mentaya, Seruyen dan Lamandau yang berperan sebagai prasarana angkutan. Pemerintahan *Gun* (kecamatan) di bawah pemimpin Pribumi yang disebut *gunco*. Di Kalimantan Tengah terdapat 21 *gun* (SRKD, 1983:6). Kedudukan seorang pribumi untuk bisa menjadi seorang camat dan di pakainya tenaga pribumi untuk urusan pemerintahan di sebabkan oleh kurangnya tenaga administrasi yang berkebangsaan Jepang. Keadaan ini tentu sangat menguntungkan para calon pemimpin pribumi untuk belajar menjalankan pemerintahan sebab sejak Kotawaringin dikuasai Belanda, golongan pribumi hampir tidak diberi kesempatan untuk memerintah daerahnya sendiri bahwa sultan hanya menjadi simbol saja. Dengan demikian waktu Jepang kalah dan pergi dari Kotawaringin pemerintahan daerah ini tetap berjalan.

Jepang memulai pemerintahan di Kotawaringin Barat dengan kepala pemerintahan Ota Tamon yang berpangkat Ken Kanrikan pada tanggal 31 Maret 1942, kemudian diganti Misibuci. Mengawali jalannya Pemerintahan, pemimpin Jepang di Kotawaringin Barat yang di sebut Bunken Kanrikan terlebih dahulu mengubah nama-nama Kantor, Dinas dan Jawatan serta Pejabat, di seluruh kekuasaan hukumnya antara lain (Yusuf dan Kassu, 1989: 63):

1. Districthoofd (Kepala Distrik) menjadi Guncho.
2. Onderdistricthoofd (Kepala Onderdistrict) menjadi Fuku Guncho.
3. Kamponghoofd (Kepala Kampung) menjadi Suncho.
4. Politie (Polisi) menjadi Jumpo.

Sanusi juga mengemukakan bahwa pada waktu pendudukan Jepang sebenarnya tidak terjadi perubahan di Kotawaringin Barat. Nampaknya Pemerintahan militer Jepang baik dan serasi dengan masyarakat. Bahkan rencana pembantaian terhadap keluarga kerajaan di batalkan.

Disini Jepang memperkenalkan sistem militer bagi masyarakatnya. Misalnya saja, tiap pagi hari kerja, baik Kantor maupun Sekolah diwajibkan mengadakan upacara Bendera, memberi hormat dengan menghadap ke Utara, ke arah Istana Teno Heika di Tokyo. Pada penghormatan itu dilakukanlah mengheningkan Cipta yang disebut (Mok To) dengan berdoa untuk keselamatan Kaisar dan kemenangan Dai Nippon dalam peperangan Asia Timur Raya. Kemudian, bagi anak-anak sekolah, mulailah dengan Taisho atau senam pagi. Setelah itu anak-anak di beri pelajaran menyanyi oleh tentara Jepang yang setiap hari datang ke sekolah.

Di dalam kota, bilamana ada orang yang melalui pos penjagaan tanpa memberi hormat, ia diganjar dengan tamparan, atau diikat ditiang Bendera, atau disuruh berdiri beberapa jam memberi hormat kepada matahari. Peraturan ini rupanya tidak pandang bulu, seperti diungkap pada bab sebelumnya, sultanpun harus melakukan hal ini.

3.5. Seni dan Budaya di Jaman Jepang

Pendekatan persuasif yang dilakukan pemerintah Jepang menciptakan suasana akrab antara tentara dengan anak-anak. Konon setiap sore hari selalu ada seorang serdadu atau lebih yang berjalan dengan anak-anak yang mengiringi dibelakangnya sambil mengajarkan bahasa Jepang di samping ia sendiri belajar bahasa Indonesia. Melihat tingkah laku dan keakraban serdadu-serdadu Jepang· ini dengan anak-anak dan para Pemuda, semakin memperkuat keyakinan bahwa bangsa Jepang adalah saudara tua yang akan membawa dan memberikan kemakmuran kepada bangsa Indonesia.

Pendekatan persuasif ini sangat berbeda dengan sikap serdadu-serdadu Belanda sebelum perang dunia kedua yang angkuh dan sangat jauh dengan anak-anak dan rakyat pada umumnya. Keangkeran tentara Belanda menimbulkan rasa takut rakyat bilamana bertemu mereka di jalanan. Jangankan bertemu, mendengar ada serdadu saja, rakyat merasa ketakutan.

Demikian pula mengenai bahasa. Kalau di zaman penjajahan Belanda tidak semua orang mendapat kesempatan belajar bahasa Belanda, kecuali mereka yang berpangkat dan memiliki uang untuk masuk sekolah. Karena itu sedikit saja rakyat yang bisa berbahasa Belanda, sehingga seseorang dianggap telah bermartabat dan mempunyai derajat yang tinggi karena ia pandai berbahasa Belanda.

Sebaliknya serdadu-serdadu Jepang ini mengajarkan bahasa Jepang pada semua orang. Sehingga dalam waktu singkat, bahasa dan nyanyian Jepang sudah meluas, hampir setiap kepala dan mulut dapat menyebutkan kata-kata Jepang dan melagukan nyanyian Jepang.

Hampir setiap hari ada saja nyanyian Jepang baru yang diajarkan dan di nyanyikan oleh anak-anak sekolah. Selain nyanyian, serdadu Jepang juga mengajarkan disiplin. Setiap hari diadakan penjagaan dimuka pintu asrama mereka, setiap orang yang lalu lalang harus memberi hormat dan mengucapkan: Ohayu gozaimasu yang berarti "Selamat Pagi". Konnicuwa yang berarti "Selamat Siang" Konbanwa yang berarti "Selamat Malam".

Penyebaran kebudayaan Jepang semakin hari semakin meluas, tari-tarian ala Jepang diajarkan pula kepada anak-anak sekolah yang nanti dipertunjukan pada waktu ada perayaan atau pasar malam.

Lagu Kebangsaan Belanda "Wilhelmus Van Nassau" yang selalu dinyanyikan oleh anak-anak sekolah pada hari Kelahiran Sri Ratu tanggal 31 Agustus, diganti dengan Lagu Kebangsaan Jepang. "Kimigayo" pada hari hari Kebangsaan Jepang seperti memperingati Kelahiran "Meiji" atau peringatan dimulainya "Peperangan Asia Timur Raya" pada tanggal 8 Desember, yaitu serangan Balatentara Jepang atas Armada U.S.A. di Teluk Mutiara (Pearl Harbor), tahun 1941, Lagu Kebangsaan Lang Leve De Koningin diganti dengan Tenno Heika Banzai.

Selain dari pada itu komponis-komponis kita tidak pula mau ketinggalan. Setelah satu tahun balatentara Jepang menduduki Indonesia lahirlah sebuah nyanyian yang penuh semangat memuji kehadiran balatentara Jepang itu. Di antara baitnya berbunyi sebagai berikut :

"Genaplah setahun Pahlawan Dai Nippon membebaskan kita semua. Dari Perbudakan dan Penjajahan Belanda. Dai Nippon pelindung Asia" dan seterusnya (Yusuf dan kassu, 1989: 66-68).

Pada masa penjajahan Jepang ini kesenian daerah mulai digali kembali. Untuk itu Jepang mendirikan Keimin Bunka Syidosyo (Badan Pusat Kebudayaan) yang bertugas menggalakkan hidupnya kesenian rakyat. Gerakan ini memacu tumbuhnya banyak rombongan-rombongan kesenian yang baru. Misalnya saja, dalam waktu singkat bermunculan rombongan sandiwara dari kota-kota kecil setempat untuk mementaskan suatu sandiwara ke desa-desa sekelilingnya dengan tanpa bayar. Sekolah-Sekolah Rakyat di perintahkan juga untuk mengadakan latihan sandiwara yang nantinya akan dapat di pentaskan pada saat peragaan hari-hari besar bangsa Jepang. Dari segi lain dapatlah dipahami bahwa diperkenankannya untuk menghidupkan dan mempertunjukkan kesenian tradisional lokal serta sandiwara ini adalah untuk menghibur para penguasa Jepang, untuk sekedar melupakan kerinduannya terhadap negeri induk dan keluarganya. Demikian juga dalam hubungan ini adalah usaha agar rakyat yang diperintah bekerja keras dalam memperbaiki daerah aliran sungai tertentu serta kerja paksa lainnya akan bisa sekedar bergembira dan sementara itu bisa melupakan kelelahan dan kesulitan hidup yang sebenarnya dirasakan berat sekali pada waktu itu. Tentu saja bagi Jepang adalah juga merupakan salah satu cara mengalihkan semua keruwetan yang di ketahuinya dalam medan pertempuran yang selalu mengalami kekalahan (SRKD 1983:31).

3.6. Propaganda Perang Asia Timur Raya

Jepang selalu menyebut Perang Pasific sebagai Perang Asia Timur Raya, dimana sebagai saudara tua mereka akan membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Untuk lebih menguatkan kekuasaan Jepang terhadap bangsa-bangsa di Asia Timur, Jepang mendengungkan dirinya sebagai pembebas. Di samping mengatakan sebagai pembahas bangsa-bangsa di Asia Timur yang di jajah oleh Inggris, Perancis, Amerika Serikat dan Belanda, mereka juga mengatakan dirinya sebagai saudara tua. Untuk itu Jepang mengindoktrinasi murid-murid sekolah yang setiap pagi harus mengucapkan semangat Gerakan 3 A bahwa Jepang Cahaya Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Pelindung Asia. Setiap anak atau murid harus hafal teks tersebut. Biasanya pengucapan teks tersebut bergiliran tiap kelas mulai kelas I hingga kelas yang terakhir. Di samping itu kepada pegawai-pegawai pribumi hal ini di tanamkan juga arti kedatangan Jepang di Kalimantan.

Di dalam propaganda ini, tantangan berat bagi Jepang adalah luasnya daerah dan transportasi yang menggunakan sungai. Sehingga antara daerah yang tidak dialiri oleh sungai yang sama seperti dari Pangkalan Bun ke Sukamara, Jepang menggunakan jalur melalui laut. Meskipun demikian pemerintahan pendudukan Jepang tetap mengadakan perjalanan keliling sampai ke pelosok-pelosok daerah terpencil di hulu-hulu sungai dengan cara di antar beranting dari satu kampung ke kampung yang lain. Dengan cara ini petugas atau penguasa pendudukan Jepang dapat mengunjungi semua desa-desa di Kalimantan Tengah, dengan tujuan utama memberi penjelasan atau keterangan kepada rakyat banyak tentang kemenangan-kemenangan yang telah dicapai oleh Jepang, dan kedatangan mereka ke Kalimantan adalah sebagai saudara tua membantu mengusir imperialisme Belanda dari bumi Indonesia.

Biasanya untuk memikat rakyat banyak, maka oleh penguasa pemerintahan penjajahan Jepang di ikuti dengan pemutaran film. Film ini umumnya mengenai permulaan Perang Pasfik di mana Jepang dapat menyapu pertahanan Amerika Serikat, Perancis, Inggris dan Belanda di koloninya yang berada di Asia Timur. Dan di mintalah agar rakyat di Kalimantan Tengah untuk bekerja keras sebagai usaha menunjang kesatuan Asia Timur Raya (SRKD, 1983: 25-26).

3.7. Perjuangan Rakyat Jelata Di masa Penjajahan Jepang

Pada waktu Jepang masuk ke Kotawaringin Barat, mereka menyerang secara sporadis. Bukan hanya orang-orang Belanda yang terancam tetapi juga orang-orang Tionghoa yang menjadi musuh bebuyutan Jepang sejak beberapa waktu sebelumnya. Orang-orang Tionghoa yang berdagang ini dengan ketakutan menyembunyikan dagangannya dan menutup toko-tokonya. Tetapi setelah Balatentara Jepang menduduki Kota Pangkalan Bun, ternyata mereka tidak diapa-apakan sehingga barang-barang dagangan yang di sembunyikan itu, berangsur-angsur hadir lagi di pasar untuk di perjual belikan.Setelah beberapa bulan menduduki Kotawaringin Barat kemakmuran yang di janjikan Pemerintah Jepang dalam rangkaian "kemakmuran bersama di Asia Timur Raya" tidak juga

datang. Maka para pedagang yang pandai membaca situasi mulai cemas. Berangsur-angsur barang-barang dagangan lenyap dari pasar. Di lain pihak pemerintah Jepang sedikit demi sedikit mulai menuntut bantuan rakyat. Kepada seluruh rakyat di perintahkan untuk membuat kebun-kebun dengan menanam ubi kayu atau umbi-umbian lain untuk memperkuat sektor bahan makanan. Tidak kalah gencarnya pemerintah juga mengharuskan penanaman pohon jarak. Di dalam propagandanya pemerintah Jepang mengatakan bahwa "Satu biji menanam jarak, berarti satu buah pesawat musuh tercampak". Demikianlah, disamping kebun umbi-umbian, juga kebun-kebun jarak di usahakan oleh penduduk di Kampung-kampung.

Setelah setahun Balatentara Dai Nippon menduduki Indonesia, khusus di Daerah Kerajaan Kotawaringin, keadaan kehidupan masyarakat sudah membayang sulit. Perjuangan orang Kalimantan untuk melangsungkan hidupnya demikian berat di masa pendudukan Jepang. Di samping harga kebutuhan sehari-hari yang melambung tinggi, barang yang dicari juga sulit didapat. Kesulitan hidup ini sangat terasa karena ketiadaan garam, gula, minyak tanah, tembakau, minyak goreng, dan bahan sandang. Karena itu penduduk Kalimantan dan Kotawaringin pada khususnya menggunakan kulit nyamu sebagai pakaian. Karena itulah kesehatan menjadi terganggu. Bukan hanya penyakit kulit karena bahan pakaian yang tidak sesuai dengan kesehatan, juga kurangnya garam menyebabkan penyakit gondok. Demikian pula dengan tembakau, karena kesulitan mendapatkan di pasar, penduduk memanfaatkan daun galinggang sebagai ganti tembakau. Daun galinggang ini diiris kecil-kecil dan dijemur. Kemudian daun galinggang ini dirokok dalam gulungan daun pisang kering sebagai pengganti kertas rokok.

Untuk memudahkan distribusi barang, maka pada jaman jepang inilah muncul sistem pekan yang bergiliran bagi setiap kampung. Pekan ini adalah hari tertentu bagi suatu kampung untuk mengadakan hari pasar dimana para pedagang atau petani yang mau penjual hasil buminya berkumpul. Umumnya yang di perjual belikan hasil bumi seperti tebu, kacang panjang, pisang, durian, ikan, daging, dan kulit nyamu untuk pakaian. Sedang perdagangan kelontong dengan menggunakan perahu terhenti (SRKD, 1983: 16).

3.8. Di Akhir Pendudukan Jepang.

Menjelang berakhirnya Perang Pasific, pasukan Jepang semakin terdesak oleh tentara sekutu. Karena semakin frustrasi dengan kekalahannya, pendekatan persuasif kepada rakyat Kotawaringin mulai di tinggalkan. Tentara Jepang yang sebelumnya ramah kepada rakyat mulai kehilangan senyumnya. Jika dulu ada tentara Jepang yang menginginkan seorang gadis maka mereka melamar dengan baik-baik, diakhir masa pendudukannya menjadi brutal. Usaha mengajarkan bahasa dan kebudayaan Jepang yang dulunya juga di barengi dengan belajar budaya lokal oleh tentara-tentara, berubah menjadi meniponisasi dan menghilangkan budaya lokal (Yusuf dan Kassu, 1989: 73). Tingkah laku yang tidak senonoh juga ditunjukkan dengan membuka rumah bordil di tengah kota

berdekatan dengan penjara. Setiap malam para tentara berdatangan untuk bersenang-senang dengan wanita yang konon ditangkap dan dimasukkan ke bordil dengan paksa sebagai ianfu. Tentara Jepang telah dengan berani mengganggu gadis-gadis di kampung-kampung, akibatnya banyak orang-orang tua yang memiliki anak gadis terpaksa mencarikan pasangan anaknya sebagai usaha penyelamatan Agama dan Kebudayaan (Yusuf dan Kassu, 1989: 74).

Ketika Jepang yang berada di Kalimantan mengetahui bahwa mereka kalah perang, mereka sangat ketakutan mengingat perbuatannya sendiri yang telah mengadakan penyembelihan besar-besaran di Kalimantan sekitar tahun 1943 dan 1944. Penyebab penyembelihan itu berkisar pada kecurigaan Jepang pada para cerdik pandai dan keluarga-keluarga raja / sultan di Kalimantan Barat dan selanjutnya di Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.

Tatkala Jepang sudah terjepit oleh Sekutu, Jepang telah mempersiapkan suatu usaha pembantaian semua tokoh di Kalimantan Tengah, sehingga kelak daerah ini akan lumpuh kekurangan pemimpin, dengan alasan yang dibuat-buat seperti menuduh pemimpin tadi sebagai pengkhianat terhadap pemerintah Jepang. Dalam hal ini ada yang sempat di tangkap dan di bunuh oleh Jepang, tetapi banyak pula pemimpin-pemimpin yang sempat bersembunyi dan rakyat membantu melindunginya dan merahasiakan tempatnya. Adapun mereka yang di tangkap kemudian di bunuh oleh Jepang antara lain: Hamzah seorang Jaksa, Thio Tjing Bie, Hausman Baboe, Lentar, Liem Tek Hien (SRKD, 1983: 28-29). Dari kekejaman ini terlihat bahwa hampir setiap suku di Kalimantan Tengah mengalami tekanan dari Jepang, sehingga mereka bersama-sama berjuang untuk merdeka.

Bulan Mei 1945 Sekutu mendarat di Tarakan, 10 Juni 1945 di Labuhan (Brunai), dan 4 Juli 1945 di Balikpapan (Riwut, 1993: 137). Dan pada tanggal 17 September tentara Australia yang tergabung dalam Sekutu menduduki Banjarmasin tanpa perlawanan dari pihak Jepang (SRKD, 1983: 38). Tetapi kekalahan Jepang di Perang Asia Pasifik ini sangat terlambat di dengar oleh rakyat Kotawaringin. Ini karena pemerintah Jepang melarang rakyat memiliki radio dan merampasnya.

Setelah bom Atom di jatuhkan di Hirosima dan Nagasaki, pemerintah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Di Kotawaringin, tentara jepang masih tetap mencoba untuk berkuasa. Mereka merampas semua radio milik penduduk agar kabar kekalahan mereka tidak terdengar atau bisa di perlambat. Akhirnya pemerintahan Jepang yang pendek berakhir tanggal 18 September 1945 di bawah pimpinan T Tiri yang ditawan oleh NICA di Kumai. Sedang pimpinan tentara Jepang yang berpangkat Taicho melakukan bunuh diri. Para tentara Jepang di seluruh Kotawaringin di kumpulkan di Kumai untuk kemudian diangkut oleh sekutu ke Banjarmasin. Berakhirlah sudah masa pendudukan Jepang.

BAB EMPAT
MASA PERJUANGAN 1945

4.1. Masuknya NICA.

Bagi rakyat Kotawaringin Barat, perjuangan di tahun 1945 memiliki dua makna yang saling mengisi. Pertama, perjuangan berarti mempertahankan diri dari perubahan yang tidak mengenakkan. Disini berjuang adalah melawan musuh yang berusaha membinasakan atau siapa saja yang mencoba mengganggu kehidupan rakyat. Kedua, perjuangan juga berarti segala usaha dari rakyat untuk mengubah keadaan hidupnya. Selama berabad-abad dijajah baik oleh Belanda maupun Jepang rakyat Kotawaringin Barat berusaha untuk mengubah nasibnya kearah yang lebih baik. Ini berarti mereka harus melawan siapa saja yang mengganggu kebebasannya untuk mengembangkan diri, rakyat harus mengusir penjajah yang memeras mereka dari waktu ke waktu. Perjuangan ini pecahlah sudah pada saat Jepang mengalami kekalahan di Perang Pasifik dan Kotawaringin dirasakan tanpa pemerintahan penjajah lagi.

Masalahnya, berita akan kekalahan Jepang dan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus datang sangat terlambat oleh rakyat di Kotawaringin Barat. Komunikasi antara Kalimantan Tengah dan Jawa amat sulit. Selain itu Jepang berusaha menyembunyikan kekalahan di Perang Pasifik yang terus menerus terhadap bangsa Indonesia. Pada saat itu Jepang merampas pesawat radio milik rakyat, sehingga tidak ada lagi berita dan hiburan bagi rakyat. Sedang alat telekomunikasi lain seperti telegraf semua dikuasai oleh tentara Jepang. Dengan demikian maka jatuhnya Jepang dan Proklamasi Kemerdekaan tidak dapat di dengarkan oleh rakyat Kotawaringin Barat yang tersebar mulai dari daerah pantai sampai ke bukit-bukit jauh di pedalaman.

Sementara itu di Jakarta Presiden Soekarno pada tanggal 22 Agustus 1945 mengumumkan pembagian wilayah Indonesia menjadi delapan provinsi. Pembagian provinsi ini merupakan hasil kerja panitia kecil yang di bentuk dari PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Adapun ke delapan provinsi tersebut adalah sebagai berikut (Riwut 1996: 4-5):

1. Provinsi Jawa Barat dengan ibukota Bandoeng.
2. Provinsi Jawa Tengah dengan ibukota Semarang
3. Provinsi Jawa Timur dengan ibukota Soerabaja.
4. Provinsi Soematera dengan ibukota Medan.
5. Provinsi Soelawesi dengan ibukota Makasar.
6. Provinsi Maloekoe dengan ibukota Ambon.
7. Provinsi Soenda Kecil dengan ibukota Singaradja.
8. Provinsi Borneo (Kalimantan) dengan ibukota Bandjarmasin.

Sebagai Gubernur Borneo yang pertama di pilih Ir. Pangeran Muhammad Noor ; seorang Insinyur Sipil lulusan Technische Hoges School (ITB) yang lahir pada tanggal 24 Juni 1901 di Martapura, telah menerima kepercayaan pemerintah pusat untuk mengemban tugas sebagai Gubernur Borneo pertama. Setelah diangkat menjadi Gubernur Kalimantan, Ir. Pangeran Mohammad Noor segera membentuk staf yang antara lain terdiri dari:

Kepala Bagian Umum	:	Gusti Ibrahim
Sekretaris	:	Nasri
Kepala Bagian Keuangan	:	Nachly
Staf Khusus/Pribadi	:	Imansyah dan M. Saleh
Bagian Keamanan	:	Abdurachman, Gst Malioner, Gst Charidji Kesuma, Gusti Mayor

Karena suasana negara dalam keadaan menghadapi Belanda yang berambisi untuk menguasai Indonesia lagi, sebagai Gubernur Borneo Ir. Pangeran Muhammad Noor tidak dapat langsung memerintah wilayahnya yang sedang di kuasai NICA.

Kemerdekaan Republik Indonesia mulai terdengar di Kalimantan Tengah dan Selatan ketika A.A. Hamidhan dan A.A. Rivai datang di Banjarmasin tanggal 24 Agustus 1945 setelah melakukan pelayaran beberapa hari dari Jawa. Mereka segera memberitahu Borneo Simbun yang langsung menyiarkan berita ini lengkap dengan siaran proklamasi, susunan pemerintahan dan pengangkatan Ir. Pangeran Muhammad Noor sebagai Gubernur Borneo (Rimut, 1993: 143). Tetapi berita inipun tidak dapat di terima di seluruh Kalimantan Tengah.

Karena hubungan pelayaran antara Jawa dan Kotawaringin Barat tetap berjalan, berita kemerdekaan Republik Indonesia ini tidak dapat dibendung. Setiap kapal yang datang pasti membawa kabar berita kemerdekaan RI dan jatuhnya Jepang di Perang Pasifik. Penduduk Kotawaringin Barat yang mendengar kabar ini menerima dengan bahagia dan mengabarkan ke rekan-rekannya yang belum mendengar. Berita dari mulut kemulut ini demikian efektif mengabarkan kemerdekaan dan sedikit-demi sedikit secara sendiri-sendiri atau kelompok kecil mulai mengibarkan sang saka Merah Putih.

Tetapi pihak Jepang akhirnya merasa ada baiknya berterus terang kepada rakyat Kotawaringin. Untuk itulah maka pada tanggal 27 Agustus 1945 di Pangkalan Bun, datang menemui raja Kotawaringin Bunken Kanrikan (Pimpinan pemerintah Jepang setingkat wedana atau kontrolir zaman Belanda) di Pangkalan Bun untuk menyampaikan beberapa hal antara tain ;

a. Atas nama Pemerintah Kerajaan Jepang, Bunken Kanrikan akan menyerahkan kembali kekuasaan Pemerintahan kepada Sultan Kotawaringin.
b. Ken Kanrikan juga memberi selembar bendera berwarna merah putih, dengan satu permintaan bahwa pengibarannya menunggu setelah orang orang Jepang tidak ada lagi di Kotawaringin.

c. Kepada Raja, Ken Kanrikan memberikan harapannya bahwa Indonesia pasti merdeka tetapi penuh dengan pengorbanan.

Mengingat pentingnya hal ini raja memerintahkan Gusti Masterdam (Raden Mas) dan Ratu Sunding Anum menyampaikan kabar dan perintah raja (Pangeran Ratu Kesuma Anum Alamsyah, Raja Kotawaringin ke XIV) kepada rakyat di Kotawaringin (Kecamatan Kotawaringin Lama). Raja mengharapkan rakyat di Kotawaringin tetap berlaku tenang, berusaha sehari-hari seperti biasanya, menjaga ketertiban serta keamanan kampung. Untuk pengawalan Istana di Pangkalan Bun, Raja minta bantuan rakyat Kotawaringin sebanyak 40 orang. Pemberitahuan Kenrikan ini baru akan ditindak lanjuti dengan serah terima tanggal 10 September 1945 yang akan di jelas kan berikut ini.

Walaupun secara sendiri-sendiri merah putih sudah berkibar, upacara bendera yang pertama kali di lakukan adalah di Pangkalan Bun tanggal 29 Agustus 1945. Upacara bendera dengan di iringi lagu Indonesia Raya ini berlangsung di halaman kantor pemerintahan negeri. Anehnya pihak tentara Jepang menyetujui upacara bendera ini.

Lebih dari dua minggu setelah pasukan Jepang menyerah pada sekutu, pada tanggal 2 September 1945 Residen Jepang mengumumkan bahwa Jepang masih bertanggungjawab atas ketertiban dan keamanan hingga kedatangan tentara Sekutu melucuti mereka dan memulangkannya ke Jepang. Di samping itu kepada semua orang Jepang supaya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya sudah berada di Banjarmasin. Orang Jepang yang berada di pedalaman segera menghilir ke kota muara sungai, dan terus ke Kumai untuk menunggu angkutan dari Banjarmasin. Mendengar pengumuman ini orang Jepang yang takut akan pembalasan rakyat segera menyelamatkan dirinya dan ingin segera sampai di Banjarmasin. Para tentara Jepang yang berada di kota maupun pedalaman dengan tergesa-gesa meninggalkan pos-posnya karena takut diserang oleh rakyat yang menderita selama masa pendudukan. Daerah-daerah yang ditinggalkan ini langsung di kendalikan pejabat-pejabat pribumi yang telah biasa mengatur pemerintahan daerahnya karena sejak Jepang menduduki Kotawaringin, pada tingkat pemerintah kecamatan diserahkan kepada pemimpin pribumi (lihat Bab Tiga).

Di Pangkalan Bun kegembiraan akan kemerdekaan Republik Indonesia ini di sambung dengan pasar malam selama tiga malam berturut-turut di lapangan Sepak bola di mulai pada tanggal 5 September 1945. Pasar malam ini konon menjadi ajang pengumuman kemerdekaan Republik Indonesia di Kotawaringin Barat yang sangat efektif. Pengunjung pasar malam ini bukan hanya penduduk Pangkalan Bun saja tetapi juga dari kota-kota lain dan desa-desa.

Bersamaan dengan pasar malam tadi, di Kumai pada tanggal 6 September 1945 juga di adakan upacara bendera merah putih yang dihadiri oleh lebih dari 300 penduduk termasuk di dalamnya para pemimpin masyarakat, pegawai negeri, pedagang, pemuda dan murid-murid sekolah. Upacara bendera di Kumai ini di iringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dipimpin oleh Wilson Satu Kepala Sekolah di Kumai. Tempat upacara bendera ini memakai halaman gudang Borsumy.

Akibat dari di adakannya pasar malam di Pangkalan Bun tadi, selain di Kumai juga di kota-kota lain seperti Sukamara, Nanga Bulik, Kudangan, Kotawaringin Lama, Balai Riam dan bahkan di desa-desa seperti Teluk Bogam, di adakan pertemuan-pertemuan untuk menyambut kemerdekaan. Secara defacto Kotawaringin telah bersatu dengan saudara-saudaranya yang lain di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pada tanggal 10 September 1945 secara resmi Pemerintah Jepang di wakili oleh Bunken Kenrikan Pangkalan Bun, T. Iri menyerahkan kekuasaan kepada kepala pemerintahan negeri yang diwakili oleh Pangeran Arianingrat. Pada waktu itu Sri Sultan berhalangan hadir, Pangeran Arianingrat mewakilinya (Yusuf dan Kassu, 1989: 84). Semenjak itu berakhirlah pemerintahan Jepang dengan segala tradisi militernya. Dilain pihak bagi rakyat, diserahkannya kekuasaan Jepang kepada pemerintahan Kerajaan Kotawaringin telah menyulut dukungan terhadap kemerdekaan Republik Indonesia secara lebih luas.

Tentara Sekutu di bawah pimpinan Australia tiba di Banjarmasin tanggal 17 September 1945. Tentara di bawah pimpinan Kolonel Rafson ini segera melucuti tentara Jepang dan menjadikan mereka tawanan perang. Kesibukan tentara sekutu pada waktu itu adalah mengumpulkan para tawanan perang dan mengembalikan ke Jepang. Untuk itu sehari kemudian, tanggal 18 September 1945, mereka memberangkatkan kapal dari Banjarmasin ke Kumai untuk menjemput tawanan perang yang dari daerah Kotawaringin (SKRD, 1983: 38; Yusuf dan Kassu 1989: 84). Sebelum mendarat, tentara Australia ini menyebarkan selebaran yang bunyinya sebagai berikut :

Maklumat dari Jenderal Sir Thomas Albert Blamey GBE, KCB, CMS, DCS, ED, Pemimpin Tertinggi dari Tentara Australia, kepada semua penduduk dari Borneo, Timor, Ceram, Ambon, Kai, Aru, Tanimbar, Kepulauan di Lautan Arafura, Papua Inggeris, New Britani, New Ireland, Solomons, Bouganville dan pulau-pulau dekatnya, Ocean, Naura dan kepulauan Bismarck.

Mengingat bahwa dengan adanya surat menyerah yang di tandatangani di Tokyo pada hari kedua bulan September 1945, atas perintah dan atas nama Kaisar Jepang. Pemerintah Jepang dan Pemimpin-pemimpin Umum dari Tentara Kerajaan Jepang yang disetujui oleh wakil-wakit dari Amerika Serikat, Republik Tiongkok, Kerajaan Jepang dan semua tentara Jepang dan semua tentara yang di kepalai oleh Jepang di mana saja, pada negeri-negeri Serikat tersebut di atas, dengan tidak memakai janji apa-apa. Mengingat pula, bahwa telah dikeluarkan "Perintah Umum bersama No. 1 dari tentara laut dan darat" oleh Pimpinan Umum tentara Kerajaan Jepang kepada semua kepala tentara Jepang dan semua tentara yang dikepalai oleh Jepang, supaya segera menghentikan permusuhan, meletakkan senjatanya, tinggal diam di tempatnya sekarang dan menyerah dengan tidak memakai perjanjian apa-apa pada Kepala-kepala tentara yang mewakili Negeri-negeri Serikat tersebut di atas.

Dan mengingat lagi bahwa saya Jenderal Sir Thomas Albert Blamey GBE, KCB, CMG, DSC, ED, Pemimpin Tertinggi dari Tentara Australia telah di tunjuk untuk menerima penyerahan semua tentara Jepang dan semua tentara yang di kepalai Jepang di pulau-pulau, daerah-daerah dan tempat-tempat tersebut di atas. Maka saya menyampaikan

salam dan pemberian selamat pada Tuan semua penduduk tersebut di atas, dan terutama pada semua tawanan perang dan rakyat negeri Serikat yang sekarang ada di pulau-pulau, daerah-daerah dan tempat-tempat tersebut berhubung dengan akan segera datangnya kebebasan Tuan oleh Tentara Australia. Saya memerintahkan Tuan untuk menurut maklumat-maklumat dan petunjuk petunjuk yang saya keluarkan atau dikeluarkan oleh Kepala Tentara Australia yang saya tujukan buat pulau, daerah dan tempat Tuan. Selanjutnya saya memerintahkan kepada Tuan supaya tinggal tenang tenang saja, pekerjaan Tuan sehari-hari kerjakanlah dengan baik-baik dan berdiamlah pada tempat atau rumah Tuan sekarang untuk menunggu maklumat-maklumat, perintah-perintah dan petunjuk-petunjuk dari saya atau dari wakil-wakil saya.

Tertanda pada hari kedua bulan September 1945.

Thomas Albert Blamey Pemimpin Tinggi dari Tentara Australia

(Dikutip dari Riwut 1993: 146)

Maklumat ini jika dibaca dengan seksama, sebenarnya mengisyaratkan bahwa kedatangan Tentara Sekutu di bawah Australia hanya bertugas melucuti tentara Jepang. Jika di kaitkan dengan Kemerdekaan Indonesia, maklumat itu sebenarnya mengakui kemerdekaan ini secara implisit sebab secara defakto maupun de jure di Nusantara sejak tanggal 17 Augustus 1945 telah berdiri NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dengan Ir. Soekarno sebagai presiden.

Tanggal 25 September tentara Sekutu tiba di Kumai. Dengan tanpa membuang waktu mereka segera mengangkut tentara Jepang yang sudah dilucuti senjatanya. Sehari kemudian semua tentara Jepang di angkut ke Banjarmasin. Sebenarnya tugas tentara sekutu hanya mengambil para tawanan perang Jepang sedang masalah politik bukanlah tugasnya. Tetapi karena tentara sekutu ini di tunggangi oleh tentara Belanda yang menamakan dirinya sebagai NICA, maka dengan berbagai muslihat Belanda mampu mempengaruhi komandan tentara sekutu, Kolonel Rafson untuk menyerahkan kekuasaan atas Kalimantan Selatan dan Tengah kepada pimpinan NICA Mayor AL van Assendorp (SRKD, 1983: 39). Rakyat umumnya tidak mengetahui bahwa tugas Tentara Sekutu hanyalah mengurusi tawanan perang dan mengenai pengalihan kekuasaan kepada NICA merupakan tipu muslihat Belanda. Bagi rakyat kedatangan sekutu disambut baik karena mengakhiri penderitaan mereka di bawah pendudukan Jepang. Mereka tidak tahu bahwa ada Belanda di balik tentara sekutu yang akan kembali menjajah bumi Kotawaringin.

Dalam penjelasannya Mayor Assendorp Perwira Komando NICA di Kalimantan Selatan (termasuk Kalimantan Tengah), mengemukakan, bahwa NICA adalah bagian dari tentara Sekutu di Pasifik, maka tugas NICA adalah memberi nasihat kepada komandan pendudukan, melakukan atau melaksanakan pemerintahan setempat, memberikan pertolongan kepada masyarakat setempat, mengembalikan mereka yang karena keadaan yang lewat terpaksa meninggalkan rumah tangganya dan melindungi rakyat yang telah di bebaskan agar bisa bekerja dengan aman dan tenteram.

Dengan adanya penjelasan ini maka jelaslah sudah, maksud Belanda, yakni menguasai kembali Kalimantan. Belanda memandang NICA nya sangat berkepentingan dan yang paling berhak atas wilayah Kalimantan Tengah, sebagai warisan. Belanda melarang mengibarkan bendera Sang Merah Putih di seluruh Kalimantan. Mereka juga mengatakan seusai janji Ratu Belanda bahwa tetap akan memberikan kemerdekaan secara bertahap. Tentu saja kata-kata ini adalah kata-kata bohong yang sekedar suatu siasat untuk mengelabui maksudnya yang sesungguhnya, yakni menguasai daerah ini.

Sementara itu pada hari yang sama tanggal 26 September, para pejabat Kotawaringin mengadakan rapat rahasia dengan para tokoh masyarakat, pemuda, dan kepolisian untuk membahas situasi yang tidak menentu setelah Bala tentara Jepang angkat kaki dari Bumi Indonesia khususnya Kerajaan Kotawaringin.

Hadir dalam rapat tersebut adalah :

1. Pangeran Arianingrat yang mewakili pihak Pemerintah dan golongan ningrat.
2. H. Moh. Saleh dan Ahmad Said mewakili golongan masyarakat.
3. Edris Hadiparmono yang mewakili pihak Kepolisian.
4. Ali Baderun mewakili golongan Pemuda bekas Konan Hoku Kudan dan Bo Eitai Sin Tai.
5. Gusti M. Sanusi yang mewakili golongan pemuda dan remaja bekas pasukan satuan Seinendan

Rapat tersebut telah mengambil keputusan sebagai berikut :

1. Membentuk dan menyempurnakan stuktur Organisasi serta personalia Badan Perjuangan.
2. Menentukan garis serta posisi masing-masing badan dalam perjuangan.
3. Membentuk dan menggariskan susunan pelaksana penangung jawab dalam perjuangan yaitu:

3.1. Para Pemuka: tokoh masvarakat merupakan suatu Badan Perwakilan yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam organisasi.

3.2. Pangeran Arianingrat, akan diangkat selaku Kepala Pemerintahan oleh badan tersebut.

3.3. Pelaksanaan jalannya pemerintahan dalam daerah Kerajaan Kotawaringin berdasarkan ketentuan-ketentuan dari Pemerintah Republik Indonesia.

Di akhir bulan September 1945 itu mulai tersebar pamflet-pamflet yang berbunyi: Indonesia telah merdeka dan mengajak segenap lapisan masyarakat baik pegawai, buruh, maupun golongan lain untuk bersatu menolak NICA. Pada tanggal 1 Oktober pamflet ini menyebar sampai ke pelosok Kalimantan. Pamflet-pamflet ini dicetak di Australia dan dibawa oleh Charles Foster dan Victor Little dan diperbanyak oleh Hadhariah M di Banjarmasin dan disebar kesuluruh pelosok Kalimantan.

Bagi para pemimpin Indonesia yang paham isi maklumat yang di keluarkan oleh Jendral Thomas Albert Blamey seperti telah dikutip di muka adalah dukungan bagi kemerdekaan Indonesia dari pemerintah Sekutu. Tentunya bagi NICA, maklumat ini sangat membahayakan bagi niatnya untuk kembali menjajah Indonesia. Karena itulah mereka menyiasati Jendral Thomas Albert Blamey agar mengeluarkan pernyataan bahwa pihak Sekutu menyerahkan wilayah nusantara kepada pihak NICA. Maka tanggal satu Oktober 1945 pimpinan tertinggi Australia ini mengeluarkan proklamasi yang isinya sebagai berikut :

Proklamasi

General Sir Thomas Albert Blamey CBE, KCB, CMG, DSC, ED Commander in Chief Australian Military. Kepada: Penduduk Timor, Selebes, Menado, Borneo, Residensi Ternate, Afdeeling Amboina, Pulu - Kai -, Aru -, dan Tanimbar, Niew Gunea.

Tentara Serikat telah membinasakan segala kekuasaan Jepang baik di darat, di laut, di udara,dan Kerajaan dan bangsa Jepang telah menyerahkan diri dengan tidak ada perjanjian apapun kepada kaum Serikat. Angkatan-angkatan di bawah perintah Sir Thomas Albert Blamey telah tiba di negeri tuan dan telah menerima penyerahan tentara Jepang atas nama kaum Sekutu.

Mereka akan melindungi penduduk dan akan menjaga keamanan sampai waktu kembalinya pemerintahan Hindia Belanda yang sah.

Atas perintah Sir Thomas Albert Blamey, pemimpin Agung kekuatan Serikat di bahagian ini, maka Undang-undang Hindia-Belanda yang telah diketahui oleh tuan-tuan, akan dipakai dan dijalankan oleh Opsir-opsir Nederlandsch Indische Civiele Administratie (NICA) yang sekarang berada di daerah tuan-tuan, demikian juga segala peraturan yang dikeluarkan oleh pemimpin Agung Tentara Serikat untuk menjaga keamanan dan keterikatan.

Bertanda tangan hari Sabtu bulan Oktober 1945 Thomas Blamey

Pemimpin Tertinggi dari Tentara Australia.

Dikutip dari Riwut (1993: 147-148)

Dengan proklamasi ini maka NICA mengklaim bahwa secara yuridis, dalam soal menduduki Indonesia, mereka benar. Dengan dasar proklamasi Jendral Blamey ini NICA memperkokoh kedudukannya di Kalimantan dengan mengangkat seorang Residen di Banjarmasin dan dua kontrolir di Sampit dan Pangkalan Bun. Dengan demikian praktis semua kota penting yang ada di Kalimantan Tengah kembali di bawah kaki penjajah Belanda (SRKD, 1983: 39-40).

Walaupun maklumat ini bertanggal 1 Oktober, NICA baru mengumumkan pada tanggal 24 Oktober. Ini mereka ingin mengelabui Rakyat Kalimantan agar mendapatkan simpati terlebih dahulu dari rakyat. Tentara Australia sendiri setelah melucuti para tawanan perang dan mengirim para tawanan perang tadi ke Jepang, mereka menarik diri dari berbagai penjuru di Kalimantan untuk kembali ke Balikpapan, markas besar mereka di Kalimantan, dan sebelum kembali ke negaranya (Riwut, 1993: 144). Selanjutnya dari Balikpapan datang 10 kompi ke

Banjarmasin dan kompi-kompi lain mencoba memasuki Kotawaringin. Kedatangan NICA di Kotawaringin Barat tidaklah dengan mudah dapat menduduki daerah ini. Perlawanan luar biasa dari rakyat dan para pejuang yang pantang menyerah mengakibatkan gugurnya banyak jiwa di pihak NICA. Pertempuran di beberapa kota akan dituturkan di bagian belakang bab ini.

Pada tanggal 12 Oktober 1945 hari Jum'at, Abdullah Mahmud seorang tokoh Politik, aktivis Bapperis dan seorang pengusaha yang selama pendudukan Jepang bermukim di Jawa, tiba di Kumai dengan menumpang sebuah perahu Layar. Abdullad Mahmud adalah Putra Daerah Kotawaringin yang pertama-tama menerima tugas perjuangan dari Pemerintah Indonesia. Kedatangannya selain mengabarkan pesan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, dia juga membawa banyak surat kabar terbitan Jakarta, Yogyakarta, dan Semarang yang memuat tentang proklamasi itu (Yusuf dan Kassu, 1989: 90).

4.2. KPRIM dan AM.

Pada tanggal 14 Oktober 1945 hari Minggu di Kumai dengan mengambil tempat di halaman Mesjid Jami di langsungkan rapat raksasa yang di hadiri oleh semua penduduk dari segala lapisan. Di dalam rapat raksasa yang di isi dengan berbagai orasi politik para tokoh masyarakat seperti Abdulkadir Ijap, lebih dikenal dengan sebutan Anang Kader, Abdul Mahmud, dan para tokoh lainnya, telah diputuskan untuk mendirikan secara resmi KPRIM (Komite Penyokong Republik Indonesia Merdeka) dan barisan AM (Angkatan Muda) dibentuk dan bermarkas di

1. KPRIM menempati rumah Bapak Busrah.
2. AM menempati gedung Sekolah lama.

Pada hari itu juga pengurus KPRIM dan AM yang baru saja dibentuk mengutus 4 orang anggota AM ke Pangkalan Bun. kesemuanva memasang Lencana "MERAH PUTIH" di dada kiri dengan maksud untuk menghadap Sultan Kotawaringin untuk mendapatkan kepastian atau ketegasan apakah beliau mendukung Republik Indonesia yang sudah di Proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 atau tidak.

Melalui utusan tadi seluruh penduduk Kumai selain menyatakan diri mendukung dan sanggup berkorban harta dan jiwa untuk membela Kemerdekaan itu, juga mengharap agar Sri Sultan pun secara keseluruhannya menyatakan Daerah Kotawaringin masuk kedalam kekuasaan Republik Indonesia (Yusuf dan Kassu, 1989: 91-92). Tetapi seperti telah di tuturkan di muka mereka tidak berhasil menemui Sultan dan akhirnya menemui Pangeran Arianingrat.

Sekali lagi Pada tanggal 15 Oktober 1945 hari Senin, di Kumai KPRIM memutuskan untuk mengadakan demontrasi ke Pangkalan Bun.Yang dilakukan oleh anggota Angkatan Muda, kaum Jenggot ; dipimpin sendiri oleh Ketua KPRIM Bapak Abdul kadir Ijap, Abdul Karim Busrah dengan maksud, bahwa Kumai dan penduduknya sudah bertekad bulat berdiri di belakang Bung Karno dan Bung Hatta, dan siap berkorban untuk mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia. Pimpinan dan semua peserta demonstrasi di terima kembali oleh Pangeran Arianingrat.

Pada tanggal 16 Oktober 1945 malam bertempat di rumah kediaman Abdullah Mahmud Kampung Mendawai Pangkalan Bun, diadakan rapat yang dihadiri oleh 33 orang. dari para Tokoh Masyarakat dan Pemerintah. golongan pemuda, rapat diadakan atas inisiatif dan undangan dari Abdullah Mahmud sendiri. Rapat ini dimaksudkan untuk menjelaskan situasi dan kondisi setelah Balatentara Jepang meninggalkan Indonesia, dan telah di umumkannya Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 oleh Bung Karno dan Bung Hatta di Jakarta. Pada pertemuan itu di sepakati pendirian Badan yang mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Badan ini bernama "KPRIM" (Komite Penyokong Republik Indonesia Merdeka). Dengan pengurus sebagai berikut :

Ketua	:	H Moh Saleh
Wkl Ketua	:	Ahmad Anwar.
Penulis I	:	Ahmad Said
Penulis II	:	Amir Husin Mahmud
Bendahara	:	H Husin Hasbullah
Pembantu-pembantu	:	1.Abdussyukur
		2. H. Moh Daud
		3. Asmoyo
		4. Ismail Samad
		5. Salman H.M Rais
		6. Uli Kader
		7. Tengku Usman
		8. Tengku Ali.
		9. M. Edris Hadiparmono.

Pada tanggal 17 Oktober 1945 semua pengurus KPRIM bersama-sama menghadap Pangeran Arianingrat, selaku Kepala Distrik Pangkalan Bun yang di anggap mewakili Kerajaan Kotawaringin. Pada waktu itu Kotawaringin Barat dalam keadaan vakum kekuasaan di mana Jepang sudah pergi, NICA belum datang dan Sultan masih ragu-ragu untuk menyatakan berada di belakang Republik Indonesia. (Yusus dan Kassu, 1989: 96). Tujuan menghadap ke Pangeran Arianingrat ini untuk memberitahukan bahwa telah terbentuk KPRIM di Kotawaringin. Pertemuan tadi di lanjutkan dengan upacara bendera. Pada hari itu juga Pangeran Arianingrat mengeluarkan surat penunjukan rumah dinas kontrolir menjadi kantor KPRIM dan Markas Angkatan Muda di Pangkalan Bun.

Pada tanggal 19 Oktober 1945 di Pangkalan Bun dibentuk organisasi Angkatan Muda (AM) yang terdiri dari bekas anggota Hoku Kudan/ Bo Ei Tai Sin Tai dan sebagian lagi anggota Seinendan. Ketua AM adalah M. Edris Hadiparmono, Komandan Polisi di Pangkalan Bun. Sedang untuk luar kota di harapkan selambatnya tanggal 10 November telah terbentuk ranting AM. Segera setelah itu di berbagai kota di Kotawaringin di bentuk AM (Yusuf dan Kassu 1989: 98).

Sejak Jepang angkat kaki dari Pangkalan Bun banyak muncul rapat akbar yang mengumpulkan rakyat untuk memberi penjelasan tentang kemerdekaan RI. Di Pangkalan Bun sebagai kota terbesar dan pusat pemerintahan rapat raksasa yang di hadiri lebih dari 2.000 orang di adakan tanggal 19 Oktober dengan pembicara Abdullah Mahmud yang menjelaskan tentang kemerdekaan RI. Tiga hari kemudian di adakan rapat lagi dengan pengunjung yang lebih banyak 2.500 orang. Pangeran Arianingrat menegaskan bahwa tidak ada pilihan lain bagi Kotawaringin kecuali berdiri di belakang RI (Yusuf dan Kassu 1989: 99).

Pada tanggal 20 Oktober, sehari setelah rapat raksasa di atas, Kotawaringin membentuk Dewan Perwakilan sendiri. Satu Dewan yang telah terbentuk pada tanggal 20 Oktober 1948. Rakyat Kotawaringin dan sekitarnya dengan suara bulat, melalui Dewan tersebut menyerukan, hanya ingin menggabungkan diri dengan Pemerintah Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta. Pernyataan ini telah membuka jalan baru bagi kerajaan Kotawaringin untuk mengirimkan seorang wakil di Parlemen, yang bernama Ibrahim Sedar. Di masa itu, status Kerajaan Kotawaringin hilang. Sultan tidak ada lagi yang memerintah. Daerah bekas kerajaan Kotawaringin, pemerintahan dilanjutkan dasai Zelfbesturregelin. 1938/staadsblad 1938 No. 529. Untuk itu pemerintahan di jalankan oleh Bestuur Commissie. Bestuur Commissie bekerja sama dengan Dewan Kotawaringin dan telah berakhir pada tanggal 2 Mei 1950, pada waktu resminya penggabungan dengan pemerintahan Republik Indonesia oleh Dr. Murjani selaku Gubernur Kalimantan (Lontaan dan Sanusi, 1976: 53-54)

Karena keragu-raguan Sultan bergabung dengan RI, maka pada tanggal 12 November 1945 KPRIM segera melantik Pangeran Ariningrat sebagai Kepala Pemerintahan RI di Kotawaringin. Disamping itu juga di lantik Mas Oemarhan bekas kepala onderdistrict Sukamara menjadi kepala district Pangkalan Bun, menggantikan Pangeran Arianingrat (Yusuf dan Kassu, 1989: 106). Baru sebulan kemudian ketika di adakan Rapat Raksasa di Pangkalan Bun untuk menghasilkan mosi dukungan kepada pemerintah RI, Sultan Pangeran Anum Kesuma Alamsyah hadir di tengah-tengah para pemimpin dan pengurus KPRIM dan AM (Yusuf dan Kassu, 1989: 121).

Untuk menyesuaikan diri dengan pemerintah pusat dan cara kerja yang lebih efisien, maka pada tanggal 16 Desember 1945 KPRIM diubah menjadi KNI (Komite Nasional Indonesia). Selain itu dibentuk organisasi-organisasi baru untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Organisasi baru tadi adalah TKR (Tentara Keamanan Rakyat) dengan ketua Edris Hadiparmono, kemudian juga dibentuk PMI (Palang Merah Indonesia) denga ketua Asnawi. Untuk organisasi kewanitaan dibentuk Perwani (Persatuan Wanita Indonesia) dengan ketua A Muthie dan Perwari (Persatuan Wanita Republik Indonesia) dengan Ketua Ratu Radiah. Untuk menunjang peperangan melawan NICA yang sudah semakin mengancam maka dibentuk pula Badan pelaksana Dapur Umum yang diselenggarakan oleh Perwani dan Perwari. Selain itu juga dibentuk Badan Penyelidik sebagai satu strategi perjuangan. Dan terakhir adalah membentuk Badan Penyiar Penerangan dan Propaganda yang dipimpin oleh Machrus Effendi (Yusuf dan Kassu, 1989: 124-125).

Pada tanggal 17 Desember 1945 hari Senin di adakan lagi Rapat Raksasa di Pangkalan Bun rapat ini di maksudkan untuk mempertegas tekad Rakyat Kotawaringin mendukung RI. Dukungan tadi juga dilakukan bukan hanya oleh rakyat tetapi juga oleh Kerajaan Kotawaringin yang berada di dalam wilayah RI. Dukungan kerajaan ini diperlihatkan dengan hadirnya Sultan Pangeran Anum Kesuma Alamsyah dan Permaisuri. Tekad tadi dinyatakan dalam bentuk Mosi

4.3. Gerombolan Tentara Burung Desa

Kembali ke tanggal 27 September 1945 hari Kamis. diterima laporan dari Kepala Onderdistrict Sukamara. bahwa ada suatu gerakan gerombolan pengacau yang bernama Tentara Burung Desa berasal dari Daerah Kalimantan Barat, yang akan menyerang Kota Sukamara dari Sungai Jelai.

Pada tanggal 28 September 1945 hari Jumat. Kepala Onderdistrict Sukamara Mas Oemarhan bersama keluarga melarikan diri ke Pangkalan Bun, sekaligus melapor kan bahwa pada tanggal 27 September 1945 diterima berita dari Kampung Manismata di Kalimantan Barat, bahwa Tentara Burung Desa sudah berada di Manismata, hari ini 28 September 194S akan tiba di Sukamara, dengan jumlah anggota pasukannya yang besar, dipimpin oleh Luput Panglima Kalam, dan sebagai pimpinan umum nya seorang Perempuan Tua bernama Raden Semah berumur kurang lebih 60 tahun. Raden Semah, berasal dari sebuah dusun bernama Bulan Terbit termasuk dalam wilayah Kampung Asam Buah di Sungai Jelai, sekarang termasuk dalam Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat. Sebagaimana kedatangan Tentara Burung Desa ini di kampung-kampung lain, ialah mencari dan membunuh orang-orang Jepang, pegawai Jepang, polisi dan merampas barang-barang yang mereka anggap adalah kepunyaan Jepang.

Pada tanggal 28 September 1945 hari Jumat, gerombolan Tentara Burung Desa tiba di Sukaramai dari Kalimantan Barat. Mereka merampas barang-barang inventaris milik Kumiai di Kampung Sukamara. Gerombolan ini berkekuatan kurang lebih 30 orang anggota. Tidak berapa lama mereka di Sukaramai, terus menyeberang ke Sukamara, langsung menuju Kantor Fuku Guncho membongkar peti besi yang kebetulan dalam keadaan kosong, kemudian mereka menuju Kantor Douane di Kantor ini mereka membongkar peti dengan cara paksa yaitu mempergunakan kapak.

Operasi gerombolan atas kedua Kantor Pemerintah ini dipimpin oleh Gusti Tendo dan Gusti Bantut, penduduk asal Manismata. Gerombolan ini menamakan dirinya Tentara Burung Desa karena semua anggota dan pimpinannya adalah orang-orang Desa di Pedalaman Kalimantan Barat, dan mereka menggunakan tanda yaitu bulu-bulu Burung dan daun andung yang di pasang di Kepala masing-masing. Sesampainya gerombolan ini di Sukamara terus menghambur propaganda untuk menakutkan rakyat, bahwa Raden Semah pimpinan mereka itu, adalah orang sakti yang memelihara seekor kucing sakti yang tahu dengan segala berita. Propaganda ini termakan oleh sebagian rakyat, maka banyaklah orang yang datang kepadanya untuk minta ampun dan sebagainya sampai ada

yang menyembah-nyembah agar tidak ditangkap dan dihukum oleh gerombolan ini.

Pada tanggal 29 September 1945 hari Sabtu, diterima lagi berita dari Nanga Bulik, adanya gerombolan Tentara Burung Desa yang sekarang sedang berada di Kudangan Sungai Delang telah melakukan perampokan kepada harta benda penduduk, membunuh ternak peliharaan. Gerombolan ini dengan seorang pimpinan serta kurang lebih 200 orang anggotanya, bersenjatakan mandau.

Bahwa gerombolan tersebut akan menyerang Kota Nanga Bulik terus ke Pangkalan Bun.

Pada tanggal 6 Oktober 1945 hari Sabtu, Kepala Pemerintahan Negeri di Pangkalan Bun mengeluarkan instruksi yang ditujukan kepada semua Kepala Onderdistrict agar secepatnya melakukan persiapan dengan mengorganisir pemuda dan rakyat untuk menyangga dan mengadakan perlawanan itu serangan gangguan dari gerombolan Tentara Burung Desa, dan segera mengadakan penyelidikan tentang kekuatan gerombolan tersebut, baik personil maupun persenjataan.

Akhirnya pada tanggal 22 Oktober Pemerintah di Pangkalan Bun menugaskan kepada Moh Sabri, Ali Baderun, Gusti Abdulah, dan Anang Mas Alipa dari AM dan KPRIM untuk berangkat ke Sukamara guna menangkap pimpinan dan anggotan tentara Burung yang telah mengadakan serentetan kekacauan termasuk perampokan di kota ini. Selain itu mereka bertugas untuk membentuk pengurus Komite Penyokong Republik Indonesia Merdeka (KPRIM) ranting Sukamara, dan pengurus Angkatan Muda.

Pada hari itu juga dengan mengambil rute yang terpisah utusan ini berangkat ke Sukamara dengan rute sebagai berikut : I. Moh. Sabri dan Gusti Abdullah, melalui Lunci terus ke Sukamara, dengan membawa 1 Pasukan Angkatan Muda yang berkekuatan 40 orang.

Pada tanggal 23 Oktober 1945 hari Senin, jam 05.00 pasukan yang dipimpin Ali Baderun dan Anang Mas Alipandi memasuki Kota Sukamara, langsung memblokir tempat-tempat yang biasa dan tetap dijadikan tempat perjudian, tetapi tidak berhasil, karena anggota gerombolan sebelum pasukan Angkatan Muda tiba, lebih dahulu sudah menyingkir ke Sukaramai, dan sebagian sudah ada yang kembali ke Hulu Jelai. Mereka kemudian mengadakan Pawai di sepanjang jalan Sukamara.

Panglima Luput sendiri, karena malam itu ia menginap ditempat Kepala Kampung Kiai Matles; maka lepas dari kepungan; melarikan diri ke Sukaramai langsung mudik ke Hulu Sungai Jelai. Adapun Gusti Tendo dan Gusti Bantut, anggota gerombolan berangkat ke Pangkalan Bun mengambil rute Sukaraja - Kotawaringin Lama. Di Kotawaringin Lama Mereka berhasil di bujuk oleh Gusti Dumai Anas untuk menyerah dan keduanya di bawa ke Pangkalan Bun. Luput sang panglima tentara burung baru menyerah tanggal 17 Nopember 1945 kepada AM di Sukamara dan kemudian di bawa ke Pangkalan Bun. Konon setelah bertemu dengan Pangeran Arianingrat dan para tokoh KPRIM panglima tentara

burung insaf dan berjanji mendukung RI. Sang Panglima akhirnya tidak di hukum malah kembali ke Sukamara bersama dengan M Yusuf ketua AM Sukamara dan wakilnya Anang Jumra (Yusuf dan Kassu, 1989: 113)

Sehari kemudian tanggal 23 Oktober Moh Sabri menemui Jebbar Martotejo untuk membentuk KPRIM. Dua hari kemudian, tanggal 25 Oktober di kantor Kepala Onderdistrict Sukamara di resmikanlah KPRIM ranting Sukamara dengan pimpinan Jebbar Martorejo. Kemudian di bentuk juga AM dengan ketua Moh Yusuf. Sebelum rapat di mulai di adakan upacara bendera yang dipimpin oleh Ali Baderun. Sedang lagu kebangsaan yang juga dinyanyikan dipimpin oleh Iskandar guru Volkschool di Sukamara yang juga wakil pimpinan AM (Yusuf dan Kassu 1989: 102-105).

Setelah gerombolan pasukan burung di Sukamara dapat dibubarkan, pada tanggal 28 November 1945 ada lagi tentara burung yang menyerang Nanga Bulik dengan jumlah pasukan yang besar seperti di sebutkan di muka. Secepat kilat ketua KPRIM dan AM Nanga Bulik mengadakan rapat untuk menghadapi serangan pengacau ini. Pada tanggal 29 November komandan AM Nanga Bulik dan barisan Jenggot membawa 100 orang pasukan untuk menghadang tentara Burung di Tapin Bini. Kemudian Pasukan ini ditambah pula dengan pasukan AM dari Kotawaringin Lama, Kampung Batu Kotam, Sungai Bunut, dan Sungai Mentawa. Berkat kesiapan AM Nangabulik dan dibantu dengan AM Kotawaringin Lama tentara burung ini dapat di halau.

Serangan tentara burung ini sebenarnya adalah akibat dari kurangnya informasi karena Jepang menutup informasi kepada rakyat tentang apa saja yang terjadi di dunia luar. Jika dilihat dari arah serangan tentara burung yang pertama adalah markas tentara Jepang, barangkali menjadi bagian dari balas dendam karena selama penjajah Jepang seluruh pendudik Kalimantan tidak peduli sukunya mengalami penderitaan yang mendalam. Menurut Tjilik Riwut (1993: 155). Jepang antara tahun 1943-1945 banyak melakukan pembunuhan di Kalimantan Barat. Akibatnya banyak gerombolan-gerombolan yang memberontak. Pemberontakan ini dilakukan di sepanjang pesisir Utara hingga ke Selatan, membujur ke Timur arah pedalaman Kalimantan Barat dari Ngabang hingga Kapuas hulu. Gerombolan ini dinamai tentara Burung Desa seperti yang menyerang Sukamara dan Nanga Bulik.

4.4. Pertempuran dengan NICA.

Semenjak tentara Jepang yang terakhir diangkut dari Kumai 25 September 1945, para pemuda dan pemimpin di Kotawaringin Barat mulai sadar bahwa perang dengan Belanda yang akan kembali menjajah sudah dekat. Maka dari mereka bersiap-siap untuk menghadapinya baik melalui pembentukan organisasi-organisasi seperti di jelaskan di muka juga dengan persiapan fisik.

Pihak Belanda memang mencoba merapat di Kumai tanggal 15 Nopember 1945 dengan sebuah Kapal Niaga dengan membawa 10 orang Belanda yang terdiri dari 8 orang militer dan 1 orang Komandan dengan seorang pimpinan

rombongannya bekas kontrolir Onderafdeeling Beron Bulongan, pada masa pemerintahan Hindia Belanda bernama Van Der Vloch. Meraka dilarang turun dari Kapal sedang di luar Pelabuhan masa yang mengetahui bahwa ada orang-orang Belanda akan mendarat langsung berkumpul untuk menentang orang-orang Belanda ini. Dari pihak masa, muncul ketua KNI Kumai naik ke kapal untuk melakukan pembicaraan. Ternyata diketahui bahwa rombongan Belanda ini ingin bertemu dengan Sultan untuk mengajak kerjasama dalam hal pemerintahan di Kotawaringin. Tentu saja ditolak oleh pihak KNI Kumai dengan mengatakan bahwa Kotawaringin bukan berada di bawah kesultanan tetapi Pemerintah Republik Indonesia. Akhirnya setelah melalui perundingan yang cukup alot Van Der Vloch di perkenankan bertemu sendirian dengan Pangeran Arianingrat dan beberapa pemimpin di Pangkalan Bun. Dengan tegas Pangeran Arianingrat mengatakan hal yang sama bahwa Kotawaringin sudah masuk ke RI dan menolak kehadiran Belanda. Van Der Vloch dengan kecewa kembali ke kapal dan meninggalkan Kotawaringin. Dari peristiwa ini Belanda sadar bahwa untuk kembali ke Kotawaringin akan membutuhkan pasukan besar dan harus melalui pertempuran yang hebat (Yusus dan Kassu, 1989 107-109)..

Di lain pihak, para pimpinan Kotawaringin sadar bahwa cepat atau lambat Belanda dengan NICA nya akan menyerang Kotawaringin dan akan terjadi pertempuran besar. Karena itu mereka tidak mau kehilangan waktu untuk mempersiapkan perang. Pada tanggal 1 Januari l946 hari Selasa pada jam 09.00 para Pemuda yang telah diterima menjadi anggota TKR (Tentara Keamanan Rakyat) berjumlah 75 orang memasuki asrama/Markas yang menempati bekas kantor Markas KNI Cabang Pangkalan Bun dan Angkatan Muda. Mereka yang diterima berasal dari, kota Pangkalan Bun, Kotawaringin Lama, Sukamara, Nanga Bulik, dan dari Pedalaman yaitu dari Sungai Belantikan. Sedang di Kumai juga di bentuk pasukan TKR sendiri (Yusuf. Dan Kassu, 1989: 139).

Keadaan di Kalimantan menjadi bertambah genting tatkala terdengar kabar bahwa pada tanggal 4 Januari 1946 Pemerintah Republik Indonesia terpaksa pindah dari Jakarta ke Yogyakarta. Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, para menteri kabinet, dan para gubernur pindah ke Yogyakarta. Dengan demikian Gubernur Borneo pertama beserta staff nya juga pindah ke Yogyakarta (Suseno, 1996: 7).

Kegentingan di Kalimantan itu terlihat antara lain di Pangkalan Bun. Pada tanggal 8 Januari 1946 pukul sembilan pagi tiba-tiba muncul pesawat terbang Belanda yang terbang rendah sekali mengelilingi kota. Setelah pesawat tadi sempat membuat panik tentara TKR yang sedang berlatih di lapangan bola yang kemudian menjadi lapangan tugu, terus terbang ke arah Utara. Sejak saat itu hingga tanggal 13 Januari 1946 setiap pagi datang pesawat Belanda yang memutar-mutar di daerah Kotawaringin untuk mengintai, dan barangkali juga untuk menakut-nakuti rakyat yang waktu itu sedang bersiap-siap menghadapi Belanda. Tetapi tingkah laku Belanda tadi bukannya membuat takut para pejuang kita tetapi justru menambah semangat untuk berlatih.

NICA yang selama kurang lebih seminggu mengintai pihak Indonesia di Kotawaringin, akhirnya pada tanggal 14 Januari 1946 benar-benar melakukan penyerangan ke Kumai sebagai kota pelabuhan terbesar di Kotawaringin. Tentara NICA yang berkekuatan 250 tentara itu datang dengan lima buah kapal. Tetapi kedatangan NICA ini telah tercium lebih dulu oleh para pejuang kita sehingga disana telah siap hampir semua pasukan di daerah Kotawaringin. Pasukan pejuang itu adalah sebagai berikut.

1. Pasukan TKR. dari Pangkalan Bu'un di pimpin M. Edris Hadiparmono.
2. Pasukan TKR. dari Kumai di bawah pimpinan H. Abd. Azis.
3. Pasukan Angkatan Muda dari Pangkalan Bu'un di pimpin Gusti Abdullah.
4. Pasukan Angkatan Muda dari Kumai di pimpin oleh Said Alie.
5. Barisan Jenggot dari Kumai di pimpin oleh Panglima Utar, Bagong, H. Djeprie dan H. Edris.

Pertempuran di Kumai ini tidak hanya melibatkan para tentara dan AM saja tetapi semua penduduk Kumai tergerak untuk melawan NICA. Perlawanan ini dipicu oleh kesadaran bahwa mereka tidak ingin tempat tinggalnya, kotanya dirusak musuh. Karena besarnya kekuatan dari pihak Indonesia dan pihak NICA, maka banyak pula yang gugur. Pada pertempuran di Kumai ini ada seorang pejuang bernama Panglima Utar, yang terkenal mampu membunuh berpuluh-puluh tentara Belanda dengan senjata Mandau (Lontaan dan Sanusi 1976: 81). Di pihak Indonesia telah gugur 18 orang, sedang pihak NICA gugur 50 orang. Pasukan NICA berkali-kali berteriak agar para pejuang menyerah, tetapi yang di dapat justru perlawanan sengit dengan senjata tradisional dan senapan dum-duman yang berisi satu peluru.

Karena persenjataan para pejuang Indonesia dan rakyat Kumai yang sederhana, akhirnya mereka terpukul mundur. Kumai dalam waktu sehari di duduki oleh NICA yang kemudian meneruskan serangannya ke Pangkalan Bun. Tentara NICA tadi menurut para pejuang yang ditemui di lokasi sebagian besar bukan bangsa Belanda tetapi justru orang Indonesia baik yang berasal dari Jawa, Ambon, maupun Menado yang berpihak ke Belanda. Sebaliknya warga Kumai, anggota TKR, maupun AM, juga terdiri dari beberapa suku mulai Banjar, Melayu, Jawa, Dayak, Tionghoa, dan Madura bersama-sama mempertahankan kotanya dari kebiadaban NICA.

(...)Kurang lebih seperempat jam kami berjalan Bandau cahaya masih ada sehingga tidak Iama kemudian dari pada itu, nampak Gedung Sekolah Volksschool satu-satunya yang ada di Kumai waktu itu.

Untuk menyeberangi jalan besar rasanya belum mungkin karena di seberang sana agak lapang, sehingga kami menelusuri terus tepi jalan itu, untuk mencari tempat yang aman untuk menyeberang.

Dalam suasana mulai gelap saya meminta kepada saudara Ahmad Suhud untuk sebentar keluar ketepi jalan besar, kalau-kalau sekitar sini masih ada penjaga atau Patroli dari Tentara NICA.

Saudara Ahmad Suhudpun tiada berapa detik berdiri ditepi jaIan dari kejauhan nampak olehnya nyala kecil rokok, secara perlahan ia memangail saya untuk mengetahui benar tidaknya penglihatannya itu, sayapun mendekati dan benarlah kira kira dalam jarak 50 meter dari kami, ada api kecil yang tak lain adalah api rokok, dan ini tidak disangsikan lagi pasti serdadu-serdadu Belanda yang melakukan tugas jaga atau Patroli, karena dalam keadaan begini dimana manusia sudah dicekam oleh ketakutkan, tak mungkin berdiri atau ada di tempat itu

Kami tunggu untuk beberapa saat dan masuk lagi ke tepi jalan tempat kami semula, kalau-kalau ada lampu sorot dari mereka (...) (Yusuf dan Kassu 1989: 149))

Selain itu Azhar Mukhtas juga menceritakan suasana pelarian malam itu sebagai berikut:

(...)Kemudian setelah kami sama-sama duduk di samping beberapa buah kuburan, saudara Yong Cuy menerangkan. bahwa persiapan Truk yang di kemudikannya tiba di Candi. Serdadu Belanda pun datang, semua penumpang yang terdiri dari anggota TKR ditangkap kami bertiga sempat lolos, dan ini kunci kontak saya bawa lari.

Adapun Pak Ibrahim ikut di Truk itu dan waktu ia mendengar ada suara tembakan ia terjun lebih dahulu sedangkan senjata bambu runcingnya masih dibawanya.

Menurut Pak Ibrahim kurang lebih 200 meter di sebelah Barat dari lokasi kuburan ini ia dengan beberapa orang kawannya sama-sama Angkatan Muda, melemparkan barnbu runcing kepunyaannya pada saat Kompi Belanda lewat dari Kumai ke Pangkalan Bun, tetapi sayang hanya kena Jipnya saja, kemudian pasukan Belanda yang ada di Jip itu men~hujani mereka dengan tembakan, hingga ia berpisah dengan kawan-kawannya yang akhirnya ia sampai di kuburan ini, sedangkan yang lainnya tidak diketahui lagi.

Setelah beberapa lama kami berbincang-bincang ditempat ini mengenai masalah pertempuran siang tadi, maka saya pun menanyakan kepada saudara Bagong, kemana lagi tujuan kita karena perut terasa lapar sekali. sedangkan hujan gerimis sudah berhenti (...) (Yusuf dan Kassu, 1989: 151).

Dengan Jatuhnya Kumai dan Pangkalan Bun pihak pejuang kemerdekaan harus mengundurkan diri ke Kotawaringin Lama. Setelah tentara NICA menduduki kota Kumai dan Pangkalan Bu'un, mereka menangkapi dan memenjarakan tokoh tokoh masyarakat, dan pemerintahan/pimpinan KNI. Para tahanan diperlakukan secara tidak wajar, di luar peri kemanusiaan. Mereka di siksa. Mendengar berita ini GA. Ramidhan Kepala Onderdistrik Nanga Bulik dengan beberapa anggotanya milir ke Pangkalan Bu'un. Kesemuanya dengan tak tahu menahu masuk perangkap tahanan kota pula. Tetapi para pejuang tidak mau menyerah dan berdiam diri. Kesatuan TKR. dan Angkatan Muda Pangkalan Bu'un, banyak melarikan diri ke Kotawaringin Lama. Mereka menyusun siasat gerilya dari kota ini.

Pada tanggal 18 Januari 1946 setelah sholat Jumat, para pejuang di bawah pimpinan E Edris yang melarikan diri dari Kumai dan Pangkalan Bun mengusulkan kepada AM Kotawaringin Lama agar benteng yang pernah dibuat di Punjung guna

menghalau pasukan tentara burung beberapa waktu yang lalu agar diperkuat guna menahan pasukan Belanda. Pada tanggal 21 Januari 1946, tatkala para pejuang ini sibuk memperkuat benteng di Punjung secara mendadak Belanda menyerang Kotawaringin Lama dengan menumpang KM Sekayung. Karena para Pejuang masih di Punjung, dengan waktu singkat Belanda dapat menguasai Kotawaringin Lama. Mereka berhasil menangkapi beberapa pejuang untuk dibawa ke Pangkalan Bun. Sore harinya Belanda kembali ke Pangkalan Bun. Mereka tidak menduduki kota ini tetapi mengangkat Kyai Kundai sebagai kepala kampung Kotawaringin Lama dan Sanusi sebagai wakilnya (Yussuf dan Kassu, 1989: 174). Sehari kemudian Pasukan TKR pimpinan M Edris meninggalkan Kotawaringin Lama menuju ke Sukamara.

Pada tanggal 25 Januari 1946 tentara NICA datang ke Sukaramai, kampung yang berseberangan sungai dengan Sukamara. Di Sukaramai ini NICA dengan kekuatan 24 orang membakari rumah-rumah penduduk yang dianggap tempat persembunyian para geriyawan Merah Putih. Dari Sukaramai mereka menyeberang ke Sukamara.

Pasukan Angkatan Muda Sukamara, telah memasang rintangan-rintangan di muara sungai Berupa kawat kawat baja yang melintang, menghalangi setiap lalu lintas sungai Jelai. Pasukan Angkatan Mudapun telah siap siaga, menghadang setiap kedatangan musuh di daerahnya. Mereka menungggu pasukan NICA disuatu tempat yang strategis untuk menghadang dan menjebak mereka. Pasukan Angkatan Muda di bawah pimpinan M. Yusuf terbagi beberapa kelompok dengan komandannya Achmad Utoch, Iskandar dan lain-lain. Rintangan-rintangan yang di buatnya itu berhasil menjebak tentara NICA. Semua sampan/perahu yang ditumpangi tentara NICA, sangkut terhenti dan melintang dalam posisi siap ditembak. Kesempatan ini tidak di sia-siakan pasukan Angkatan Muda pimpinan M. Yusuf. Angkatan Muda segera menembaki sasarannya, sumpitpun tak kalah juga menyengat tentara NICA yang telah panik. Sampan-sampannya terbalik masuk air. Tentara NICA membalas dengan tembakan balasan, tapi sia-sia belaka. Dari pertempuran hari itu banyak anggota pasukan NICA yang terkena sumpitan. Tetapi karena pihak NICA memiliki seorang mata-mata Mat Aban, seorang penduduk pribumi yang berkhianat kepada bangsanya, akhirnya segala racun dari sumpitan bisa ditawarkan dan NICA bisa menyeberang dan mendarat di Sukamara. Dengan senjata otomatisnya NICA dapat menghalau pasukan dan rakyat Sukamara. NICA memasuki Sukamara dan menangkap penghulu H. Bakri. Sebelum meninggalkan Sukamara mereka membakari rumah-rumah penduduk. Dari Sukamara NICA menyusuri sungai menuju Kuala Jelai.

Rombongan TKR M. Edris yang datang dari Kotawaringin Lama sampai di Sukamara pada saat NICA sudah berangkat ke Kuala Jelai. Dengan diantar oleh AM Sukamara mereka menyusul ke Kuala Jelai untuk membantu AM disana yang akan menghadapi NICA. Tetapi mereka kemudian mengurungkan niatnya dan bermalam di pulau Nibung. Pasukan M. Edris melanjutkan perjalanannya kehulu Sungai Bengaris dan mendirikan markas pejuang di situ (Yusuf dan Kassu, 1989: 184). M. Edris memilih Sungai Bengaris sebagai markasnya karena letaknya yang

strategis untuk menyerang Kumai dan Pangkalan Bun, serta banyaknya landang ubi disitu yang dapat menjadi cadangan pangan selama menunggu pasukan bantuan dari Jawa yang konon akan datang di bawah pimpinan Husin Hamzah. Kelanjutan perjuangan pasukan M. Edris akan dilanjutkan di belakang.

Sebenarnya pada tanggal 26 Januari 1946 di Kuala Jelai telah terjadi pertempuran yang hebat. Di Kuala Jelai pun pertempuran di akhiri dengan perampokan dan pembakaran rumah-rumah penduduk seperti di Kotawaringin Lama dan Sukamara. Selain itu NICA juga menangkapi para pemimpin KNI dan AM di kota ini (Yusuf dan Kassu, 1989: 177-179).

4.5. Pasukan MN 1001.

Untuk mengusir NICA dari Bumi Kalimantan, Gubernur Kalimantan waktu itu Ir. Pangeran Muhammad Noor, mencoba beberapa kali mengirim pasukan dari Jawa. Diantara beberapa pasukan-pasukan itu, yang bertugas ke Kotawaringin adalah MN 1001 yang dua kali datang, pertama dengan kapal dari Jawa ke Sungai Tabuk, dan yang kedua penerjunan pasukan payung di Sambi. Selain itu juga di kirim ekspedisi Husin Hamzah yang terkenal dengan pertempuran di Teluk Bogam.

Sebenarnya rombongan Tjilik Riwut yang diberi Tugas oleh Gubernur Kalimantan di namai dengan Rombongan II Oetoesan Pemerintah Repoeblik Indonesia yang disingkat ROPRI. Adapun tugas rombongan ini adalah :

a. Membentuk Pemerintah Sipil di Kalimantan
b. Membentuk pasukan MN 1001 (TRI) Kalimantan (Borneo) guna mengobarkan semangat perjuangan Rakyat Kalimantan
c. Memberikan penerangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat tentang arti Proklamasi Kemerdekaan RI.

Semua perlengkapan dalam bentuk perbekalan selama dalam perjalanan, uang, senjata dan bahan-bahan kebutuhan pokok, majalah dan brosur-brosur yang setibanya di Kalimantan akan di bagikan kepada masyarakat setempat, disiapkan oleh M. Nasrie dan Nachli, Staf Gubernur Borneo.

Rombongan II Oetoesan Pemerintah Repoeblik Indonesia yang di berangkatkan tersebut memiliki tim inti ialah Mayor Tjilik Riwut, Kapten Reinout Sylvaraus, Kapten A. Mukran, dan Sersan Mayor Willem Batu. Mayor Tjilik Riwut merupakan pimpinan rombongan. Kapten Reinout Sylvanus dengan nama samaran Oehing bertugas sebagai Wakil Pimpinan untuk Urusan Kalimantan bagian Tengah. Kapten A. Mukran dengan nama samaran Harris bertugas sebagai Wakil Pimpinan Urusan Kalimantan Selatan merangkap Kepala Bagian Pertahanan. Sersan Mayor Willem Batu dengan nama samaran Kancil bertugas pada bagian perlengkapan merangkap tenaga kesehatan.

Dengan menumpang kereta Api, pada tanggal 16 Februari pasukan berangkat dari Yogyakarta ke Pekalongan dan dari Pekalongan ke Kalimantan dengan kapal. Rombongan ini tiba di Sungai Tabuk pada tanggal 6 Maret 1946. Kedatangan mereka di sambut baik oleh masyarakat setempat.

Pasukan yang di pimpin Mayor Tjilik Riwut, bergerak dari tanggal 6 Maret 1946 sampai 5 Desember 1946, keliling Kalimantan Selatan, Barat, Tengah dan Timur; membentuk Pasukan MN 1001 dan mendirikan pemerintah sipil serta memberikan penerangan di Tabuk, Sukamara, Kotawaringin, Nanga Bulik, Nanga Gatal, Sambi, Panyumpa, Tbg. Manjul, Buntut Sapau, Nanga Pulut, Tbg. Senamang, Tbg. Samba, Kasongan, Tewang Kampung, Pegatan, Mandomai, Pulang Pisau, Banjarmasin, Marabahan, K. Pembuang, Sampit, Aloh-aloh besar, Pleihari, Martapura, Kuala Kapuas, Tabunganen, Kandangan, Amuntai, Muara Oya, T. Grogot, Batu Supang, Anjir Serapat, Maloka, Gambut, Lupak Luar, Bahaur, Mendawai, Handel Bincit, Jambu Burung, Pasar Arba, Handel Pamangkih dan lain-lain. Melewati sungai-sungai Jelai, Arut, Lemandau, Seruyan, Melawi, Sayan, Katingan, Sebangau, Kahayan, Kapuas, Barito dan lain-lain. Mengenai pengalaman Tjilik Riwut dan MN 1001 di Kotawaringin Barat akan ditulis pada bagian yang terpisah sesuai dengan peristiwa tiap tempat yang akan dituturkan kemudia.

4.6. Ekspedisi Husin Hamzah.

Sewaktu Bung Karno dan Bung Hatta membacakan Proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, maka dengan serentak rakyat Surabaya mengadakan tindakan-tindakan terhadap tentara Jepang ke tangan Bangsa Indonesia. Dalam hal ini tidak ketinggalan juga pemuda-pemuda Kalimantan yang menggabungkan dirinya dalam Pemuda Republik Indonesia (P.R.I.) Kalimantan dibawah pimpinan Abdoel Murad dan Husin Hamzah sebagai Komandan Pertahanan yang bermarkas di sebelah BKR Surabaya di muka kantor Gubernur Jawa Timur (bekas Kantor Kempe Tai). Di dalam pertempuran di Surabaya, Husin Hamzah beserta anak buahnya ikut serta ambil bagian, dimana beliau cidera kena peluru dan terpaksa di rawat di Rumah Sakit Umum Surabaya (CBZ).

Oktober 1945 Gubernur Kalimantan Ir. Pangeran Muhammad Noor, dengan persetujuan Menteri Pertahanan (Bapak Amir Sarifudin) memerintah Husin Hamzah untuk memimpin rombongan ekspedisi tentara berangkat ke Kalimantan. Setelah ke Kalimantan nama kesatuannya berubah menjadi B.K.R. dan pangkatnya di tetapkan menjadi "Letkol BKR" Rombongan tersebut beranggotakan 96 orang. Sebelum berangkat, sebagai ketua rombongan Husin Hamzah mohon doa restu kepada bapak Presiden RI di Istana Negara dengan di saksikan oleh Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, serta pembesar-pembesar RI lainnya, dengan diantar oleh Gubernur Kalimantan Ir. Pangeran Muhammad Noor.

Rombongan Ekspedisi ini di pimpin oleh (Yusuf dan Kassu, 1989: 185):

1. Let. Kol. Husin Hamzah sebagai pucuk pimpinan.
2. Mayor Inf. Firmansyah, Kepala Staf.
3. Kapten A. Petters, Dan Tempur.
4. Led. Rudolf. A. Beck, Kepala Penerangan.
5. Ltd. Anang Hasyim, Staf I

6. Plt. Inf. Darmansvah SA, Kepala Tata Usaha
7. Kapten Moch. Arief, Kepala Keuangan
S. Ltd. Reginal, Dan Divisi
9. Ltd. Anwar, bagian pem Daerah.
I0. Lts. Burhan Daniel, opearasi perhubungan
11. Sersan. Anwar Gurkha, Ajudan
12. Hasyun Ambun, Kepala Perlengkapan

Pebruari 1946 rombongan ekspedisi tentara tersebut meninggalkan kota Pekalongan menuju Kalimantan dengan menumpang perahu layar. Walaupun dalam keadaan terpencar-pencar, perahu layar yang telah mengarungi lautan selama l5 hari itu dapat juga sampai ditempat tujuan. Pada tanggal 17 Februari 1946 perahu layar pimpinan rombongan berlabuh di Kuala Jelai, dan lainnya ada yang berlabuh di Air Item. pasir Putih dan Teluk Bogam.

Setelah rombongan yang terdiri dari Husin Hamzah, Firmansyah, A.Peters, Rudolf A Beck, Anang Hasjim, Darmansjah S.A., Moch Arif, Reginald, Gt Anwar, Burhan Daniel, Anwar Gurka, Hasjim Ambun, berada di Kuala Jelai, maka semua perahu yang tersebar di sana-sini di perintahkan untuk berkumpul di Kuala Jelai untuk menyusun strategi dan taktik penyerangan. Anang Peters dan Reginald di perintahkan untuk mengadakan penyerangan ke Sukamara, dan yang lainnya di perintahkan untuk menyusup ke daerah lainnya seperti Kotawaringin, Kuala Jelai, Sungai Rangas, Teluk Bogam, Sungai Tabuk, Air Putih dan Pangkalan Bun. Salah satu kelompok dari pasukan ekspedisi Husin Hamzah ini ada yang menggabungkan diri dengan pasukan M Edris di Sungai Bengaris untuk kemudian melakukan penyerangan ke Pangkalan Bun.

Keberangkatan rombongan tentara Ekspedisi ke Kalimantan yang dipimpin oleh Husin Hamzah bersamaan waktunya dengan keberangkatan Rombongan II utusan Pemerintah RI ke Kalimantan yang di pimpin oleh Tjilik Riwut, anggota antara lain Lettu R.Sylvanus, Lettu Mukran, Haji Darham, Willem Batu, Hamdie Gafar, Nazarudin, dan lain-lain dengan nama pasukan MN 1001 Mobiele Brigade M.B.T. dan rombongan Kapten Muljono dari P.M.C./M.N.1001 dcngan anggota antara lain: Marconi Mangkin, A.Dengus Patianom, dan lainnya, dengan tujuan dan sasaran yang sama. Ketiga rombongan itu telah bertempur dan berjuang bahu membahu. Tempat-tempat pertempuran yang perlu kami catat di sini adalah Pangkalan Bun. Teluk Bogam, Sungai Rangas, dan Kotawaringin (Riwut, 1993: 167)..

Oleh Husin Hamzah, Reginald dan A Peters di perintahkan untuk berangkat ke Sukamara guna menyusun dan mengembalikan semangat perjuangan terhadap proklamasi dan kemerdekaan. Terlebih lagi Sukamara baru saja di serang oleh Belanda. Sementara pimpinan ekspedisi itu sendiri menyusun kekuatan bersama laskar setempat dan akan bergerak di sepanjang pesisir untuk kemudian membuat markas di sungai Tabuk sebagai pusat operasi (Yusuf dan Kassu, 1989: 187).

4.7. Pasukan M Edris menyerang Pangkalan Bun

Telah dijelaskan di muka bahwa M Edris mengkonsolidasikan kekuatan tempurnya di Sungai Bengaris. Setelah merasa cukup kuat, pada suatu hari di bulan Maret pasukan M. Edris berniat untuk menyerang Belanda yang menduduki Pangkalan Bun. Pasukan yang akan menyerang dibagi menjadi tiga:

1. Pasukan M. Edris dengan anggota 10 orang akan menyerang dan merebut Penjara sekaligus mengeluarkan tahanan semua pejuang yang ada didalamnya.
2. Pasukan yang dipimpin Sdr. Musatafa menyerang dari arah jalan Kumai-Pangkalan Bun dimulai dari Kampung Sidorejo serta harus menyerang terlebih dahulu.
3. Pasukan yang dipimpin oleh Derek alias Alamul Daimi mcnyerang POS Penjagaan Belanda di Kantor lama serta membebaskan semua tawanan yang berada disitu, dibantu oleh pasukan Pimpinan Tengku Syahrial yang menyerang dari arah Istana.

Karena belanda terlalu kuat serangan ini menemui kegagalan. Rombongan M. Edris kembali lagi ke Sungai Bengaris (Yusuf dan Kassu, 1989: 188). Pada penyerangan ini gugur tiga orang pejuang, sedang di pihak Belanda tidak diketahui.

Beberapa hari setelah penyerangan Pangkalan Bun yang gagal, datang utusan Husin Hamzah ke sungai Bengaris menyampaikan undangan agar M. Edris dan pasukannya datang ke Sungai Tabuk. Maka keesokan harinya berangkatlah pasukan M. Edris ke Sungai Tabuk. Ternyata disana sudah menunggu Pasukan Husin Hamzah dan MN 1001 Tjilik Riwut (Yusuf dan Kassu, 1989: 194 - 196). Pertemuan ini merupakan konsolidasi seluruh pasukan untuk melawan NICA secara bersama-sama dan terencana dengan baik. Dari pertemuan ini di capai keputusan bahwa pasukan Husin Hamzah dan M. Edris bersama-sama akan bergerak ke Teluk Bogam menunggu serangan Belanda disana. sementara itu Tjilik Riwut dan MN 1001 menuju ke Utara, Kotawaringin Lama dan Nanga Bulik. Kemudian setelah berhasil menggalang kekuatan mereka akan menyerang Pangkalan Bun bersama-sama: Husin Hamzah dari arah Teluk Bogam dan Tjilik Riwut dari arah Kotawaringin Lama. Kalau menurut Suseno (1996) Tjilik Riwut baru mendarat di Sungai tabuk tanggal 6 Maret 1946 dan kemudian tanggal 7 Maret berangkat ke Kotawaringin Lama, berarti pertemuan dengan Husin Hamzah ini pada tanggal 6 Maret 1946.

4.8. Teluk Bogam.

Persiapan perang oleh AM dan KNI sebenarnya telah di mulai sekitar 6 bulan sebelum Belanda menyerang. Waktu Pangkalan Bun dan Kumai telah diduduki NICA, para pemuda di Teluk Bogam terus menerus berlatih dan menjadi semacam gerakan bawah tanah yang hanya diam saja. Di bulan Februari (tanggalnya tidak jelas) di tempat ini di singgahi oleh ekspedisi pasukan Husin Hamzah yang merencanakan serangan ke Pangkalan Bun. Pasukan Ekspedisi Husni Hamzah

ini tinggal di sebuah rumah yang kemudian dipakai sebagai markas dan gudang senjata. Di Teluk Bogam ini tugas Husin Hanzah adalah menunggu kabar dari Tjilik Riwut untuk menyerang bersama-sama ke Pangkalan Bun, di samping itu juga untuk memperkuat basis pertahanan.

Sementara itu mata-mata Belanda yang cukup licin mengetahui bahwa di Teluk Bogam ada gerakan kemerdekaan yang terus-menerus berlatih. Belanda mengirimkan pasukannya dengan kapal "Rinjani" pada tanggal 27 Maret. Oleh para pejuang kapal besar ini terlihat dari kejauhan. Melihat kapal tersebut Pimpinan Tentara Ekspedisi Husin Hamzah langsung menginstruksikan kepada semua pasukan yang ada agar siaga dengan segala kewaspadaan dan menyuruh semua anggota pasukan untuk mencari perlindungan di celah-celah pohon kelapa yang banyak berjejer tumbuh di pinggir pantai dan di ingatkan juga supaya jangan ada satupun yang menembak terlebih dahulu sebelum ada perintah dari pimpinan. Para pejuang itu kemudian berlindung di dalam lubang tanah yang memang sudah di siapkan sebelumnya.

Karena kapal tidak dapat merapat maka pendaratan pasukan NICA di lakukan dengan motor bot. Usaha pendaratan tentara Belanda tersebut berhasil digagalkan dengan melalui pertempuran yang sengit. Pertempuran langsung dipimpin Husin Hamzah. Motor bot tersebut telah terbakar karena tangki bensinnya ditembak. Setelah pertempuran yang berlangsung dari pagi hingga sore hari itu, akhirnya NICA dengan Kapal Rinjani pergi dengan meninggalkan kekalahan yang besar. Dari dua buah motor bot yang mendarat itu hancur berantakan beserta dengan kurang lebih 40 orang tentara NICA di bawah pimpinan Letnan De Vries, terkubur di Teluk Bogam. Di antara tentara NICA yang berguguran ini ternyata ada yang belum mati. Husin Hamzah langsung menangkap dan menginterogasinya. Dari mulut tentara ini didapat keterangan bahwa Belanda akan kembali lagi dengan 600 pasukan.

Gb 4.1. Teluk Bogam, pada deretan pohon kelapa sebelah kiri pernah dibuat lubang-lubang pertahanan

Sehari setelah pertempuran tadi, dua speed boat NICA muncul lagi, kali ini mereka berhasil menembaki rumah-rumah penduduk termasuk markas tentara Ekspedisi. Sebuah tulisan pengalaman seorang pejuang barangkali dapat menggambarkan suasana pasukan pejuang di Teluk Bogam tatkala speedboat tadi datang.

(...) Dua motor boat ini barangkali juga telah menurunkan sejumIah mata-mata Belanda ataupun kaki tangannya ditempat lain guna mengamati gerakan kami. Sebab bila dihubungkan dengan terkepungnya pasukan kami pada keesokan harinya di Sungai Rengas; tentu kehadiran dua buah motor boat ini hanya merupakan gerakan pancingan belaka terhadap hal ini kami waktu itu kurang mewaspadai

Adapun jarak motor boat yang datang ini kurang lebih l00 sampai 200 meter dari pantai, waktu itu ait laut pasang. Begitu motor boat ini muncul terus menghamburkan tembakan yang membabi buta kearah pantai tempat sekitar markas kami. Saya ingaat beberapa tembakan mengenai rumah Sdr. Kode yang menjadi markas kami dan juga tiang Bendera di mukanya menjadi hancur.

Dalam suasana demikian Bapak Husin Hamzah memerintahkan sdr Sidik untuk membalas tembakan itu yang diarahkan kepada sebuah motor boat yang agak dekat. Tembakan beruntun pun dilepaskan sdr. Sidik kearah perahu motor tersebut seketika kelihatan motor boat itu sempat oleng menandakan bahwa tembakan tadi ada yang mengena pada sasarannya. namun kemudian karena motor boat itu dalam keadaan jalan maka sebentar kemudian perahu motor itupun lenyap dari penglihatan kami.

Setelah kejadian tersebut pimpinan Tentara ekspedisi mengadakan perundingan dengan semua kepala-kepala bagian ataupun pasukan sehingga di dapat kesimpulan bahwa semua pasukan harus meninggalkan Teluk Bogam pindah ke Sungai Rengas sebuah Kampung yang terletak di sebelah Barat dari Teluk Bogam dan tidak jauh dari muara Sungai Kotawaringin masuk ke Pangkalan Bun.

Strategi ini disusun mendekatkan Kota Pangkalan Bun sebagai tujuan sehingga memudahkan menjangkau Hulu Sungai Karang Anyar sebagai tempat menyusun kekuatan sesuai dengan mufakat yang telah di tetapkan semula.

Setelah persiapan perjalanan dan pasukan selesai maka berangkatlah kami meninggalkan Teluk Bogam menuju Sungai Rangas dengan sebagian naik perahu dan sebagian lagi mendarat memrusur pantai. Sekitar dini hari sampailah kami semua di tempat tujuan yaitu Sungai Rengas.

Disini kami juga disambut baik oleh masyarakat, dan memakai beberapa buah rumah penduduk sebagai tempat bagi pasukan (...) (Yusuf dan Kassu, 1989: 200-201).

Setelah pasukan ekspedisi pergi ke Sungai Rengas, pasukan NICA kembali menyerang Teluk Bogam dengan jumlah pasukan yang lebih besar. Para Pemuda Teluk Bogam mencoba bertahan dengan menggali tanah dan bersembunyi disana sambil membalas serangan. Tetapi serangan NICA kali ini memang luar biasa besarnya. Rakyat Teluk Bogam yang bersenjata sederhana seperti Mandau, bambu runcing dan senapan satu peluru, melarikan diri. NICA berhasil mendarat dengan speed boat, mereka membakar semua rumah di Teluk Bogam tanpa sisa.

Tentu saja semua rumah yang dibuat dari kayu habis menjadi abu dan arang. NICA kemudian sebagian melakukan jalan darat menuju ke Sunga Rengas dan sebagian lagi melalui laut menuju Sengai Rengas, sebuah dusun kecil di pesisir Kotawaringin. Pembumi hangusan Teluk Bogam ini tidak pernah dicatat oleh penulis-penulis terdahulu yang menuliskan sejarah berdasarkan jejak pasukan tentara pejuang kemerdekaan. Pada pemikiran modern memang sejarah menjadi milik mereka yang menonjol dalam satu alur sejarah sehingga sosok seperti Husin Hamzah adalah tempat untuk menuliskan sejarah. Tetapi di era pasca modern di mana kekuatan sejarah bukan berkisar pada tokoh tetapi pada rakyat, maka kejadian di Teluk Bogam yang di bumi hanguskan oleh Belanda dan rakyat yang mencoba bertahan tetapi terus melarikan diri merupakan kekuatan sejarah perjuangan yang tak ternilai harganya.

Untuk menyelamatkan diri rakyat Teluk Bogam lari menuju hutan dengan bekal seadanya. Sementara rumah dan harta benda mereka dibakar, mereka menghadapi bahaya kelaparan di tengah hutan. Di dalam pelarian itu menurut beberapa saksi sejarah, penduduk Teluk Bogam membentuk kelompok-kelompok pengungsi yang tujuannya adalah saling membantu antara tetangga.

4.9. Sungai Rengas.

Setelah mendapat kemenangan yang gemilang, Husin Hamzah segera mengadakan perundingan dengan semua staf pimpinan untuk menentukan langkah selanjutnya. Diputuskan tentara ekspedisi meninggalkan Teluk Bogam menuju Sungai Rengas dengan jalan kaki melalui rawa-rawa pada malam hari.

Setelah sampai Sungai Rengas di pagi harinya, rombongan langsung disambut dengan tembakan oleh pasukan Belanda yang sedang berpatroli. Dengan semangat yang bernyala-nyala, tentara ekspedisi yang mempunyai tekad "Merdeka atau Mati" menyerbu dan menyerang musuh. Menurut kesaksian seorang veteran pejuang yang ikut dalam pertempuran ini, katanya mereka bertempur di dekat mesjid yang mereka jadikan markas. Serangan belanda datang dari tiga arah, Laut, Utara dan dari Teluk Bogam. Pasukan Husin Hazah terjepit dan terjebak. Tidak ada pilihan lain untuk bisa lolos dari kepungan NICA kecuali bertempur habis-habisan.

Dalam pertempuran ini Husin Hamzah gugur kena tembakan musuh di dada. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, dia sempat berpesan kepada beberapa anak buahnya yang terdekat, pesan terakhir beliau:

„SAMPAIKAN PESANKU KEPADA TEMAN-TEMAN SEPERJUANGAN YANG LAIN, AGAR MENERUSKAN PERJUANGAN INI SAMPAI TETES DARAH YANG PENGHABISAN..... "

Jenazah Husin Hamzah dikuburkan ditempat itu juga. Pertempuran tetap diteruskan dan pimpinan diambil alih oleh Firmansyah dan Djayadi dan mengambil siasat mundur karena menipisnya persediaan Amunisi. Dengan menumpang 17 perahu kepunyaan tentara Belanda yang kebetulan ada di sungai, rombongan dapat sampai di Sungai Tabuk pada keesokan harinya. Di sungai Tabuk, seluruh rombongan dan di hadiri juga oleh penduduk dari Sungai Tabuk, Teluk Bogam,

Kuala lelai, serta pesisir Pangkalan Bun, mengadakan upacara peringatan atas meninggalnya Husin Hamzah.

Sementara itu sebagian lagi dari pasukan M. Edris yang tercerai berai di pertempuran tadi ada yang kembali ke Sungai Bengaris. Djumberi Djainudi yang ikut dalam rombongan ini, mereka mendapati Sungai Bengaris ternyata kosong karena M. Edris dan teman-temannya lari ke arah Sungai Tabuk. Kemudian Djumberi dan teman nya berjalan ke Pangkalan Bun. Selama seminggu dalam perjalanan ini mereka makan ubi dari ladang penduduk. Djumberi adalah penduduk Teluk Bogam yang bergabung pada TKR. Dia memiliki keluarga dengan satu anak. Pada saat Teluk Bogam di bumi Hanguskan, dia ke Sungai Rengas bersama M. Edris, sedang istri dan anaknya yang baru lahir lari ke hutan bersama penduduk yang lain.

Karena pimpinan baru pengganti yaitu Firmansjah memperhitungkan pertempuran tidak akan menguntungkan lagi maka pasukan diundurkan ke Sungai Jelai tempat pangkalan mereka. Diperhitungkan kemudian jika melanjutkan ekspedisi sangat besar resikonya maka direncanakan untuk kembali ke Jawa. Ini berarti rencana tentara ekspedisi semula untuk menuju kepedalaman gagal. Dua hari sebelum keberangkatan mereka ke Jawa, Belanda menghadang dan menyerang Kuala Jelai dari laut dan udara. Tentara ekspedisi berlindung dan tidak menanggapi serangan Belanda sehingga Belanda mengira tentara ekspedisi telah tidak ada di Kuala Jelai, karena merasa sia-sia akhirnya Belanda pergi meninggalkan Kuala Jelai (Riwut, 1993: 167-169).

Setelah dengan susah payah pasukan ekspedisi dapat kembali ke pulau Jawa dengan menumpang kapal Andalas dan Garinda. Banyak lagi tentara dari Jawa yang datang ke Kalimantan.menemui kegagalan, baik kegagalan di laut maupun sesudah sampai di Kalimantan. Karena mereka berhadapan dengan musuh yang lebih berlipat ganda kuatnya dari mereka, sedangkan rakyat yang diharap akan dapat membantu hanya sebagian kecil yang membantu dengan sungguh-sungguh, dan sebagian tidak mengetahui apa yang akan diperbuatnya. Itulah sebabnya pasukan-pasukan dari Jawa yang sebagian gagal (Yusuf dan Kassu, 1989: 205).

Sementara itu M. Edris dan pasukannya, memilih untuk pergi ke Sukamara membantu saudara-saudara di sana dalam menghadapi NICA. Di sana mereka bergabung dengan Reginals dan Iskandar.

4.10. Serangan NICA yang kedua ke Kotawaringin Lama

Setelah menyerang beberapa kota di bulan Januari, karena merasa belum dapat menundukkan para pejuang, di bulan Maret dan April NICA kembali menyerang beberapa tempat di Kotawaringin. Salah satu kota yang dianggap sebagai tempat para pejuang adalah Kotawaringin Lama. Kota yang berada dipinggir Sungai Lamandau ini memang memiliki pasukan pejuang yang kuat. Angkatan Muda yang dipimpin oleh Gusti Dumay Anas merupakan Angkatan Muda yang sangat aktif berlatih.

Kesiapan AM Kotawaringin Lama ini terlihat tatkala Tanggal 26 Maret 1946 rombongan ROPRI tiba di situ, mereka langsung mengadakan pembicaraan serius serta tukar-menukar pikiran mengenai situasi daerah setempat. Saat itu keadaan sangat rawan karena kaki tangan musuh tersebar merata di seluruh daerah. Dengan demikian situasi yang telah sulit menjadi semakin sulit karena sulitnya membedakan mana kawan dan mana lawan (Suseno: 1996: 24).

Keesokan harinya, mereka membentukan Pemerintah Darurat Republik Indoensia (PDRI) dan Pertahanan Daerah Kotawaringin dan MN 1001. Anggita AM dan TKR melebur ke MN 1001. Sebagai Pimpinan Pemerintah Daroerat Repoeblik Indonesia Daerah Kotawaringin, sambil menunggu pasukan ekspedisi pimpinan Husin Hamzah, ditunjuk Kapten Reinout Sylvanus. Sebagai Wakil dan Komandan Pertahanan Daerah Kotawaringin dan wakil pimpinan, ditunjuk Gusti Domey Anas. Susunan organisasi selengkapnya adalah sebagai berikut (Nahan AF b: 3):

Pimpinan	:	Kapten Reinout Sylvanus
Wakil Pimpinan	:	Letnan Gusti Dumay Anas
Anggota Staf	:	Gusti Akhmad Kedeung, Gusti Sakuri, Gusti Alamutaans, Gusti Anang, Haeanuddin Kial Ira.
Pertahanan	:	Gusti Djalin, Gusti Kiting
Logistik	:	Gusti Indjil, Gusti Amfnullah, Hadjl Mukhdam. Hadji Kudar, Gusti Adjit, Asri, H Mukhdam

Setelah pembentukan pemerintahan darurat, pada tanggal 27 Maret 1946 segenap AM dan TKR bersama rakyat memperbaiki parit-parit pertahanan yang sebelumnya telah di rintis oleh Mahrus Effendi. Sebagai markas TKR untuk daerah Kotawaringin di tetapkan rumah bekas gudang milik seorang Tionghoa (Suseno: 1996: 25).

Dengan semboyan "NICA datang kami kirim ke neraka dengan meriam kerajaan.", malam harinya diadakan latihan tanda bahaya dipimpin oleh Reinout Sylvanus dan Willem Batu. Setelah latihan berakhir, datanglah Abdul Hamid, utusan R. Syamsi, Kepala Markas Besar TRI Sukamara, untuk menyerahkan sepucuk surat kepada Tjilik Riwut. isi surat tersebut antara lain menjelaskan situasi dan kondisi di Sukamara saat itu. Dalam surat itu disebutkan bahwa kondisi persenjataan mereka sangat minim. Dalam Surat itu juga dijelaskan bahwa saat itu sangat besar kemungkinan NICA menyerang Kuala Jelai. Diungkapkan juga bahwa Markas Besar TRI Sukamara telah mengirimkan bantuan bahan makanan untuk daerah Kotawaringin. Setelah membaca surat itu dan memahami isinya, Tjilik Riwut kemudian berunding dengan para pejuang setempat, para pemuda,

KNI serta para guru. Akhirnya diambil keputusan untuk mengirimkan meriam milik Sultan di samping juga bensin untuk keperluan Markas Besar TRI Sukamara. Setelah persoalan itu selesai di pecahkan maka Reinout Sylvanus dan Willem Batu memberikan latihan kemiliteran kepada masyarakat setempat. Selesai latihan, Willem Batu kemudian memberikan pengobatan cuma-cuma kepada masyarakat yang membutuhkan (Suseno: 1996: 25).

Tidak lama kemudian datang pula 22 orang pemuda utusan Suku Dayak Mamah Darat. Mereka datang karena diutus oleh Damang agar di latih menjadi Pasukan Sumpitan. Mereka menggunakan cawat, rambut dibiarkan tergerai panjang, kepala di ikat kain berwarna merah, putih dan kuning. Karena kesibukan yang padat, malam itu otomatis ROPRI tidak sempat memejamkan mata. Sungguh Luar biasa semangat yang di miliki masyakat di Kotawaringin (Suseno: 1996: 25).

ROPRI tidak lama berada di Kotawaringin Lama karena menganggap kota ini sudah siap menghadapi NICA dan sudah memiliki organisasi MN 1001 yang baik. Setelah segala sesuatunya dianggap selesai, ROPRI melanjutkan perjalanannya ke Nanga Bulik. Empat orang anggota Angkatan Muda Nanga Bulik datang menjemput ROPRI di Kotawaringin. Mereka adalah Hasnul, Asmail dan dua orang kawan mereka. Beberapa anggota baru MN 1001 daerah Kotawaringin, seperti Bachrun alias Jenjeng, Haji Muhdam, dan kawan-kawannya juga ikut serta mendampingi ROPRI dalam perjalanan menuju Nanga Bulik. Sementara Reinout Sylvanus tinggal di tempat itu untuk memimpin Pemerintahan Daroerat Repoeblik Indonesia Wilayah Kotawaringin.

NICA menyerang Kotawaringin Lama pada tanggal 6 April 1946. Berbeda dengan serang Belanda ke Kotawaringin Lama yang pertama, kali ini dilakukan dengan jumlah pasukan yang lebih besar. Mereka menggunakan empat kapal perang. Tiga jam sebelum masuk ke Kotawaringin mereka sudah menghamburkan pelurunya dan menghancurkan pertahanan di Punjung. Barisan MN 1001 yang bertahan di situ terpaksa mundur. NICA berhasil mendarat di Kotawaringin Lama dan membakari rumah-rumah penduduk. Terdapat tiga anggota MN 1001 yang gugur dalam serangan NICA ini. Selain itu markas MN 1001 juga dihancurkan. NICA menduduki Kotawaringin Lama.

Para pimpinan PDRI dan anggota MN 1001mengundurkan diri dan lari ke Sukamara untuk mencari bantuan dan menghindari jatuhnya korban yang lebih banyak lagi. Di sana mereka bergabung dengan sisa pasukan ekspedisi pimpinan Letnan Kolonel Husin Hamzah yang waktu itu ditugaskan ke Sukamara. Konon kabarnya pimpinan PDRI Reinout Sylvanus di sarankan untuk kembali Ke Jawa (Nahan (b): 5). Selanjutnya pertempuran pecah di Sukamara dan Nanga Bulik yang akan dituturkan di bawah ini.

4.11. Serangan NICA yang kedua ke Sukamara.

Sukamara merupakan kota yang penting diperbatasan antara Kalimantan Tengah (kini dan Kalimantan Barat. Sejak dulu dikota ini tinggal berbagai kelompok etnis. Kota yang tumbuh linear di sepanjang sungai merupakan kota

dagang yang sangat penting. Dengan serangan NICA yang pertama, banyak sudah rumah-rumah yang di bakar. Tetapi serangan ini tidak mengendurkan semangat berjuang pasukan TKR dan AM yang saat itu sudah di bantu oleh Reginal dari ekspedisi Husin Hamsah.

Walaupun kesulitan yang luar biasa untuk menundukkan para pejuang di Sukamara, NICA tetap berusaha untuk menyerang lagi ke Sukamara guna membersihkan pasukan pejuang kemerdekaan RI. Tanggal 9 April 1946, tentara NICA dari Pangkalan Bun menyerang Sukamara lagi dengan kekuatan kira-kira 200 orang, melalui daratan. Pada mulanya pasukan dalam jumlah besar ini bergerak dari arah Sungai Cabang Barat dimana disitu menembak dua orang penduduk. Mereka kemudian berhenti di Natai Sedawak.

Pejuang yang berada di Pos Natai Sedawak langsung melaporkannya ke pimpinan pasukan di Sukamara. Setelah menerima kabar ini, semua pos pertahanan mengadakan persiapan-persiapan untuk menyambut NICA. Pada tanggal 10 April, sehari kemudian, NICA dengan barisan panjang keluar dari Natai Sadawak menuju ke Sukamara. Para AM yang berada di pos penjagaan melakukan serangan lebih dulu untuk menghalau NICA tadi, tetapi serangan ini tidak memiliki arti karena pasukan NICA demikian besar jumlahnya.

Suatu serangan dengan jumlah pasukan yang besar ini membuat para pejuang di Sukamara sama sekali tidak dapat mengantisipasinya. Tentara NICA pun menduduki kota. Mereka menangkap M. Djohar, ketua KNI. M. Yusuf, Achmad Utoch dan kawan kawan. Tertangkap sudah pimpinan pasukan Angkatan Muda. Tentara NICA yang tak mengenal kasihan, membumi hanguskan rumah rumah rakyat. Setengah kota Sukamara menjadi lautan api yang menyedihkan (Lontaan dan Sanusi, 1976: 63). Pada serangan kedua ini perjuangan di Sukamara bisa di katakan di tundukkan oleh NICA.

Setelah NICA berhasil menduduki Sukamara, para penduduk kota ini berlarian menyelamatkan diri ke hutan. Komandan NICA kemudian memerintahkan para penduduk yang bersembunyi untuk keluar guna mendapatkan surat keterangan dan diberi jaminan tidak akan ditangkap. Akibat janji ini banyaklah penduduk yang keluar dari persembunyiannya. Tetapi Belanda bukannya menjamin tidak ditangkap, sebaliknya dengan mudah mereka ditangkap dan disiksa. Penduduk yang tidak memiliki rumah terpaksa harus tinggal di tetangganya. Sungguh satu penderitaan yang luar biasa dari rakyat Sukamara yang tidak boleh dilupakan.

Pendudukan NICA ini menunjukkan kekejaman yang luar biasa dari tentara Belanda, yang mana juga terdapat orang-orang Indonesia yang berseberangan dengan RI. Kekejaman tentara NICA ini dapat kita kutip dari cerita di bawah ini:

(....) Sejak itu penangkapan-penangkapan atas diri anggota pengurus KNI, dan anggota Pasukan Angkatan Muda dan TRI. Di lakukan oleh Tentara Belanda, yang disertai dengan penyiksaan-penyiksaan di luar batas kemanusiaan. Pihak Belanda menjadikan 3 buah rumah untuk tempat tahanan. Penyiksaan-penyiksaan, dengan pukulan kayu ulin tendang dan terjang. Di suruh berbaring di tanah yang kemudian di tindih dengan batang dan sebagainya rasa hari ini tak mampu untuk

menceritakannya…….Saudara Simin bin Dahim. adalah korban pertama yang menerima penyiksaan, di lakukan di hadapan isteri dan anaknya yang masih kecil, sehingga meninggal Dunia, sedangkan isterinya Ibu Marhamah, sampai sekarang masih hidup dalam keadaan kurang normal (….).

Kisah penyiksaan seperti ini tidak pernah ditulis dalam buku sejarah kita sehingga tidak pernah terkesan bahwa Belanda dan antek-anteknya telah melakukan kekejaman yang tidak berperikemanusiaan di Kalimantan. Masih ada lagi cerita tentang penyiksaan di tempat terbuka sebagai berikut:

(…) Pada tanggal 19 April 1945 semua orang tawanan dikumpulkan berbaris menuju sebuah tanah Lapang didarat kampung Sukamara. Setibanya di Lapangan itu semua orang tawanan disuruh berdiri mengelilingi lapangan, dan jalan yang menuju ke Natai Sedawak. Tiada berapa lama kemudian di bawalah saudara Legong dan Akau dengan tangan terikat yang di kawal oleh 6 orang Militer Belanda, kemudian kedua orang tawanan ini di dirikan kurang lebih dalam jarak 5 meter dari Tentara Belanda yang membawanya. Kemudian kedua mata saudara Legong dan Akau ditutup dengan kain merah. Dari sikap kedua pejuang ini sama sekali tidak menunjukkan gentar dan takut, walaupun kepada mereka diberitahukan bahwa mereka akan dihukum mati, karena di tuduh sebagai pengkhianat perang dan telah melakukan pembunuhan kejam terhadap beberapa orang tanpa adanya pemeriksaan yang wajar menurut hukum. Setelah surat keputusan (vonis) dibacakan oleh Detasemen komandan Onder Liutenant Rooze yang menyatakan kedua orang itu akan dijatuhi hukuman mati, maka di ajukanlah pertanyaan-pertanyaan Kepada keduanya apakah mereka ada permintaan atau lain sebagainya. Waktu pertanyaan di sampaikan kepada saudara Legong yang di ajukan oleh Detasemen komandan, maka saudara Legong dengan suara yang keras dan lantang ia menjawab

" Bilamana aku mati beritahukan pada Isteriku. bahwa aku mati ditembak Belanda ".

Adapun saudara Akau waktu ditanya. ia tidak berkata apa-apa. kemudian, Detasemen komandan memberikan komando kepada 6 orang militer Belanda yang bersenjata L.E. senjata di tembakkan yang di arahkan kepada kedua terhukum, robohlah keduanya dalam posisi telentang, dan disusul lagi dengan tembakan sten gun yang di arahkan ke kepala keduanya. Gugurlah saudara Legong dan Akau, dihadapan ragu tembak Tentara Belanda, dengan segala keberanian dan kekesatriaannva. Kedua mayat saudara Legong dan Akau oleh Tentara Belanda di biarkan selama sehari itu, untuk ditonton oleh penduduk. Para tahanan yang lain setelah selesai eksukusi ini, dengan penjagaan yang ketat dibawa lagi kerumah tahanan (…) (Yusuf dan Kassu, 1989: 222-223).

Setelah Belanda menduduki Sukamara dengan pertempuran tanggal 10 April dan menangkapi dan membunuh para tokoh pejuang, menurut Yusuf dan Kassu perjuangan rakyat Sukamara terhenti (Yusuf dan Kassu, 1989: 225). Tetapi perlawanan bawah tanah akan terus berlangsung karena kekejaman tentara NICA yang melebihi tentara Jepang menimbulkan rasa dendam yang luar biasa.

4.12. Perjuangan di Nanga Bulik.

Perjuangan tentara MN 1001 yang selama ini menyusun kekuatan dari selatan, di daerah Kotawaringin mencapai klimaksnya di Nanga Bulik, kota yang berada

dipinggir sungai Lamandau yang dapat dicapai dari Pangkalan Bun dengan perahu. Kota Nanga Bulik sangat unik dan tua. Di sepanjang sungai terdapat jalan kayu dimana toko-toko penduduk Tionghoa berada dan di balik deretan toko ini terdapat lagi rumah-rumah tinggal. Kantor onderdistrict terletak di pinggir sungai dekat dengan poliklinik, serta tidak jauh dari toko-toko tadi. Pada waktu Jepang menduduki Nanga Bulik, mereka mendirikan gudang senjata di dekat kantor onderdistrict tadi. Rumah onder district terletak berseberangan dengan kantornya sehingga kepala onderdistrict dapat dengan mudah pergi kerja dari rumahnya tinggal menyeberang jalan.

Sebenarnya AM Nanga Bulik sudah lama mempersiapkan diri untuk melawan Belanda. Mereka memakai kantor bekas Onderdistrict dan tempat logistik Jepang sebagai Markasnya. Seorang bekas Pejuang Abdul Rivai, yang waktu itu seorang asisten Hasnul menceritakan. Susunan pasukan AM di Nanga Bulik sudah demikian rapi sebelum kedatangan Tjilik Riwut. Misalnya saja sudah ada dua pleton tentara dengan komandan pleton Syahran Minin dan Yasin Rindai. Mereka berlatih setiap hari mempergunakan lapangan di depan rumah sakit. Waktu itu disana sudah ada sekolah rakyat baik yang 3 kelas (Volkschool) maupun 5 kelas (Vervolkschool).

Rombongan Tjilik Riwut tiba di Nanga Bulik tanggal 1 April 1946 sekitar jam 19.00 setelah melakukan perjalanan dari Kotawaringin. Dalam rombongan ROPRI selain Tjilik Riwut terdapat juga A. Mukran, Wiliem Batu, yang disertai beberapa orang anggota MN 1001 daerah Kotawaringin dan Nanga Bulik yang datang menjemput ke Kotawaringin (Suseno, 1996: 29). Mereka tentu saja disambut oleh ketua AM Nanga Bulik Amir Rusin Muslihan dan anggota KNI. Malam itu para anggota MN 1001 ini menginap di bekas rumah Onderdistrict yang berdekatan dengan markas AM. Karena kedatangan Tjilik Riwut, jalan yang dilewati pak Tjilik ini sekarang dinamai Jalan Tjilik Riwut.

Keesokan harinya, jam 08.00 pagi, diadakan rapat umum bertempat di Sekolah Rakyat Enam Tahun, di hadiri oleh penduduk Kampung Nanga Bulik, Kampung Kujan, Kampung Batu Kotam, dan Kampung Bunut. Acaranya adalah membentuk Pemerintahan Daroerat Repoeblik Indonesia dan Pertahanan Daerah Nanga Bulik. Sebagai Komandan Pertahanan pasukan MN 1001 ditunjuk Kapten A. Mukran yang dibantu oleh Hasnul, Kasah, Syahran Minin, Yasin Rindai, Herman Belatung. Sejak hari itu pertahanan daerah Nanga Bulik yang meliputi desa-desa di Sungai Bulik, Sungai Mentobi, Sungai Lamandau, Sungai Belantikan, Sungai Batang Kawa dan Sungai Delang, yang semula berupa Pasukan Angkatan Muda kemudian di lebur menjadi Pasukan MN 1001.

Setelah pertemuan diadakan pembagian tugas mulai diadakan. A. Mukran dengan beberapa orang yang telah ditunjuk bertugas membagikan gula, garam, dan beras kepada masyarakat setempat yang membutuhkan, sedangkan Tjilik Riwut memberikan berbagai penerangan kepada mereka. Pangka Lirna Kanambuiy dan Sauian di utus sebagai penyelidik ke Karang Beusi sambil menantikan kedatangan ROPRI di Marambang. Karena Willem Batu sedang

demam dan kondisinya mengkhawatirkan maka ia di pindahkan ke rumah keluarga A. Assan untuk mendapatkan perawatan (Sanusi 1996: 30).

Pada tanggal 4 April 1946 jam 03.00 subuh, di dapat informasi bahwa kapal perang Belanda telah berlabuh di Kampung Kujan sebelah hulu. Kapal tersebut di penuhi serdadu NICA. Serdadu-serdadu NICA yang baru turun dari kapal itu telah bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju Nanga Bulik yang jaraknya sekitar tiga setengah kilometer. Dengan informasi ini maka komandan pertahanan langsung mengatur siasat. Para Ibu dan anak-anak segera diungsikan, sedangkan yang muda tetap tinggal untuk menghadapi pertempuran.

Serdadu NICA mulai muncul kira-kira jam 05.00. Tetapi pihak NICA sangat terkejut karena rakyat Nanga Bulik ternyata sudah siap dengan senjata sumpitannya. Kedatangan NICA ini disambut dengan hujan Damek beracun yang mematikan. Para pejuang yang menyebar di rerumputan benar-benar tidak bisa dikenali oleh NICA apa lagi di suasana pagi. Tanpa pikir panjang mereka menghujani setiap tempat dengan peluru yang di muntahkan dari senjata otomatis. Setelah pertempuran yang berlangsung dua jam, pihak pejuang MN 1001, memilih untuk mundur dari pada jatuh banyak korban. Hal ini memang sangat beralasan karena NICA demikian kuat dan lengkap persenjataannya. Pada pukul 09.00 NICA menghentikan serangan dan berhasil menawan enam orang anggota pasukan MN 1001. Mereka adalah Willem Batu yang saat itu menderita demam, M. Rhaudhansyah, Alamul, M. Jawas, Syahran Minin, dan Gusti Jonet. Oleh NICA ke enam tawanan perang tersebut dibawa ke Pangkalan Bun. Sedang para pejuang yang mundur segera masuk ke hutan sehingga tidak terkejar oleh pihak NICA. Tjilik Riwut dan teman-temannya meneruskan perjalanan mengobarkan semangat perjuangan di tempat lain. Dari pihak pejuang RI jatuh seorang korban Gusti Abd Gani bin Gusti Asma yang kemudian di makamkan di kampung Kujan. Gusti Djapri bin. Gusti Daham yang juga berasal dari Kampung Kujan mengalami luka parah karena rusuk kanannya terkena peluru.

NICA benar-benar marah dengan sistem gerilya pejuang RI yang selalu pergi setelah melawan mati-matian dan setelah itu pergi tanpa dapat di musnahkan semuanya. Karena itu pagi itu NICA berniat membakar kota Nanga Bulik. Tetapi karena di antara mereka ternyata jatuh banyak korban terkena damek, maka waktu mereka mengontak Pangkalan Bun dengan radio, mendadak mereka harus cepat kembali ke Pangkalan Bun, rencana pembakaran ini pun di batalkan.

4.13. Pasukan Payung Republik Indonesia Mendarat di Kalimantan.

Semenjak pertempuran di Nanga Bulik, Belanda menduduki seluruh wilayah Kotawaringin. Tetapi para pejuangpun tidak tinggal diam, mereka terus menerus melakukan perang gerilya. Memang mereka tidak memiliki senapan otomatis seperti tentara NICA, tetapi senjata sumpitan dengan demek yang mematikan sangat ditakuti oleh lawan.

Jauh Dari Kalimantan, Ir Pangeran Mohamad Noor selalu memikirkan bagaimana bisa merebut kembali daerah pemerintahannya Borneo dari tangan Belanda. Karena itu dia pada tanggal 25 Juli 1947 mengirim surat kepada

Panglima Angkatan Udara RI yang pada pokoknya: "Untuk usaha-usaha merebut Kalimantan menjadi wilayah Republik Indonesia, maka disamping usaha-usaha lain yang kini di jalankan, di pandang perlu memulai pasukan payung untuk mengirimkan pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan ke Kalimantan. "

Pada waktu itu ide Ir Pangeran Muhammad Noor bisa di katakan ide gila, sebab belum pernah Tentara Republik Indonesia mengadakan penerjunan payung. Ide ini tak sedikitpun terlintas di benak para pimpinan NICA karena mereka menganggap kemampuan Bangsa Indonesia belum sampai ke tingkat setinggi itu. Perundingan di lakukan antara lain ditetapkan oleh Panglima Angkatan Udara RI agar dibentuk satu staf khusus untuk pasukan payung RI yang taktis di bawah komando Panglima Angkatan Udara dan peralatan dari Staf Angkatan Darat dan Gubernur Kalimantan. Dalam hal ini Mayor Tjilik Riwut di tetapkan dan merupakan Komandan untuk pasukan payung Kalimantan dengan di dudukan sebagai staf Sekretaris bagian Siasat Perang Kepala Staf Angkatan Udara, disamping tugasnya sebagai perwira di MBT (Riwut, 1993:169-170).

Dalam latihan pasukan terjun payung ini terdapat 60 pemuda dari Kalimantan dan 12 orang dari Sulawesi. Latihan pasukan payung ini sangat sederhana dan benar-benar membutuhkan ketabahan hati. Selama latihan mereka di bawah pimpinan Opsir Udara I Sudjono, yang dibantu oleh Sukotjo, Mayor Udara Siswadi, Matyasir, Kopral Udara Sangkala, Suraja, dan lain-lain perwira AURI. Asramanya di Warung Boto (Yogyakarta) sedang tempat latihan terjun payung di Meguwo dan Wonocatur. Setelah melalui seleksi terpilih 12 pemuda yang akan di terjunkan dalam misi ini. Selain mereka akan disertakan pula dua anggota TNI AU sebagai pendamping. Adapun misi operasi Kalimantan kali ini adalah (Yusuf dan Kassu, 1989:226):

1. Membawa alat pemancar radio lengkap dengan motor dan bahan bakar.
2. Membangun pemancar induk hingga terselenggara hubungan Kalimantan - Sumatera - Jawa.
3. Menghimpun dan mengkoordinir perlawanan setempat.
4. Menyiapkan daerah dropping

Rencana penerjunan payung ini merupakan pengalaman pertama dalam sejarah Republik Indonesia, di mana banyak sekali mengalami kesulitan tetapi semua kesulitan dapat di atasi berkat adanya motto kerja "Tidak ada kesulitan yang tak dapat di atasi, dan berjuang dengan dayung dan sampan yang ada".

Daerah yang menjadi sasaran penerjunan payung ini adalah Sepanbiha yang sekarang masuk wilayah Kotawaringin Timur. Pada tanggal 17 Oktober 1947 jam 02.30 pagi berangkatlah Dakota RI-002 dari lapangan udara Meguwo Yogyakarta. Mengenai penerbangan ke Kalimantan itu di ceritakan oleh Mayor Udara R.Suhodo co pilot pesawat

(...) Tanggal 16 Oktober jam 23.50 (menjetang tengah malam) dari hotel Tugu kami menuju ke lapangan Meguwo. Pasukan Paratroop yang terdiri dari 14 pemuda dibawah pimpinan Mayor Tjilik Riwut, antara lain almarhum Kapten Udara Harry Ariadi

Sumantri, dengan pakaian sederhana cukup dan bersenjata sudah bersedia di sebelah pesawat. Mula-mula kami sibuk dengan memasukan barang-barang, antara lain radio baru yang diperlengkapi den~.!an pavung untuk diterjunkan keranjang rotan berisi bahan makanan dan pakaian serta kebutuhan lain-lain.

Tanggal 17 Oktober 1947 jam 01.30 malam pesawat sudah siap kemudian anggota paratroop berbaris untuk menerima perintah dari KSAU. Setelah paratroop berjabat tangan dengan KSAU maka satu persatu naiklah kedalam pesawat. Saya pada waktu itu juga mohon diri kepada KSAU akan tetapi ditolak oleh beliau sambil berkata: "Tidak perlu, bukankah akan kembali?" "Mudah-mudahan jawab saya dalam hati".

Jumlah barang muatan dan orang 2700 kg, dan bensin udara berisi penuh dus "overblast". Tidak apa toh kamipun akan menuju ketempat kami. Jam 02.30 malam kami mulai bertolak dan terus menuju ke "Heading 31". Alam gelap gulita hanya suara motor terdengar menderu-deru, membawa kami ketempat yang tingginya 9000 kaki. Dengan tidak memakai "meteocheeck" yang sempurna terlebih dahulu, dengan tidak adanya radio perhubungan "radio ground to air" dan tidak memberi posisi tiap setengah jam untuk keperluan SAR kami terus menuju ke utara dengan "koers 31".

Tempo-tempo jika kapten pesawat terlalu cape, kemudi pesawat diserahkan kepada saya. Mula-mula memang agak sukar bagi saya, sedangkan dalam latihan terbang di Yogya belum pernah mendapat latihan instrumen atau terbang dengan linktrainer, berhubung dengan tidak adanya alat-alat. Akan tetapi baik juga koers menjadi tetap sehingga oleh kawan-kawan saya diberi nama "Automatis Pilot".

Memang pada waktu itu automatis pilot sedang rusak tidak dapat dipergunakan. Arloji tangan saya menunjukan 05.30 pagi kami akan berada di pantai selatan Kalimantan.

Pagi-pagi masih remang-remang akan tetapi kami masih juga dapat melihat "Check punten" . Setengah jam kemudian kami sudah berada diatas rawa-rawa dan hutan Kalimantan Selatan. Kami bertanya kepada sdr. Tjilik Riwut, dulu Mayor Angkatan Darat, yang ikut pula menyaksikan dengan mata kepala sendiri apakah daerahnya yang kami tuju. Dengan muka masem ia menganggukan kepalanya sambil berkata "Disebelah bukit kecil itu".

Akan tetapi 10 menit di sebelah bukit kecil itu kami tidak ada melihat suatu apapun kampung ataupun lapangan. Kami menanyakan lagi kepada sdr Tjilik Riwut yang rupanva masih tercengang karena keadaan dari atas dan dari tanah sangat berbeda untuk dia. Tiba-tiba ia menunjuk "Oh gunung itu". ,

Dan ia menerangkan pula bahwa ditimur laut gunung tersebut adalah tempat kelahirannya dimana orang tuanya masih berdiam. Keterangan ini mungkin untuk hanya menenangkan hati kami. Untuk kepastian maka kami terus menerus melihat peta, kesamping kiri, kesamping kanan dan kebawah, kalau-kalau kami betul berada ditempat yang semestinya. Kapten terlihat agak gelisah selalu melihat dan mengontrol keadaan ukuran bensin. Apakah kita masih bisa pulang?

Jam 07.00 tepat kami melayang diatas bukit yang sedang melayang dan di sebelah utaranya kurang lebih 5 mil ada ladang kasar yang dimana-mana masih tonggak-tonggak bekas tebangan pohon besar dan beberapa rumah panggung di celah-celah hutan luas di Kalimantan Selatan.

Disanalah anggota paratroop akan di terjunkan. Mula-mula kami berputar sekali untuk melihat keadaan dibawah, sekitar dan arah angin, setelah itu terdengarlah bel 1 kali, lima orang satu persatu berterjun kebawah.

Bel dua kali harus berhenti, kalau tidak nanti terjun kehutan. Sekali lagi bel 1 kali terdengar, berterjunlah radio dan barang-barang lainnya. Kini tibalah waktunya untuk Kapten Harry terjun. Mula-mula ia mengambil kacamata untuk disimpan dalam sakunya, kemudian dia berjabatan tangan dengan saya sambil mengucapkan "Salam kepada teman-teman dan mas Tit" (Dimaksud Kapten Udara Muharto, masih saudara). Kering satu kali lagi terdengar maka semuanya satu persatu terjun kebawah.

Ada seorang diantara ke 14 anggota itu tidak mau terjun. Mungkin karena sangat takut ia dalam keadaan sangat pucat berjongkok dijok belakang pesawat. Ketika diketahui oleh Komandan sdr. Tjilik Riwut maka iapun sangat marah lalu menuju ketempat prajurit yang ketakutan, itu, menyatakan apa sebabnya tidak berani terjun.

Kurang lebih setengah jam kemudian dan setelah diperiksa dengan teliti, apakah payung-payung terbuka semua maka kamipun menuju kearah selatan. Ke Yogya sebagai arah tujuan kami mengambil Kepulauan Karimun Jawa, dan masuk Jawa melalui gunung Muria. Dalam perjalanan kapten sering mengontrol ukuran bensin. Kami sudah 6 jam dan 30 menit berada antara bumi dan langit. '

Untung dalam perjalanan pulang ke Jawa kami mendapat angin buritan (tail wind). Karena cuaca diatas laut jawa baik sekali waktu masuk Jawa, diatas Gunung Muria kami harus terbang diantara awan untuk sewaktu-waktu menyelundup masuk kedalam awan kalau-kalau ada pesawat musuh. Pada waktu itu Eskadron pemburu Belanda ditempatkan di Semarang.

Kira-kira jam 11 siang, pesawat mendarat di Meguwo dengan selamat dan dengan dengan sisa bensin untuk 15 menit (...) (Riwut, 1993: 172-175).

Dari 13 orang yang berani terjun adalah:

1. Letnan Muda Iskandar..... berasal dari Sampit.
2. Letnan Muda J. Bitak..... berasal dari Kelapabaru.
3. Letnan Muda Dachlan..... ..... berasal dari Sampit.
4. Letnan Muda C. Willems. ..... berasal dari Kuala Kapuas.
5. Letnan Muda Darius. ..... berasal dari Kasongan.
6. Sersan Majoor Achmad Kosasih. ..... berasal dari Mangkahui Barito.
7. Letnan Muda Ali Akbar. ..... berasal dari Balikpapan.
2. Letnan Muda M. Amiruddin. ..... berasal dari Kahayan Hulu.
3. Letnan Muda Emanuel. ..... berasal dari Kahayan Hulu.
4. Letnan Muda Marawi. ..... berasal dari Rantau Pulut.
5. Letnan Muda Suyoto. .....:... berasal Ponorogo.

12. Kapten Udara Harry Hadi Turnantri. ..... berasal dari Semarang.
13. Letnan Muda Bachri. ..... berasal dari Mapulang Barabai.

Ternyata, setelah penerjunan dilakukan, Sepanbiha daerah sasaran belum sampai, mereka terjun di daerah Sambi. Pasukan diterjunkan di daerah yang berhutan lebat dengan ketinggian pohon mencapai 40 meter. Latihan singkat yang mereka persiapkan, dan pelajaran terjun payung yang hanya teoritis ternyata tidak memberikan ketrampilan yang memadai sehingga mereka salah mengarahkan payungnya (Riwut, 1993: 172). Konon tidak ada satupun dari ke 13 penerjun ini yang berhasil mulus mencapai tanah. Baru dua hari setelah penerjunan ke 13 orang ini dapat berkumpul. Hari kelima setelah mereka berkumpul baru di ketemukan radio yang harus mereka pasang untuk komunikasi dengan Yogyakarta. Sayang radio tadi air aki nya tumpah sehingga tidak dapat di pergunakan lagi (Yusuf dan Kassu, 1989: 230).

Gb 4.2. Monumen Penerjunan Payung di Sambi. Monumen ini berada di Pangkalan Bun

Rupa-rupanya penerjunan payung pertama oleh bangsa Indonesia ini di ketahui oleh Belanda. Mereka langsung mencari para penerjun tadi. Sedang para penerjun tadi dalam keadaan tak tahu arah bertemu dengan seorang pemburu bernama Daser. Dari orang inilah mereka tahu bahwa mereka mendarat di Sambi. Menyadari radio tersebut tidak dapat dimanfaatkan; maka untuk menjaga kewaspadaan salah seorang anggota pasukan bernama Marawi diperintahkan melakukan penyelidikan sekitar Sambi dan terus ke Rantau Pulut (jarak keduanya sekitar 20 Km) untuk mengetahui apakah Belanda berada di sekitar itu, Marawi adalah salah seorang Putra Rantau Pulut, kepergian Marawi ditunggu tak pernah kembali ke pasukan, akhirnya Iskandar memutuskan ke 12 orang anggota pasukannya untuk berangkat meninggalkan Sambi menuju ke kampung panahan.

Gb 4.3. Monumen Pesawat terbang yang dipakai untuk menerjunkan pasukan di Sambi. Monumen ini berada di Pangkalan Bun.

Melalui Jagui dan Anton, penduduk setempat yang menjadi penunjuk arah, pasukan terjun payung ini akan membangun kubu 4 km di utara Panahan. Sayang Jagui dan Anton yang pamit akan pulang panahan tempat tinggalnya, ternyata tidak kembali lagi. Belakangan diketahui bahwa Jagui terpaksa tidak berani pulang karena dicari Belanda sedang istrinya ditangkap sebagai ganti, sedang Anto ditangkap tanpa sempat melarikan diri.

Beberapa bulan pasukan ini menembus rimba yang lebat dengan logistik yang kurang. Selain Sambi dan Panahan, mereka juga singgah di Rantau Pulut, Panyumpa, Suma, Pangke dan akhirnya tiba di kampung Mujang. Pada tanggal 23 Nopember 1947 di Pondok tua sebuah perladangan penduduk di tepi Sungai Menahan anak dari Sungai Seruyan merupakan akhir dari Penjelajahan Pasukan Payung R.I. pertama. Ditempat ini ke 12 orang anggota Pasukan Payung tersebut, diserang dan ditembak Belanda, sebagai akibat dari penghianatan yang dilakukan oleh Kepala Kampung Mujang. Dalam penyegapan ini Iskandar, Harry Hadi Sumantri, dan Achmad Kosasih gugur, sedang yang lain berhasil lolos. Konon mereka yang lolos ini akhirnya juga tertangkap Belanda.

Dari segi teknis kemiliteran, penerjunan payung ini bisa dianggap gagal, tetapi dari segi psikologis, merupakan keberhasilan yang luar biasa. Penerjunan payung ini telah menjadi berita di Kalimantan dan menjadi api yang mengobar semangat

para pejuang yang masih terus bergerilya. Waktu pertama kali mendengar berita penerjunan payung ini rakyat Kalimantan hampir tidak percaya, tetapi akhirnya mereka yakin dan menambah semangat untuk merdeka dan yakin bahwa orang Indonesia tidak kalah dengan Belanda. Belanda sendiri menjadi panik dan malu, sebab penerjunan yang spektakuler ini telah melewati beribu-ribu tentara NICA yang juga terkenal dengan skuadron tempur udaranya. Dalam rasa malu itu mereka menangkap dan menahan semua rakyat kampung Sambi, Riam, dan Panahan kemudian di simpan di bawah rumah, tidak diberi makan entah itu laki-laki atau perempuan. Rakyat ini dituduh telah memberikan bantuan kepada pasukan payung RI tersebut (Riwut, 1993: 172). Selain itu, Masyarakat Banjarmasin merasa terkejut dengan adanya proses pemeriksaan perkara pasukan payung Republik Indonesia yang diperiksa dan di adili oleh pengadilan Belanda, yang kemudian di jatuhi hukuman yang berat oleh pengadilan Belanda, sedangkan sebagian lagi telah mengorbankan jiwanya bagi menegakkan kemerdekaan tanah air (Riwut, 1993: 170)..

Ketika pada akhir bulan Maret 1950, setelah kedaulatan RI di akui oleh dunia internasional, jenazah ketiga Pahlawan ini akan diangkat dan dipindahkan ke Yogya, yang diketemukan hanya Kerangka jenazah almarhum Harry Hadi Sumantri, sedangkan kerangka jenasah Iskandar dan Achmad Kosasih tidak diketemukan. Kini, untuk mengenang kepahlawanan penerjun Payung ini, tanggal 17 Oktober menjadi hari Kopassanda.

4.14. Penutup.

Tanggal 14 Januari 1946 daerah Kotawaringin menjadi daerah pendudukan Belanda dengan NICA nya dan akan dimasukkan daerah bagian Dayak Besar, menjadi negara bagian. Dewan Kotawaringin dengan mati-matian mempertahankan daerah Kotawaringin berdiri sendiri yang maksudnya berhubungan langsung kepada Pusat sehingga sampai pada akhir tahun 1949 kedaulatan telah diterima. Tanggal 1 Mei 1950 Kotawaringin telah diterima masuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada tanggal 1 Mei 1950 Dr. Murdjani Gubernur Republik Indonesia datang ke Kotawaringin di dampingi oleh Residen Winarno Danuatmodjo, Residen M. Hanafiah, Mayor Tjilik Riwut, M. Agus Ibrahim, Akad, timbang terima dari Pemerintah Bestuur Komisi sehingga di bentuk Acting Kepala Daerah Kotawaringin untuk sementara menyusun terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat setempat, dan daerah Kotawaringin masih disebut daerah "Swapraja Kotawaringin".

Dari tuturan perjuangan di Kotawaringin Barat kita selalu melihat kenyataan pahit bahwa pasukan RI yang didukung oleh kekuatan rakyat selalu terpukul mundur. Kita juga melihat penderitaan rakyat yang luar biasa karena rumah-rumahnya dibakar Belanda dan mereka harus melarikan diri kehutan. Semua itu adalah kenyataan pahit perjuangan kemerdekaan di Kotawaringin Barat.

Tetapi di balik segala kekalahan itu kita juga melihat bahwa Angkatan Muda, KNI dan rakyat semuanya telah berjuang untuk menentang penjajahan. Disaat kota-kota dijawa di duduki oleh NICA dan Pemerintah RI harus mengungsi ke Yogyakarta, rakyat di Kotawaringin Barat dengan gigih terus menerus menentang dan melawan Belanda.

Memang semua pasukan yang dikirim dari Yogyakarta oleh Pangeran Muhammad Noor, bukanlah untuk mengalahkan NICA yang berjumlah besar dan memiliki peralatan perang yang jauh lebih canggih. Semua misi dari Jawa ke Kalimantan tadi hanyalah untuk menyulut semangat pantang menyerah pada rakyat Kalimantan sementara politisi di Yogyakarta berjuang melalui jalur di plomatik. Kegigihan melawan Belanda, yang berhasil disulut terus menerus itu tadi, rupanya telah menunjukkan ke dunia internasional bahwa kembalinya Belanda ke Indonesia memang di tolak habis oleh Rakyat Indonesia pada umumnya dan rakyat Kotawaringin adalah rakyat yang dengan militan menolak Belanda. Dari sini sebenarnya perjuangan seluruh rakyat Kotawaringin Barat memiliki makna mendalam bagi kemerdekaan.

BAB LIMA
KABUPATEN KOTAWARINGIN

5.1. KOTAWARINGIN DALAM KONTEKS KALIMANTAN TENGAH

Sebelum kita menginjak pada berdirinya Kotawaringin Barat sebagai kabupaten, ada baiknya kita melihat konteks sejarahnya pada Provinsi Kalimantan Tengah. Provinsi ini merupakan provinsi yang berdiri semenjak Indonesia merdeka, tetapi merupakan perjuangan rakyat Kalimantan Tengah untuk mendapatkan ruang hidup yang lebih baik.

Tanggal 17 Juli 1957 merupakan saat yang bersejarah bagi Kalimantan Tengah. Pada hari itu Presiden Republik Indonesia Ir. Soekarno meletakkan batu pertama pembangunan Pahandut (Palangkaraya) sebagai Ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah yang di bentuk dengan Undang-Undang Nomor 21 / 1957 tanggal 23 Mei 1957. Daerah ini, sebelumnya termasuk bagian dari Provinsi Kalimantan Selatan. Karena itu sejarah Provinsi Kalimantan Tengah erat kaitannya dengan sejarah Kalimantan Selatan khususnva, dan sejarah Kalimantan pada umumnya.

Perjuangan rakyat Kalimantan Tengah untuk meningkatkan status wilayahnya menjadi salah satu Provinsi Republik Indonesia di Pulau Kalimantan, merupakan suatu proses yang cukup panjang, dan menarik. Secara bertahap dan terencana tuntutan sanubari rakyat Kalimantan Tengah untuk mendapatkan status provinsi di mulai dengan pembentukan Panitia Penyalur Hasrat Rakyat Kalimantan Tengah di Banjarmasin, pada akhir tahun 1950. Kemudian pada Kongres Serikat Kaharingan Dayak Indonesia (SKDI) yang di langsungkan pada tanggal 22 Juli 1953 di Kampung Bahu Palawa, Kahayan Tengah, tuntutan itu semakin nyaring terdengar.

Namun sejauh itu, tuntutan aspirasi rakyat ini belum dapat dipenuhi oleh pemerintah pusat, yang berpegang pada pertimbangan teknis pemerintahan. Ada banyak faktor yang belum dapat dipenuhi daerah ini untuk di tetapkan menjadi satu provinsi, antara lain dikatakan :

I. Potensi ekonomi daerah Kalimantan Tengah masih belum memadai dan mampu untuk membiayai urusan rumah tangga daerahnya sebagai Daerah Otonom.
2. Kekuasaan negara pada saat itu belum mengizinkan untuk membentuk provinsi baru.
3. Masih kurangnya sumber daya manusia di daerah terutama yang terampil dan terdidik dalam tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Sebaliknya masyarakat Kalimantan Tengah menganggap bahwa wilayahnya mampu berdiri sebagai daerah otonom, dengan mengemukakan berbagai alasan termasuk potensi-potensi yang dimiliki wilayah itu. Mereka mengajukan alasan antara lain:

1. Dalam kenyataannya sebagian besar kehidupan perekonomian dan

perdagangan di Banjarmasin, di topang oleh arus barang/hasil bumi/ produksi dari Wilayah Kalimantan Tengah, aliran Sungai Barito, Kapuas, Kahayan, Katingan, dan lain-lain.

2. Kurangnya tenaga terdidik dan terampil di bidang pemerintahan dan pembangunan dapat saja diatasi oleh / dipenuhi dari Pusat, mengingat Provinsi Kalimantan Tengah tetap merupakan dan satu kesatuan dalam Negara Republik Indonesia.
3. Bahwa pembiayaan oleh negara tentu saja tidak harus sekaligus, tetapi bisa dilakukan secara berangsur-angsur sesuai kemampuan pemerintah pusat pada saat itu.

Walaupun demikian tuntutan masyarakat setempat tersebut tidak segera mendapat persetujuan pemerintah pusat, bahkan menjadi berlarut-larut. Situasi demikian sampai melahirkan tindakan-tindakan kekerasan yang menjurus ke bentuk perjuangan fisik, seperti timbulnya Gerakan Mandau Talawang Pancasila (GMTP) yaitu gerakan pembela keadilan dan Pasukan Sumpit Kanyawung yang anggota-anggotanya terdiri dari kaum muda. Gerakan ini cukup meluas dan sempat menimbulkan gejolak-gejolak dalam masyarakat. Bahkan pada tanggal 21 November 1953 menimbulkan peristiwa berdarah di Buntok, yang meminta korban jiwa.

Menyadari masalahnya tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, maka tokoh-tokoh masyarakat Kalimantan Tengah membentuk Dewan Rakyat yang wakil-wakilnya di pilih secara demokratis dari masing-masing wilayah/daerah. Langkah itu di ikuti dengan pembentukan Kongres Rakyat, yang mengadakan sidang pada tanggal 2-5 Desember 1956 di Banjarmasin. Hadir pada kongres itu sekitar 600 utusan masyarakat. Kongres menghasilkan beberapa keputusan yang antara lain adalah : Mendesak kepada Pemerintah Republik Indonesia agar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan pengertian sebelum terlaksananya Pemilihan Umum untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kalimantan Tengah sudah di jadikan suatu provinsi otonom.

Ketua Presidium Kongres Mahir Mahar menandatangani naskah keputusan Kongres Rakyat Kalimantan Tengah itu yang kemudian di sampaikan kepada Gubernur Kalimantan R.T.A Milono dan Pemerintah Pusat. Selanjutnya sidang Pleno Dewan Rakyat Kalimantan Tengah tanggal 7 Desember 1956 di Banjarmasin yang ditanda tangani oleh Dewan Mahir Mahar dan Sekretaris II H. Ukur, memutuskan untuk mengajukan saran kepada pemerintah sebagai berikut:

1. Memohon kepada pemerintah agar mengeluarkan suatu pernyataan mengakui dan menyetujui sepenuhnya akan tuntutan rakyat Dewan Kalimantan Tengah.
2. Pelaksanaan dari pengakuan ini haruslah serempak. dengan pengangkatan gubernur-gubernur untuk Kalimantan Tengah, Timur, dan Barat, dengan menunjuk seorang untuk menjadi Gubernur pembentuk Provinsi Kalimantan Tengah.

Perjuangan menjadikan Kalimantan Tengah menjadi salah satu provinsi didukung pula oleh organisasi sosial dan politik setempat seperti Partai Dayak (PD), Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Rakyat Nasional (PRN), IPKI, dan lain-lain. Demikian pula tokoh-tokoh masyarakat setempat seperti Tjilik Riwut yang saat itu sebagai Bupati Kabupaten Kotawaringin, Botar, Bupati Kabupaten Barito serta lain-lainnya, sibuk menghubungi Pemerintah Pusat dan Perlemen Republik Indonesia. Pada saat itu Pemerintah Pusat memang sedang menggodok pemekaran wilayah Pulau Kalimantan menjadi tiga provinsi. Desakan masyarakat Kalimantan Tengah untuk memperoleh status semakin mematangkan rencana yang tengah di garap tersebut. Namun ternyata ketetapan yang lahir belum mengesahkan Kalimantan Tengah dalam status provinsi sendiri, dan hanya mengesahkan tiga provinsi di Kalimantan.

Pemerintah Pusat menetapkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1956 tentang pembagian Kalimantan menjadi tiga provinsi yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Ketika ketetapan mulai di berlakukan pada 1 Januari 1957, rakyat Kalimantan Tengah merasa kurang puas, meskipun dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1956 tersebut dinyatakan bahwa Kalimantan Tengah akan dijadikan suatu provinsi otonom dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga tahun.

Rakyat Kalimantan Tengah merasa janji waktu tiga tahun tersebut belum dapat menjadi pegangan yang positif. Karena itu sebagian rakyat melanjutkan perjuangan dengan kekerasan sehingga terjadilah gangguan keamanan dan peristiwa-peristiwa berdarah seperti di Dayu, Tangkahen, Tumbang Samba, Kasongan-Katingan, Pahandut (Kahayan), dan di Masaran (Kapuas).

Sebagai kelanjutannya Dewan Rakyat Kalimantan Tengah mengirimkan utusan menemui Gubernur Kalimantan R.T.A. Milono dan Utusan Pemerintah Pusat. Hasilnya, terjadilah perdamaian di desa Madara, Barito Selatan antara pihak pemerintah dan GMTP. Atas permintaan Gubernur R.T.A. Milono, pihak pemerintah dalam perjanjian ini diwakili oleh Mahir Mahar disertai Lettu Wilson Ukur dan lain-lain. Dalam perjanjian itu disepakati antara lain : Tuntutan rakyat Kalimantan Tengah untuk membentuk daerah otonom dapat disetujui dan agar putra-putri Kalimantan Tengah yang tergabung dalam GMTP menghentikan segala aktivitasnya.

Akhirnya titik terang pun muncul dengan keluarnya pengumuman tentang terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah oleh Ketua Koordinasi Keamanan Daerah Provinsi Kalimantan R.T.A Milono pada tanggal 10 Desember 1956. Dijelaskan pula bahwa Pemerintah Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah untuk sementara berkedudukan di Banjarmasin Kalimantan Selatan karena masih harus menunggu persiapan-persiapan dan pembangunan Ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Pahandut yang kemudian dikenal dengan nama Palangkaraya. Kantor sementara bertempat di Kantor Gubernur Kalimantan dan Gubernur R.T.A. Milono sebagai Gubernur pada Kementerian Dalam Negeri, ditunjuk/ditugaskan sebagai Gubernur Pembentuk Provinsi Kalimantan Tengah.

Bersamaan dengan itu, untuk memulihkan keamanan dan ketertiban di Kalimantan Tengah, dibentuk Panitia Ketertiban dan Keamanan yang terdiri dari enam orang anggota presidium Dewan Rakyat Kalimantan Tengah yang diketuai oleh Mahir Mahar. Kemudian untuk menyusun persiapan pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah di keluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor UP. 34/41/24 tanggal 28 Desember 1956, yang antara lain menetapkan bahwa mulai 1 Januari 1957, membentuk kantor Persiapan Pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah di Banjarmasin yang berkedudukan langsung di bawah Kementerian. Dalam Negeri. Langkah berikutnya pada 23 Januari 1957 Gubernur R.T.A Milono sebagai pejabat tinggi dalam Kementerian Dalam Negeri yang ditunjuk menjadi Gubernur Pembentuk Provinsi Kalimantan Tengah membentuk panitia yang di ketuai oleh Mahir Mahar. Tugas panitia meneliti dan menetapkan lokasi yang tepat untuk Ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Akhirnya ditetapkan Pahandut sebagai lokasi ibu kota provinsi yang bakal lahir tersebut. Kelak desa ini menjelma namanya menjadi Palangkaraya.

Dengan berkembangnya situasi menuju kesepakatan ini, pada tanggal 5 Maret 1957 GMTPS dilebur menjadi BPPKT (Barisan Pemuda Pembangun Kalimantan Tengah) dengan pimpinan CH. Simbar. Untuk lebih memantapkan iklim keamanan dan ketertiban maka diadakan lagi perdamaian antara pemerintah dengan eks GMTP masing-masing di Tehang Sampit 11 Mei 1957, di Pahandut 18 Mei 1957 dan Dayu Barito 23 Mei 1957. Pada tanggal 18 Mei 1957 dalam rangka upacara adat peresmian GMTP menjadi BPPKT yang berlangsung di Desa Pahandut, Gubernur R.T.A. Milono telah berkenan menyampaikan pidato sambutan yang isinya, antara lain bahwa Pahandut telah dipilih menjadi Ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan hasil pilihan rakyat Kalimantan Tengah. Selanjutnya Gubernur Milono, mengusulkan nama baru Ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan jiwa pembangunan dan tujuan sucinya, maka di pilih dan diberikan nama Palangkaraya yang artinya tempat yang suci, mulia, dan besar.

Akhirnya dengan Undang-Undang Darurat Nomor 10 tahun 1957 yang mulai berlaku 23 Mei 1957 secara resmi terbentuklah Provinsi Kalimantan Tengah dengan ibu kotanya Pahandut. Kemudian dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 1958 (LN Nomor 27 tahun 1958) sebutan Pahandut diganti dengan Palangkaraya.

Dengan selesainya sebagian pembangunan gedung Kantor Pemerintahan dan Perumahan Pegawai, maka dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Desember 1959 Nomor Des. 52/12/2-206, kedudukan pusat Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terhitung 20 Desember 1959 di pindahkan dari Banjarmasin ke Palangkaraya.

5.2. BERDIRINYA KABUPATEN KOTAWARINGIN

Jauh sebelum pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah, bersamaan dengan berakhirnya perang revolusi dan disusul dengan pengakuan Kedaulatan oleh Belanda tanggal 27 Desember 1949 lahirlah Kabupaten Kotawaringin dengan ibu kota Sampit. Kelahiran kabupaten baru ini di kukuhkan dengan Undang Undang Nomor 22 tahun 1948. Sebagai bupati di lantiklah seorang bekas pejuang yang

bernama Tjilik Riwut. Kotawaringin Barat pada waktu itu merupakan daerah swapraja yang setingkat kawedanan dengan ibu kotanya Pangkalan Bun dengan wedana yang bernama Basri. Dengan kondisi peralihan pemerintahan maka pemerintahan Kabupaten Kotawaringin. Menurut UU Nomor 22 tahun 1948 daerah Kotawaringin Barat sekarang dimasukkan pada wilayah daerah swapraja Kotawaringin yang berada di bawah Kabupaten Kotawaringin. berjalan dengan fasilitas yang ada. Bangunan-bangunan pemerintahan memakai bangunan yang pernah di pergunakan oleh Pemerintahan Belanda dan Jepang. Tetapi hal ini tidak mengurangi semangat para pemimpin dan rakyatnya di dalam menegakkan pemerintahan yang bersih. Lembaga legislatifnya yakni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara (DPRDS.) Kabupaten Kotawaringin berkedudukan di Sampit.

Pada saat terbentuknya Kabupaten Kotawaringin ini hampir tidak ada pembangunan di perkotaan. Kota-kota di daerah swapraja Kotawaringin Barat merupakan kota air yang tergantung dari transportasi air. Bahkan hubungan ke ibu kota provinsipun di lakukan melalui laut dan sungai. Kota yang menjadi ajang perjuangan kemerdekaan memerlukan pembangunan agar dapat hidup secara normal kembali.

Sebagai Daerah Swapraja, Kotawaringin Barat terbagi menjadi beberapa Kecamatan yang di kepalai oleh seorang Asisten Wedana atau Kiai yang dikemudian hari disebut camat :

I. Kecamatan Arut Selatan ibukotanya Pangkalan Bun.
2. Kecamatan Kumai ibukotanya Kumai.
3. Kecamatan Sukamara ibukotanya Sukamara.
4. Kecamatan Bulik ibukotanya Nanga Bulik.

Pembagian wilayah kecamatan ini mengikuti pembagian onderdistrict yang telah di lakukan oleh Belanda. Tetapi karena prasarana dan sarana transportasi masih menggunakan sungai sehingga wilayah kecamatan yang terletak jauh dari sungai menjadi sulit terjangkau. Ibu kota-ibu kota kecamatan tadi sebenarnya telah berkembang menjadi kota semenjak zaman Belanda. Dampak perang seperti pembakaran rumah-rumah penduduk seperti yang terjadi di Sukamara tidak mengubah status kota tadi sebagai tempat pengumpul hasil-hasil bumi dan pusat distribusi barang-barang yang di datangkan dari luar daerah.

Sedang kegiatan politik di daerah swapraja ini di wadahi oleh partai-partai politik yakni

1. Partai Masyumi.
2. Partai Nasional Indonesia (PNI).
3. Partai Kristen Indonesia (Parkindo) .
4. Sarekat Kerja Indonesia (S.K.I).
5. Badan Pekerja Republik Indonesia (B.P.R.I).
6. Persatuan Wanita Indonesia (Perwani).

Walaupun terbagi di dalam beberapa partai Politik, tetapi tidak mengurangi semangat persatuan di dalam masyarakat Kotawaringin Barat. Kehidupan modern yang mulai di kenal semenjak jaman Belanda terus berkembang dengan berbagai organisasi sosial.

Semangat untuk kehidupan berdemokrasi tampak dari terbentuknya DPRDS Kabupaten Kotawaringin. Karena daerah Swapraja Kotawaringin Barat merupakan sebagian dari daerah Kabupaten Kotawaringin maka untuk wakil-wakil rakyat dari daerah ini duduk di lembaga tersebut dilakukan pemilihan dan diambil dari Partai yang ada.

Atas dasar ini pada waktu itu terpilih :

1. M. Abdullah Mahmud	dari Partai Masyumi.
2. Ahmad Said	dari B.P.R.I.
3. Dahlan Abas	dari Partai Masyumi.
4. M. Sahloel	dari P.N.I.
5. Gusti M. Sanusi	dari P.N.I.
6. Djainuri	dari S.K.I.
7. I. Ismail	dari Parkindo.

Menurut catatan Lontaan, M. Sahloel karena tidak dapat hadir pada saat pelantikan, akhirnya di ganti oleh Azhar Mukhtas. Para wakil rakyat tadi hampir semuanya adalah bekas para pejuang. Abdulah Mahmud misalnya adalah orang pertama yang mengabarkan kemerdekaan Republik Indonesia kepada masyarakat Kotawaringin Barat.

Ketujuh orang ini yang mewakili daerah Swapraja Kotawaringin di DPRDS Kabupaten Kotawaringin yang keseluruhannya terdapat 18 kursi.

Sebagai keseluruhan anggota DPRDS. Kabupaten Kotawaringin adalah sebagai berikut :

1.	R. Herman Sakban	Ketua	dari Muhammadiyah
2.	Ahmad Said	Wakil Ketua	dari B.P.R.I.
3.	H. Abd. Mahmud	Anggota	dari Partai Masyumi
4.	Dahlan Abas	Anggota	dari Partai Masyumi
5.	Manopol. M.	Anggota	dari Partai Masyumi
6.	Inchon Mahin	Anggota	dari Partai Masyumi
7.	H.Abd.Rasyid	Anggota	dari Partai Masyumi
8.	HA. Kustar	Anggota	dar i P.N.I.
9.	Gst.M.Sanusi	Anggota	dari P.N.I.
l0.	Azhar Mukhtas	Anggota	dari P.N.I.
11.	M.Usman Hasan	Anggota	dari P.S.S.I.
12.	I. Ismail	Anggota	dari Parkindo

13. Hans Timbung	Anggota	dari Parkindo
14. D. Umar	Anggota	dari Parkindo
15. M. Dimel	Anggota	dari P.N.I.
16. Ibu Tjilik Riwut	Anggota	dari Perwani
17. Djainuri	Anggota	dari S.K.I.
18. Hasyim Djapar	Anggota	dari B.P.R.I.

Di antara anggota DPRDS. ini di ambil 3 orang menjadi anggota Dewan Pemerintah Daerah Sementara (DPDS.) yakni .

1. Hasyim Djapar	Wakil Ketua / Anggota.
2. HA. Kustar	Anggota
3. Dahlan Ahas	Anggota

Semua anggota DPRDS ini di lantik di tahun 1951, yakni sebelum terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun orang orang yang pernah menjabat sebagai Wedana/Wakil Kepala Daerah Swapraja Kotawaringin berturut-turut adalah sebagai berikut :

1. Basri. BA. (kemudian menjadi Residen pada Kantor Gubernur KDH. Dati I Kalimantan Selatan).
2. Gst. Ahmad.
3. M. Saleh.
4. Abd. Muis (kemudian menjadi Residen pada Kantor Gubernur KDH. Dati I Kalimantan Barat).
5. Rozani.
6. Syukur.
7. C. Mihing.

5.3. BERDIRINYA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

5.3.1. Proses pembentukan kabupaten baru

Bagian terpenting dari sejarah perjuangan Kotawaringin Barat adalah usaha berdirinya kabupaten ini. Sebab pada era ini penduduk Kotawaringin Barat di tantang untuk mengurus daerahnya sendiri tanpa pengaruh pemerintahan dari luar. Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia Kabupaten Kotawaringin Barat di dorong untuk lebih maju dari masa-masa sebelumnya.

Setelah berjalan beberapa tahun lamanya daerah ini berada di dalam lingkungan Kabupaten Kotawaringin dengan ibu kota Sampit, atas dasar kemauan rakyatnya yang di salurkan melalui Partai-Partai/Organisasi, agar Daerah Swapraja Kotawaringin Barat dengan ibu kotanya Pangkalan Bun memisahkan diri dari Kabupaten Kotawaringin dan penghapusan Swapraja menjadi suatu Daerah Kabupaten berdiri sendiri.

Keinginan ini oleh wakil wakilnya yang duduk di DPRDS diperjuangkan dalam sidangnya yang pertama tahun 1955 dengan mengajukan suatu mosi tertanggal Sampit 21 Juni 1955 yang ditanda tangani oleh :

1. Dahlan Abas.
2. Abdullah Mahmud.
3. Azhar Mukhtas.
4. Ahmad Said.
5. Djainuri.
6. Gusti M. Sanusi.

Mosi tersebut oleh sidang DPRDS dapat di setujui dan di kuatkan dengan keputusan DPRDS. Kabupaten Kotawaringin yang merupakan suatu resolusi tertanggal Sampit 30 Juni 1955 Nomor A-21-12-Dpr-55 yang disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Gubernur/Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
3. Residen Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
4. Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin di Sampit.

Dengan keputusan DPRDS Kabupaten Kotawaringin tersebut setelah sampai di pemerintah pusat, kemudian datanglah utusan dari Parlemen Pusat ke Pangkalan Bun untuk meninjau atau melihat dari dekat keadaan daerah dan masyarakatnya, terutama tentang keinginan yang menjiwai mosi tersebut di atas apakah memang benar-benar datangnya dari masyarakat.

Pada saat itu bersamaan dengan keinginan rakyat Kalimantan Tengah untuk mendirikan provinsi tersendiri yang terpisah dari Kalimantan Selatan. Baru setelah empat tahun pemerintah pusat mengeluarkan UU Nomor 27 tahun 1959 tentang pembagian Dati II Kotawaringin menjadi dua daerah Kabupaten atau pembentukan daerah Kabupaten atau Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan ibu kota Sampit dan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan ibu kota Pangkalan Bu'un, yang pada waktu itu sudah berada dalam lingkungan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten Kotawaringin Barat yang di dirikan ini memiliki luas 21.000 Km2 atau 13,68% dari luas Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan Berdirinya Kabupaten Baru ini, maka semakin intensif pula pemanfaatan infrastruktur transportasi yang ada. Lapangan terbang Iskandar di Pangkalan Bun menjadi pintu gerbang kabupaten terhadap pulau Jawa. Posisi ibukotanya yang strategis di bagian Selatan Kalimantan Tengah membuat Pangkalan Bun kota yang cepat berkembang dengan berbagai kegiatan ekonomi.

Dengan latar belakang berbagai perjuangan tersebut di atas Kabupaten Kotawaringin Barat di resmikan oleh Gubernur Tjilik Riwut yang bertindak a.n. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 3 Oktober 1959. Peresmian tadi mengambil tempat di balai Sembaga Mas Pangkalan Bun dalam

suatu upacara resmi, dengan C. Mihing sebagai Bupati Kepala Daerah. Jadi dalam sejarahnya Kabupaten Kotawaringin Barat beliau adalah merupakan Bupati yang pertama dan sebagai aparat pemerintah yang di tugaskan mempersiapkan guna menyambut lahirnya daerah ini menjadi daerah Kabupaten. Bupati C. Mihing berakhir tugasnya di daerah ini pada tanggal 22 Maret 1960, karena mendapat tugas baru atau di pindahkan sebagai Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit. Sebagai penggantinya oleh Pemerintah Pusat diangkatlah J.C. Rangkap.

Untuk kelengkapan Badan Badan/Lembaga Lembaga dalam Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan lahirnya Pen. Pres. Nomor 5/6 tahun 1960 dan berdasarkan S.K. Gubernur Kalimantan Tengah tanggal 17 Maret 1960, Nomor 35-PD-I-1960 diangkatlah 4 orang anggota Badan Pemerintah Harian (BPH) yang terdiri dari :

1. Gusti M. Sanusi
2. Lie Sian Beng
3. Ishak Permana
4. Djainuri

Badan Pemerintahan Harian merupakan suatu Badan berfungsi membantu tugas Bupati dalam menjalankan roda Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Selanjutnya dengan SK Gubernur Kalimantan Tengah tanggal 17 Oktober 1960 Nomor Okt-317/60/Dprdgr di bentuklah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong (DPRDGR) dengan beranggotakan sebanyak 15 orang yang terdiri sebagai berikut :

1. JR. Lama	Wakil Ketua	dari P.N.I.
2. P. Arianingrat	Anggota	dari P.N.I.
3. Said M. Tji	Anggota	dari N.U.
4. Abdussukur	Anggota	dari Seniman
5. A. Kamas	Anggota	dari P.N.I.
6. LE. Djuang	Anggota	dari P.K.I.
7. Gst. Abd. Gani	Anggota	dari N.U.
8. Said Husin	Anggota	dari Angkatan 45
9. H. Barak	Anggota	dari Pengusaha Nas.
10. Selma	Anggota	dari Wanita
11. Ajang Bahan	Anggota	dari ABRI/Pol.
12. Gst. Kiting	Anggota	dari Pemuda
13. Gst. Hermansyah	Anggota	dari N.U.
14. Mas Karim Dw.	Anggota	dari Tani
15. HA.Mas Alipandi	Anggota	dari ABRI/AD.

Oleh Gubernur Kalimantan Tengah, Tjilik Riwut dalam sidang terbuka DPRDGR. Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun tanggal 12 Januari 1961 bertempat di ruangan Balai Prajurit bertindak atas nama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah melantik dengan resmi DPRDGR Kabupaten Kotawaringin Barat.

Untuk mendapatkan gambaran tentang sejarah perkembangan Kabupaten Kotawaringin Barat, maka perkembangan di bawah ini akan di jelaskan perkembangan secara sektoral sebagai berikut :

5.3.2. Pemerintahan.

l. Pada saat Kabupaten Kotawaringin Barat di dirikan, wilayah kabupaten ini terbagi atas 3 Kawedanan, 8 Kecamatan dan 143 kampung yang berpenduduk sejumlah 52.000 jiwa.

a. Kawedanan Kotawaringin Selatan dengan ibukota Pangkalan Bun, di pimpin oleh Wedana Soepomo. BA. meliputi 3 Kecamatan :
   - Kecamatan Arut Selatan ibu kota Pangkalan Bun.
   - Kecamatan Kumai ibu kota Kumai.
   - Kecamatan Arut Utara ibu kota Pangkut.

b. Kawedanan Kotawaringin Utara ibu kota Nanga Bulik, di pimpin oleh Wedana Achmad Said, meliputi 3 Kecamatan :
   - Kecamatan Bulik ibu kota Nanga Bulik.
   - Kecamatan Lamandau ibu kota Tapin Bini.
   - Kecamatan Kotawaringin Lama ibu kota Kotawaringin Lama.

c. Kawedanan Sungai Tabuk ibu kota Sukamara, di pimpin oleh Wedana R. Sucherman, meliputi 2 Kecamatan :
   - Kecamatan Sukamara ibu kota Sukamara.
   - Kecamatan Balai Riam ibu kota Riam.

Seiring dengan perjalanan waktu, hingga tahun 1990 an untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan maka dilakukan pemekaran kecamatan dari empat kecamatan di atas menjadi 9 kecamatan seperti yang terlihat di tabel dibawah ini

2. Lembaga Lembaga/Badan Badan yang ada di daerah ini antara lain :
   a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong.
   b. Front Nasional Tk. II, Tk. III.
   c. Komando Operasi Gerakan Makmur (KOGM).
   d. Bapengkop/Dedakop singkatan dari Badan Penggerak Koperasi/Dewan Daerah Koperasi.
   e. Komando Operasi Gerakan Olah Raga (KOGOR).
   f. Hansip, dan Panitia Panitia kecil yang bergerak dalam lapangan Sandang Pangan dan pendidikan.

3. Jawatan Jawatan/Dinas-Dinas tk. II yang ada antara lain:
   a. Dinas Pertanian Rakyat,
   b. Dinas Kehutanan,
   c. Dinas Perikanan Laut,
   d. Dinas Perikanan Darat,
   e. Dinas Karet Rakyat,
   f. Dinas Kehewanan,
   g. Jawatan Koperasi tk.II,
   h. Jawatan Penerangan,
   i. Insp. Pendidikan Masyarakat,
   j. Kantor Perw. Urusan Veteran RI,
   k. Kepenjaraan,
   l. P.T.T. lengkap dengan Station Radionya.

Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Luas (Km2)	Ibukota Kecamatan
Arut Selatan	16	2.400	Raja
Arut Utara	10	2.685	Pangkut
Balai Riam	11	1.199	Balai Riam
Bulik	23	2.456	Nanga Bulik
Dolang	19	1.370	Dolang
Jelai	9	1.600	Kuala Jelai
Kotawaringin	12	1.218	Kotawaringin
Kumai	16	4.456	Kumai
Lamandau	21	2.588	Tapin Bini

Sumber : Profil provinsi di Indonesia

Jawatan/Instansi yang sedang dalam pelaksanaan:
   a. Jawatan Agraria,
   b. Jawatan Agama,
   c. Jawatan Pajak Hasil Bumi,
   d. Insp. Pendidikan Rendah Kabupaten.

Pengembangan dinas dan kantor pemerintahan ini perlu dicatat sebagai bagian perubahan sistem manajemen kabupaten yang memberi dampak pada sistem pemerintahan selanjutnya.

5.3.3. Keamanan.

Dalam tahun 1962 ini nampak ada kemajuan pada bidang keamanan dalam daerah ini kalau dibandingkan dengan tahun-tahun yang telah lalu.

a. Status PDM kini sudah berobah menjadi Kodim 1104 Kotawaringin Barat dengan Buterpra di Kumai, Sukamara, dan Nanga Bulik dilengkapi dengan Kompi II/603 dan Polisi Militer serta bagian-bagian lainnya.

b. Detasemen AURI di Pangkalan Bu'un sedang giat dibangun.

c. Kepolisian District berobah menjadi Ressort Kepolisian Kab. Kotawaringin Barat tanggal 3 Pebruari 1962.

Selain dari itu kesatuan kesatuan yang ada hubungannya dengan hidang keamanan di daerah ini antara lain :

a. Pagar Praja pada tiap-tiap Kecamatan,

b. Kesatuan Kesatuan OPR sampai ke desa-desa,

c. Dalam pelaksanaan, TRI-KORA, telah pula dapat dilaksanakan latihan-latihan di daerah ini. Yang mengikuti latihan Kemiliteran dalam tahun 1962 tiga angkatan terdiri dari WALA dan WALI terjumlah ± 1500 orang dan melalui LKPS tk. II berjumlah 40 orang yang terdiri dari Pegawai Pegawai Negeri Sipil,

d. Kesatuan Kesatuan PRAMUKA,

e. Markas Cabang Legiun Veteran R.I. Kabupaten Kotawaringin Barat,

f. Kantor Kejaksaan Negeri sudah ada, sedangkan Kantor Pengadilan Negeri masih dalam perencanaan,

g. Sebagai kelengkapan dari bidang keamanan di daerah ini sedang di sempurnakan Lembaga Lembaga Kepala Adat atau Mantir Puluhan yang meliputi tiap-tiap sungai dengan istilah : "Demang" atau "Kepala Adat". BIDANG EKONOMI.

Melihat keadaan dewasa itu, di mana persoalan harga bahan keperluan sehari hari sama halnya dengan dilain lain daerah seluruh Indonesia. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada para pedagang di pasar, dengan adanya harga barang barang keperluan sehari hari tidak terlalu menyolok, kalau dibandingkan dengan lain lain daerah.

Dalam usaha bersama untuk menuju per koperasian di daerah ini, kita merasa bangga karena di daerah ini sudah tumbuh dengan pesatnya mulai tahun 1962, tercatat :

I. Pusat Koperasi "Batu Raya"

a) Anggota Premair 43 buah,

b) Laki-laki 3.970 orang,

c) Tanggungan anggota 18.648 orang,

d) Simpanan Rp. 443.700,-

e) Omzet Rp. 8.012.470,97

2. Pusat Koperasi Pegawai Negeri,

a) Anggota Premair 11 buah,

b) Anggota perorangan 620 orang,

c) Simpanan Rp. 67.000,-

d) Omzet Rp. 1.500.000,-

3. Organisasi Pengusaha Sejenis Pedagang Kecil Eceran (OPSPKE),

Selain dari badan badan kegiatan tersebut di atas bagi daerah ini digiatkan pula Kursus Kursus Kader Koperasi, pembelian padi oleh Pemerintah dengan modal dari J.P.P. Kalimantan Tengah.

5.3.4. Sosial Dan Pendidikan.

a. Pendirian Sekolah

Pada saat itu di daerah ini belum ada Jawatan Sosial. Segala sesuatu yang ada hubungannya dengan urusan Sosial diatasi secara mupakat / gotong royong mengatasinya dari Rukun Tetangga di Kampung Kampung. Dari kalangan wanita di daerah ini ikut serta membangun dalam dunia Pendidikan dengan berdirinya Sekolah Sekolah Taman Kanak Kanak seperti T.K. Kesuma dan di Sabah Uyah T.K. yang di usahakan oleh ibu-ibu dari persatuan A.U.R.I. Setingkat lebih maju dengan berdirinya yayasan pendidikan yang di beri nama "Indra Kencana" (di singkat Inka) dengan akte Notaris Banjarmasin tanggal 27 Juni 1962 Nomor 27 dan usahanya menjurus kepada membuka tambahan Sekolah Lanjutan seperti S.M.P. Swasta di Kumai, Sukamara dan Nanga Bulik. Demikian pula direncanakan pembukaan S.T. dan S.K.K.P. yang seterusnya sampai dengan S.M.A. Swasta di Pangkalan Bun. Di samping membuka tambahan tambahan Sekolah Lanjutan, juga menyediakan bea siswa dengan tunjangan belajar dan memperhatikan kesejahteraan pelajar/mahasiswa KDC di luar daerah. Terasa kesulitan dalam bidang Pendidikan di daerah ini akan tenaga tenaga Guru Sekolah Lanjutan terutamanya, sehingga Yayasan Pendidikan Inka pernah mendatangkan guru Guru Sekolah Lanjutan dari Jawa. BIDANG PENDIDIKAN MASYARAKAT.

Sejak tahun 1959 di daerah ini sudah ada berdiri Kantor Insp. Pendidikan Masyarakat yang di kepalai oleh Abdurani yang statusnya masih di bawah Sampit. Kegiatan sampai dengan 1961 bergerak dalam pemberantasan buta huruf di kampung kampung dan penyebaran Perpustakaan berupa buku-buku bacaan. Dengan keinsyafan dari tenaga tenaga pengajarnya yang sifatnya sukarela, nampak adanya kemajuan walaupun tidak begitu menonjol. Pada tanggal 16 Pebruari 1962 Kantor Insp. Pendidikan Masyarakat Wilayah berubah menjadi Kantor Insp. Pendidikan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat. .

b. Bidang Pendidikan Jasmani.

Sejak daerah ini masih berstatus Kawedanan/Daerah Swapraja, sudah ada Kantor Insp. Pendidikan Jasmani Wilayah Pangkalan Bun yang statusnya masih di bawah Sampit dan di kepalai oleh Madjekur. Kegiatan-kegiatannya di bidang Olah Raga terutama keolah ragaan di S.R.N. (SDN) dan di samping itu mempelopori di masyarakat terutama di kalangan pemuda/pemudinya. Sehingga atas prakarsa dari Pemerintah Daerah lahirlah untuk pertama kalinya Pekan Olah Raga Kabupaten (PORKAB) tahun 1961 bertempat di Pangkalan Bu'un, yang akan dilaksanakan secara kontinu setiap dua tahun sekali.

c. Bidang Pendidikan Dasar.

Bagi daerah ini sejak tahun 1955 struktur pembinaannya ada terdapat 2 Wilayah Inspeksi S.R.

1. Wilayah Pangkalan Bu'un, sebagai Kepala Inspeksi S.R. Wilayah yaitu L. Renteng.
2. Wilayah Nanga Bulik, sebagai Kepala Inspeksi S.R. Wilayah yaitu D. Oemar.

d. Bidang Kesenian & Kebudayaan.

Sejak dahulu hingga sekarang di daerah ini tidak ada suatu Instansi khusus yang menangani masalah Kesenian & Kebudayaan. Namun demikian kegiatannya masih dapat terpelihara dan berjalan sebagaimana mestinya menurut kebiasaan kebiasaan yang sudah berlalu nampak adanya pada tiap-tiap kampung terutama di pedalaman, organisasi-organisasi yang dapat dikatakan berfungsi memelihara Kesenian dan Kebudayaan yang ada. Tadinya ada suatu organisasi bernama Badan Kesenian Daerah (BAKEDA) dan melalui inilah Pemerintahan Daerah mengajukan agar kesenian hendaknya dipelihara/di pupuk terus, terutama seni tari yang sewaktu waktu bila di perlukan dapat dipertunjukkan di Ibukota Kabupaten.

e. Pembangunan Umumnya.

Dalam tahun 1960/1961 di daerah ini dengan adanya suatu Badan Yayasan Kredit Pembangunan yang semula masih tergabung dengan Sampit, dewasa ini sudah memisahkan diri dapat di usahakan membangun 14 buah perumahan rakyat dan 3 buah Gedung Pemerintah di sekitar kompleks Taman Makam Pahlawan Pangkalan Bu'un.

Empat buah di antaranya khusus kepunyaan Yayasan Pendidikan Inka Pangkalan Bu'un guna persediaan mendatangkan Guru Sekolah Lanjutan dari luar daerah. Selain perumahan rakyat tersebut di atas, juga di bangun beberapa buah perumahan Pegawai di kompleks Pelabuhan Pangkalan Bun. Kegiatan membangun sampai kepedalaman daerah ini dimana-mana gedung gedung SRN. banyak di bangun oleh swadaya rakyat secara bergotong royong. Demikian gedung Pertanian Rakyat di Kecamatan Kecamatan seperti di Kumai, Kotawaringin Lama, Nanga Bulik, Tapin Bini, Kudangan dan Sukamara walaupun secara sederhana sekali.

5.3.5. Perubahan Sistem Pemerintahan.

Pada tanggal 3 Pebruari 1962 Bupati KDH. JC. Rangkap berdasarkan Keputusan Pemerintah Pusat dipindahkan ke Kantor Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya dan di angkat menjadi Residen. Sebagai penggantinya ialah Drs. FAD. Patianom. Semasa beliau menjabat sebagai Bupati banyak terjadi perubahan terutama dalam sektor pemerintahan. Tentang perubahan dan perkembangan tersebut dapat kita lihat sebagai berikut :

a. Pemerintahan.

Susunan Pemerintahan di bidang Legislatif banyak mengalami perubahan sedangkan di bidang Eksekutif tidak demikian halnya kalau dibandingkan dengan keadaan di tahun-tahun sebelumnya. Demikian pula mengenai susunan dari pada Jawatan/ Instansi, kecuali dalam bidang Pendidikan agak banyak mengalami perubahan.

1. Keadaan Lembaga tertinggi di daerah ini atau DPRD-GR. Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan tanggal 5 September 1966 susunannya adalah sebagai berikut

Drs. FAD. Patianom	Ketua
1.JR. Lama	Wakil Ketua
2 H. Abdussyukur	Wakil Ketua
3 Gst. Hermansyah	Wakil Ketua
4 A. Kamas	Anggota
5 Sa'dillah	Anggota
6 Masykur Golek	Anggota
7 Said M. Tjie	Anggota
8. Maskarim. DW.	Anggota
9. Said Husin	Anggota
10. Muchtarudin	Anggota
11. Salman. K.	Anggota
12. H.Oemar	Anggota
13. Husin Djafri	Anggota
14. HAM. Alipandi	Anggota
15 I. Jumathan	Anggota
16. Abia Tindan	Anggota
17. B. Punu	Anggota
18. Huldi Udang	Anggota
19. Harkan Amin	Anggota
20. Achmad Utoch	Anggota

21. JS. Apin Anggota
22. W. Sirait Anggota
23. T. Usman Anggota
24. Lie Sian Giok Anggota
25. LE. Djuang Anggota

2. Badan Pemerintah Harian (BPH) mengalami perubahan personilnya yakni Gst. M.Sanusi; Ishak Permana; Ahmad Said; Madjekur Muchtas Sedangkan anggota lama. Djainuri dan. Lie Sian Beng mengundurkan diri kembali aktif sebagai Pegawai Negeri.
3. Pengadilan Negeri Ekonomi Pangkalan Bu'un berdiri sendiri, jadi tidak lagi bergabung dengan Sampit dan Kantor Perdagangan di dirikan untuk daerah ini.

b. Ekonomi Dan Perhubungan.

Pembangunan dalam bidang Ekonomi dan Perhubungan sejak tahun 1962 digiatkan seperti :

1. Usaha di bidang pertanian/perkebunan yang oleh Pemerintah Daerah di adakan WATAN - WATAM (wajib tanam wajib ketam).
2. Sejalan dengan rencana Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah:
   a. Sedang di perbaiki Pelabuhan Kumai dan tambahan perumahan para Pegawainya.
   b. Perbaikan jalan dan pembukaan jalan baru terutama di pesisiran daerah ini.
3. Penyerahan K.M.A.E. 014 oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah inipun suatu usaha guna melancarkan hubungan melalui laut.
4. Lapangan Udara AURI "Sabah Uyah" di buka kembali bagi penerbangan sipil dan nama lapangannya berubah menjadi lapangan terbang "Iskandar".

c. Bidang Pendidikan.

1). Pendidikan Dasar.

Struktur instansi yang menangani Pendidikan Dasar di daerah ini dalam tahun 1963 mengalami perubahan dengan terbentuknya Inspeksi SR. Kabupaten Kotawaringin Barat yang di kepalai oleh R.Welong yang membawahi 3 Inspeksi Wilayah :

I. Wilayah Pangkalan Bu'un, di kepalai oleh Abdul Kadir,
2. Wilayah Nanga Bulik, di kepalai oleh Herman Nuray,
3. Wilayah Sukamara, di kepalai oleh Harkan Amin.

2).Sekolah Lanjutan.

Sejak daerah ini masih berstatus Kawedanan / Daerah Swapraja sudah ada S.M.P. Nasional (Swasta), mempunyai gedung permanen sendiri, yang di asuh oleh suatu Badan Pengasuh. Setelah menjalani masa beberapa tahun berstatus swasta, berdasarkan S.K. Menteri P.D. & K tanggal 31 Agustus 1962 Nomor

20/sk/B/III, SMP tadi dijadikan sekolah negeri. Untuk itu di lakukanlah serah terima gedung serta alat-alat perlengkapan yang ada dari dan Pengasuh kepada Pemerintah Daerah (Bupati KDH) Kotawaringin Barat pada tanggal 11 Januari 1963.

Kemudian untuk memperluas kesempatan belajar bagi anak anak di daerah ini atas prakarsa dari Yayasan Pendidikan Inka membuka SMP di Nanga Bulik, Kumai dan Sukamara dan SMA di Pangkahan Bu'un berstatus swasta. SMP nya Kang dapat berjalan terus hanya di Nanga Bulik. Untuk SMA dalam tahun 1964 dapat di Negerikan dengan SK Menteri P. D. & K. R.I. tanggal 30 Juni 1964 Nomor 79/sk/S/III.

3). Pendidikan Jasmani.

Dengan adanya ketentuan kegiatan PORKAB di adakan untuk tiap 2 tahun sekali, maka pada masa ini dengan di sponsori oleh Pemerintah Daerah dalam tahun 1963 di adakan PORKAB kedua di Sukamara dan PORKAB ketiga dalam tahun 1966 di Nanga Bulik. Sambutan dan perhatian masyarakat di selenggarakannya kegiatan PORKAB ini cukup besar dan dengan melalui PORKAB di harapkan perkembangan keolahragaan dapat merata ke seluruh pelosok pedalaman daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, di samping manfaatnya untuk dapat saling bertemu dan memupuk rasa persaudaraan. Demikianlah sehingga PORKAB keempat dalam tahun 1969 di selenggarakan di Kumai.

5.4. Kotawaringin Barat di Jaman Orde baru

Dari susunan partai pada DPRDGR maupun DRPDS terlihat baik akan partai-partai keagamaan dan hanya satu anggota dewan dari Partai Komunis Indonesia (PKI). Hal ini menunjukkan bahwa warga Kotawaringin merupakan warga yang religius. Peralihan kekuasaan antara pemerintahan Presiden Soekarno Ke Presiden Soeharto yang di berbagai daerah telah menjadi peristiwa berdarah, tidak terjadi di Kabupaten ini. Adapun tradisi kepala Daerah yang berasal dari militer memang sudah biasa semenjak kabupaten ini berdiri karena para pemimpin Kotawaringin Barat merupakan para Pejuang yang turun di medan peperangan.

Menurut Lontaan, bagi daerah Kotawaringin Barat peristiwa yang disebut dengan “G 30 S / PKI”, dalam tahun 1965 cukup beralasan merasa khawatir dengan keinginan pihak/pelaku pelaku gerakan tersebut mengadakan pengambilan kekuasaan Pemerintahan di daerah ini secara kekerasan. Hal ini terbukti kemudian dalam jumlah cukup banyak di amankannya oknum-oknum yang terlibat. Dengan dipelopori oleh ABRI dan berkat kerja sama serta dukungan dari rakyat di daerah ini, gerakan tersebut dapat di gagalkan dan di bersihkan dengan tidak melalui pertumpahan darah. Masih ada hubungannya dengan masalah keamanan, dalam tahun 1967, 1968 dan 1969 di daerah ini juga mengikuti arus gerakan-gerakan yang di pelopori oleh para pemuda/pelajar dan mahasiswa seperti yang terjadi di pusat dan di kota-kota besar lainnya di seluruh

Indonesia. Gerakan mana dalam bentuk yang di sebut KAMI, KAPPI, KAPI. Di daerah ini pada masa itu pernah ada KAPPI Konsulat Pangkalan Bun yang turut menanggulangi masalah-masalah yang timbul, seperti dalam masalah politik, ekonomi, dan lain lain di daerah ini.

Setelah terjadi peristiwa yang disebut dengan "G 30 S/ PKI" terjadi perubahan susunan anggota DPRGR. Hal ini seirama dengan adanya ketentuan undang-undang bahwa Ketua DPRDGR, tidak lagi di jabat rangkap oleh Bupati KDH, meninggalnya salah seorang Wakil Ketua DPRD-GR (JR. Lama), salah : seorang anggota dewan dari Partai Komunis Indonesia (LE. Djuang) yang harus meninggalkan kursinya karena di nyatakan terlibat "G 30 S/ PKI" tadi dan penambahan seorang anggota baru (E. Guhong) maka sejak tanggal 6 September 1966 susunan Ketua, Wakil Ketua dan anggota-anggota adalah sebagai berikut :

1.	H.Abd.Syukur	Ketua/Anggota	dari Seniman,
2.	Gst. Hermansyah	Wk.Ketua/Anggota	dari N.U.
3.	Maskarim. DW.	Wk.Ketua/Anggota	dari P.N.I.
4.	A. Kamas	Anggota	dari P.N.I.
5.	Masykur Golek	Anggota	dari P.N.I.
6.	Said M. Tjie	Anggota	dari N.U.
7.	Sa'dillah	Anggota	dari N.U.
8.	Abia Tindan	Anggota	dari Parkindo, `
9.	B. Punu	Anggota	daii Parkindo,
10.	Huldi Udang	Anggota	dari P.S.I.I.
1 l.	Harkan Amin	Anggota	dari P.S.I.I.
12.	I. Junathan	Anggota	dari I.P.K.I.,
13:	Said Husin	Anggota	dari Angk. 45,
14.	T. Usman	Anggota	dari Veteran,
15.	E. Guhong	Anggota	dari TNI/AD,
16.	Achmad Utoch	Anggota	dari AURI,
17.	Husin Djaprie	Anggota	dari AKRI,
18.	Muchtaruddin BR	Anggota	dari Pemuda,
19.	Selma. K.	Anggota	dari Wanita,
20.	H. Oemar	Anggota	dari Peng. Nasional.
21.	Lie Sian Giok	Anggota	dari Peng. Nasional.
22.	JS. Apir	Anggota	dari Buruh/Peg.
23.	W. Sirait	Anggota	dari Buruh/Peg.

Usia DPRD-GR yang di ketuai oleh H. Abd.Syukur ini sampai dengan permulaan bulan Agustus 1968 karena menurut ketetapan dalam SK Gubernur KDH Provinsi Kalimantan Tengah Nomor Pemda. 28-I-3/AP/68 tanggal 5 Agustus 1968 memberhentikan dengan hormat Ketua, Wakil Ketua dan anggota anggota DPRD-GR Kabupaten Kotawaringin Barat yang nama-namanya seperti tersebut di atas, dan mengangkat anggota-anggota DPRD-GR Kabupaten Kotawaringin Barat yang nama-namanya sebagai berikut :

1.	Idham Thaid	Anggota	dari N.U.
2.	MD. Pasizaki	Anggota	dari N.U
3.	Djuhri H. Mansyur	Anggota	dari N.U.
4.	Gt. Masariep .	Anggota	dari N.U
5.	Dollah Muhlid	Anggota	dari N.U
6.	Mulkan	Anggota	dari P.N.I
7:	Djuhri	Anggota	dari P.N.I
8.	Muchtaruddin. BR.	Anggota	dari P.N.I.
9.	Abia Tindan	Anggota	dari Parkindo
10.	Rons Mankin	Anggota	dari Parkindo
11.	Harkan Amin	Anggota	dari P.S.I.I.
12.	Abdussalim	Anggota	dari P.S.I.I.
13.	Abd. Satta	Anggota	dari Muhammadiah
14.	Jusran Abdulgani	Anggota	dari Tani.
15.	M. San Marwan	Anggota	dari Pemuda.
16.	Ny.M.Oentoeng Soemantrie	Anggota	dari Wanita.
17.	M. Syah Yusuf	Anggota	dari Veteran.
18.	Said Husin	Anggota	dari Angk. 45.
19.	M. Sany Rachman	Anggota	dari Angk. 66.
20.	Alipandi	Anggota	dari Peng. Nas.
21.	Anang Itrahim	Anggota	dari TNI/AD.
22.	Syachroni Mimis	Anggota	dari A.U.R.I.
23.	Masdan Djenal	Anggota	dari A.K.R.I,.
24.	Pasirun	Anggota	dari Pendidik.
25.	NL. Nahan	Anggota	dari Peg./Buruh.

Dalam pertengahan tahun 1968 pimpinan tertinggi Pemerintahan di daerah ini mengalami perubahan, yaitu dengan berakhirnya masa jabatan Bupati Drs. FAD. Patianom, untuk sementara oleh Gubernur Kalimantan Tengah di tunjuk Residen M.Agoes Ibrahim dari Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka

Raya sebagai care taker sampai bupati definitif terpilih. Keanggotaan B.P.H. mengalami perubahan pula jumlahnya dari 4 menjadi 5 orang yang terdiri dari :

I. GM. Sanusi,
2. Ishak Permana,
3. M. Shaloel,
4. Achmad Said, dan
5. Madjekur Muhtas.

Kembali lagi kita lihat masalah DPRD-GR yang dalam uraian terdahulu telah di singgung singgung adanya perubahan anggota anggota DPRD-GR yang lama dan pengangkatan anggota anggota yang baru terdiri dari 25 orang. Dengan perubahan ini maka pada tanggal 16 September 1968 di adakan serah terima Pimpinan DPRDGR dari Ketua yang lama kepada Ketua yang baru (sementara) yaitu Alipandi. Kemudian dalam rapat plenonya tanggal 16 September 1968 di adakan pemilihan pimpinan DPRD-GR Kabupaten Kotawaringin Barat, terpilih :

I. Masdan Djenal sebagai Ketua,
2. Muchtaruddin. BR sebagai Wakil Ketua,
3. Idham Thaib sebagai Wakil Ketua.

Demikianlah sejak tanggal 7 Oktober 1968 keadaan susunan dari pada DPRD-GR Kabupaten Kotawaringin Barat dan dalam masa-masa seterusnya setelah mengalami perubahan/mutasi personil pimpinan juga anggota anggotanya berhubung ada di antaranya yang meninggal dunia, mengundurkan diri/penggantian, maka sampai dengan menjelang terbentuknya DPRD hasil pemilihan umum tahun 1971 terdapatlah susunannya sebagai berikut :

1. Masdan Djenai	Ketua	dari POLRI,
2. Idham Thaib	Wk.Ketua	dari N.U.
3. H. Abdussyukur	Wk.Ketua	dari Tani,
4. MD. Pasizaki	anggota	dari N. U.
5. Djuhri H. Mansur	anggota	dari N.U.
6. Gt. Masarif	anggota	dari N.U.
7. Dollah Muchlid	anggota	dari N.U.
8. Mulkan	anggota	dari P.N.I.
9. Djuhri	anggota	dari P.N.I.
10. Harkan Amin	anggota	dari P.S.I.I.
11. Abdussalim 1	anggota	dari P.S.I.I.
12. Rens Mankin	anggota	dari Parkindo.
13. Abd. Satta	anggota dari Parmusi.	
14. Anang Ibrahim	anggota dari TNI/AD.	

15. Syahroni Mimis	anggota	dari A.U.R.I.
16. Ny.M.Oentoeng Soemantri	anggota	dari Wanita.
17. TA. Zailani	anggota	dari Pemuda.
18. Muchdar Said	anggota	dari Peng. Nas.
19. Dachlan Achmad	anggota	dari Peg./Buruh.
20. Mawawi. M. BA.	anggota	dari Kokarmindagri.
21. Al-dul Azis	anggota	dari Veteran.
22. Ir. JL. Rombe	anggota	dari Cendekiawan.
23. Mahyuni	anggota	dari Hansip/Wanra.
24. Achmad Utoch	anggota	dari Angk. 45.

Adapun mengenai Dinas/Jawatan Instansi Sipil/Militer yang ada di daerah ini dalam tahun 1969 mengalami pertambahan jumlahnya kalau dibandingkan dengan keadaan dalam tahun-tahun permulaan terbentuknya Kabupaten Kotawaringin Barat, untuk ini dapat di lihat sebagai berikut :

1. Dinas P.U. Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat,
2. Dinas P.U. Seksi Kabupaten Kotawaringin Barat,
3. Dinas Pertanian Rakyat Kabupaten Kotawaringin Barat,
4. Dinas Pemangkuan Hutan Kabupaten Kotawaringin Barat,
5. Dinas Karet Rakyat Kabupaten Kotawaringin Barat,
6. Kantor Direktorat Bea / Cukai,
7. Kantor Pajak Insp: Keu. Dinas Luar,
8. Kantor Pelabuhan / Syahbandar,
9. Kantor Radio Station,
10. Kantor Pos dan Telegraf,
11. Kantor Insp. S.R. Kabupaten Kotawaringin Barat,
12. Kantor Pengadilan Negeri & Ekonomi Pangkalan Bu'un,
13. Kantor Kejaksaan Negeri Pangkalan Bu'un,
14. Kantor Perdagangan Dalam Negeri,
15. Lembaga Pemasyarakatan,
16. Direktorat Koperasi,
17. Insp. Pend. Jasmani Kabupaten Kotawaringin Barat,
18. Insp. Pend. Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat,
19. Jawatan Penerangan Kabupaten Kotawaringin Barat,
20. Jawatan Agama Kabupaten Kotawaringin Barat,
21. Dinas Perikanan Darat Kabupaten Kotawaringin Barat,

22. Dinas Perikanan Laut Daerah Kab. Kotawaringin Barat,
23. Dinas Kehewanan,
24. Kodim 1104 Kotawaringin Barat,
25. Resort Kepolisian Kotawaringin Barat,
26. Pangkalan Udara "Sabah Uyah",
27. Detasemen P.O.M.,
28. B.N.I. 1946 Cabang Pangkalan Bun,
29. Kantor Sensus & Statistik Kabupaten Kotawaringin Barat,
30. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Sebagaimana dalam uraian terdahulu telah disinggung singgung bahwa Residen M. Agoes Ibrahim selaku Care Taker/Pj. Sementara Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat dalam tahun 1969 di tugaskan oleh Gubernur Kalimantan Tengah untuk mempersiapkan sampai dengan pelaksanaan pemilihan Bupati KDH. Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang ada melalui Lembaga Tertinggi di daerah ini. Demikianlah setelah DPRD-GR dalam sidangnya tanggal 8 Desember 1968 menghasilkan calon, yang memperoleh suara terbanyak yaitu Letkol. HM. Rafi'i yang pada waktu itu menjabat sebagai Dan Dim 1104 Kotawaringin Barat. Berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Juni 1969 Nomor Pemda. 7/6/16/159, oleh Gubernur. Kalimantan Tengah yang mewakili Menteri Dalam Negeri pada tanggal 28 Desember 1969 secara resmi melantik Letkol. H.M. Rafi'i selaku Bupati KDH. Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dengan diangkatnya HM Rafi'I menjadi Bupati. Kabupaten Kotawaringin Barat maka jabatan Dan Dim 1104 Kotawaringin Barat di ganti oleh Letkol. M. Adenan. Kemudian di ganti oleh Mayor CZI. Anwar Bedjo. Masa jabatan Letkol. HM. Rafi'i di mulai dengan tahun-tahun yang penuh dengan tugas-tugas berat antara lain :

a. Di mulainya tahun pertama Repelita tahap I.
b. Mempersiapkan segala sesuatu untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan Pemilu tahun 1971.

Dengan adanya pimpinan baru dalam pemerintahan di daerah ini dan berkat di manfaatkannya forum MUSPIDA serta timbulnya kesadaran rakyat berpartisipasi dalam pembangunan, maka nampak adanya kesuksesan pelaksanaan dari pada tugas-tugas tersebut di atas, dapat di lihat pada keadaan yang diketengahkan di bawah ini.

PEMERINTAHAN.

a. Badan Pemerintah Harian, anggota-anggotanya memperlihatkan wajah wajah baru yang terdiri dari :
   I. Abia Tindan.

2. Masdulhak Nachran.
3. M. Oentoeng Soemantri.

M. Oentoeng Soemantri dalam tahun 1971 mengundurkan diri karena yang bersangkutan di tunjuk sebagai anggota yang di angkat dari ABRI mewakili AD untuk duduk menjadi anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat. Sedangkan dalam perkembangan selanjutnya untuk Abia Tindan dan Masdulhak Nachran pada akhir tahun 1974 mengundurkan diri juga karena adanya Peraturan Pemerintah tentang penghapusan badan tersebut.

Menurut Lontaan pelaksanaan pemilu tahun 1971 di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat di katakan sukses (dalam arti kelancaran dan ketertibannya). Pemilu tersebut telah memilih Wakil-Wakil Rakyat untuk duduk di DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat serta berdasarkan SK Gubernur Kalimantari Tengah tanggal 3 Nopember 1971 Nomor Destah-28/IIA-S/SK/1971, terdapatlah susunan sebagai berikut :

1.	Ir.Rukmantoro Prayitno	Ketua	dari Golkar.
2.	Abikusno Nachran	Wk.Ketua	dari Golkar.
3.	Gst. M. Sanusi	Wk.Ketua	dari Golkar.
4.	Abdul Azis	Anggota	dari Golkar.
5.	Abdul Almubarak	Anggota	dari Golkar.
6.	Abdul Aziz HB.	Anggota	dari Golkar.
7.	Gt. Abdullah	Anggota	dari Golkai
8.	HA. Zumra	Anggota	dari Golkar.
9.	Hasanuddin	Anggota	dari Golkar.
10.	Ishak Permana	Anggota	dari Golkar.
11.	Muchdar Said	Anggota	dari Golkar.
12.	Magdalena Sitohang	Anggota	dari Golkar.
13.	Rensina Sahidar	Anggota	dari Golkar.
14.	TA. Zailani	Anggota	dari Golkar.
15.	Udang Abdurrachman	Anggota	dari Golkar.
16.	M.Oentoeng Soemantri	Anggota	dari Golkar/diangkat AD.
17.	Masdan Djenal	Anggota	dari Golkar/diangkat POLRI.
18.	Syachroni Mimis	Anggota	dari Golkar/diangkat AU.
19.	Idham Thaib	Anggota	dari N.U.
20.	M. San Marwan	Anggota	dari Parmusi.

Dari ke 20 anggota dewan tersebut, Abdul Azis meninggal dunia dan Magdalena Sitohang pindah ke luar daerah sehingga pada bulan Mei 1975 di lantik sebagai anggota pengganti antar waktu Nurdinsyah dan A. Kamas.

b. Perkembangan keadaan Dinas/Instansi Pemerintah Sipil & Militer di daerah ini memperlihatkan keadaan yang hampir serupa dengan keadaan ditahun-tahun sebelumnya, hanya ada perkembangan dalam struktur dan penggantian jabatan pimpinannya. Adapun tentang perkembangan kegiatan dari tiap Dinas/Instansi yang bersangkutan di dalam uraian ini sengaja di batasi.

KEAMANAN.

a. Perlu pula dikemukakan di sini secara singkat bahwa pada permulaan Kabupaten Kotawaringin Barat terbentuk Instansi Militer di daerah ini berstatus PDM. (Perwira Distrik Militer), sebagai Komandannya ialah Lettu. HM. Rafi'i. Beliau pindah di ganti oleh Kapten M. Hanafie dan status PDM berobah menjadi Kodim 1104 Kotawaringin Barat. Selanjutnya Kapten M.Hanafie pindah di ganti oleh Letkol. W. Sandy.

   Kemudian beliau pindah dalam tahun 1966 dan di ganti oleh Letkol. Inf. HM. Rafi'i yang berakhir sampai tahun 1969 ketika beliau di angkat menjadi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat, sedangkan sebagai Komandan Kodim 1104 Kotawaringin Barat (sekarang Kodim 1014 Kotawaringin Barat) di jabat oleh Letkol. Inf. M. Adenan. Kemudian diserah terimakan jabatan Dan Dim 1014 Kotawaringin Barat kepada Mayor CZI. Anwar Bedjo hingga penulisan naskah ini.

   Selanjutnya Pimpinan Pemerintah Daerah tertinggi Kabupaten Kotawaringin Barat HM. Rafi'i berdasarkan perundangan yang berlaku telah berakhir dengan S.K. Gubernur KDH. Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 6 Pebruari 1975 Nomor Pem-7/2/6-10. Sehingga oleh Bapak Gubernur KDH. Provinsi Kalimantan Tengah bertindak a.n. Menteri Dalam Negeri dengan resmi melantik HM. Rafi'i selaku Pejabat Bupati KDH. Kabupaten Kotawaringin Barat pada tanggal 24 Maret 1975 yang baru lalu sampai pada dewasa ini. Kemudian pada tanggal 13 Agustus 1976 di kukuhkan kembali menjadi Bupati KDH. Tingkat II Kotawaringin Barat yang kedua kali.

   Sedangkan di pihak Kepolisian sejak Pimpinan Pemerintahan daerah ini di jabat oleh Bupati KDH. HM. Rafi'i, sebagai Komandan Ressort Kepolisian 1304 Kotawaringin Barat di jabat oleh Ajun Komisaris Polisi M. Radjab Oemar. Selanjutnya karena beliau meninggal dunia secara mendadak maka di ganti oleh Mayor Polisi Ajang Bahan. Dalam tahun 1973 beliau pindah ke Palangka Raya dan di ganti oleh Mayor Polisi Drs. Soetikno. Berhubung Mayor Polisi Drs. Soetikno ditugaskan mengikuti SESKOAU di Lembang maka sejak bulan Mei 1975 hingga sekarang Komandan Ressort Kepolisian 304 Kotawaringin Barat (sekarang Ressort Kepolisian 1314 Kotawaringin Barat) sebaqai Pejabat ialah Kapten Polisi Drs. Yuzar Hasan. Dan Res sekarang Letkol. Pol. Moch. Ismail.

5.5. Kotawaringin barat membangun.

5.5.1. Pembangunan di segala Bidang.

Pembangunan Kotawaringin Barat dalam zaman Orde Baru di mulai oleh Bupati H.M. Rafi'i Bupati. Bupati baru ini telah bertugas berapa kali di Pangkalan

Bun menjabat PDM. Dan Dim kemudian di pilih menjadi Bupati KDH. Kotawaringin Barat sampai dua kali. Selama beliau menjabat dan menjalankan tugas militernya dan sebagai Bupati KDH. Tingkat II Kotawaringin Barat, banyak terjadi perubahan dalam tata fisik perkotaan.

Pidato beliau dalam ramah tamah memperingati HUT. Hari Jadi Kabupaten Kotawaringin Barat 3 Oktober 1976 di Aula Pangkalan Bun, beliau menekankan bahwa

sebuah mobil yang hendak berjalan jauh harus merevisi sebaik mungkin. Jika tidak akan mengalami kemacetan dalam perjalanan nanti. Bagi kita umat manusia harus merevisi jiwa dan mental kita masing masing untuk menempuh jalan jauh ke arah atas/surga yang jauh sekali. Demikian pula untuk menghadapi segala kewajiban kita selama dalam dunia ini untuk mengabdi kepada Negara dan masyarakat pada umumnya. Kita sedang menghadapi pembangunan. Dan harus membangun di segala bidang.

Pada tahun 1976 itu, dibawah pemerintahan Orde Baru mulai terjadi banyak kerusakan baik tatanan kawasan lama kota yang seharusnya di lestarikan, penghancuran bangunan bersejarah seperti bekas gedung DPRD dan juga banyak kerusakan lingkungan yang tidak di sadari di waktu itu. Hilangnya semangat demokrasi membuat Bupati memiliki kekuasaan mutlak atas daerahnya kecuali tidak bertentangan dengan kepentingan pejabat di atasnya. Lontaan seorang penulis yang berada dibawah kekuasaan Bupati H.M. Rafi'i menulis antara lain:

(..) Daerah Kotawaringin Barat penuh berisi potensi yang memanggil para ahli untuk menggarapnya. Hasil hutan yang beraneka, batu permata dan segala macam mineral yang masih tersimpan dalam perut bumi. Daerah Kotawaringin sebenarnya mempunyai masa depan yang gemilang, jika para ahli datang menggali dan mengolah segala apa yang masih tersimpan itu.

Bapak Bupati H.M. Rafi'i sangat aktip dalam segala bidang dan sukses dalam pembangunan. Kepemimpinan yang didampingi para stafnya yang siap melakukan tugasnya masing-masing lebih memperlancar derap pembangunan Daerah Kotawaringin Barat. Pada waktu itu terdapat perkebunan karet seluas 6.618 ha; kelapa seluas 10.932 ha; Kopi 596 ha; dan Cengkeh 22 ha.

Demikian juga di bidang perikanan (darat dan laut), walaupun cukup potensial, belum mendapatkan penggarapan yang semestinya. Daerah Tanjung Puting yang terkenal "lebat" ikannya kerap kali menjadi daerah operasi nelayan nelayan dari Daerah lainnya. Pada musim kemarau di Daerah Kuala Jelai banyak menerima pendatang dari Kalimantan Barat yang berusaha menangkap ikan di danau/rawa rawa yang airnya mulai mengering, sehingga ikannya mengumpul dart mudah di tangkap.

Sapi banyak di pelihara masyarakat di daerah pedalaman dengan sederhana sekali, di lepas begitu saja dan sewaktu waktu di beri air garam untuk menjinakkan. Dalam kondisi yang sekarang ini keperluan daging cukup dipenuhi oleh peternakan yang ada itu, dan sekali tempo dalam setahun juga datang Perahu Madura membawa ternaknya memasuki Pelabuhan Pangkalan Bu'un, yang berarti juga menambah persediaan ternak yang ada. (...)

5.5.2. Perhubungan.

Seperti yang pernah kami kemukakan bahwa sungai-sungai yang ada lebih banyak fungsinya sebagai sarana perhubungan terutama di daerah pedalaman. Jalan-jalan darat yang sudah ada di kecamatan-kecamatan sepanjang 80 km yakni dari Kotawaringin Lama menuju Sukamara dan Balai Riam, serta dari Kecamatan Lamandau ke daerah Delang/Kudangan. Selain itu juga ada jalan-jalan yang di buat oleh pemegang HPH, yakni dari Kumai (P. Banteng) ke Pembuang Hulu, dari Pangkut ke Rantau Pulut (Kotawaringin Timur), dan dari Bulik ke Lamandau, dengan jumlah panjang 60 km. Jalan ekonomi yang utama ialah dari Pangkalan Bun Kumai sepanjang 15 km, barang dari Daerah Arut eksport utama yang merupakan jalur transport barang Lamandau ke Kumai sebagai pelabuhan Lapangan Udara Iskandar sudah ada sejak zaman Jepang yang merupakan Pangkalan Udara Militer. Selain dapat di darati jenis pesawat DC-3 (Dakota), dan dalam keadaan tertentu pernah juga di darati oleh pesawat Hercules AURI untuk mengangkut perbekalan/kendaraan besar. Tak lama kemudian di pertengahan tahun 1970 an secara tetap oleh Bouraq Airlines di adakan penerbangan dua kali seminggu tujuan Banjarmasin dan Palangka Raya. Saat ini Merpati dan Deraya mengadakan penerbangan ke Semarang, sehingga tidak salah jika Pangkalan Bun adalah gerbang barat Kalimantan Tengah.

Perhubungan laut antara Pelabuhan Kotawaringin Barat dengan daerah-daerah lainnya, yang juga merupakan hubungan perekonomian masyarakat, banyak dilakukan ke daerah di Kalimantan Barat, Semarang, Cirebon, Surabaya dan juga Banjarmasin. Dengan Daerah Daerah Tingkat II lainnya di Kalimantan Tengah hampir dapat dikatakan tidak ada, yang ada hanya hubungan administratif pemerintah saja. Pelabuhan Kumai yang menjadi Pelabuhan Samudera masih kurang mencukupi fasilitasnya sebagai pelabuhan penting di Kalimantan Tengah.

Pada mulanya Kantor Pos dan Telekomunikasi hanya ada di Pangkalan Bun, sedangkan telekomunikasi daerah sudah dapat melayani lima kecamatan di daerah pedalaman. Kantor Pos Pembantu juga akan segera di buka di daerah Sukamara dan Nanga Bulik. Sekarang telah dapat ditemui di berbagai tempat di ibu kota kecamatan.

Pada pertengahan tahun 1970 an disebutkan oleh Lontaan sebagai : Kabupaten Kotawaringin Barat dalam perkembangan selanjutnya telah menyelesaikan Pembangunan Jangka Panjang Pertama dan memasuki Jangka Panjang Kedua yang dimulai dengan Repelita VI Daerah Kabupaten Tingkat II Kotawaringin Barat. Ditetapkannya bidang ekonomi sebagai titik berat dan merupakan penggerak utama pembangunan di segala bidang, maupun sektor lainnya dan seiring dengan perkembangan kualitas sumber daya manusia, maka prioritas pembangunan Tingkat II Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

1. Melanjutkan dan meningkatkan Pembangunan disektor Transportasi:
2. Melanjutkan dan meningkatkan Pertanian dalam arti luas.
3. Melanjutkan dan meningkatkan Pembangunan Industri.

4. Melanjutkan dan meningkatkan Pembangunan Transmigrasi.
5. Pembangunan Desa Tertinggal.
6. Melanjutkan penelitian sumber dan potansi daerah.

Dalam kurun waktu selama Pelita V dan Tahun Pertama Repelita VI dapat terlihat hasil - hasil yang talah dicapai pada:

1. Sektor Industri, dengan adanya aneka industri dan besarnya penyerapan tenaga kerja.
2. Sektor Pertanian dan kehutanan terlihat denaan peningkatan hasil Produksi Pertanian, Perkeburan, Peternakan dan Kehutanan:
3. Sektor Sumber Daya Air- dan irigasi, dengan adarya pembangunan pos-pos hidrologi, pemeliharaan drainase pasang surut.dan lain-lain.
4. Sektor Tenaga Kerja, adanya program-program pelatihan, penggunaan dan penyebaran tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja serta program pembinaan dan penempatan transmigrasi.
5. Sektor Perdagangan, Pengembangan usaha daerah, Keuangan daerah dan Koperasi, terlihat dengan laju pertumbuhan perdagangan daiam PJP I rata - rata 3,92 % per tahun.
6. Sektor Transportasi, prioritas utama pada perhubungan darat, perhubungan laut dan udara.

   7. Sektor Pertambangan dan Energi adanya eksploitasi untuk penelitian potensi gambut yang ada di Kotawaringin Barat sebagai bahan bakar PLTU dan galian C.
8. Sektor Pariwisata dan Telekomonikasi
9. Selain itu telah dicapai keberhasilan-keberhasilan di sektor pembangunan dan pemukiman, sektor lingkungan hidup dan tata ruang, sektor pendidikan pemuda dan olah raga, sektor keluarga berencana, kesehatan, peranan wanita dan anak remaja, sektor perumahan dan pemukiman. Sektor agama, Ilmu Pengetahun dan Teknologi, Hukum, Aparatur Pemerintah, Politik, Penerangan, Komonikasi, Media Massa dan Sektor Keamanan dan Ketertiban Umum.

Kabupaten Kotawaringin Barat lahir pada tanggal 3 Oktober 1959. Dengan sasanti "MARUNTING BATU AJI" yang artinya; MENUJU KEJAYAAN dengan motto "KOTA MANIS" yang berarti : MINAT AMAN NIKMAT INDAH SEGAR, daerah ini akan terus bertambah maju baik dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan pengembangan wilayah perkotaannya dengan tanpa meninggalkan nilai-nilai sejarah.

5.5.3. Otonomi Daerah dan Pemekaran Kabupaten

Dengan adanya undang-undang pemekaran wilayah kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah, maka wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat di mekarkan menjadi tiga kabupaten. Dua kabupaten baru adalah Kabupaten Lamandau dan

Kabupaten Sukamara. Dengan pemekaran kabupaten baru ini tentunya tidak mengubah sejarah bahwa seluruh daerah yang dulu menjadi Kotawaringin Barat merupakan daerah perjuangan kemerdekaan yang pantang menyerah.

5.5.4. Pejabat yang pernah bertugas di Kowaringin Barat.

Daftar nama pejabat-pejabat mulai zaman pemerintahan penjajahan Belanda, Jepang sampai Pemerintahan Republik Indonesia yang pernah bertugas di Daerah Swapraja Kotawaringin sampai dengan Kabupaten Kotawaringin Barat dari Tahun 1907 s/d sekarang, ditulis pada tabel di bawah ini.

Nama-nama pejabat yang pernah bertugas di Kotawarungin Barat

No	Nama	Pangkat	Tahun
1.	Van der Maulen	Controleur	1907 Zaman Belanda
2.	L. Ludolp	Controleur	-
3.	J. C. Van Nouhuya	Civ Gezaghebber	-
4.	CH. Logaen	Gezaghebber	-
5.	W. F. A. Bal	Controleur	-
6.	L. E. Bristen Van Gral	Controleur	-
7.	W. E, C. Vean	Controleur	06-10-1915 - 21-03-1916
8.	F. M. L. Horsting	Gezaghebber	21-03-1916 - 09-09-1921
9.	Dr. J. Malingkrodt	Controleur	09-09-1921 - 29-11-1923
10.	J. Watstain	Fd. Controleur	29-11-1923 - 28-06-1924
11.	N. H. Holirust	Controleur	28-06-1924 - 13-12-1926
12.	W. Staanstra Tousaint	Gezaghebber	13-12-1926 - 02-01-1930
13.	H. A. Garritsea	Gezaghebber	02-01-1930 - 11-02-1930
14.	D. J. P. Dala	Gezaghebber	11-02-1930 - 28-11-1930
15.	B. Bangert	Gezaghebber	28-11-1930 - 20-03-1933
16.	H. J. Koers	Cd. Controleur	20-03-1933 - 17-10-1933
17.	J. M. A. Sondag	Gezaghebber	17-10-1933 - 09-06-1936
18.	Mr. G. Th. J. M. Baukers	Controleur	09-06-1936 - 19-10-1936
19.	M. D. Voors	Controleur	19-10-1936 - 15-08-1938
20.	J. R. Luth H. J. Zn.	Controleur	15-08-1938 - 29-03-1939
21.	D. S. Bloanandael	Wd. Controleur	29-03-1939 - 06-06-1939
22.	J. R. Luth H. J. Zn.	Controleur	06-09-1939 -
23.	L. W. J. Douhyus	Controleur de kl	31-03-1942
24.	Ota Tason	Banker Kanrikan	Zaman Jepang
25.	Mizubuchi Sinzo	Banker Kanrikan	
26.	Irie Tasiyasu	Ken Kanrikan	29-08-1954
27.	H. Verkuyl	Dd. Controleur	14-01-1946 - 23-02-1946
28.	B. G. Parya	Adp. Controleur	23-02-1946 - 02-03-1946
29.	J. Dijk	Controleur lelk	02-03-1946 - 05-09-1946
30.	A. J. Serenda	Controleur	05-09-1946 - 18-12-1947
31.	H. F. H. Wollrabe	Controleur	18-12-1947 - 12-04-1948
32.	Mr. G. Dekker	Controleur	12-04-1948 - 10-05-1948

33.	Mr. I. Green	Controleur	10-05-1948 - 10-09-1949
34.	G. A. Hartwig	Controleur	10-09-1949 - 23-03-1950
35.	Basri	Kiai Kepala	23-03-1950 - 01-05-1950
36.	Basri	Wedana	01-05-1950 - 27-09-1951
37.	M. Saleh	Wedana	27-09-1951 - 04-02-1952
38.	Gusti Achmad	Wedana	04-02-1952 - 31-07-1954
39.	Abdul Muis	Wedana	31-07-1954 - 14-10-1955
40.	Rozani	Wedana	14-10-1955 - 1958
41.	C. Mihing	Ahli Praja	1958 - 03-10-1959
42.	C. Mihing	Bupati	03-10-1959 - 22-03-1960
43.	J. C. Rangkap	Bupati	03-03-1960 - 03-02-1962
44.	Drs. FAD Patianom	Bupati	03-02-1962 -03-02-1965
	Jabatan lowong ??		03-02-1965 -1968
45.	H. Agoes Iberahim	Carataker	Pertengahan 1968 s.d 1969
46.	Letkol Inf. H. M. Rafii	Bupati	28-12-1969 - Tahun 1974
			Tahun 1974 - Tahun 1979
47.	Letkol Czi H. M. Soetarso	Bupati	Tahun 1979 - Juni 1983
48.	Drs. Donnis A. Singaraja	Pjb. Bupati	Juni 1983 - Desember 1983
49.	Kol. Inf. H. Imam Maestoer	Bupati	Januari 1984 - Tahun 1989
50.	Letkol Inf. Darman	Bupati	Tahun 1989 - Tahun 1994
	Jabatan lowong ??		Tahun 1994- Tahun 1996
51.	Kol. H. Jahja Al. Idrus	Bupati	13-10-1996 - 16-06-1998
52.	Drs. Sukirman	Pjb. Bupati	16-06-1998 - 23-07-1998
		Pejabat sementara bupati	23-07-1998 - 25-10-1999
53.	Matlim Alang	Pjb. Bupati	25-10-1999 - 27-01-2000
54.	Ir. H. Abdul Razak	Bupati definitif	27-01-2000 - 08-02-2005
55.	Ir.H.Achmad Diran	Pejabat Sementara Bupati	28-02-2005 - 04-04-2005
56.	Drs. Suchaimi Muda	Pejabat Sementara Bupati	04-04-2005 - 03-08-2005
57.	H. Ujang Iskandar, ST	Bupati	03-08-2005 - 03-08-2010
	Jabatan Kosong ??		04-08-2010 - 30-09-2010
58.	A. Teras Narang, SH	Pj. Bupati	01-10-2010 - 29-12-2011
59.	Dr. H. Ujang Iskandar, ST, M.Si.	Bupati	29-12-2011 - 28-08-2015
60.	Bambang Purwanto, S.S.T., M.H	Plt. Bupati	29-08-2015 - 08-10-2015
		Bupati definitif	08-10-2015 - 27-10-2016
61.	Drs. Nurul Edy, M.Si	Plt. Bupati	27-10-2016 - 30-12-2016
		Pejabat Bupati	30-12-2016 - 21-05-2017
62.	Hj. Nurhidayah, S.H., M.H	Bupati perempuan pertama	22-05-2017- Sekarang

BAB ENAM

SEJARAH LOKAL SEBAGAI JATI DIRI DAN KEBANGGAAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Sejarah merupakan jembatan yang dipakai untuk membangun masa depan dengan mengambil suri teladan masa lalu. Pengalaman leluhur di dalam mempertahankan kemerdekaannya merupakan pelajaran yang tak ternilai untuk menghargai kebebasan masa kini. Demikian pula pengalaman leluhur didalam membangun dan membina negara amat bermanfaat bagi kehidupan masa kini. Penyusunan sejarah, tidak cukup hanya dengan mengurutkan peristiwa dalam satu kronologi. Tetapi, sejarah adalah satu tafsir yang merupakan usaha mencari kebenaran yang telah hilang dari pandangan dan telah musnah dari ingatan (Slamet Muljono, 1983).

6.1. *Main stream* Sejarah Nasional

Kita mengenal satu main stream kronologi sejarah mulai dari Sriwijaya, Majapahit, sampai dengan gerakan kemerdekaan di abad 20 sebagai bagian sejarah pra kemerdekaan. Pada bagian kemerdekaan, sejarah kita mengenal proklamasi oleh Bung Karno dan Bung Hatta, penyerbuan tentara Belanda ke Yogyakarta, serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta, dan kisah perjuangan arek-arek Surabaya 10 November 1945 yang dikenal dengan hari pahlawan. Sebagai satu tafsir sejarah, kronologi semacam ini sangat miskin akan nilai-nilai perjuangan rakyat karena tertutup oleh kisah para pemimpinnya.

Padahal penentuan tokoh sejarah dan pahlawan nasional di tingkat pusat selalu bersifat politis sehingga sering diselewengkan dari kenyataan. Contoh yang menonjol dalam penyelewengan ini adalah sejarah orde baru yang menempatkan Soeharto sebagai pelaku sejarah yang sangat penting bagi kemerdekaan Indonesia dan penyelamatan Pancasila dari penghianatan PKI. Setelah Soeharto turun dari kepresidenan, banyak kisah kepahlawanannya yang disangkal orang. Misalnya tentang serangan umum 1 Maret 1949 yang di klaim sebagai idenya. Sekarang kita tahu bahwa serangan penting ini ternyata ide Sri Sultan Hamengkubuwono IX.

Semua ini terjadi karena kita menganut paham bahwa sejarah yang sah adalah yang di resmikan oleh pemerintah pusat. Sedang keraguan akan kebenaran sejarah yang di sahkan tadi selalu ditepis pergi demi kepentingan sebuah rezim. Demikian pula dianggap menghianati perjuangan jika ada orang Irian yang menyatakan bahwa kepahlawanan Soeharto di serangan Umum 1 Maret diatas tidak ada hubungannya dengan orang Irian

6.2. Sejarah lokal

Diluar main stream sejarah nasional yang berhubungan dengan negara seperti proklamasi, gerakan kemerdekaan di Jakarta dan Yogyakarta melawan Belanda, ada juga sejarah lokal yang penting bagi daerahnya. Sejarah perjuangan tokoh-

tokoh lokal yang semestinya mampu menggugah semangat generasi muda untuk terus maju, selama ini justru banyak dilupakan.

Ketimpangan antara sejarah nasional dan lokal terlihat pada muatan buku pelajaran sejarah. Dalam buku pelajaran sejarah untuk murid sekolah yang menonjol adalah tokoh-tokoh besar seperti Soekarno, Soeharto, dan Sudirman. Bahkan banyak kisah-kisah tokoh pejuang tingkat nasional yang di tulis secara mendetail. Di lain pihak, adakah murid-murid sekolah di Jakarta yang mengenal M. Edris Hadiparmono seorang pejuang di Kotawaringin Barat? Sungguh tidak adil jika anak-anak di Kalimantan harus mempelajari sejarah perjuangan di Jawa sementara sejarah perjuangan di daerahnya lambat laun di lupakan orang. Lalu bangaimana mereka bisa mencintai daerahnya?

Selain mengangkat sejarah lokal, penyusunan sejarah harusnya bersifat kritis terhadap peristiwa yang tersusun dalam satu kronologi. Selama ini pemerintah menuliskan sejarah perjuangan dari kaca mata yang selalu positif tanpa bersedia secara fair membuka kenyataan-kenyataan yang negatif dari perjuangan itu sendiri. Sehingga berjuang yang berarti melawan musuh dengan kekerasan seolah menjadi sah. Ini pula yang mengakibatkan anak-anak sekolah merasa sah untuk melakukan kekerasan terhadap anak-anak sekolah lain yang dianggap musuh. Di Jerman sejarah bukan hanya cerita tentang keberhasilan tentara Otto von Bismark di pertempuran, tetapi juga menyoroti kekejaman perang. Sebaliknya, kita justru cenderung menutupi segala kekelaman dalam sejarah, sehingga sejarah dibangun dari paparan gambar yang harmonis walaupun berbeda dari kenyataan

Sejarah Perjuangan yang bukan hanya sekedar kekerasan tetapi cerminan dari Way of Life terlihat jelas di Kabupaten Kotawaringin Barat. Bagi rakyat Kotawaringin Barat, perjuangan di tahun 1945 memiliki dua makna yang saling mengisi. Pertama, perjuangan berarti mempertahankan diri dari perubahan yang tidak mengenakkan. Disini berjuang adalah melawan musuh yang berusaha membinasakan atau siapa saja yang mencoba mengganggu kehidupan rakyat. Kedua, perjuangan juga berarti segala usaha dari rakyat untuk mengubah keadaan hidupnya. Selama berabad-abad dijajah baik oleh Belanda maupun Jepang rakyat Kotawaringin Barat berusaha untuk mengubah nasibnya kearah yang lebih baik. Ini berarti mereka harus melawan siapa saja yang mengganggu kebebasannya untuk mengembangkan diri, rakyat harus mengusir penjajah yang memeras mereka dari waktu kewaktu. Perjuangan ini pecahlah sudah pada saat jepang mengalami kekalahan di perang Pasifik dan Kotawaringin dirasakan tanpa pemerintahan penjajah lagi.

Di dalam perjuangan melawan Belanda yang mencoba menduduki kembali daerah ini, telah dilakukan sebelum berita kemerdekaan RI didengar. Para pejuang yang tergabung dalam KPRIM, AM, dan pasukan Jenggot, telah mempersiapkan diri ketika Jepang pergi dan Kotawaringin mengalami ke vakuman pemerintahan. Di dalam perjuangan yang pantang menyerah itulah

muncul pejuang-pejuang seperti M. Edris Hadiparmono yang memimpin perlawanan dari Pangkalan Bun ke Utara, Kotawaringin Lama, Sukamara, membelok ke Selatan di Sungai Bengaris, dan bahkan mencoba masuk kembali ke Pangkalan Bun dengan menyerang Belanda yang sudah menduduki kota ini kembali. Selain itu juga terdapat pejuang yang juga merupakan pemikir seperti Pangeran Arianingrat yang memimpin pemerintahan Negeri ketika Jepang pergi dari Kotawaringin.

Semangat perjuangan ini terungkap pada banyak kisah kepedihan rakyat yang harus mengungsi, ibu yang kehilangan suaminya. Seorang anggota TRI Djumberi Djainudi yang ikut dalam pertempuran di Sungai Rengas mencoba menyelamatkan diri dari kejaran Belanda dengan pergi ke Sungai Bengaris yang pada waktu itu menjadi pusat perjuangan. Tetapi, mereka mendapati Sungai Bengaris ternyata kosong karena M. Edris dan teman-temannya mengundurkan diri ke arah Sungai Tabuk. Kemudian Djumberi dan temannya berjalan ke Pangkalan Bun. Selama seminggu dalam perjalanan ini mereka makan ubi dari ladang penduduk. Sekarang Djumberi adalah penduduk Teluk Bogam yang miskin. Dia memiliki keluarga dengan satu anak yang pada waktu terjadi pertempuran di Teluk Bogam mereka menyelamatkan diri ke hutan bersama penduduk yang lain. Padawaktu itu, anak satu-satunya tadi baru saja lahir sehingga sangat menderita sekali di dalam pengungsian.

6.3. Pasca Modern dan Perjuangan Rakyat

Sejarah Perjuangan yang selama ini dikenal oleh murid-murid sekolah dasar maupun menengah adalah sejarah perjuangan politik dari pada para pemimpin bangsa di Jawa. Sejarah seperti ini tidak berbeda dengan sejarah kerajaan-kerajaan yang bercerita tentang raja-raja, pertempuran dan segala sesuatu di sekitar raja. Padahal kita juga mengenal sejarah lokal yang selama ini belum ditulis dengan baik dan bahkan belum diterbitkan merupakan sejarah yang melekat di hati rakyat.

Sejarah seharusnya tidak hanya tentang tentara yang mampu membunuh musuh-musuhnya. Tetapi lebih dari itu, sejarah harus mampu mengungkap semangat perjuangan rakyat sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh adalah kisah setelah tentara Belanda membakar rumah-rumah di Teluk Bogam dan Sukamara. Setelah perang usai, para penduduk yang mengungsi selama perang kembali lagi ke desa dan kotanya. Mereka mendapati reruntuhan rumah tanpa tersisa harta benda yang dapat mereka pakai. Dengan tanpa membedakan kelompok etnis mereka membangun kembali desa dan kotanya bersama-sama. Sejarah tentang pembangunan kembali desa dan kota yang sudah hangus ini merupakan bagian sejarah perjuangan lokal yang tidak boleh dilupakan dan harus diingat oleh generasi muda agar mencintai daerahnya. Perjuangan rakyat yang seperti ini kiranya akan lebih menyadarkan rasa persatuan dengan sesama saudara sedaerah.

Pembumi hangusan Teluk Bogam ini tidak pernah dicatat oleh penulis-penulis sejarah Kotawaringin Barat terdahulu yang menuliskan sejarah berdasarkan jejak pasukan tentara pejuang kemerdekaan. Bagi para pemikir modern memang sejarah menjadi milik mereka yang menonjol dalam satu alur sejarah sehingga sosok seperti Husin Hamzah adalah tempat untuk menuliskan sejarah. Tetapi di era pasca modern dimana kekuatan sejarah bukan berkisar pada tokoh tetapi pada rakyat, maka kejadian di teluk Bogam yang di bumi hanguskan oleh Belanda dan rakyat yang mencoba bertahan tetapi terus melarikan diri merupakan kekuatan sejarah perjuangan yang tak ternilai harganya.

Setelah Belanda dapat memukul mundur TRI di Sukamara, mulailah penangkapan mereka yang dicurigai terlibat dalam perjuangan. Heroisme yang luar biasa terungkap pada kisah penyiksaan Simin bin Dahim yang di siksa sampai mati di depan anak istrinya. Konon sang istri Marhamah menjadi sakit ingatan akibat kejadian ini. Demikian pula kisah Legong dan Akau yang di tulis kembali di Bab IV di buku ini.

Belanda yang waktu itu menggunakan 3 rumah untuk menyiksa rakyat seharusnya di tuntut ke Mahkamah Internasional karena pelanggaran hak-hak asasi manusia, tetapi, toh cerita ini seakan tercecer dari *main stream* sejarah nasional. Mungkinkah para pahlawan rakyat ini kita peringati dengan satu monumen perjuangan kemerdekaan rakyat Kotawaringin Barat yang berada di Sukamara, Sungai Bengaris, Teluk Bogam, Kumai, Pangkalan Bun, dan di Nanga Bulik?

Sejarah perjuangan rakyat seharusnya merupakan identitas satu masyarakat yang menjadi kebanggaan bersama melewati batas-batas etnis. Sejarah lokal suatu daerah merupakan dekonstruksi sejarah nasional yang selama ini kita pahami sebagai satu wacana ilmu pengetahuan modern yang kolonial dan otoriter. Kita perlu menyusun sejarah yang mengangkat nilai-nilai lokal sebagai bagian dari wacana pasca modern yang mana perjuangan lokal memiliki makna yang lebih penting bagi perjuangan nasional.

Melalui pemahaman sejarah lokal itu barangkali konflik horisontal di suatu daerah seperti yang terjadi akhir-akhir ini dapat dihindari.

BAB TUJUH
PEMBANGUNAN KOTAWARINGIN BARAT

Kotawaringin Barat berasal dari Kata "Kutawaringin" dan "Barat". Kuta berarti Gapura, Waringin berarti Pohon Beringin yang bermakna Pengayoman, sedangkan Barat berasal dari pembagian tempat. Secara keseluruhan Kotawaringin Barat berarti "Gapura Pengayoman di Sebelah Barat"Makna Lambang Kabupaten Kotawaringin Barat

1. Perisai bersudut lima, melambangkan tekad rakyat dalam mempertahankan pancasila yang dilandasi seluruh perjuangannya dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur dengan ikatan tali yang melambangkan kesatuan dan persatuan bangsa/ masyarakat Kotawaringin Barat.
2. Untaian padi dan bunga kapas, melambangkan kesejahteraan sosial dan merupakan cita-cita Bangsa Indonesia, sebagaimana dicetuskan dalam Proklamasi 17 Agustus 1945 yang pula dalam butir padi 17, bunga 8, daun padi 4 dan daun kapas 5.
3. Bintang bersudut lima, dengan warna kuning emas melambangkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dan segala pengabdian kepada kepentingan Nasional maupun kemanusiaan.
4. Pohon beringin kembar (sepasang), sebagai gerbang yang berarti Kuta (gerbang) Waringin (pohon beringin) yang melambangkan pula sifat keterbukaan dan keramahan rakyat Kotawaringin Barat dalam pergaulan dan hubungan antar suku maupun bangsa dan melambangkan pula pengayoman dari pemerintah terhadap rakyatnya yang kokoh dan kuat.
5. Rumah/ Balai adat, dengan warna atas kuning emas berdinding putih melambangkan wadah persatuan dan kesatuan serta kebutuhan pokok bagi rakyat akan perumahan.
6. Pita warna putih dengan tulisan cokelat yang bertuliskan kata-kata "MARUNTING BATU AJI", yang maksudnya menuju kejayaan, kebahagiaan lahir batin, keadilan dan kemakmuran berdasarkan Pancasila.
7. Tulisan Kotawaringin Barat di bagian atas sebagai tanda pengenal, yakni salah satu kabupaten yang berasal di Provinsi Kalimantan Tengah.

PANGKALAN BUN KOTA MANIS

Pangkalan Bun sebagai ibukota Kabupaten Kotawaringin Barat dongan luas kota lebih kurang 25 km persegi. Pembangunan kota diarahkan kepada terciptanya kondisi dengan motto "MANIS" yang berarti: MINAT, AMAN, NIKMAT, INDAH DAN SEGAR.

MINAT : Pangkalan Bun dibangun untuk menarik minat masyarakat agar tinggal dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, memacu lajunya pembangunan daerah dalam kaitannya mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

AMAN : Segala kegiatan yang dilakukan dalam pembangunan Pangkalan Bun hendaknya mampu menciptakan rasa aman bagi masyarakat baik lahir maupun batin. Oleh karena itu, dalam setiap gerak kehidupan kota hendaknya dilandasi oleh sikap dan suasana yang penuh kegotong-royongan, saling asah, asih dan asuh diantara anggota masyarakat,

NIKMAT : Pangkalan Bun dibangun untuk dinikmati sedemikian rupa, dalam suasana yang bebas dari berbagai dampak dan pengaruh yang kurang baik bagi kehidupan masyarakat dan lingkungannya.

INDAH : Keindahan segala aspek kehidupan dalam masyarakat adalah merupakan tuntutan setiap manusia, oleh karena itu Pangkalan Bun dibangun dengan penataan yang rapi, bersih dan teratur.

SEGAR : Minat untuk membangun Pangkalan Bun yang dijamin oleh rasa aman, akan memberikan hasil yang dapat dinikmati oleh masyarakat untuk mendorong semangat.

VISI & MISI KAB. KOTAWARINGIN BARAT

Dalam pelaksanaan pemerintah dan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah mencanangkan Visi yaitu “Gerakan Membangun Kotwaringin Barat Menuju Kejayaan Dengan Kerja Nyata Dan Ikhlas”

MISI

1. Memperkuat tata pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan transparan;
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan olah raga;
3. Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi dengan memperhatikan lingkungan hidup;
4. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat;
5. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis;
6. Melestarikan situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkatkan kunjungan wisata;

Dengan usianya yang menanjak dewasa telah menjadikan daerah ini sejajar dengan daerah kabupaten lainnya baik pada level Kalimantan Tengah maupun level daerah lain di Kalimantan. Kabupaten berdasarkan UU No. 5 Tahun 2002 saat ini memiliki luas wilayah sebesar 10.075.900 Km2. Kabupaten Kotawaringin terbentuk berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. UP.34/41/42 tanggal 28 Desember 1959 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Des.52/12/2-206 tentang pembagian kabupaten, dewasa itu wajarlah jika kabupaten ini memiliki tingkat kematangan. Sentuhan pembangunan selama

PJP-I Kotawaringin Barat setelah diadakan pemekaran sekitar 6,2% luas propinsi Kalimantan Tengah, terdiri dari 6 Kecamatan dan 72 desa dan 13 kelurahan. Kecamatan tersebut meliputi :

1. Kecamatan Arut Selatan
2. Kecamatan Kumai
3. Kecamatan Arut Utara
4. Kecamatan Kotawaringin Lama
5. Kecamatan Pangkalan Lada
6. Kecamatan Pangkalan Banteng

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

No.	OPD	Alamat	No. Telp./Fax
1.	Bupati Kotawaringin Barat	Jln. Sutan Syahrir No. 2	21010
2.	Sekretariat Daerah	Jln. Sutan Syahrir No .2	21126
3.	Sekretariat DPRD	Jln. H.M Rafi'i No. 14	21130
4.	Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat	Jln. H.M Rafi'i No. 16	24476/24475
5.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jln. Pramuka No. 7	21421
6.	Dinas Kesehatan	Jln. Cilik Riwut II No. 210	2031503/2031502
7.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jln. Sutan Syahrir No. 1	21034
8.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jln. Hasanudin No. 10	22418
9.	Dinas Sosial	Jln. Sutan Syahrir No. 4	21202
10.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jln. Iskandar Km. 3,7	21269
11.	Dinas Lingkungan Hidup	Jln. H.M Rafi'i No. 169	21071
12.	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Jln. Sutan Syahrir No. 27	24935
13.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jln. Sutan Syahrir No. 29	21300
14.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jln. Sutan Syahrir No. 42	21200
15.	Dinas Perhubungan	Jln. H.M Rafi'i No.	22927/24024
16.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	Jln. Sutan Syahrir No. 62	6612159
17.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jln. Sutan Syahrir No. 2B	28064/23057
18.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jln. Sutan Syahrir No. 15	27963/27934
19.	Dinas Pariwisata	Jln. Sutan Syahrir No. 2A	27520
20.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jln. Kumpai Batu Atas, Pasir Panjang	6707158/20231034
21.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura	Jln. A. Yani No. 4	21465
22.	Dinas Ketahanan Pangan	Jln. Sutan Syahrir No. 47	21430

No.	OPD	Alamat	No. Telp./Fax
23.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jln. Sutan Syahrir No. 48	27210/27211
24.	Dinas Perikanan	Jln. Pakunegara No. 80	21098
25.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jln. Sutan Syahrir No. 28	22154
26.	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Jln. H.M Rafi'i	25052
	Sat Damkar	Jln. Pangeran Antasari	22008
27.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Jln. H.M Rafi'i No.3	21052
28.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jln. Sutan Syahrir No. 41	21412 ext. 25317
29.	Badan Pendapatan Daerah	Jln. Sutan Syahrir No. 22	21064
30.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Jln. Sutan Syahrir No. 14	21045/21018
31.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jln. Jend. Sudirman No.18	21195/21504
32.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jln. Cilik Riwut II No. 16A	2067330/27772
33.	Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin	Jln. Sutan Syahrir No. 17	21238, 21404, 23581
34.	Komisi Pemilihan Umum	Jln. Iskandar No. 3	21221

KONDISI GEOGRAFIS

Kabupaten Kotawarjngin Barat yang beribu kota Pangkalan Bun terletak di daerah Katulistiwa antara: 1®19'35" sampai dengan 3®36'59" Lintang Selatan, 110®25'26" sampai dengan 112®50'36" Bujur Timur. Memiliki luas wilayah sebesar 10.759 Km^2 atau sekitar 6,2% luas wilayah Kalimantan Tengah.Luas wilayah tersebut di atas berbatasan dengan sebelah utara dengan Kabupaten Lamandau, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Seruyan, sebelah selatan berbatasan dengan laut Jawa dan sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Lamandau dengan Kabupaten Sukamara.

Berikut ini adalah data letak geografis kabupaten Kotawaringin Barat

I. Topografis

Topografis Kabupaten Kotawaringin Barat digolongkan menjadi 4 bagian dengan ketinggian antara 0 — 500 m dari permukaan laut dan kemiringan antara 0 — 40 persen, yaitu dataran daerah datar berombak, daerah berombak berbukit-bukit dan daerah berbukit-bukit yang terdiri dari :

- ✓ Sebelah Utara adalah pegunungan dan macam tanah lotosal tahan terhadap erosi
- ✓ Bagian Tengah terdiri dari tanah podsolik merha kuning, juga tahan terhadap erosi
- ✓ Sebelah Selatan terdiri dari danau dan rawa allupial/ organosal banyak mengandung air. Terdapat 3 sungai yang melintasi Kabupaten Kotawaringin

Barat yaitu Sungai Arut, Sungai Kumai dan Sungai Lamandau dengan kedalaman rata-rata 5 meter lebar 100— 300 meter.

II. Iklim

Iklim daerah Kotawaringin Barat secara umum beriklim tropis yang dipengaruhi oleh musim kemarau/ kering dan musim hujan. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember yaitu 375,8 mm. Suhu udara maksimum berkisar 32.1°C — 33.1°C dan Suhu Minimum antara 23.1°C — 24.2°C dan kecepatan angina maksimal 20 knot.

III. Demografi

Luas wilayah kabupaten kotawaringin barat adalah 10.759 m^2 dengan jumlah penduduk berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2016 adalah sebanyak 286.714 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 151.891 jiwa dan perempuan sebanyak 134.823 jiwa. Dari luas dan jumlah penduduk tersebut bisa dikatakan bahwa kepadatan penduduk di Kotawaringin Barat sebesar 27 jiwa/Km^2 dan laju pertumbuhan 3.30 persen per tahun. Jika ditinjau per kecamatan maka dari 6 kecamatan di kabupaten kotawaringin Barat, kecamatan Pangkalan Lada. merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk sebesar 142 jiwa/Km^2 dan kecamatan Arut Utara sebagai kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah yaitu sebesar 7 jiwa/Km^2.

Beberapa pasar yang ada di Pangkalan Bun

Pasar	Tipe	Lokasi
Indra Sari	Kelas I A	Kelurahan Baru Pangkalan Bun
Indra Kencana	Kelas I A	Kelurahan Raja Pangkalan Bun
Tembaga Indah	Kelas I A	Kelurahan Baru Pangkalan Bun
Saik	Kelas I B	Kelurahan Raja Pangkalan Bun
Eks. Terminal Sungai	Kelas I B	Kelurahan Raja Pangkalan Bun
Pasar Mini	Kelas I B	Kelurahan Madurejo Pangkalan Bun
Palagan Sari	Kelas I B	Kelurahan Madurejo Pangkalan Bun

PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan sumber daya manusia. Gambaran umum tingkat pendidikan di Kotawaringin Barat tercermin dari jumlah prasarana pendidikan (sekolah), jumlah tenaga pendidikan dan jumlah siswa. Jumlah sekolah menurut strata pendidikan dasar, lanjutan dan tinggi dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan.

Jumlah sekolah di kecamatan Arut Selatan

No	Tipe	Lokasi
1.	TK	48
2.	SD / Madrasah Ibtidaiyah	75
3.	SMP / Madrasah Tsanawiyah	21
4.	SMA / Madrasah Aliyah	8
5.	SMK	9
6.	SPPM	1
7.	SDLB	1
8.	SMPLB	1

Lembaga Kursus di Kabupaten Kotawaringin Barat

1. Enter Komputer Jalan Diponegoro RT. 02 Kelurahan Pangkalan Bun, Telp. (0532) 24376 / 0821 5050 9002
2. Genius Education Center JI. Pangeran Adipati No. 4 Pangkalan Bun, Telp. (0532) 23126
3. Lembaga Manajemen Komputer Indonesia (LMKI), Gedung LMKI JL. Kawitan RT. 23 Pangkalan Bun, Telp. (0532) 21210
4. Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Cahaya Mandiri, Kelurahan Mendawai Pangkalan Bun, Telp (0532) 21912
5. Komputer Studio '99 JL. Pangeran Diponegoro, No. 05 RT. 01, Kelurahan Madurejo, Pangkalan Bun, Telp. (0532) 23638 / 085248274109
6. LP3T Banua Mandiri JI. Hasanudin No. 38 Rt. 19 Kel. Mendawai Pangkalan Bun, Telp. (0532) 22815
7. LPK Prisma, JIn. Pangeran Antasari No IB Kelurahan Mendawai Pangkalan Bun, Telp. (0532) 6727279 / 082154444485
8. LPK Yenwied, JIn. Jenderal Sudirman Gang Kalkun, No. 54 RT. 10, Sidorejo, Pangkalan Bun, Telp. (0532) 23445
9. Lembaga Pendidikan Prima Mandiri Utama, JI. Pangeran Diponegoro No. 42, Sidorejo, Arut Selatan, Sidorejo, Pangkalan Bun, Telp. 082353003028.

Perguruan Tinggi

1. Universitas Antakusuma

   Jln. Iskandar No. 63 Pangkalan Bun, Telp/Fax. (0532) 227852
2. Stikes Borneo Cendekia Medika

   Jln. Sutan Syahrir No. 11, Pangkalan Bun, Telp. (0532) 282200

PELAYANAN KESEHATAN

Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan untuk masyarakat seperti puskesmas dan rumah sakit dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Selain sarana kesehatan, tenaga medis juga merupakan faktor penting dalam proses pelayanan kesehatan. Di kota Pangkalan Bun terdapat 2 Rumah Sakit, 4 Puskesmas, dan 5 klinik/balai kesehatan.

Layanan di RSUD Sultan Imanuddin

1. Rawat Jalan

No	Nama Klinik
1	Poliklinik Penyakit Dalam
2	Poliklinik Anak
3	Poliklinik Dalam
4	Poliklinik Orthopedi
5	Poliklinik Kebidanan dan Kandungan
6	Poliklinik Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) & Keluarga Berencana (KB)
7	Poliklinik Mata
8	Poliklinik Psikologi
9	Poliklinik Umum dan Medical Check Up
10	Poliklinik Neurologi (Saraf)
11	Poliklinik Gigi dan Mulut
12	Poliklinik Gizi
13	Poliklinik Kulit dan Kelamin
14	Poliklinik THT-KL
15	Poliklinik Kesehatan Jiwa
16	Klinik Imunisasi
17	Klinik VCT (Voluntary Counseling & Testing)
18	Klinik Tumbuh Kembang
19	Klinik Lavender (Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba)
20	Pojok Laktasi
21	Pojok DOTS (Directly Observed Treatment Short-course) atau TB
22	Layanan Hemodialisasi

Jam Pendaftaran Layanan Rawat Jalan:

- ✓ Senin s.d kamis pukul 09.00 sd 12.00 WIB
- ✓ Jumat pukul 07.30 s.d 10.30 WIB
- ✓ Sabtu pukul 07.30 s.d 10.30 WIB

Jam Pelayanan Layanan Rawat Jalan:

- ✓ Senin s.d kamis pukul 09.00 sd 12.00 WIB
- ✓ Jumat pukul 09.00 s.d 11.00 WIB
- ✓ Sabtu pukul 09.00 s.d 11.00 WIB

2. Pelayanan Rawat Inap Terdiri dari 9 Ruangan, dengan Jumlah Tempat Tidur 220 Buah, Masing – Masing Sebagai Berikut:

No	Ruangan	Jumlah Tempat Tidur
1.	Ulin (VIP)	8 buah
2.	Ramin (VIP)	8 buah
3.	Bengkirai (Obsgyn)	38 buah
4.	Meranti (Bedah)	32 buah
5.	Lanan (anak)	38 buah
6.	Sindur (Peny. Dalam Pria)	31 buah
7.	ICU/ICCU	11 buah
8.	Perinatologi	24 buah
9.	Akasia (Peny. Dalam Wanita)	30 buah

Penunjang Medis

No	Layanan Penunjang	Waktu
1.	Instalasi Laboratorium Patologi Klinik	24 jam
2.	Instalasi Farmasi	24 jam
3.	Instalasi Radiodiagnostik	24 jam
4.	Instalasi Bedah Sentral	24 jam
5.	Instalasi Anestesi dan Reanimasi	24 jam
6.	Instalasi Gas Medis	24 jam
7.	Instalasi Gizi	24 jam
8.	Instalasi Rekam Medis	24 jam
9.	Instalasi Gawat Darurat	24 jam
10.	Instalasi Rehabilitas Medik	

Penunjang Non Medis

1.	Ambulance Service (118)
2.	Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS
3.	Instalasi Pemulasaran Jenazah
4.	Perpustakaan Konvensional
5.	Unit Elektronik
6.	Instalasi Laundry
7.	Sentra Administrasi & Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS)

RSUD Sultan Imanudin:
Alamat:
Jl. Sutan Syahrir No. 17 Pangkalan Bun - 74112
Telepon Kantor: 0532 - 21238 / 0532 - 21404
Fax: 0532 - 23581
Email: rsudpbun@gmail.com

Layanan Puskesmas, Klinik, Balai Kesehatan di Kota Pangkalan Bun

NO	Nama	Alamat
1.	Rumah Sakit Citra Husada	Jln. Malijo RT 14, Kel. Madurejo, Kec. Arut Selatan Telp: (0532) 2070777, Fax: (0532) 2070789
2.	Puskesmas Arut Selata	Jln. Pangeran Antasari Kelurahan Raja, Pangkalan Bun Telp: 0812-5161-2585
3.	Puskesmas Madurejo	Jln. Malijo Kelurahan Madurejo, Pangkalan Bun Telp: (0532) 22377
4.	Puskesmas Mendawai	Jl. Abdul Ancis Kelurahan Mendawai, Pangkalan Bun Telp: 0821-5576-3449
5.	Puskesmas Natai Pelingkau	Jl. Ahmad Yani No.8, Baru, Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat
6.	Klinik Utama Endang Purnama	Jl. P. Antasari No.165 (Sebelah Lap. Tugu) Pangkalan Bun Telp: (0532) 23090 / 0813-5299-5220
7.	Harapan Insani Medical Center	Jl. Iskandar No. 88 Pangkalan Bun Telp: (0532) 2067332 / 0812-5475-4745
8.	Klinik Hastarini	Jl. A. Yani No. 21 RT. 17 Kelurahan Baru Pangkalan Bun Telp: 0821-5822-68
9.	Klinik Kusuma	Jln. Iskandar Kel. Madurejo Pangkalan Bun Telp: (0532) 23935
10.	Klinik Asih Husada	Jln. P. Antasari Kelurahan Mendawai, Pangkalan Bun Telp: (0532) 2030578

KEBUDAYAAN

1. Pawai Budaya Nasi Adab

Pawai Budaya Nasi Adab (Nasi Tumpeng Kuning dengan hiasan khas Kotawaringin Barat) yang dilaksanakan di Kabupaten Kotawaringin Barat setiap tahunnya untuk memeriahkan peringatan hari lahir Kabupaten Kotawaringin Barat yang jatuh pada tanggal 3 Oktober. Pawai ini diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat yang mewakili desa/ kelurahan dan kecamatan masing-masing serta didukung oleh seluruh dinas, instansi, perbankan, perusahaan swasta, kelompok masyarakat, lembaga pendidikan, dan sekolah se-kabupaten Kotawaringin Barat. Pawai budaya ini merupakan salah satu atraksi wisata yang dapat dijumpai para wisatawan yang kunjungan nya bertepatan dengan hari jadi daerah ini. Selain itu para wisatawan dapat pula menyaksikan berbagai atraksi budaya dan olahraga tradisional yang dapat dinikmati pada saat peringatan hari jadi daerah ini.

2. Fesitival Marunting Batu Aji

Festival Budaya Marunting Batu Aji merupakan wadah bagi seniman dan budayawan untuk menampilkan kreativitas seni dan budaya tradisional. Melestarikan olah raga dan seni tradisional masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya Kotawaringin Barat dan juga melestarikan berbagai potensi seni budaya, kearifan lokal di Kabupaten Kotawaringin Barat. Cabang yang di perlombakan adalah: lombang begasing, lomba belogo, lomba menyumpit, lomba sepak sawut, lomba masak tradisional, lomba melomang, lomba karungut, lomba pantun seloka, lomba tari titik, lomba tari pedalam, dan lomba tari pesisir. Festival Budaya Marunting Batu Aji ini biasanya diselenggarakan sebagai rangkaian kegiatan dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Kotawaringin Barat pada bulan Oktober di setiap tahunnya.

3. Festival Batang Arut

Selain Pawai Nasi Adab, di setiap Peringatan Hari Jadi Kabupaten Kotawatingin Barat juga diselenggarakan Festival Batang Arut. Kegiatan yang dilaksanakan dalam festival Batang Arut adalah Lomba Kapal/Kelotok Hias, Lomba Getek Hias dan lomba Kayuh Berlawanan. Festival ini dilaksanakan di daerah aliran sungai Arut dari Pelabuhan PT. KORINDO di Kelurahan Mendawai sampai Jembatan penghubung Pangkalan Bun - Kotawaringin Lama di Kelurahan Baru, hal ini sebagai upaya untuk mengingatkan masyarakat Kotawaringin Barat bahwa pada masa keemasannya Sungai Arut merupakan penggerak perekonomian, sosial dan budaya di Pangkalan Bun.

4. Tari – tarian Tradisional

Tarian "KEMBANG PANDAN" merupakan salah satu tarian yang bisa dinikmati dalam acara hari jadi daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Tari ini berasal dari daerah pedalaman Kotawaringin Barat. Tarian "BAGONDANG" merupakan tarian adat yang dilakukan untuk menerima tamu – tamu

kehormatan. Tarian "MANUNGGAL" juga merupakan tarian yang berasal dari pedalaman yaitu tarian yang menggambarkan menanam padi secara bergotong-royong. Tarian “KIPAS DAYUNG” merupakan tarian putri-putri Dayak yang dipentaskan untuk menghibur para laki-laki Dayak yang pulang dari mencari ikan.

WISATA KAB. KOTAWARINGIN BARAT

Kekayaan alam dan budaya di Kabupaten Kotawaringin Barat sangat potensial untuk dikembangkan menjadi tempat pariwisata, seperti wisata hutan wisata bahari, wisata sejarah dan budaya maupun wisata kuliner. Dalam perkembangannya pesona pariwisata di Kabupaten Kotawaringin Barat semakin memikat. Hal ini terlihat dari banyaknya kunjungan wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Berdaskarkan Data Bari Dinas Pariwisata di tahun 2016 kunjungam wisatawan ke Objek wisata Taman Nasional Tanjung Puting baik wisman dan wisnu adalah 15.106 orang sedangkan untuk tahun 2017 mengalami kenaikan yaitu 24.693 orang. Untuk kunjungan ke obyek Wisata Pantai Bugam Raya di tahun 2016 sejumlah 72.754 orang dan di tahun 2017 sejumlah 78.578 orang.

Obyek Wisata di Kotawaringin Barat

a. Taman Nasional Tanjung Putting (TNTP)

Tanjung Puting merupakan kawasan untuk rehabilitasi, konservasi, penelitian orangutan dan bekantan, dengan luas wilayah adalah 415.040 ha. Cara terbaik untuk sampai di kawasan TNTP ini adalah menggunakan kelotok dengan wisata susur sungai Sekonyer. Sepanjang perjalanan menuju TNTP akan disuguhi pemandangan hutan alam Kalimantan, monyet dan bekantan bergelantungan di pohon pinggiran sungai.

Beberapa kawasan wisata di TNTP yaitu:

- ✓ Tanjung Harapan

  Tanjung Harapan merupakan zona pemanfaatan yang dikembangkan untuk kegiatan wisata alam yang dilengkapi dengan pusat informasi, wisma tamu, menara pengintai, camping ground. Daya tarik wisata alam adalah perjalanan menyusuri sungai dengan pornasi nipah, pandan dan hutan rawa, kemudian juga tracing, bird watching. Anda dapat masuk ke pusat informasi Taman Nasional Tanjung Puting untuk mendapatkan penjelasan dari petugas.

- ✓ Pondok Tanggul

  Merupakan zona pemanfaatan khusus rehabilitasi Orangutan di TNTP ini merupakan daya tarik tersendiri karena memiliki atraksi pemberian makan Orangutan pada jam tertentu setiap harinya sehingga akan mengundang minat wisatawan dari dalam dan luar negeri untuk berkunjung.

- ✓ Camp Leakey

  Merupakan zona pemanfaatan khusus menjadi tempat riset dan penelitian serta rehabilitasi Orangutan dewasa, cocok sebagai tempat kunjungan wisata singkat untuk melihat Orangutan rehabilitas baik sudah liar atau semi liar.

- ✓ Pesalat

  Merupakan zona pemanfaatan khusus untuk kegiatan rehabilitasi kawasan, lokasi ini mempunyai daya tarik wisata alam tersendiri karena pengunjung/wisatawan dapat melakukan penanaman pohon konservasi dengan bibit yang telah disediakan kemudian diberi nama si penanam tersebut sehingga pohon itu dapat diadopsi oleh wisatawan itu sendiri sebagai pohon konservasi, Pesalat menjadi pusat pendidikan konservasi.

- ✓ Sungai Cabang

  Daerah Sungai Cabang merupakan zona pemanfaatan tradisonal dengan potensi wisata berupa pantai berpasir putih, dengan atraksi budaya berupa aktivitas nelayan tradisional yang mencari ikan di sekitar kawasan perairan TNTP. Pantai pasir putih merupakan daerah peneluran penyu hijau dan jenis penyu sisik.

- ✓ Sungai Buluh Besar dan Danau Burung

  Sungai Buluh Besar merupakan zona pemanfaatan terbatas dengan formasi vegetasi dengan sangat menarik, dengan air sungai yang berwarna hitam jernih sebagai ciri khas hutan tropis bergambut yang langka.

- ✓ Sungai Sekonyer

  Sungai Sekonyer di Kecamatan Kumai adalah pintu gerbang masuk Taman Nasional Tanjung Puting. Di sepanjang tepi semua sungai di kawasan ini terdapat hutan rawa air tawar (aluvial) sejati, memiliki jenis tumbuhan yang kompleks dan jenis tumbuhan merambat berkayu yang besar dan kecil, epilit dan paku-pakuan menjalar dalam jumlah besar. Keindahan malam juga dapat dinikmati di Muara sungai ini dengan kunang-kunang yang jumlahnya ribuan dapat menjadi atraksi tersendiri yang sangat menarik

b. Wisata Pantai Bugam Raya

Merupakan suatu kawasan pengembangan wisata pantai yang secara geografis letaknya berhadapan dengan Taman Nasional Tanjung Puting, adapun objek wisata yang ada di sini adalah Pantai Kubu, Pantai Umbang, Pantai Keraya, Pantai Tanjung Penghujan, dan Pantai Sabuai. Selain Pantai di Kawasan ini juga terdapat Air Terjun Patih Mambang.

- ✓ Pantai Kubu

  Pantai Kubu terletak di Desa Kubu, tepi Teluk Kumai yang merupakan objek

wisata transit bagi wisatawan yang akan berkunjung ke Taman Nasional Tanjung Keluang. Di sepanjang pantai terdapat pohon cemara dan kelapa yang menjadikan pantai kubu menjadi teduh. Fasilitas yang tersedia di pantai ini adalah jembatan panjang, arena bermain anak, dan Mushola.

- ✓ Pantai Umbang

  Hampir semua Pantai di Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan pantai pasir putih, dengan tanaman bakau di pinggir pantai sehingga airnya tidak berwarna biru tetapi berwarna cokelat khas air sungai bakau. Yang menjadi daya tarik pantai ini adalah di ujung pantai sebelah timur terdapat muara sungai Umbang dengan pemandangan hutan bakau yang masih alami.

- ✓ Pantai Keraya

  Objek wisata Pantai Keraya lokasinya berhadapan dengan Pantai wisata Tanjung Penghujan, objek wisata ini dapat dicapai dengan waktu 15 menit perjalanan darat dari pantai Tanjung Penghujan. Wisatawan di objek wisata pantai keraya dapat bersantai sambil menikmati lalu-lalang kapal penumpang, perahu nelayan dan indahnya panorama alam.

- ✓ Air Terjun Patih Mambang

  Air terjun Patih Mambang terletak di kawasan wisata Bugamraya, dan berhadapan dengan obyek wisata Pantai Keraya, air terjun ini menyajikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan setelah menikmati panorama pantai.

- ✓ Pantai Tanjung Penghujan

  Pantai Tanjung Penghujan berlokasi di Teluk Bogam, di pantai ini wisatawan dapat menyaksikan keindahan pantai saat matahari terbit dan terbenam. Hamparan Pantai seluas 44,7 Ha merupakan Pantai berpasir putih yang kental dengan kehidupan para nelayan tradisional. Hamparan laut biru nan memukau, serta sepoi angin dari jajaran pohon cemara. Biota laut pun akan dengan mudah kita lihat, terlebih dengan air lautnya yang masih jernih.

c. Pantai Tanjung Keluang

Pantai Tanjung Keluang seluas 200ha terletak di ujung Pantai Kubu, terbentuk dari hamparan pasir putih bersih dengan laut tenang, sangat cocok untuk berenang dan berjemur sambil menikmati pesona pantai yang khas. Pantai ini langsung menghadap ke Laut Jawa, dapat dicapai dengan perahu penyeberangan (klotok wisata) dalam waktu 35 menit dari Pantai Kubu. Pantai ini jauh dari keramaian sehingga wisatawan yang mendambakan ketenangan dan keheningan alam dapat dijumpai ditempat ini. Di pantai ini terdapat tumbuhan cemara khas pantai dan mangrove. Tumbuhan yang membentuk sabuk hijau bervariasi dari golongan mangrove sejati (bakau, pidada, api-api, nipah, nirih) dan non sejati (seperti pandan laut, bogem, cemara laut, kelapa) serta tumbuhan formasi pescarpae, seperti katang-katang, kacang laut, rumput teki, rumput

gulung yang diselingi tanaman pionir dan tumbuhan dari ciri ekosistem lain. Selain itu Kawasan Pantai Tanjung keluang merupakan kawasan konservasi penyu, menjadi tempat pendaratan dan bertelur jenis Tuntong (Batagur sp.) dan penyu langka yang dilindungi yaitu jenis Penyu Sisik (Eretmochelys imbricata). Untuk kegiatan konservasi dan meningkatkan potensi daya tarik wisata terdapat penangkaran penyu sisik di kawasan konservasi ini.

d. Hulu Sungai Arut dan Sungai Lamandau

Bagi wisatawan yang gemar berarung jeram atau ingin menikmati pemandangan alur sungai yang alami, hulu sungai arut di Kecamatan Arut Utara sangat tepat untuk menyalurkan hobi tersebut. Liku-liku alur sungai dengan bebatuan yang tersebar menanti para wisatawan yang gemar dengan tantangan alam tersebut. Alur sungai arut yang pontensial untuk berolahraga arung jeram yang terbentang sepanjang 30 km dimulai dari Desa Riam sampai ke Pangkut yang merupakan Ibu kota Kecamatan Arut Utara. Pemandangan masih sangat alami dan asri, kini menanti investor untuk pengembangan selanjutnya. Ibukota Kecamatan (Pangkut) dapat ditempuh dari Ibukota Kabupaten (kota Pangkalan Bun) melalui jalan darat kurang lebih 3 jam, dan melalui Sungai Arut kurang lebih 4 jam, bagi wisatawan yang baru berkunjung ke tempat ini, dianjurkan agar didampingi pemandu wisata.

WISATA SEJARAH DAN BUDAYA SITUS SEJARAH

Istana ini dulunya bernama Lawang Kuning, merupakan istana Kasultanan Kutaringin yang sebelumnya bertempat di wilayah Kecamatan Kotawaringin Lama. Pemindahan Istana ini pada tahun 1811 pada masa kepemimpinan Sultan imanuddin. Istana Kuning merupakan Istana Kerajaan pada masa Kesultanan Kutaringin. Lokasinya berada di tengah kota Pangkalanbun dan bersebelahan dengan lapangan tugu. Kontruksi bangunan Istana Kuning terbuat dari kayu ulin yang terkenal kuat dan banyak dipakai pada bangunan-bangunan tradisional di Kalimantan Tengah. Arsitektur Istana Kuning yaitu berbentuk rumah panggung yang megah dengan warna kayu kecokelatan yang dibiarkan alami tanpa dicat. Karena merupakan rumah panggung maka di depannya, terdapat tangga-tangga jenjang yang akan mengantar langkah pengunjung ke pintu masuk istana. Ada beberapa bagian ruangan istana yaitu: Bangsal (tempat penerimaan tamu kerajaan), Rumbang (tempat raja bersemedi), Dalem Kuning (pusat pemerintahan, dan tempat tinggal raja), dan Pedahiran (ruang makan kerajaan).

Rumah Mangkubumi

Rumah Mangkubumi dibangun oleh Pangeran Ratu Anum Kesumayudha (gusti Muhammad Sanusi) bin Pangeran Ratu Ahma Hermansyah yang memerintah Kesultanan Kutaringin dari tahun 1867 – 1904 M. Sebagai Mangkubumi diangkatlah Pangeran Sukma Negara. Kediaman Mangkubumi ini masih merupakan kediaman wakil raja. Di dalam kediaman Mangkubumi ini masih

tersimpan beberapa barang – barang bersejarah diantaranya naskah kuno, khususnya kitab – kitab agama Islam (Kitab Kuning), baju – baju keluarga kerajaan, pusaka keramat, peralatan gamelan dan sebagainya. Bangunan ini terdiri dari atap sirap, tiang, dinding dan lantai dari kayu ulin.

Kolam Pemandian Tujuh Putri

Salah satu peninggalan sejarah yang terletak di Astana Mangkubumi adalah Pemandian Puteri Tujuh. Nama Puteri Tujuh diambil dari jumlah putri dari Pangeran Adipati Mangkubumi yang berjumlah tujuh orang. Kolam pemandian yang terletak sekitar 100 meter sebelah selatan dari Astana Mangkubumi konon biasa digunakan oleh putera puteri Sultan. Kolam ini berukuran 20 x 30 meter dan berbentuk huruf U. Dipagari khusus dan dikelilingi pohon-pohon besar yang rindang, kolam pemandian ini juga digunakan sebagai tempat pemandian raja.

Kolam pemandian yang kini airnya nampak kehijaun dan ditumbuhi bunga teratai ini sudah tidak lagi difungsikan sebagaimana mestinya. Hanya saja secara insidentil masih difungsikan sebagai tempat ritual dengan ditandai adanya keberadaan bunga rampai dan kain kuning di Situs tersebut.

Masyarakat mempercayai air kolam ini berkasiat mempermudah melahirkan anak, memperlancar pelarisan, dan dipercaya bisa membuat awet muda. Tidak ada aturan khusus untuk berkunjung ke Kolam Pemandian Puteri Tujuh, selain meminta ijin pada keluarga Pangeran untuk masuk, diharapkan pengunjung berpakaian sopan dan tidak berkata-kata yang tidak sopan atau berniat sombong. Serta tidak diperbolehkan pula untuk bersemedi di tempat tersebut.

1. Rumah Adat Betang Pasir Panjang

   Rumah Betang Pasir Panjang ini berlokasi di Desa Pasir Panjang dan di tepi Jalan Utama Pasir Panjang yang menghubungkan Pangkalan Bun ke Kecamatan Kumai. Bangunan rumah ini merupakan bangunan tunggal dengan kontruksi rumah panggung yang ditopang dengan 21 tiang utama, 9 penopang serambi/ teras dan 4 tiang penyangga. Ukuran bangunan berkisar 24 x 8 m ditambah bagian serambi atau teras yang berukuran 4 x 4 m.

2. Makam Kuta Batu

   Makam Kuta Batu adalah makam raja-raja Kasultanan Kutaringin. Lokasinya terletak sekitar 100 meter di sebelah barat Istana Kuning. Raja Kutaringin yang dimakamkan di Makam Kuta Batu ini diantaranya adalah Pangeran Ratu Immanuddin Sultan IX, Pangeran Ratu Ahmad Hermansyah Sultan ke X, Pangeran Ratu Sukma Alamsyah Sultan ke XIII, Permaisuri Ratu Sri Mahkota Antung Dinar dan Sri Paduka Pangeran Ratu Tumenggung Cikra Negara Bin Pangeran Ratu Tuha.

3. Monumen Palagan Sambi

Monumen ini terletak di Pusat Kota Pangkalan Bun. Monumen ini memilikki makna yang penting bagi Kabupaten Kotawaringin Barat maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Monumen ini berupa pesawat terbang yang digunakan pada waktu itu yaitu pesawat C4 Dakota RI-002 pesawat ini merupakan tugu peringatan penerjunan pertama pasukan Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) pada masa pergerakan atau revolusi melawan belanda. Penerjunan ini dilakukan tepatnya Pada 17 oktober 1947 di Desa Sambi Kec Arut Utara Kotawaringin Barat. Yang menarik 13 orang pasukan yang diterjunkan pada saat itu tidak semuanya tentara melainkan ada yang putra asli Kalimantan ada yang dari Sulawesi dan ada yang dari jawa.

Pesawat ini dibawa Oleh Bob Freeberg berkebangsaan inggris sekaligus pemilik pesawat. Penerjunan pasukan ini adalah operasi lintas udara pertama dalam sejarah Indonesia. Peristiwa penerjunan ke 13 orang ini merupakan peristiwa yang menandai lahirnya satuan pasukan tempur khas TNI Angkatan Udara Republik Indonesia. Tanggal 17 oktober 1947 kemudian ditetapkan sebagai hari jadi komando pasukan gerak cepat (kopasgat) yang sekarang dikenal denga koorps pasukan khas TNI Angkatan Udara (korpaskhas).

Di Sisi lain dari monumen ini terdapat prasasti perjuangan pahlawan dalam membela dan menegakkan Negara Republik Indonesia, dan juga diorama atau sebuah kisah yang digambarkan dengan sebuah cerita relief.

4. Astana Al Nulsari

Astana Al Nursari adalah istana kerajaan Kotawaringin sebelum dipindahkan ke Pangkalan Bun pada tahun 1811. Astana ini terletak di Kecamatan Kotawaringin Lama. Astana Alnursari adalah astana tertua di Kotawaringin Barat. Sebagai salah satu cagar budaya, astana Al Nursari telah mengantongi sertifikasi warisan budaya dari Balai Cagar Budaya (BCB). Di tempat inipun terdapat berbagai peninggalan sejarah kesultanan Astana Al Nursari. Bangunan astana ini merupakan peninggalan Dinasti Kesultanan Kutaringin. Bangunan astana ini menggunakan kontruksi kayu dengan arsitektur rumah panggung, terdiri dari atap, dinding dan lantai yang terbuat dari kayu ulin. Bangunan terdiri dari beberapa bagian yaitu ruang depan (bangsal), ruang tengah, ruang dapur, pelataran dengan luas wilayah kurang lebih 2 Ha. Astana Al Nursari merupakan tempat tinggal kaum bangsawan keturunan Sultan Kutaringin. Bangsawan yang menempatinya adalah Pangeran Paku Sukma Negara bin Sultan Kutaringin Pangeran Ratu Imanudin. Disamping kiri Astana Alnursari terdapat bangunan yang diberi nama Pa'agonangan yang berfungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda bersejarah dan juga meriam.

5. Meriam Beranak

Benda bersejarah ini berada di bagian depan Astana Alnursari. Terdapat 4 buah meriam, 2 meriam berada di teras depan, dan 2 lainnya berada di samping kiri. Konon meriam ini digunakan perang oleh kerajaan Kutawaringin melawan penjajah Belanda.

6. Pa'agonangan

Pa'agonangan adalah sebuah bangunan berukuran 7x2.5 m dengan arsitektur rumah panggung berkontruksi kayu ulin. Berada di sisi kiri bangunan Astana Alnursari yang sering disebut "Rumah Meriam Beranak". Bangunan ini berfungsi untuk menyimpan benda-benda pusaka dan berbagai benda bersejarah lainnya yang dikeramatkan. Benda keramat yang masih tersimpan dalam bangunan ini adalah Landasan Meriam Berukir, Meriam Beranak, Gong, berbagai bentuk dayung, dan Bejana Besi Perunggu.

7. Masjid Kyai Gede

Masjid ini dibangun pada tahun 1632 Miladiyah atau tahun 1052 Hijriyah, tepatnya pada masa pemerintahan Sultan Mustain Billah (1650-1678 M), raja keempat dari Kesultanan Banjarmasin. Nama Kiai Gede untuk masjid ini diambil dari nama seorang ulama yang telah berjasa besar dalam menyebarkan ajaran Islam di Pulau Kalimantan, khususnya di wilayah Kotawaringin. Ulama tersebut adalah Kiai Gede, seorang ulama asal Jawa yang diutus oleh Kesultanan Demak untuk menyebarkan ajaran Islam di Pulau Kalimantan.

Masjid Kyai Gede berada di Desa Kotawaringin Hulu, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat. Bangunan masjid didominasi dengan bahan kayu baik dari lantai hingga atap bangunan. Luas masjid 16x16 meter (256 m2) dan terdiri dari 36 tiang penyangga, 4 di antaranya merupakan tiang utama (saka guru) yang berada di tengah ruangan. Khusus untuk tiang saka guru yang berdiri di atas umpak kayu, memiliki ukiran menyerupai kelopak bunga teratai. Teknik dalam penyambungan kayu satu dengan yang lain tidak menggunakan paku besi melainkan menggunakan paku yang terbuat dari kayu (pasak). Seperti masjid kuna pada umumnya, masjid Kyai Gede juga memiliki mihrab, mimbar, dan bedug. Dilihat dari segi arsitekturnya, masjid ini memiliki percampuran seni bangun yaitu, ciri arsitektur bangunan masjid di Jawa yang terlihat dari bentuk atap tumpang dan menggunakan atap limas bersusun tiga yang terbentuk segitiga sama kaki, ciri arsitektur Kalimantan dengan bahan kayu ulin bertipe bangunan panggung (rumah panggung), dan arsitektur Cina dimana cara meletakkan bedug digantung di serambi (Sulaiman, 2014).

8. Makam Kyai Gedde

Makam Kiai Gede berada di Kecamatan Kotawaringin Lama yang letaknya hanya 200 meter dari Masjid Kiai Gede atau sekitar 100 meter di sebelah kiri Astana Alnursari. Kiai Gede atau Abdul Qadir Assegaf merupakan salah satu tokoh penyebar agama Islam di Kabupaten Kotawaringin Barat yang kharismanya setara Syekh Arsyad Al Banjary atau Datuk Kalampayan di Kalsel. Konon nama Kiai Gede disandang Abdul Qadir Assegaf karena ukuran tubuhnya yang sangat besar.

Di dalam Kubah terdapat dua buah makam yang perbedaannya sangat mencolok menyangkut ukuran makam, yang pertama berukuran normal dan yang satunya berukuran hampir tiga meter. Makam berukuran lebih panjang inilah tempat persemayaman terakhir Kiai Gede, sedangkan makam yang berukuran normal adalah makan pengikut setia Kiai Gede.

9. Makam Raja-raja Kuta Tanah

Komplek makam raja-raja Kutawaringin menyebar di Sisi barat Astana Alnursari, namun saat ini makam sudah tercampur dengan makam masyarakat umum. Area komplek pemakaman berukuran 20 x 30 meter dan berisi sekitar 30 makam, 11 diantaranya merupakan makam kerabat kerajaan. Makam menggunakan kontruksi dari kayu ulin, ornamen salur daun dan berenkripsi, ada nisan berbentuk gada, dan ada juga nisan yang berbahan batu andesit.

10. Sapundu

Hampir seluruh Desa di Kecamatan Arut Utara dapat ditemui Sapundu, seperti di Desa Sambi, Desa Pandau, Desa Riam Panahan. Sapundu merupakan tiang berbentuk Patung manusia yang dibuat dari bahan kayu ulin berdiameter 15 - 50 cm dengan panjang 3 - 5 meter. Selain sapundu juga ditempatkan sejahat/ sejahu yaitu patung berbentuk manusia tetapi tidak memiliki tangan dan kaki. Sepundu banyak ditemukan di sisi timur jalan desa Pandau. Sapundu biasanya wajib digunakan dalam Upacara Tiwah dan merupakan persyaratan utama dalam perlengkapan Upacara Tiwah.

11. Sandung

Sandung adalah sebuah bangunan untuk meletakkan tulang-tulang atau abu orang yang sudah meninggal dimana sebelumnya dilakukan Upacara Adat Tiwah. Tetapi Upacara Adat Tiwah saat ini tidak lagi memindahkan tulang belulang atau abu ke sanding karena saat ini masyarakat dayak memakamkan jenazah ke dalam tanah. Konon pada zaman dulu Pangeran Ratu Begawan menghimbau untuk menguburkan orang meninggal ke dalam tanah. Hal ini dikarenakan pada masa itu tradisi masyarakat adat dayak di sepanjang aliran sungai Arut apabila ada orang yang meninggal jenazahnya disandarkan di

bawah pohon besar di hutan atau dibakar, tradisi ini disebut Besadai. Sejak ada larangan besadai sejak saat itu masyarakat adat dayak menguburkan jenazah ke dalam tanah dengan upacara sesajian kecil dan tidak ada upacara Tiwah untuk memindahkan tulang. Oleh karena itu tidaklah aneh jika saat ini di permukiman suku Dayak tidak lagi dijumpai Sandung tempat tulang belulang dan abu.

12. Tiang Pantar

Pendiri tiang pantar ini terkait dengan kematian tokoh dayak yang terkenal bernama Mas Petinggi Ringit. Konon beliau adalah seorang puluh atau raja. Sekarang tiang pantar tinggal 2 buah dengan panjang/ tinggi kira-kira 20 m. Di sekeliling tiang ini diukur dengan motif kepla kara, keraya sapa dan pantak atau tetat. Motif keraya sapa merupakan ukiran motif naga yang disitilir atau motif suluran, motif ini merupakan motif yang wajib disertakan pada setiap pelaksanaan upacara kematian dengan diukurkan pada peti mati atau sandung. Motif patak atau tetat berupa goresan berbentuk segitiga yang merupakan simbol atau tanda jumlah hasil kayau. Pada tiang patar ini terdapat 33 goresan yang artinya terdapat 33 korban kayu.

13. Batu Petahan

Batu Petahan ditempatkan di sebuah tajuk yang berada di tengah jalan Desa Pandau Kecamatan Arut Utara, batu pasif dengan tinggi 60 cm berbentuk persegi empat tak beraturan yang merupakan monumen perjanjian antara dua belah pihak, yaitu pihak Rombongan Pangeran Adipati dan pihak Suku Dayak Arut di bawah kepemimpinan Demang Petinggi. Kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian yang saling menghargai dan saling menjaga kehormatan yang dilaksanakan melalui sebuah prosesi adat Tiwah (Persembahan). Perjanjian ini selanjutnya dinamakan "PANTI DARAH JANJI SAMAYA" yang berarti perjanjian yang di kokohkan dengan tetesan darah yang menjadi satu, dan konon di bawah batu tersebut dimakamkan 2 orang manusia yang mewakili 2 pihak yang mengadakan perjanjian.

14. Makam Patih Kuta Batu

Makam ini berada di Desa Riam Kecamatan Arut Utara. Makam Patih Kuta Batu ini berada diantara tiang-tiang patar di jalan masuk desa Riam. Patih Kuta Batu adalah nama gelar dari kerajaan yang nama aslinya adalah Rakam. Dahulu Patih Kuta Batu adalah tangan kanan atau orang kepercayaan Kerajaan Kotawaringin dari Desa Riam.

Gosong Beras Basah

Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki banyak potensi wisata, sajian wisata paling utama tentu saja kawasan Taman Nasional Tanjung Putting. Namun

sebenarnya, selain kawasan konversi terbesar Orangutan itu, Kobar memiliki potensi kekayaan alam lainnya. Panjang pantai garis pantai Kabupaten berjuluk Marunting Batu Aji ini sepanjang 156 km yang terbagi dua kecamatan Kumai dan Arut Selatan. Keberadaan garis pantai ini memiliki potensi yang harus dijaga, mengingat di beberapa titik garis pantai menjadi habitat beberapa hewan endemik, seperti Penyu di sepanjang garis pantai TWA Tanjung Keluang. Selain itu, di wilayah garis pantai sepanjang Teluk Kumai juga menjadi habitat Dugong, hal ini dikarenakan di wilayah tersebut kaya akan tanaman lamun yang menjadi makanan Dugong. Sampai saat ini potensi padang lamun yang menjadi habitat Dugong masih diteliti oleh beberapa pihak terkait, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan dan WWF Indonesia. Survey terhadap keberadaan mamalia laut ini terus dilakukan, dari penuturan masyarakat sekitar keberadaan Dugong di perairan ini benar adanya.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kobar melalui Dinas Pariwisata juga telah memetakan potensi yang ada di wilayah ini sebagai salah satu destinasi wisata. Selain Gosong Senggora yang selama ini telah banyak dikenal, di Desa Teluk Bogam kecamatan Kumai juga memiliki Gosong (hamparan pasir). Tidak jauh dari Tanjung Penghujan, terdapat wilayah yang dikenal dengan Gosong Beras Basah. Kawasan Beras Basah meliputi Gosong, padan lamun sekaligus hamparan terumbu karang yang dikenal oleh masyarakat sekitar dengan sebutan Batu Babi. Jika musim sedang baik, kondisi air yang jernih akan membantu kita untuk menikmati keberadaan habitat bawah lautnya. Tidak sulit untuk mencapai area Gosong Beras Basah, cukup menempuh perjalanan selama kurang lebih 30 menit menggunakan perahu yang dimiliki oleh warga Desa Teluk Bogam. Istilah “Beras Basah” sendiri menurut penuturan warga setempat diambil dari kejadian karam nya kapal yang mengangkut sembako dari Jawa di kawasan ini, dikarenakan kapal tersebut menghantam karang Batu Besi, akibatnya sembako yang mayoritas adalah beras menjadi basah semua sejak pariwisata inilah kawasan ini dikenal dengan nama Beras Basah.

- ✓ Klotok : Kapasitas max 10 orang | Rp. 10.000/orang | waktu tempuh 30 menit
- ✓ Camping Tanjung Penghujan
- ✓ Karang Batu Babi
- ✓ Padang Lamun
- ✓ Dugong
- ✓ Waktu Terbaik : Bulan 4-5 dan 9-10 (pancaroba) minim ombak, air sangat jernih

Festival Mehampar Wadai 3

Komunitas Perempuan Adat Juriat Kutaringin sukses menggelar berbagai jenis Wadai (kue) tradisional khas yang saat ini sudah jarang sekali ditemui. Berbagai

wadai tradisional ini tersaji dalam gelaran festival kuliner yang bertajuk Festival Mehampar Wadai 3. Kegiatan yang dipusatkan di Bukit Indera Kencana jalan P.R.A. Kusumayudha Kelurahan Raja Pangkalan Bun ini dihadiri oleh ratusan warga Pangkalan Bun yang ingin be nostalgia menikmati wadai bahari (lama). Festival kuliner yang rutin dilaksanakan ini dibuka secara resmi oleh Bupati Kotawaringin Barat (Kobar) Hj. Nurhidayah, S.H., M.H. Selain sajian berbagai wadai tradisional, dalam kegiatan ini juga menampilkan tarian adat tradisonal, Kriang-Kriut, musisi alat musik tradisonal Sape asal Kalbar Thambunesia, Pantun Seloka. Para warga yang hadir pun bisa ikut menikmati berbagai wadai yang disajikan.

Berbagai wadai tradisional yang tersaji seperti Putu Basah, Bubur Ayak, Apam Kukus, Imbah, Wadai Ilat Sapi dan banyak lagi lainnya merupakan wadai khas tradisional yang sudah jarang ditemui saat ini. Wadai-wadai yang ada pun dahulu selain untuk santapan di saat senggang, sekaligus berperan sebagai pelengkap ritual tertentu, seperti Tampung Tawar Pengantin, Meninjau Awan, Mandi 7 Bulan, acara Lahiran Bayi seperti menggunting rambut begundading dan ritual adat lainnya. Ketua panitia dari Komunitas Perempuan Adat Juriat Kutaringin Adat Tengku Salamah mengatakan jika kali ini pihaknya menggelar sejumlah 59 jenis wadai tradisional, hal ini sekaligus untuk memperingati hari jadi kabupaten Kobar yang ke59 tahun. Perempuan yang akrab disapa Ambo Salamah ini juga mengatakan jika tujuan diadakan Festival Mehampar Wadai ini adalah untuk melestarikan kebudayaan khususnya di bidang kuliner. Selain itu, kegiatan ini menjadi media untuk memperkenalkan wadai khas Kobar kepada khalayak ramai dan generasi penerus saat ini.

Sementara itu Bupati Kobar Hj. Nurhidayah mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini, khususnya kepada Komunitas Perempuan Adat yang telah menginisiasi kegiatan Festival Mehampar Wadai ini. “Kegiatan ini tentu saja menambah wahana pengetahuan kita tentang adat istiadat serta kearifan lokal khususnya dalam bidang kuliner, Hal ini menunjukkan bahwa kita bersama-sama memiliki semangat dan komitmen yang sama dalam menjaga budaya kita” kata Hj. Nurhidayah. Hj. Nurhidayah juga mengajak semua stakeholder yang ada untuk bersama pemerintah daerah ikut mendorong pembangunan yang muara nya adalah pemberdayaan masyarakat. Hj. Nurhidayah melanjutkan betapa kuat makna kegiatan ini sebagai media promosi wisata Kobar. “Saya berharap Festival Mehampar Wadai ini terus dilaksanakan secara berkesinambungan sebagai upaya penguatan kearifan lokal”

DAFTAR PUSTAKA

Penyusunan Akhir dan Penggandaan Buku Sejarah Kotawaringin Barat Dumont, Ch F.H., Matahari Terbit 1924.

Lucas, Anton, Local Opposition and Underground Resistance to the Japanese in Java 1942 – 1945, Centre of Southeast Asian Studies Monash University, 1986.

Mallincodt, J, Het Adat Recht van Borneo, jilid I dan II, 1928

Muljana, Slamet; Pemugaran Pesada Sejarah Leluhur Majaphit, Intidayu Press , 1983, Jakarta.

Nahan AF (a), Keraton Lawang Agung Bukit Indera Kencana (Tinjauan Arsitektur), tanpa tahun.

Nahan AF (b), Perjuangan Masyarakat Kotawaringin Lama dalam Menegakkan Proklamasi, paper tidak diterbitkan dan tanpa tahun.

Nahan AF (c), Sejarah Singkat Kotaringin, paper yang tidak diterbitkan, 1993

Nahan AF, (d) Kita Ungkapkan Sejarah Kerajaan Kotawaringin, paper yang tidak diterbitkan, tanpa tahun.

Nahan AF (e) Deskripsi Singkat: Situs/ Benda Cagar Budaya di Kalimantan Tengah, Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Kalimantan Tengah Palangka raya 1996.

Nahan AF (f) Kepingan Sejarah Kalteng Versi Muatan Lokal, tanpa tahun

Profil Provinsi Republik Indonesia, Kalimantan Tengah, Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara, Jakarta, 1992

Riwut, Cilik, Kalimantan Membangun - Alam dan Kebudayaan, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1993.

Suseno, Nila, Tjilik Riwut Berkisah Pernerbit Andi Yogyakarta.

Lontaan Ju dan Sanusi GM, Mengenal Kabupaten Kotawaringin Barat, Pemda Kotawaringin Barat, 1976

Pratiwo, Penang Pluralisme sebuah Kota, paper di presentasikan pada seminar Ikatan Arsitek Indonesia di Jawa Tengah., 1 Agustus 1998.

Usop, KMA.M. (eds) Profil Kebudayaan Dayak di Kalimantan Tengah, Bappeda Provinsi Dati I Kalimantan Tengah dan Pusat Penelitian Kebudayaan Dayak, 1995.

Yusuf, GM dan Kassu W Helemen, Memori Hari Pahlawan ke- 43, 10 Nopember 1988 di Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat, Pemda Kotawaringin Barat, 1989

Singkatan

SRKD = Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Kalimantan Tengah.
KNIL = Koninklijke Nederlandsche Indische Luchtvaart
NICA = Nederlandsche Indische Civiele Administratie.